BUKTI MEMBIMBING KERJA PRAKTEK

SEMESTER GENAP 2024/2025

1. Buku bimbingan
2. Laporan Kerja Praktek

Nama mahasiswa:

Nuke Parameswari 083002200004

Randi An-nissa Putri 083002200005

Aji Nugra Siswanto 083002200007

UNIVERSITAS TRISAKTI

BUKTI BIMBINGAN

MATA KULIAH KERJA PRAKTIK

SEMESTER GENAP 2024-2025

UNIVERSITAS TRISAKTI

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

Disusun Oleh:

Nuke Parameswari

083002200004

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

Bukti Bimbingan

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Dokumentasi Bimbingan	TTD Pembimbing
1.	Selasa, 21 Januari 2025	- Pengarahan cara bekerja di instansi - Menjelaskan pengisian logbook kerja praktik - Menjelaskan jangka waktu kerja praktik dan pekerjaan yang dikerjakan		
2.	Kamis, 17 Juli 2025	- Menjelaskan pengisian logbook beserta lampirannya, apakah waktu yang diclaim dalam logbook sesuai dengan yg dikerjakan - Lampiran yang ada juga berupa proses pekerjaan yang dikerjakan (ppt) - Menjelaskan isi PPT untuk sidang kerja praktik	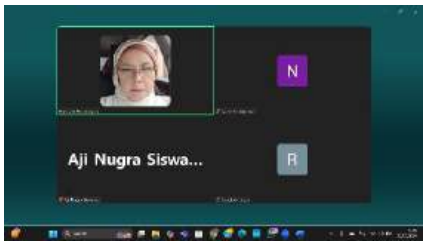	

LAPORAN KERJA PRAKTEK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PERMUKIMAN

Disusun untuk memenuhi prasyarat lulus mata kuliah kerja praktek

Dosen Pngampu:

Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K.

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

Disusun Oleh:

Nuke Parameswari

083002200004

UNIVERSITAS TRISAKTI

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PERMUKIMAN

Diajukan Oleh:

Nuke Parameswari

083002200004

Disetujui:

20 Juli 2025

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktek hingga menyelesaikan laporan kerja praktek tepat pada waktunya. Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktek. Selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kelik Indriyanto, S.T, M.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
2. Ir. Retno Sulistyaningrum, MAP selaku Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
3. Daris Sugiarto, ST selaku Ketua Subkelompok Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana Sarana Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
4. Bapak Donald Ganitua Sianturi, S.T. selaku pembimbing di Bagian Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
5. Ibu Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K. selaku dosen penanggung jawab mata kuliah kerja praktik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan kerja praktek.
6. Ibu Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan kerja praktek yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunannya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, baik dalam hal materi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di waktu yang akan datang.

Jakarta, 19 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Proses Mendapatkan Tempat Kerja Praktek 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 3
BAB II 4
DESKRIPSI TEMPAT KERJA PRAKTEK 4
2.1 Profil Singkat Instansi Kerja Praktek 4
2.2 Struktur Organisasi 7
2.3 Posisi Praktikan 7
2.3 Deskripsi Tugas 8
BAB III 9
JADWAL KEGIATAN DAN SUBSTANSI PEKERJAAN 9
3.1 Jadwal Kerja Praktikan 9
BAB IV 41
ANALISIS 41
4.1 Manfaat Praktis dan Teoritis Bagi Praktisi 41
4.1.1 Manfaat Praktis Bagi Praktikan 41
4.1.2 Manfaat Teoritis Bagi Praktikan 41
4.2 Kelebihan dan Kekurangan Instansi Kerja Praktek 42
4.2.1 Kelebihan Instansi Kerja Praktek 42
4.2.2 Kekurangan Instansi Kerja Praktek 42
4.3 Kekurangan dan Kelebihan Praktikan di Tempat Kerja Praktik 42
4.3.1 Kelebihan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik 43
4.3.2 Kekurangan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik 43
BAB V 44
PENUTUP 44
5.1 Masukan Perbaikan bagi P enyelenggara Mata Kuliah Kerja Praktek 44
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja praktek adalah kegiatan penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Melalui kerja praktek, mahasiswa dapat memasuki lingkungan kerja, memperoleh pengalaman praktis, dan wawasan pengetahuan yang relevan, menjadikannya bekal berharga untuk masa depan. Selain itu, magang juga berperan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai bidang studi mereka dan menjadi media komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi antara mahasiswa dan institusi tempat kerja praktek.

Kerja Praktek merupakan mata kuliah wajib di Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti, yang diambil pada semester VI atau VII sebagai bekal sebelum menyusun Tugas Akhir. Program ini dirancang agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik di dunia kerja nyata, dengan syarat minimal 175 jam kerja yang dilaksanakan saat libur semester untuk memastikan fokus penuh. Kerja Praktek merupakan komponen esensial dalam pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai jembatan vital antara teori dan praktek, memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan akademis ke dalam skenario kerja nyata. Melalui Kerja Praktek, mahasiswa mengembangkan keterampilan praktis baik teknis maupun non-teknis, serta membentuk profesionalisme dengan memahami etika dan budaya kerja. Selain itu, KP menyediakan kesempatan berharga untuk memperluas jaringan profesional dan menjelajahi minat karier, membantu mahasiswa mengidentifikasi jalur yang sesuai untuk masa depan mereka. Dengan demikian, tujuan utama Kerja Praktek adalah mempersiapkan mahasiswa secara komprehensif untuk dunia kerja, meningkatkan pemahaman mereka tentang industri, melatih kemampuan penulisan ilmiah melalui laporan, membentuk pola pikir adaptif, serta mempererat kemitraan antara institusi pendidikan dan industri.

1.2 Proses Mendapatkan Tempat Kerja Praktek

Untuk bisa mengikuti Kerja Praktek, mahasiswa harus melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti. Beberapa tahapan yang wajib wajib dipenuhi agar mahasiswa dapat melaksanakan kerja praktek, sebagai berikut:

1. Praktikan mencari informasi terkait instansi yang memiliki kaitan dengan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. (November 2024)
2. Praktikan menyerahkan surat permohonan melakukan kerja praktik yang sudah ditanda tangani oleh Wakil Dekan I kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (November 2024)
3. Praktikan mengisi formulir surat permohonan pelaksanaan kerja praktek dan koordinator kerja praktik untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan lalu diajukan kepada pihak sekretaris jurusan Teknik Panologi dan didisposisikan surat permohonan melakukan kerja praktik kepada Wakil Dekan I Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan untuk ditanda tangani. (Desember 2024)
4. Praktikan menyerahkan surat permohonan melakukan kerja praktek yang sudah ditanda tangani oleh Wakil Dekan I kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta. (Desember 2024)
5. Praktikan mendapatkan surat penerimaan untuk melakukan kerja praktek dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya termuat mengenai tanggal awal untuk memulai kerja praktek hingga batas akhir kerja praktek serta penempatan posisi. (Desember 2024)
6. Praktikan melakukan kerja praktik yang dimulai pada tanggal 8 Januari 2024 – 21 Februari 2025.

1.3 Tujuan

Tujuan praktikan melakukan kerja praktik di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Memahami secara mendalam berbagai kebijakan, strategi, dan program yang diterapkan oleh DPRKP DKI Jakarta dalam menangani permasalahan perumahan di ibu kota, terutama terkait penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi DPRKP dalam mengimplementasikan program-program perumahan, serta mempelajari solusi dan pendekatan inovatif yang diterapkan untuk mengatasinya.
3. Memahami secara langsung peran dan fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini DPRKP DKI Jakarta, sebagai aktor kunci dalam perencanaan dan penyediaan perumahan serta kawasan permukiman yang berkelanjutan.
4. Mengaplikasikan ilmu dan teori perencanaan wilayah dan kota yang telah saya peroleh di bangku kuliah ke dalam konteks praktis kebijakan dan program perumahan di Jakarta.
5. Mengasah keterampilan profesional seperti analisis data, penulisan laporan, komunikasi, dan kerja tim dalam lingkungan birokrasi pemerintah.
6. Mendapatkan wawasan dan pengalaman langsung mengenai proses kerja, tantangan operasional, dan dinamika pengambilan keputusan di instansi pemerintah terkait perumahan dan permukiman.

1.4 Manfaat

Manfaat praktikan melakukan kerja praktik di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Memahami praktik perencanaan perumahan di kota metropolitan secara langsung, termasuk program rumah susun, penataan kawasan kumuh, dan relokasi warga.
2. Mengasah kemampuan analisis spasial dan teknis PWK, seperti pemetaan, survei lapangan, serta penggunaan GIS.
3. Memahami proses kebijakan dan tata kelola perumahan dan permukiman, dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi program.
4. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, baik dengan aparatur pemerintah, konsultan, maupun masyarakat.
5. Mengetahui tantangan riil perencanaan kota seperti keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, dan kebutuhan MBR.
6. Meningkatkan wawasan terhadap integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan.
7. Membangun jejaring profesional dengan para pelaku perencanaan dan instansi pemerintah daerah.

BAB II

DESKRIPSI TEMPAT KERJA PRAKTEK

2.1 Profil Singkat Instansi Kerja Praktek

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
7. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
9. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah
10. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
11. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
12. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
13. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU permukiman
14. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi perumahan
15. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kawasan permukiman
16. Pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian
17. Pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman

18. Fasilitasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
19. Fasilitasi penyelesaian sengketa penghunian perumahan
20. Penanganan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan lingkup tugasnya
21. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman
22. Pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
23. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
24. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
25. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi, 1 (satu) Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kep. Seribu, 8 (delapan) Unit Pengelola Rumah Susun, 1 (satu) Pusat Data dan Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 1 (satu) Unit Pengelola Dana Perumahan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Struktur Organisasi

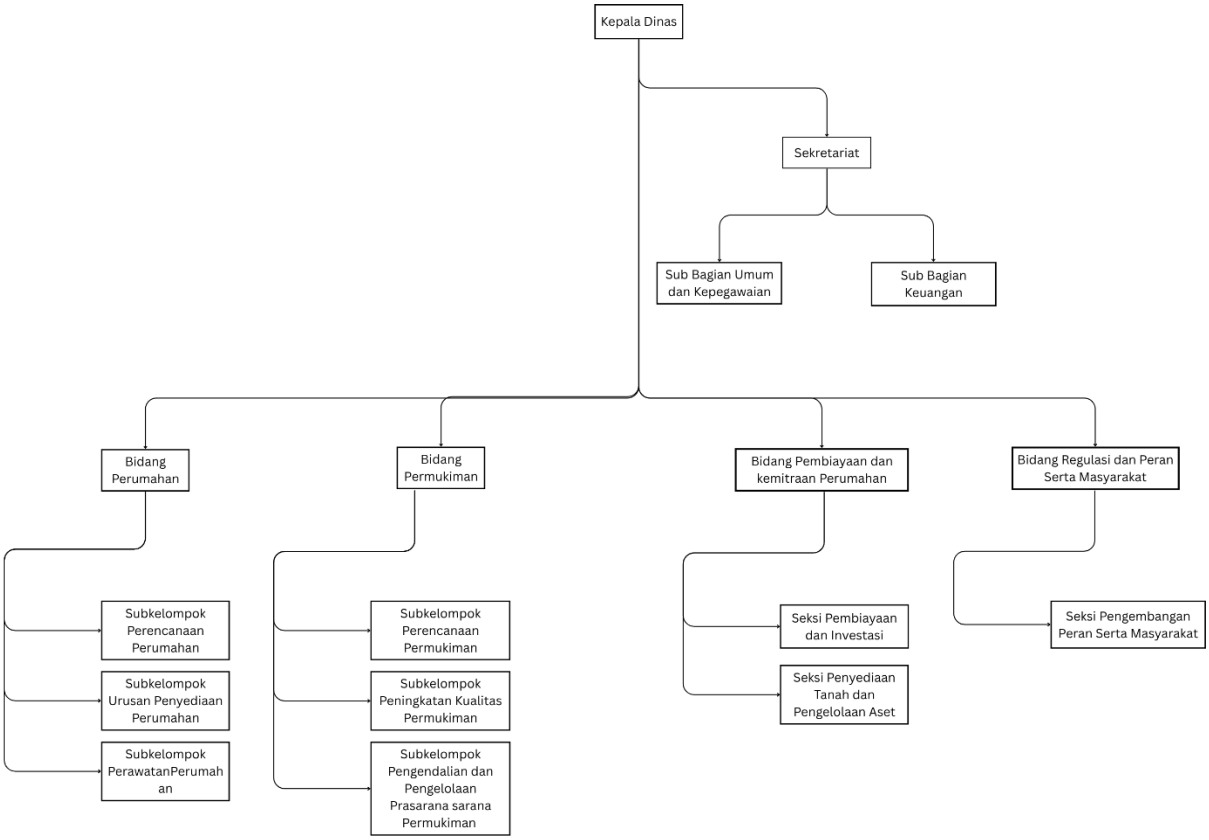

2.3 Posisi Praktikan

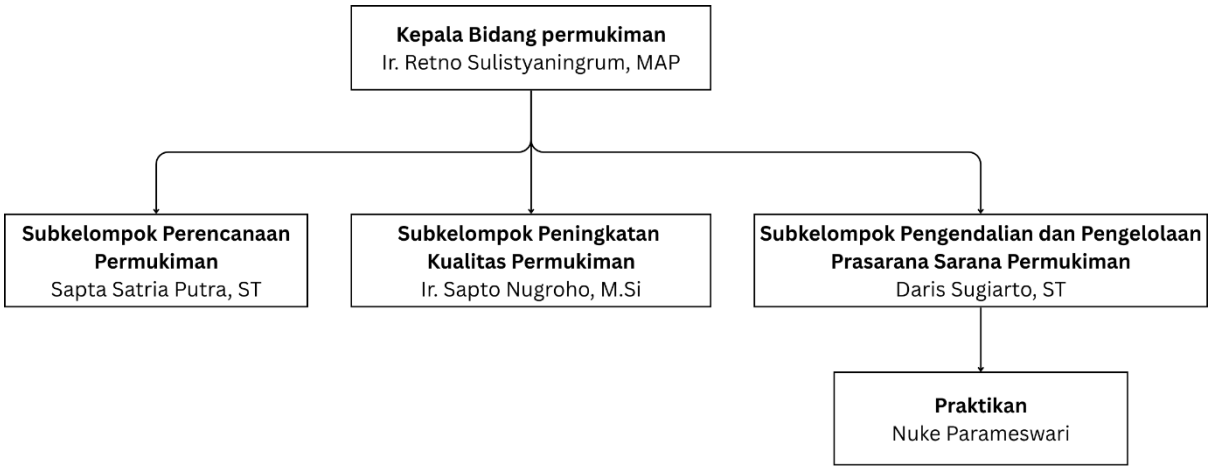

2.3 Deskripsi Tugas

Selama melakukan kerja praktek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta praktikan membantu Bidang Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya. Praktikan diarahkan untuk melakukan dua analisis serta notulensi pada Musrenbang Kota Manado. Tugas-tugas tersebut sebagai berikut:

1. Menggunakan ArcGIS Model Builder untuk menganalisis spasial terkait persebaran permukiman kumuh Praktikan belajar dan mencoba merunning Model Builder pada ArcGIS untuk menghasilkan kesesuaian area kumuh di DKI Jakarta berdasarkan SHP yang telah diberikan oleh DPRKP dan menyusun alur kerja analisis berdasarkan geospasial. Tahapan yang perlu dilakukan dalam analisis adalah berikut:
   - Tahap 1 Environment
   - Tahap 2 Constraint
   - Tahap 3 Suitability

   Saat ketiga tahap berhasil di running, maka akan muncul hasil peta kesesuaian area kumuh di daerah DKI Jakarta berdasarkan kelas.
2. Membuat PPT penjelasan tentang cara penggunaan Model Builder pada aplikasi ArcGIS. Praktikan diberikan tugas membuat PPT untuk menjelaskan kepada staff DPRKP bagian permukiman bagaimana cara menggunakan Model Builder pada aplikasi ArcGIS.
3. Mengerjakan pendataan kawasan kumuh di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada Microsoft Excel. Praktikan diberikan tugas untuk menyesuaikan data pada Open Atribute Tabel pada aplikasi ArcGIS dan disesuaikan dengan tabel di Microsoft Excel.
4. Mengerjakan pendataan indikasi kumuh. Praktikan diberikan tugas untuk mengerjakan tabel indikasi kumuh di Microsoft Excel untuk rencana program peningkatan kualitas permukiman.
5. Merancang banner dan cover buku Pokmas 2025. Praktikan mendapatkan tugas untuk merancang banner vertikal dan horizontal, serta buku untuk kegiatan Pokmas 2025.
6. Membuat peta indikasi kumuh. Praktikan membuat peta indikasi kumuh di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan berdasarkan Kecamatan yang akan digunakan oleh DPRKP.
7. Survey bersama staff Bidang Perumahan. Praktikan diberikan kesempatan untuk mengikuti survey Bersama staff Bidang Perumahan untuk melihat Lokasi yang dapat dipotensikan untuk Pembangunan KTV di daerah Jakarta Pusat.

BAB III

JADWAL KEGIATAN DAN SUBSTANSI PEKERJAAN

3.1 Jadwal Kerja Praktikan

Praktikan melaksanakan kerja praktek pada Bidang Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 30 hari kerja atau 185 jam 40 menit kerja di luar waktu istirahat, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 hingga 21 Februari 2025, dan telah memenuhi waktu minimal pelaksanaan kerja praktik. Secara umum, jam kerja praktikan mengikuti jam kerja pegawai, yakni mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB pada hari Senin - Kamis dan 08.00 - 16.30 WIB pada hari Jumat. Selama melaksanakan kerja praktek, praktikan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang rinciannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kerja Praktikan

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
1.	Rabu, 08/01/2025	08.00-09.00	Perkenalan dengan lingkungan kerja	Lt.3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	
		09.00-12.00	Mempelajari hasil laporan akhir Kajian Indikatif Kumuh 2024	Lt.3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.1	Melihat dan mempelajari cara mengidentifikasi dan mempriotitaskan area kumuh yang membutuhkan intervensi berdasarkan indikator kumuh	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						dan kondisi wilayah secara holistik menggunakan konsep SMCE (*Spatial Multi-Criteria Evaluation*)	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-14.00	Mempelajari PERGUB No. 90 Tahun 2018 dan PERMEN Nomor 14/PRT/M/2018	Lt.3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.2	Peraturan terkait Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Permukiman Kumuh	
		14.00-16.00	Mengikuti pertemuan dengan Mahasiswa untuk membahas penelitian tugas akhir	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.3	Membahas penelitian terkait Konsolidasi Tanah Vertikal (TKV) di daerah Palmerah dan Tanah Tinggi	
Total: 7 Jam							
2.	Kamis, 09/01/2025	08.00-08.52	Membuat Logbook dan Laporan Kerja Praktik	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.4	-	
		09.00-11.30	Menghadiri rapat Bersama PUPR mengenai laporan akhir pendataan kumuh DKI Jakarta	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.5	Hasil pendataan area kumuh di DKI Jakarta dengan indikator yang digunakan oleh PUPR dan 1 indikator khusus kota Jakarta menggunakan SMCE oleh aplikasi AccGIS	
		12.00-13.00	Istirahat				

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.00-15.00	Merapihkan notulensi hasil rapat	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.6	Terdapat 7 indikator dan 16 sub indikator dari Kementrian PUPR yang digunakan sebagai indikator area kumuh, namun setiap daerah memiliki tipologi yang berbeda dan indikator yang digunakan juga harus menyesuaikan kondisi eksisiting di setiap daerah. Tujuan dari pendataan ini terdapat 2 yaitu Integrasi data dengan pusat dan pengurangan kawasan kumuh	
		15.00-16.00	Membuat Logbook Kerja Praktik	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.7	-	
Total: 6 Jam 30 Menit							
3.	Jumat, 10/01/2025	08.00-11.30	Membuat laporan kerja praktik	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.8	-	
		Istirahat					
		13.00-16.30	Pemaparan dan diskusi terkait Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) dan HL DPRKP	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.9	Mempelajari perencanaan tata ruang, infrastruktur, dan kebijakan pembangunan yang relevan dalam merancang kawasan bebas kumuh. Melalui pendekatan partisipatif dan perencanaan berkelanjutan.	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
Total: 7 Jam							
4	Senin, 13/01/2025	08.00-11.00	Review mengenai laporan akhir Kajian Indikatif Kumuh 2024 dan PERGUB No. 90 Tahun 2018	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.10	Mempelajari bagaimana data indikatif kumuh digunakan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan merevitalisasi permukiman, serta bagaimana kebijakan seperti PERGUB No. 90 Tahun 2018 menjadi pedoman hukum dalam proses perencanaan tersebut. Memberikan wawasan praktis dan regulatif yang penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.00	Review mengenai PERMEN Nomor 14/PRT/M/2018	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.11	Mempelajari bagaimana kebijakan ini digunakan dalam proses identifikasi, perencanaan teknis, hingga pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Permen ini juga mendorong pendekatan partisipatif dan lintas sektor, yang merupakan bagian penting dalam praktik perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif.	
Total: 7 Jam							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
6	Rabu, 15/01/2025	08.00-12.00	Mempelajari dan mencoba model builder pada aplikasi ArcGIS	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.12	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang, evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.00	Mempelajari dan mencoba model builder pada aplikasi ArcGIS	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.13	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang, evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
Total: 7 Jam							
7	Kamis, 16/01/2025	08.00-12.00	Membuat PPT mengenai analisis area kumuh menggunakan model builder di aplikasi ArcGIS	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.14	Analisis area kumuh menggunakan Model Builder di ArcGIS sangat relevan karena memungkinkan proses identifikasi kawasan kumuh	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						dilakukan secara sistematis, cepat, dan berulang. Dengan memanfaatkan berbagai indikator seperti kepadatan bangunan, aksesibilitas, dan kondisi infrastruktur, Hasilnya berupa peta kawasan kumuh yang akurat dan informatif, yang sangat berguna dalam mendukung perencanaan penanganan permukiman kumuh secara terarah dan berbasis data.	
		Istirahat					
		13.00-16.00	Mencoba tahap 1 dan 2 Environment pada model builder	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.15	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang, evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
Total: 7 Jam							
8	Jumat, 17/01/2025	08.00-11.30	Mencoba tahap 3 Environment pada model builder	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.16	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang,	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
		11.30-13.00	Istirahat				
		13.00-16.32	Mengerjakan Clip kelurahan area kumuh yang akan digunakan dalam analisis model builder pada aplikasi ArcGIS	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.17	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang, evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
Total: 7 Jam 2 Menit							
9	Senin, 20/01/2025	07.55-12.00	Mencoba running model builder untuk menganalisis salah satu kelurahan pada aplikasi ArcGIS	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.18	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang, evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
		Istirahat					
		13.00-16.00	Revisi ppt dan memaparkan ppt hasil running model builder pada aplikasi ArcGIS	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.19	Analisis area kumuh menggunakan Model Builder di ArcGIS sangat relevan karena memungkinkan proses identifikasi kawasan kumuh dilakukan secara sistematis, cepat, dan berulang. Dengan memanfaatkan berbagai indikator seperti kepadatan bangunan, aksesibilitas, dan kondisi infrastruktur. Hasilnya berupa peta kawasan kumuh yang akurat dan informatif, yang sangat berguna dalam mendukung perencanaan penanganan permukiman kumuh secara terarah dan berbasis data.	
Total: 7 jam 5 Menit							
10	Selasa 21/01/2025	8.30-11.30	Mengikuti rapat koordinasi persiapan pendataan RW kumuh DKI Jakarta anggaran 2025	Via Zoom Meeting	Lampiran 2.20	Mengikuti rapat koordinasi persiapan pendataan RW kumuh DKI Jakarta anggaran 2025 memiliki hubungan erat karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan berbasis data. keterlibatan langsung dalam	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						koordinasi lintas sektor penting untuk memahami dinamika kebijakan, metodologi pendataan, serta kebutuhan riil di lapangan.	
		Istirahat					
		13.03-16.18	Mengerjakan pendataan Kawasan Kumuh di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada Microsoft Excel	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.21	Mengerjakan pendataan kawasan kumuh di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menggunakan Microsoft Excel memiliki hubungan langsung karena pendataan merupakan dasar dalam proses perencanaan yang berbasis bukti. Pengolahan dan analisis data tabular seperti kondisi bangunan, kepadatan, aksesibilitas, dan infrastruktur permukiman sangat penting untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan suatu wilayah.	
Total: 6 Jam 15 Menit							
11	Rabu 22/01/2025	7.46 -12.00	Membuat peta indikasi kumuh Jakarta Barat	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.22	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan merencanakan penanganan kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini mendukung proses	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.49	Membuat peta indikasi kumuh Jakarta Utara	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.23	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan merencanakan penanganan kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini mendukung proses perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
Total: 8 Jam 3 Menit							
12	Kamis 23/01/2025	7.46-12.00	Membuat peta indikasi kumuh Kecamatan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.24	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan merencanakan penanganan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini mendukung proses perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.10-15.23	Rapat bersama tenaga ahli membahas mengenai analisis model builder pada aplikasi ArcGIS Pro	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.25	Model builder membantu dalam analisis spasial yang merupakan sangat penting untuk perencanaan tata ruang, evaluasi penggunaan lahan, serta pemetaan wilayah kumuh, rawan bencana, atau kawasan strategis. Model Builder dapat menyusun alur kerja analisis geospasial secara efisien, akurat, dan dapat direplikasi.	
		15.25-16.51	Membuat peta indikasi kumuh Kecamatan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.26	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan merencanakan penanganan kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						mendukung proses perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
Total: 7 Jam 51 Menit							
13	Jumat, 24/01/2025	7.50-11.34	Membuat peta indikasi kumuh Kecamatan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.27	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan merencanakan penanganan kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini mendukung proses perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		11.30-13.00	Istirahat				
		13.17-16.57	Revisi peta Indikasi Kumuh Kecamatan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.28	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						merencanakan penanganan kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini mendukung proses perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
Total: 7 Jam 24 Menit							
14	Kamis, 30/01/2025	07.45-12.37	Revisi Peta Indikasi Kumuh Jakarta Utara dan Jakarta Barat	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.29	Membuat peta indikasi kumuh memiliki hubungan yang kuat karena peta tersebut menjadi alat visual utama dalam menganalisis dan merencanakan penanganan kawasan permukiman yang tidak layak. Peta ini mendukung proses perencanaan tata ruang yang berbasis data dan lokasi, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program peningkatan kualitas lingkungan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.00-16.33	Mempelajari dan Review NUA Final Report 2021	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.30	Mempelajari dan me-review **NUA Final Report 2021** (New Urban Agenda) memiliki hubungan karena dokumen tersebut merupakan panduan global dalam pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Pemahaman terhadap NUA penting untuk mengaitkan praktik perencanaan lokal dengan kebijakan internasional, seperti penanganan permukiman kumuh, peningkatan infrastruktur dasar, dan tata kelola perkotaan yang partisipatif. Melalui review NUA dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip pembangunan kota yang ideal dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan.	
Total: 8 Jam 25 menit							
15	Jumat, 31/01/2025	7.47-11.40	Mempelajari dan Review NUA Final Report 2021	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.31	Mempelajari dan me-review **NUA Final Report 2021** (New Urban Agenda) memiliki hubungan karena dokumen	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						tersebut merupakan panduan global dalam pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Pemahaman terhadap NUA penting untuk mengaitkan praktik perencanaan lokal dengan kebijakan internasional, seperti penanganan permukiman kumuh, peningkatan infrastruktur dasar, dan tata kelola perkotaan yang partisipatif. Melalui review NUA dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip pembangunan kota yang ideal dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan.	
		Istirahat					
		13.00-16.43	Mempelajari dan Review NUA Final Report 2021	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.32	Mempelajari dan me-review **NUA Final Report 2021** (New Urban Agenda) memiliki hubungan karena dokumen tersebut merupakan panduan global dalam pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						berketahanan. Pemahaman terhadap NUA penting untuk mengaitkan praktik perencanaan lokal dengan kebijakan internasional, seperti penanganan permukiman kumuh, peningkatan infrastruktur dasar, dan tata kelola perkotaan yang partisipatif. Melalui review NUA dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip pembangunan kota yang ideal dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan.	
Total: 7 jam 36 menit							
16	Senin, 03/02/2025	07.58-12.02	Review terkait NUA Good Report 2021	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.33	Mempelajari dan me-review **NUA Final Report 2021** (New Urban Agenda) memiliki hubungan karena dokumen tersebut merupakan panduan global dalam pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Pemahaman terhadap NUA penting untuk mengaitkan praktik perencanaan lokal dengan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						kebijakan internasional, seperti penanganan permukiman kumuh, peningkatan infrastruktur dasar, dan tata kelola perkotaan yang partisipatif. Melalui review NUA dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip pembangunan kota yang ideal dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan.	
Total: 4 Jam 4 Menit							
17	Selasa, 04/02/2025	8.03-12.00	Menyelaraskan data area kumuh yang ada di ArcGis dan Microsoft Excel	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.34	Menyelaraskan data area kumuh yang ada di ArcGIS dan Microsoft Excel memiliki hubungan karena kegiatan ini merupakan bagian dari integrasi data spasial dan non-spasial yang penting dalam proses perencanaan. Penyelarasan data ini membantu dalam mengidentifikasi pola kekumuhan secara akurat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan merancang intervensi penataan kawasan yang tepat sasaran.	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		Istirahat					
		13.02-16.18	Mengerjakan desain banner (Horizontal) untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.35	Mengerjakan desain banner horizontal untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
	Total: 7 jam 12 menit						
18	Rabu, 05/02/2025	07.40-08.55	Mengerjakan desain banner (Vertikal) untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.36	Mengerjakan desain banner vertikal untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
		09.00-11.50	Rapat mengenai pendataan RW kumuh dengan data Survey	Via Zoom Meeting	Lampiran 2.37	Rapat mengenai pendataan RW kumuh dengan data survey berkaitan langsung karena mendukung proses perencanaan berbasis data yang akurat. Kegiatan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara data lapangan dan perencanaan teknis, sehingga intervensi terhadap kawasan kumuh dapat dirancang secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		12.57-16.21	Mengerjakan desain banner (Vertikal) untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.38	Mengerjakan desain banner vertikal untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
	Total: 7 Jam 29 Menit						
19	Kamis, 06/02/2025	07.48-12.05	Mengerjakan desain cover buku untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.39	Mengerjakan desain cover buku untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.03	Mengerjakan desain cover buku untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.40	Mengerjakan desain cover buku untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
Total: 7 Jam 20 Menit							
20	Jumat, 07/02/2025	08.05-11.43	Mengerjakan KAK Narasumber Pemeliharaan Sarpras	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.41	Mengerjakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk Narasumber Pemeliharaan Sarpras memiliki hubungan karena kegiatan ini melatih kemampuan menyusun rencana kegiatan yang mendukung pengelolaan infrastruktur kota. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari perencanaan berkelanjutan, dan melalui penyusunan KAK.	
		Istirahat					
		13.00-16.17	Mengerjakan KAK Narasumber Pemeliharaan Sarpras	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.42	Mengerjakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk Narasumber Pemeliharaan Sarpras memiliki hubungan karena kegiatan ini melatih kemampuan menyusun rencana kegiatan yang mendukung pengelolaan infrastruktur kota. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari perencanaan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						berkelanjutan, dan melalui penyusunan KAK.	
Total: 6 Jam 55 Menit							
21	Senin, 10/02/2015	08.30-12.10	Mengerjakan Kerangka Acuan Kerja MC	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.43	Mengerjakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk Narasumber Pemeliharaan Sarpras memiliki hubungan karena kegiatan ini melatih kemampuan menyusun rencana kegiatan yang mendukung pengelolaan infrastruktur kota. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari perencanaan berkelanjutan, dan melalui penyusunan KAK.	
		Istirahat					
		13.00-16.03	Mengerjakan Kerangka Acuan Kerja MC	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.44	Mengerjakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk Narasumber Pemeliharaan Sarpras memiliki hubungan karena kegiatan ini melatih kemampuan menyusun rencana kegiatan yang mendukung pengelolaan infrastruktur kota. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari perencanaan	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						berkelanjutan, dan melalui penyusunan KAK.	
Total: 6 Jam 43 Menit							
22	Selasa, 11/02/2025	08.01-11.59	Mengerjakan revisi desain banner (Horizontal) untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.45	Mengerjakan desain banner horizontal untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
		Istirahat					
		13.00-16.07	Mengerjakan revisi desain banner (Vertikal) untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.46	Mengerjakan desain banner vertikal untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
Total: 7 Jam 7 Menit							
23	Rabu, 12/02/2025	07.47-12.03	Mengerjakan revisi desain cover buku untuk program CIP 2025	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.47	Mengerjakan desain cover buku untuk program CIP (City Improvement Program) 2025 memiliki hubungan karena desain visual merupakan bagian dari komunikasi perencanaan. Penyampaian informasi program kepada masyarakat secara jelas dan menarik sangat penting untuk membangun partisipasi dan pemahaman publik. Melalui desain banner, dapat belajar menerjemahkan konsep perencanaan menjadi media	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						visual yang informatif, representatif, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keberhasilan sosialisasi dan implementasi program pembangunan kota.	
Total: 4 Jam 16 Menit							
24	Kamis, 13/02/2024	**Company Visit LRT Jakarta (Himpunan)**					
26	Senin, 17/02/2025	07.50-11.45	Mengisi dan Merapihkan logbook	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.48	-	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.16	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh Jakarta Timur	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.49	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh di Jakarta Timur berkaitan karena merupakan bagian dari pengelolaan data yang mendukung proses perencanaan. Kegiatan ini membantu memastikan data tersusun rapi dan siap digunakan untuk analisis spasial maupun perumusan strategi penanganan kawasan kumuh secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
Total: 7 Jam 11 Menit							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
27	Selasa, 18/02/2025	07.35-09.07	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh Jakarta Timur	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.50	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh di Jakarta Timur berkaitan karena merupakan bagian dari pengelolaan data yang mendukung proses perencanaan. Kegiatan ini membantu memastikan data tersusun rapi dan siap digunakan untuk analisis spasial maupun perumusan strategi penanganan kawasan kumuh secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		09.07-11.20	Mengikuti Webinar terkait Program Konsolidasi Tanah Vertikal	Youtube Live	Lampiran 2.51	Mengikuti webinar terkait Program Konsolidasi Tanah Vertikal memiliki hubungan karena program ini merupakan solusi penataan permukiman di lahan terbatas. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan tata ruang yang efisien, mengurangi kepadatan horizontal, dan meningkatkan kualitas hunian secara berkelanjutan.	
		11.16-12.13	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh Jakarta Timur	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.52	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh di Jakarta Timur berkaitan karena merupakan bagian dari pengelolaan data	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						yang mendukung proses perencanaan. Kegiatan ini membantu memastikan data tersusun rapi dan siap digunakan untuk analisis spasial maupun perumusan strategi penanganan kawasan kumuh secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.03	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh Jakarta Timur	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.53	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh di Jakarta Timur berkaitan karena merupakan bagian dari pengelolaan data yang mendukung proses perencanaan. Kegiatan ini membantu memastikan data tersusun rapi dan siap digunakan untuk analisis spasial maupun perumusan strategi penanganan kawasan kumuh secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
Total: 7 Jam 41 Menit							
28	Rabu, 19/02/2025	08.03-09.00	Revisi data indikasi program peningkatan kualitas kumuh Jakarta Timur	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.54	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh di Jakarta Timur berkaitan karena merupakan bagian dari pengelolaan data yang mendukung proses	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						perencanaan. Kegiatan ini membantu memastikan data tersusun rapi dan siap digunakan untuk analisis spasial maupun perumusan strategi penanganan kawasan kumuh secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		09.10-13.58	Survey sosialisasi program KTV di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat	Balai Warga Kp. Rawa Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat	Lampiran 2.55	Survey sosialisasi program KTV di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berkaitan erat karena kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam perencanaan kawasan kumuh. Sosialisasi dan survey lapangan penting untuk memahami kebutuhan masyarakat, meningkatkan keterlibatan warga, serta memastikan perencanaan dan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		14.00-16.00	Mengikuti webinar Reinventing Cities	Via Zoom Meeting	Lampiran 2.56	-	
Total: 7 Jam 45 Menit							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
29	Kamis, 20/02/2025	07.51-12.00	Revisi data indikasi program peningkatan kualitas kumuh Jakarta Timur	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.57	Memindahkan data indikasi program peningkatan kualitas kumuh di Jakarta Timur berkaitan karena merupakan bagian dari pengelolaan data yang mendukung proses perencanaan. Kegiatan ini membantu memastikan data tersusun rapi dan siap digunakan untuk analisis spasial maupun perumusan strategi penanganan kawasan kumuh secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-16.00	Mengikuti dan menotulensi rapat koordinasi rencana strategis informasi geospasial 2023-2026	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.58	Mengikuti dan menotulensi rapat koordinasi rencana strategis informasi geospasial 2023-2026 berkaitan erat karena informasi geospasial merupakan dasar penting dalam perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan perkotaan. Kegiatan ini dapat membantu memahami pengelolaan data spasial secara strategis untuk mendukung perencanaan yang akurat, efisien, dan berkelanjutan.	
Total: 7 Jam 9 Menit							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
30	Jumat, 21/02/2025	09.03-11.12	Review dan rangkum Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.59	Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023 berperan penting dalam bidang karena menyediakan data spasial dan non-spasial terbaru mengenai lokasi, luas, dan tingkat kekumuhan permukiman di Indonesia. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang, perumusan strategi penanganan kumuh berbasis kawasan, serta penentuan prioritas intervensi pembangunan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.	
		Istirahat					
		02.00-16.00	Rapat koordinasi persiapan hunian Rusun Jagakarsa dengan Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta	Via Zoom Meeting	Lampiran 2.60	Rapat koordinasi persiapan hunian Rusun Jagakarsa memiliki keterkaitan langsung, karena mencerminkan proses pengelolaan ruang kota yang melibatkan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan sesuai peruntukan tata ruang. Rapat ini menjadi bagian dari implementasi perencanaan permukiman vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan,	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						pengendalian urban sprawl, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan seperti Jakarta Selatan.	
Total: 4 jam 9 Menit							
TOTAL: 185 JAM 40 MENIT							

BAB IV

ANALISIS

4.1 Manfaat Praktis dan Teoritis Bagi Praktisi

Selama melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, praktikan memperoleh berbagai manfaat, baik dari sisi praktik lapangan maupun penguatan pemahaman teoritis. Beberapa manfaat yang di dapatkan adalah sebagai berikut.

4.1.1 Manfaat Praktis Bagi Praktikan

1. Pemahaman langsung terhadap sistem kerja instansi pemerintah di bidang kawasan permukiman.
2. Keterlibatan dalam kegiatan teknis**,** seperti survei lapangan, verifikasi data hunian, dan dokumentasi kegiatan proyek.
3. Penguasaan alat bantu perencanaan**,** seperti ArcGIS, Excel analisis data, dan perangkat kerja lainnya yang digunakan di lapangan.
4. Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim dalam lingkungan kerja profesional.
5. Pengalaman mengikuti proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program**,** seperti pembangunan rusunawa atau penataan kawasan kumuh.

4.1.2 Manfaat Teoritis Bagi Praktikan

1. Penerapan ilmu PWK secara nyata, seperti konsep permukiman berkelanjutan, perencanaan berbasis tata ruang, dan prinsip keterpaduan wilayah.
2. Pemahaman terhadap dinamika sosial-ekonomi dalam perencanaan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
3. Analisis hubungan antara kebijakan pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap perencanaan dan pembangunan kawasan.
4. Refleksi kritis terhadap teori yang dipelajari di perkuliahan, dengan melihat realitas dan tantangan implementasinya di lapangan.

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Instansi Kerja Praktek

Selama melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, terdapat kelebihan dan kekurangan instansi yang praktikan dapatkan. Beberapa kelebihan dan kekurangan yang di dapatkan adalah sebagai berikut.

4.2.1 Kelebihan Instansi Kerja Praktek

- Instansi kerja praktek memberi tugas yang relevan dengan bidang studi Perencanaan Wilayah dan Kota .
- Pembimbing selalu membantu dan membimbing disaat praktikan kesulitan dalam mengerjakan tugas .
- Pembimbing serta rekan kerja selalu terbuka untuk berbagi informasi terkait pekerjaan.
- Suasana yang terdapat pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengedepankan rasa kekeluargaan yang membuat suasana kerja lebih nyaman..

4.2.2 Kekurangan Instansi Kerja Praktek

- Koneksi internet wifi tidak berjalan secara optimal sehingga mengganggu kelancaran pengerjaan tugas dan pekerjaan yang diberikan.
- Suhu ruangan terkadang panas sehingga menggangu konsentrasi praktikan.

4.3 Kekurangan dan Kelebihan Praktikan di Tempat Kerja Praktik

Seorang praktikan yang masih dalam masa belajar dan belum pernah bekerja secara profesional di suatu instansi pemerintahan merasa mendapatkan pengalaman baru serta kesempatan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa kuliah. Dalam melakukan kerja praktek di Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukian Provinsi DKI Jakarta, praktikan mencoba mengenali kelebihan serta kekurangan diri sendiri, sehingga dapat menjadi masukan untuk meningkatkan diri sendiri.

4.3.1 Kelebihan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik

- Praktikan mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu.
- Praktikan cepat beradaptasi serta mampu berinteraksi dan berkoordinasi secara efektif dengan para pegawai di Bidang Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- Praktikan mengikuti arahan dengan baik dan tidak ragu untuk bertanya saat menghadapi kendala dalam penyelesaian tugas.
- Praktikan memiliki semangat belajar yang tinggi, disiplin, serta bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
- Praktikan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta terbuka terhadap kritik dan saran untuk pengembangan diri.

4.3.2 Kekurangan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik

- Praktikan terkadang butuh waktu untuk memahami tugas yang diberikan.
- Praktikan masih suka ragu untuk bertanya terkait tugas yang diberikan saat kebingungan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Masukan Perbaikan bagi P enyelenggara Mata Kuliah Kerja Praktek

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama menjalani kerja praktik, terdapat sejumlah saran yang dapat disampaikan kepada Penyelenggara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja praktik pada tahun ajaran selanjutnya. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Jurusan diharapkan dapat menunjuk dosen pembimbing kerja praktik sejak awal pelaksanaan kegiatan, agar mahasiswa memperoleh arahan dan pendampingan sebelum memulai kerja praktik di instansi yang dituju.
2. Jurusan sebaiknya memiliki data atau database mengenai instansi-instansi yang sebelumnya telah digunakan sebagai lokasi kerja praktik oleh mahasiswa, khususnya yang relevan dengan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Hal ini bertujuan agar mahasiswa angkatan berikutnya mendapatkan referensi tempat kerja praktik yang sesuai, sehingga mempermudah mereka dalam memilih instansi berdasarkan minat dan bidang yang ingin ditekuni.

DAFTAR PUSTAKA

dprkp.jakarta.go.id (2020). Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-tugasdanfungsi

dprkp.jakarta.go.id (2020). Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-strukturorganisasi

dprkp.jakarta.go.id (2020). Profil Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profilepejabatstruktural

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Penerimaan Kerja Praktek Pada Instansi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 34833708, 3865369, Fax: 3847151
JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 8150/HM.03.04 — 18 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Kerja Praktik

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Nomor 1492/AK.1.03/FALTL/XI/2024 Hal Permohonaan Kerja Praktik, dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk melakukan kegiatan Kerja Praktik mulai dari 8 Januari 2025 sampai dengan 21 Februari 2025.

Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama	:	Nuke Parameswari
NIM	:	083002200004
Kontak	:	082132415765

Selanjutnya agar yang bersangkutan menghubungi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,
Sekretaris Dinas

Meli Budiastuti
NIP. 196905171994032004

Tembusan :
- Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran II. Bukti dan Dokumentasi Logbook Kerja Praktek

Lampiran 2.1

Lampiran 2.2

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PRT/M/2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN
KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

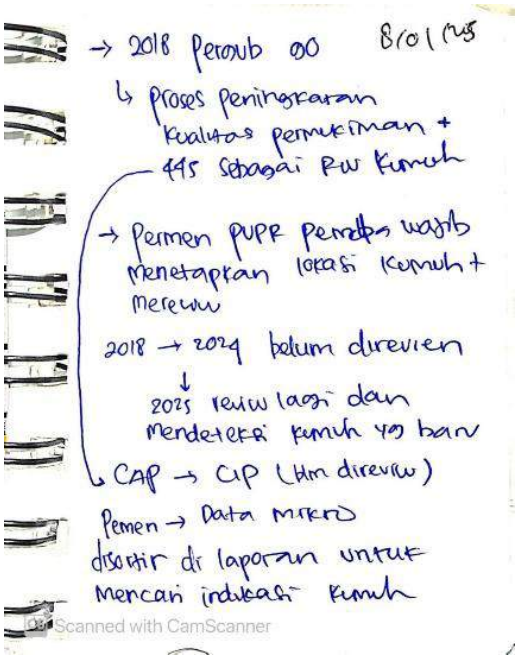

→ 2018 Perubahan 8/01/2019
↳ Proses Peningkatan Kualitas permukiman + 445 Sebagai RW Kumuh
→ Permen PUPR Pemda wajib menetapkan lokasi kumuh + mereview
2018 → 2024 belum direview
↓
2025 review lagi dan mendeteksi kumuh yg baru
↳ CAP → CIP (Hm direview)
Pemen → Data MIKRO disortir di laporan untuk mencari indikasi kumuh

Scanned with CamScanner

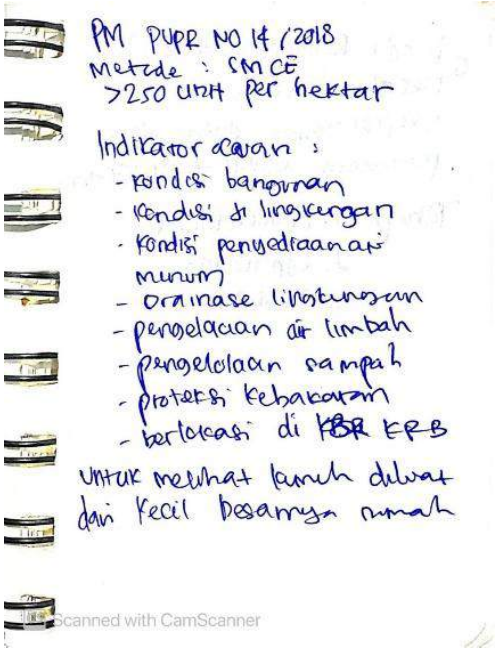

PM PUPR NO 14 / 2018
Metode : SMCE
>250 unit per hektar

Indikator acuan :
- kondisi bangunan
- kondisi di lingkungan
- kondisi penyediaan air minum
- drainase lingkungan
- pengelolaan air limbah
- pengelolaan sampah
- proteksi kebakaran
- berlokasi di ~~KSR~~ KPS

untuk melihat kumuh dilihat dari kecil besarnya rumah

Scanned with CamScanner

Lampiran 2.3

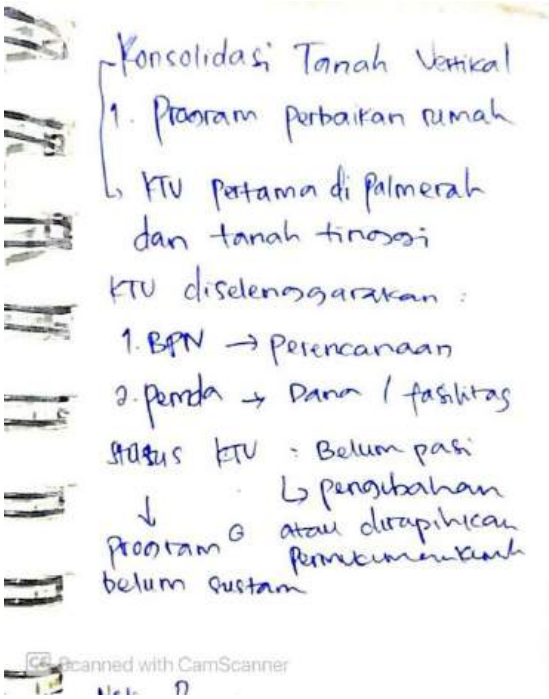

Konsolidasi Tanah Vertikal
1. Program perbaikan rumah
↳ KTV pertama di Palmerah dan tanah tinggi

KTV diselenggarakan :
1. BPN → Perencanaan
2. Pemda → Dana / fasilitas

Status KTV : Belum pasti
↳ pengubahan atau dirapihkan permukiman kumuh

↓
Program belum pastam

Scanned with CamScanner

Lampiran 2.4

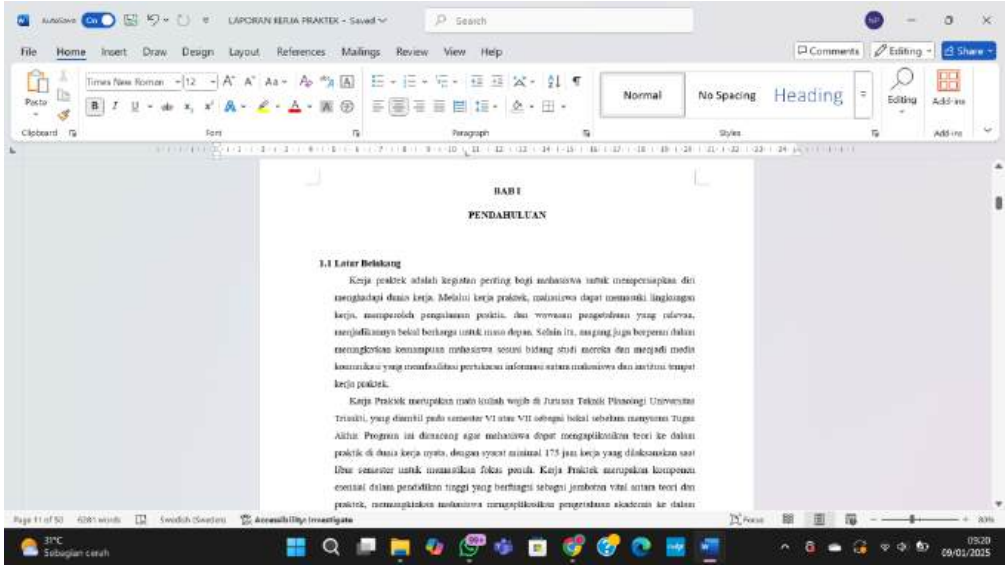

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja praktek adalah kegiatan penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Melalui kerja praktek, mahasiswa dapat memahami lingkungan kerja, memperoleh pengalaman praktis, dan wawasan pengetahuan yang relevan, menjadikannya bekal berharga untuk masa depan. Selain itu, magang juga berperan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai bidang studi mereka dan menjadi media komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi antara mahasiswa dan institusi tempat kerja praktek.

Kerja Praktek merupakan mata kuliah wajib di Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti, yang diambil pada semester VI atau VII sebagai bekal sebelum menyusun Tugas Akhir. Program ini dirancang agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik di dunia kerja nyata, dengan syarat minimal 175 jam kerja yang dilaksanakan saat libur semester untuk memastikan fokus penuh. Kerja Praktek merupakan komponen esensial dalam pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai jembatan vital antara teori dan praktek, memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan akademis ke dalam

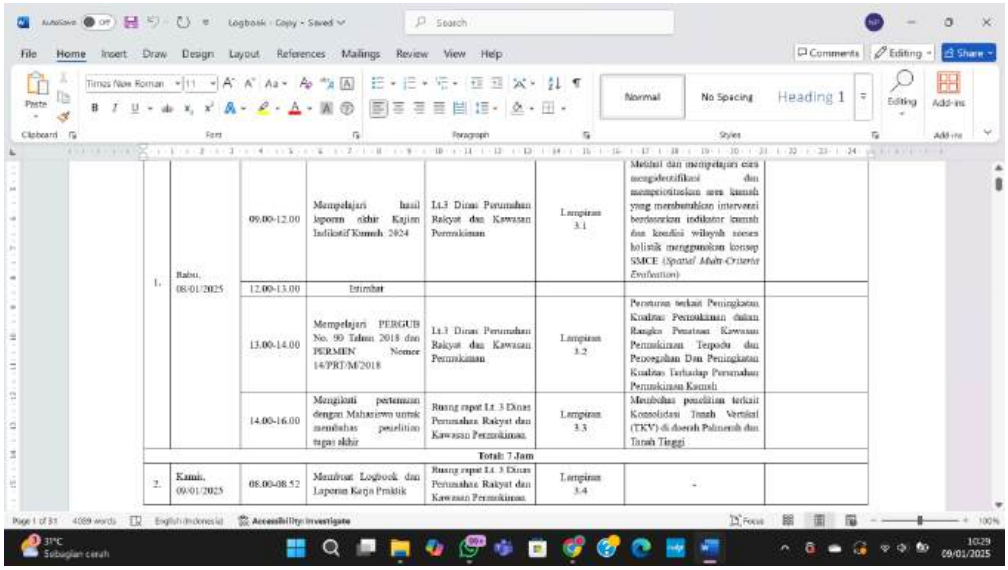

1.	Rabu, 08/01/2025	09.00-12.00	Mempelajari hasil laporan akhir Kajian Indikatif Kumuh 2024	L4.3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 3.1	Melihat dan mempelajari cara mengidentifikasi dan memprioritaskan area kumuh yang membutuhkan intervensi berdasarkan indikator kumuh dan kondisi wilayah secara holistik menggunakan konsep SMCE (*Spatial Multi-Criteria Evaluation*)	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-14.00	Mempelajari PERGUB No. 90 Tahun 2018 dan PERMEN Nomor 14/PRT/M/2018	L4.3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 3.2	Peraturan terkait Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Permukiman Kumuh	
		14.00-16.00	Mengikuti pertemuan dengan Mahasiswa untuk membahas penelitian tugas akhir	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 3.3	Membahas penelitian terkait Konsolidasi Tanah Vertikal (TKV) di daerah Palmerah dan Tanah Tinggi	
Total: 7 Jam							
2.	Kamis, 09/01/2025	08.00-08.52	Membuat Logbook dan Laporan Kerja Praktik	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 3.4	-	

Lampiran 2.5

Lampiran 2.6

9/01/2025
Laporan akhir
Pendataan kumuh DKI JKT
Pendekatan pemetaan kumuh
↳ Multi scale
Tahapan
- Identifikasi
Pendekatan
Menghitung jumlah bangunan dan padatnya
Jl lingkungan
dibuffer → Bangunan

Scanned with CamScanner

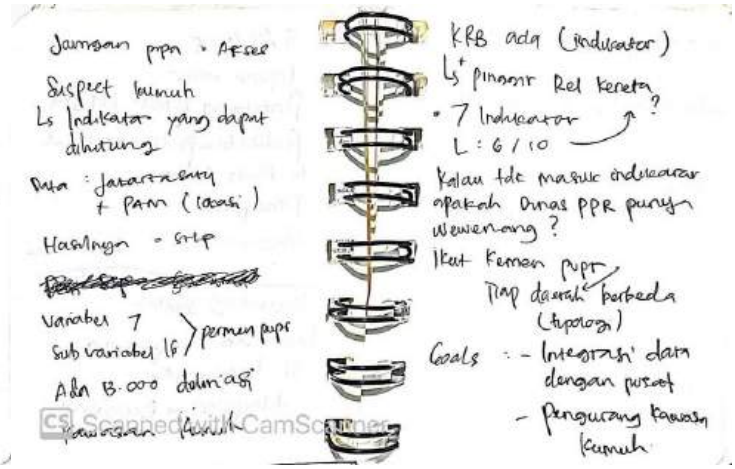

Jaringan ppn • Akses
Suspect kumuh
↳ Indikator yang dapat dihitung
Data : Jaraknya + PAM (lokasi)
Hasilnya = SHP
Variabel 7
Sub variabel 16 > permen pupr
Ada 13.000 dalmiasi
KPB ada (indikator)
↳ Pinggir Rel kereta
• 7 Indikator ?
L : 6/10
Kalau tdk masuk indikator apakah Dinas PPR punya wewenang ?
Ikut Kemen pupr
Tiap daerah berbeda (topografi)
Goals : - Integrasi data dengan pusat
- Pengurang kawasan kumuh

Scanned with CamScanner

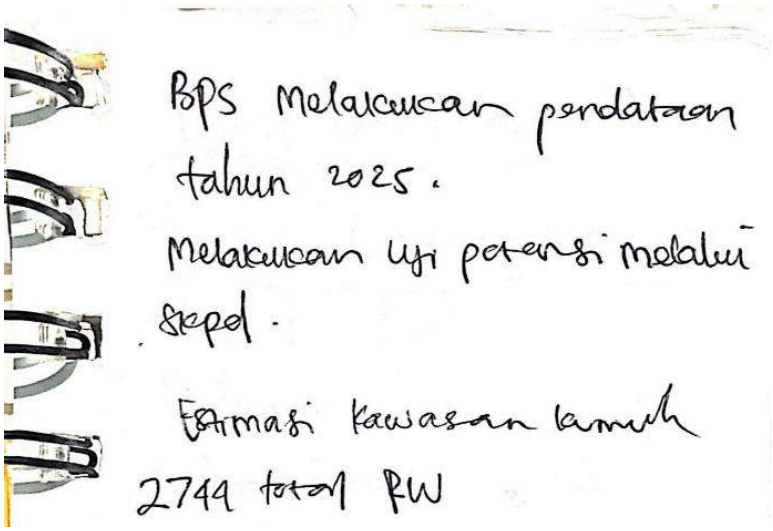

BPS melakukan pendataan tahun 2025.
Melakukan uji potensi melalui Sepd.
Estimasi kawasan kumuh 2744 total RW

Lampiran 2.7

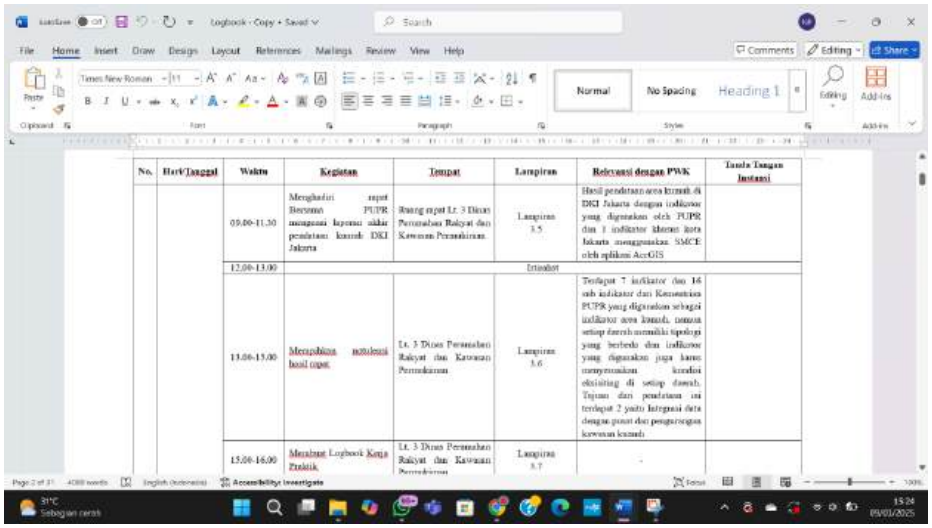

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		09.00-11.30	Menghadiri rapat Bersama PUPR mengenai laporan akhir pendataan kumuh DKI Jakarta	Ruang rapat Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	Lampiran 3.5	Hasil pendataan area kumuh di DKI Jakarta dengan indikator yang digunakan oleh PUPR dan 1 indikator khusus kota Jakarta menggunakan SMCE oleh aplikasi ArcGIS	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-15.00	Merapihkan notulensi hasil rapat	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 3.6	Terdapat 7 indikator dan 16 sub indikator dari Kementerian PUPR yang digunakan sebagai indikator area kumuh, namun setiap daerah memiliki topologi yang berbeda dan indikator yang digunakan juga harus menyesuaikan kondisi eksisting di setiap daerah. Tujuan dari pendataan ini terdapat 2 yaitu Integrasi data dengan pusat dan pengurangan kawasan kumuh	
		15.00-16.00	Merapat Logbook Kerja Praktik	Lt. 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 3.7	-	

Lampiran 2.8

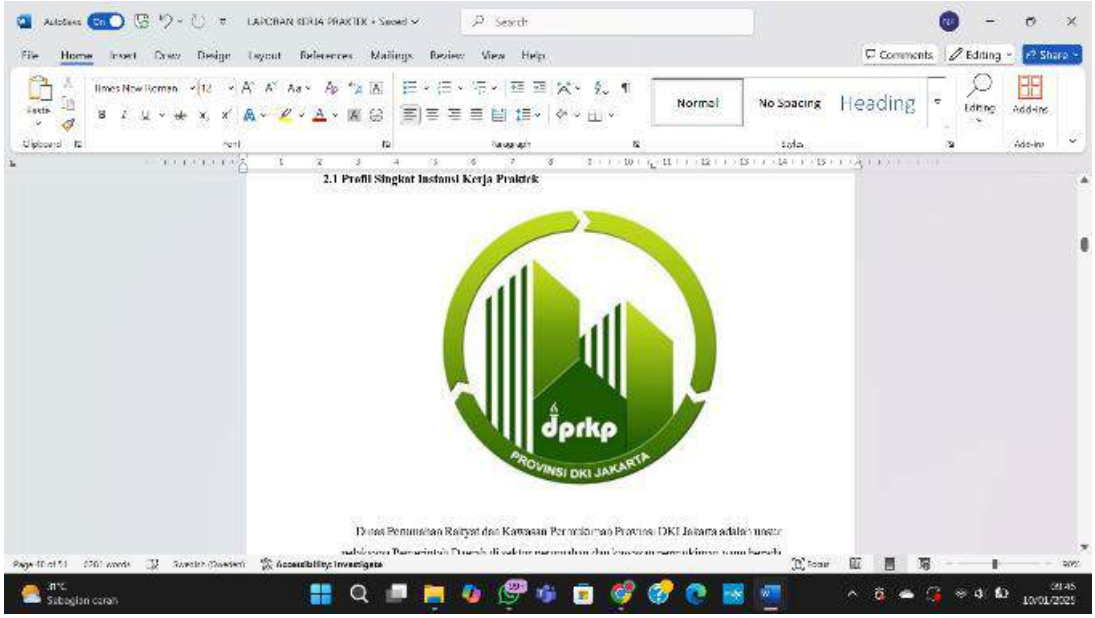
2.1 Profil Singkat Instansi Kerja Praktek
dprkp
PROVINSI DKI JAKARTA

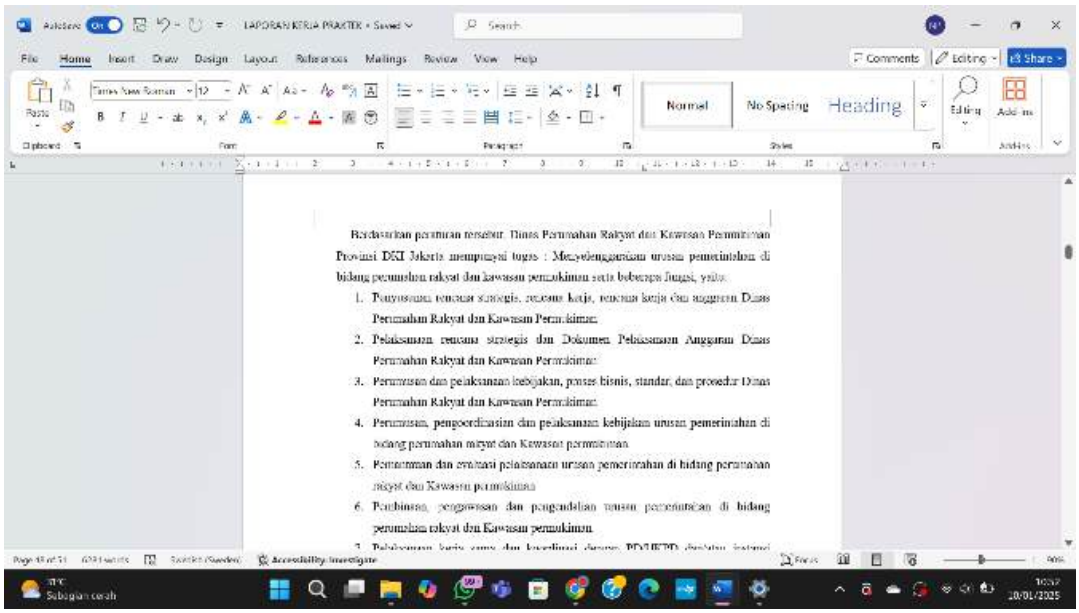
Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta beberapa fungsi, yaitu:
1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;

Lampiran 2.9

https://docs.google.com/document/d/1aiR26A5Ed-ZZod2urBqVNgIrxesf2oNmwFQwtSDqCB4/edit?usp=sharing

Lampiran 2.10

https://docs.google.com/document/d/1kZJgMYgENmlh8pwAP-wX3bYtOfmnsvPcDqRqS0dTE_g/edit?usp=sharing

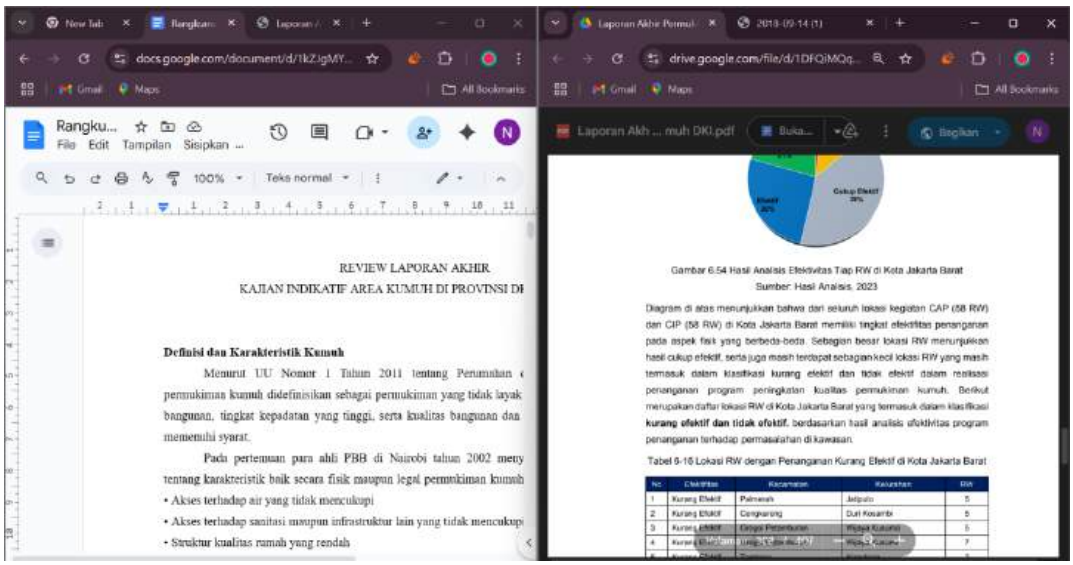

https://docs.google.com/document/d/1P1vsWQyP4m_3jHLk8h6YaJnmEM8bIF0aMF2BdCCHSsQ/edit?usp=sharing

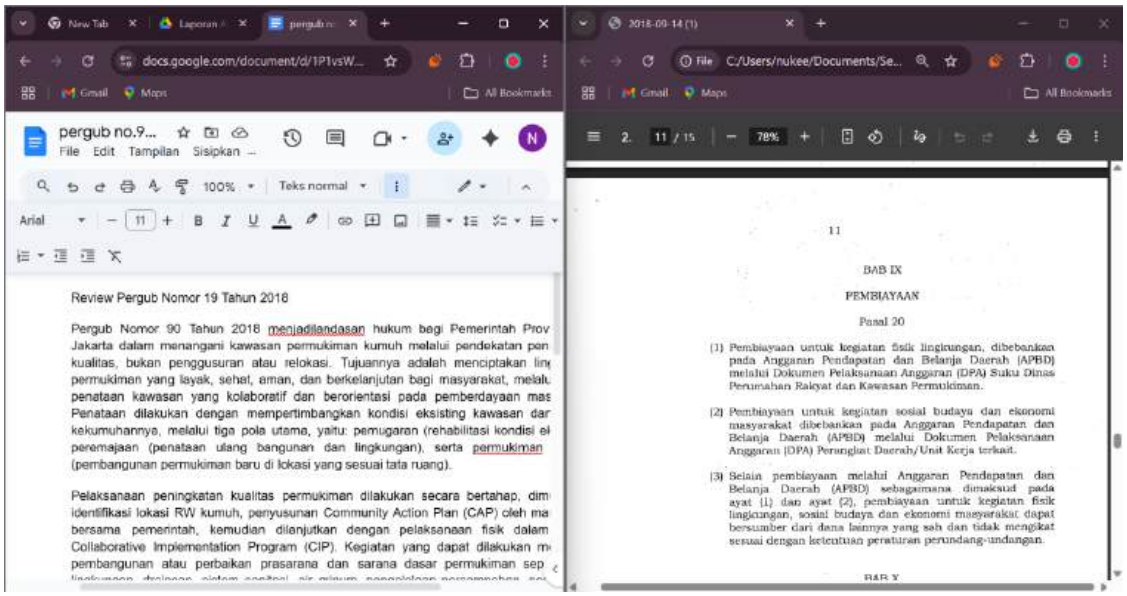

Lampiran 2.11

https://docs.google.com/document/d/1AcebIMQinhcr77n5-VmWQRAXlerKu5s-Ub78RF9QNK0/edit?usp=sharing

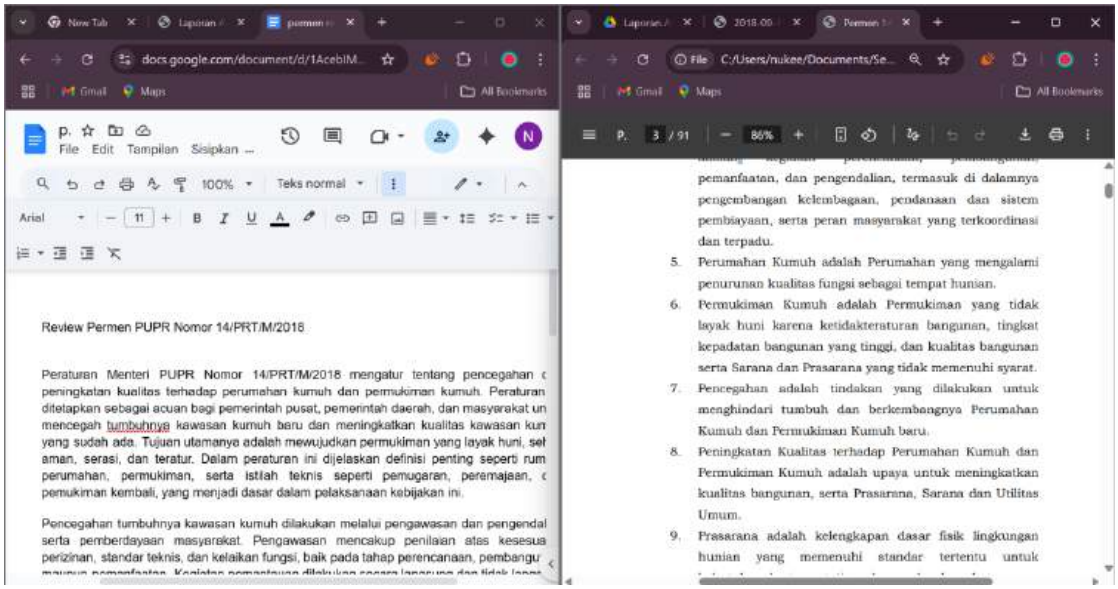

Lampiran 2.12

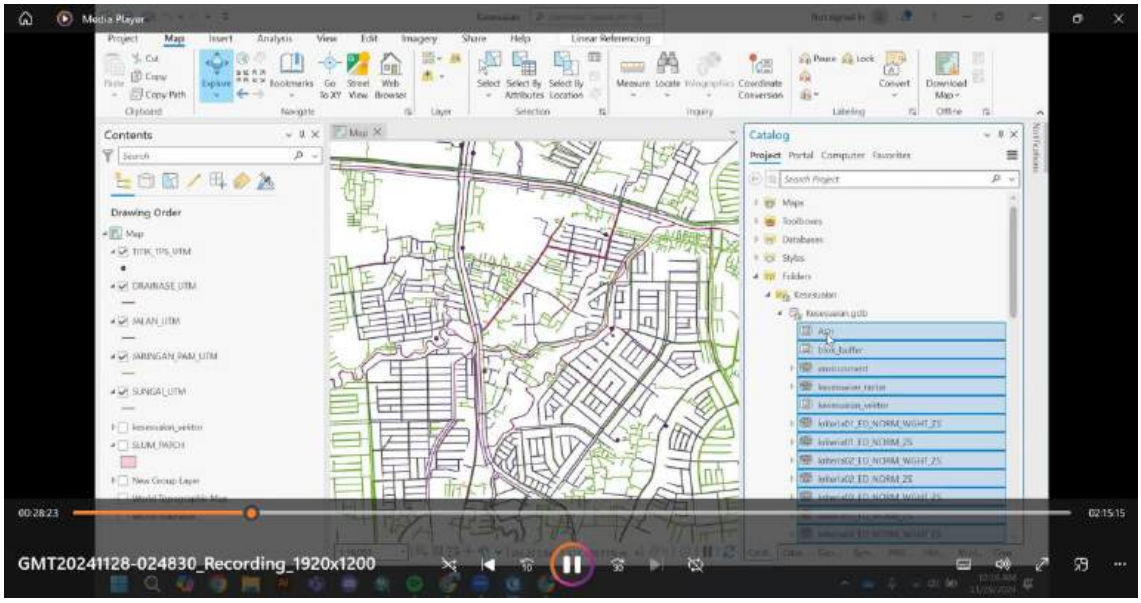

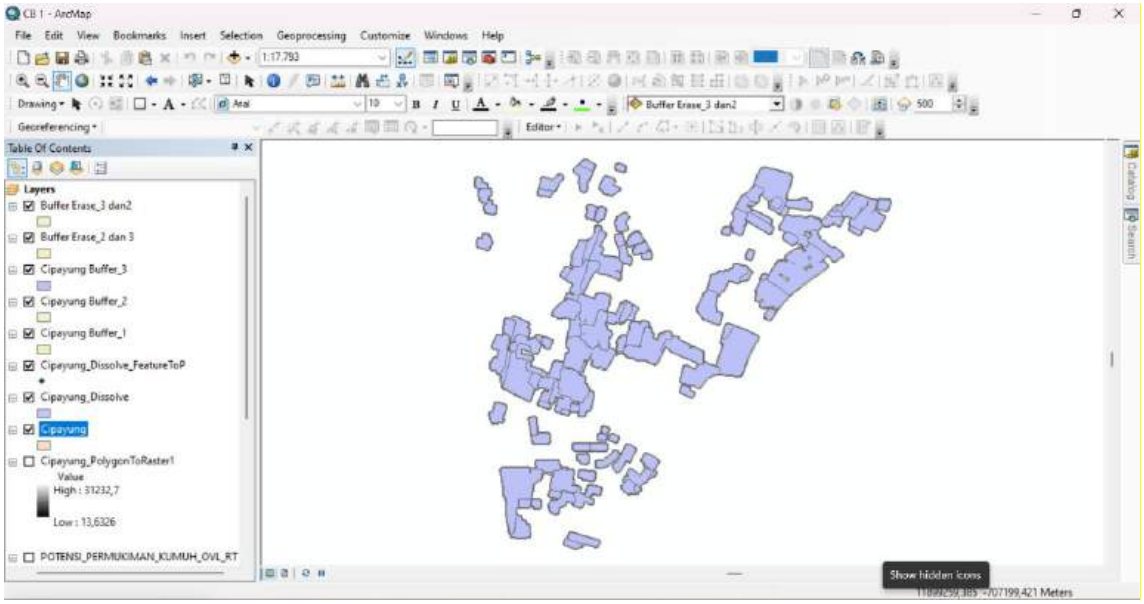

Lampiran 2.13

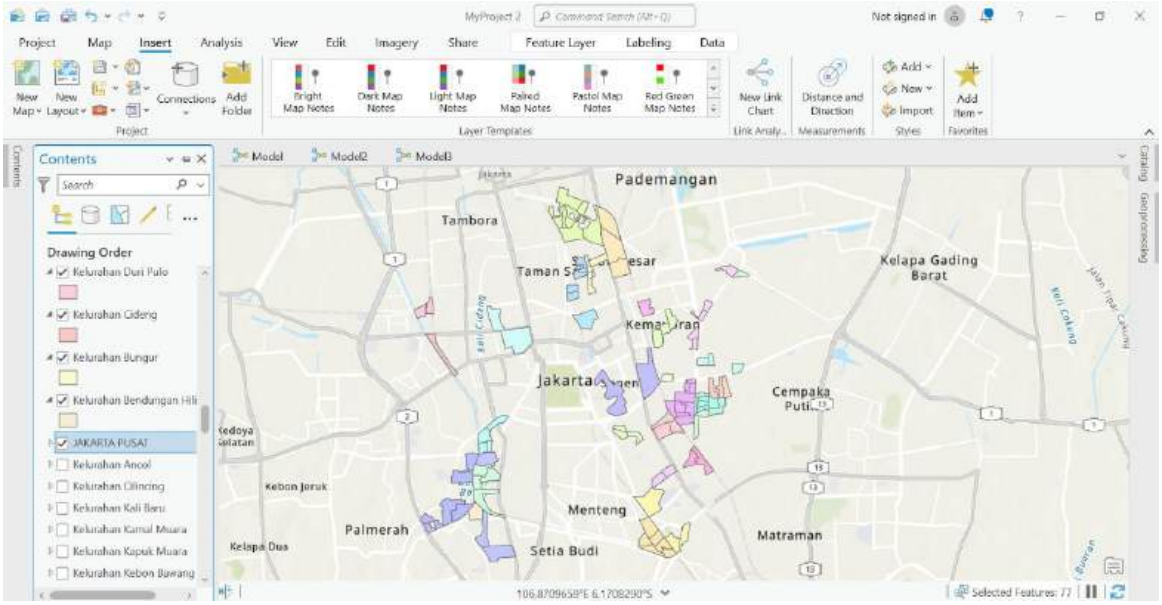

Lampiran 2.14

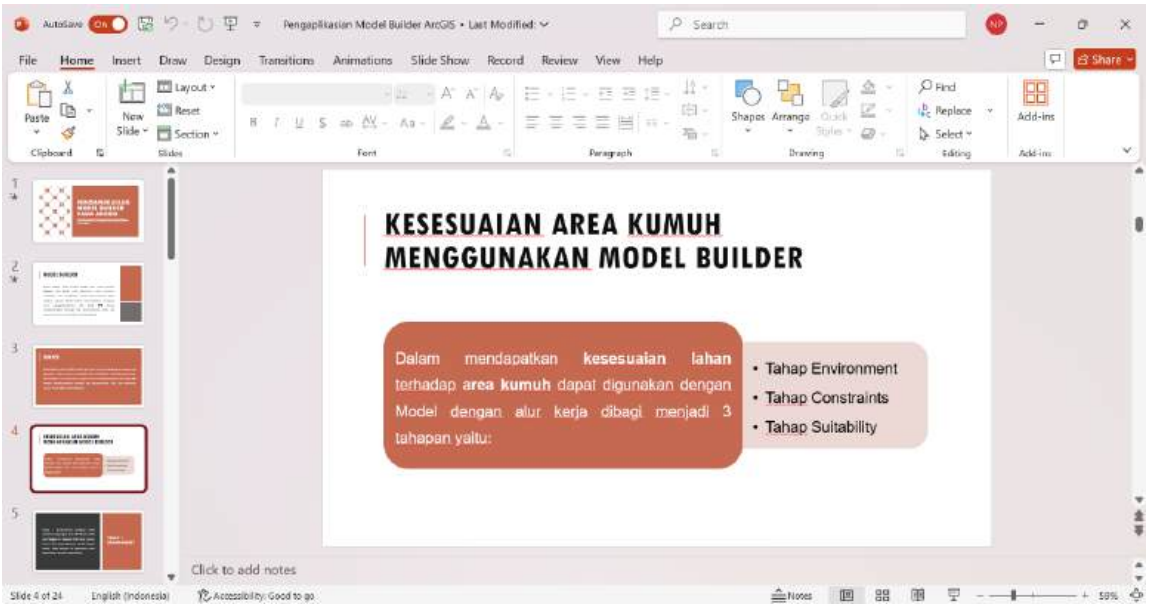

Lampiran 2.15

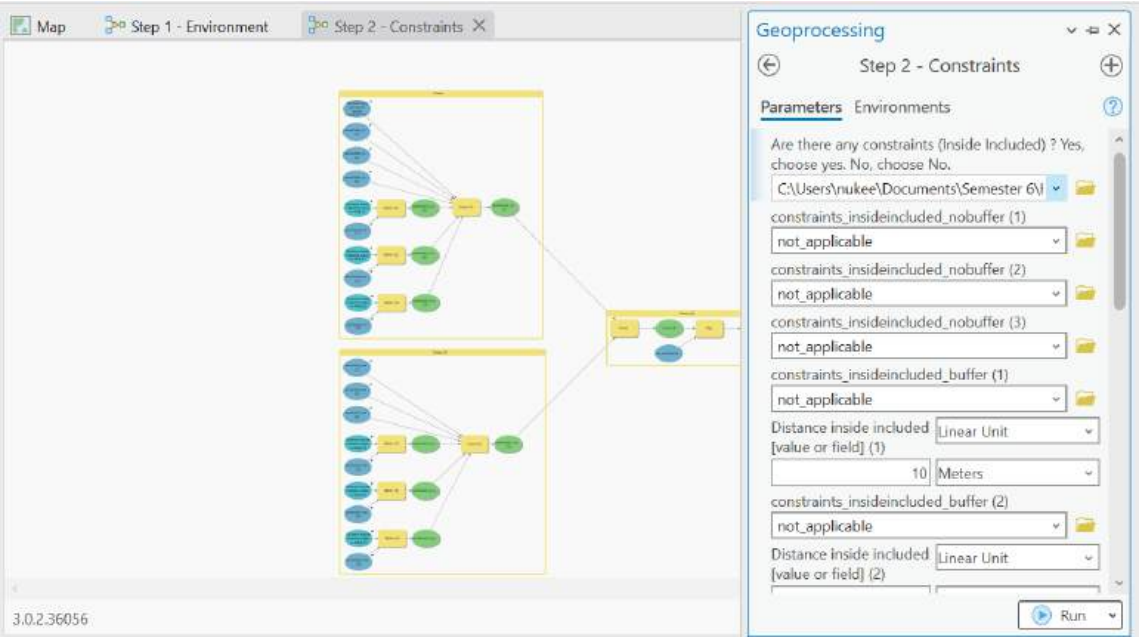

Lampiran 2.16

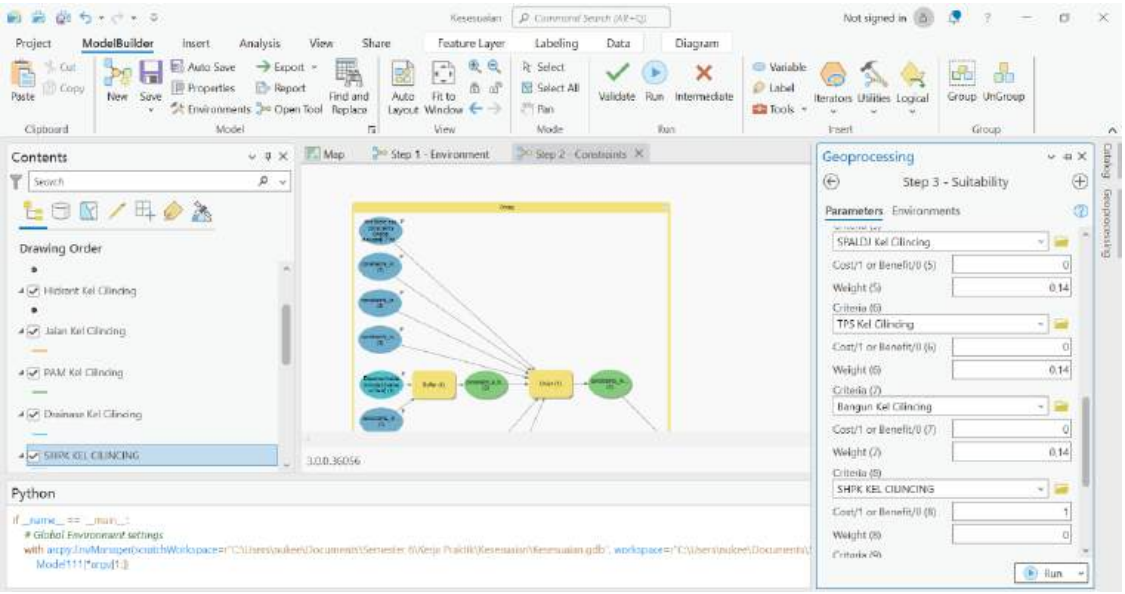

Lampiran 2.17

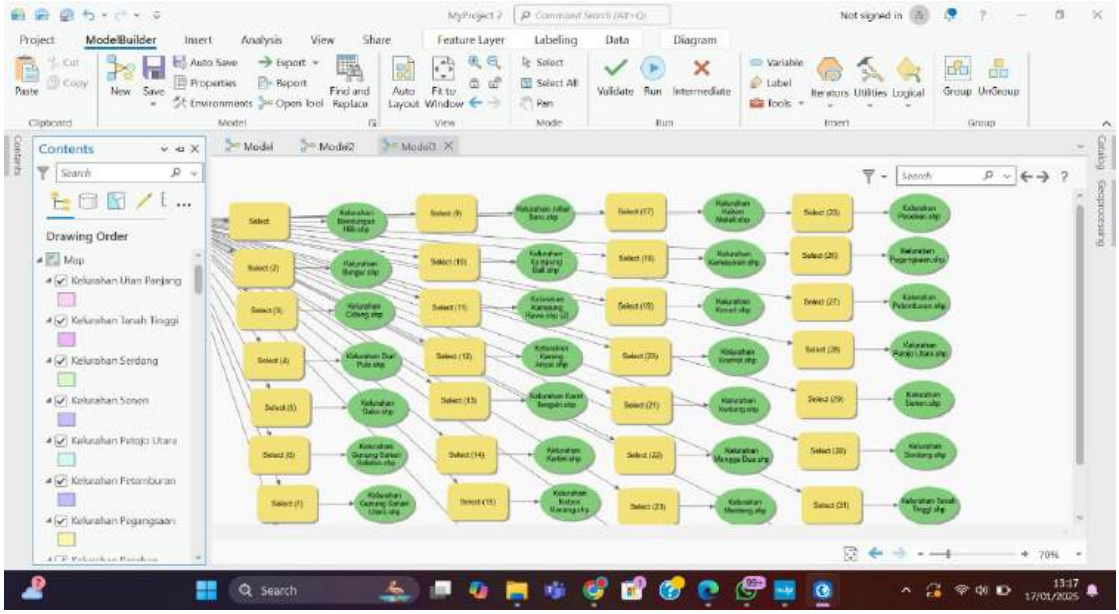

Lampiran 2.18

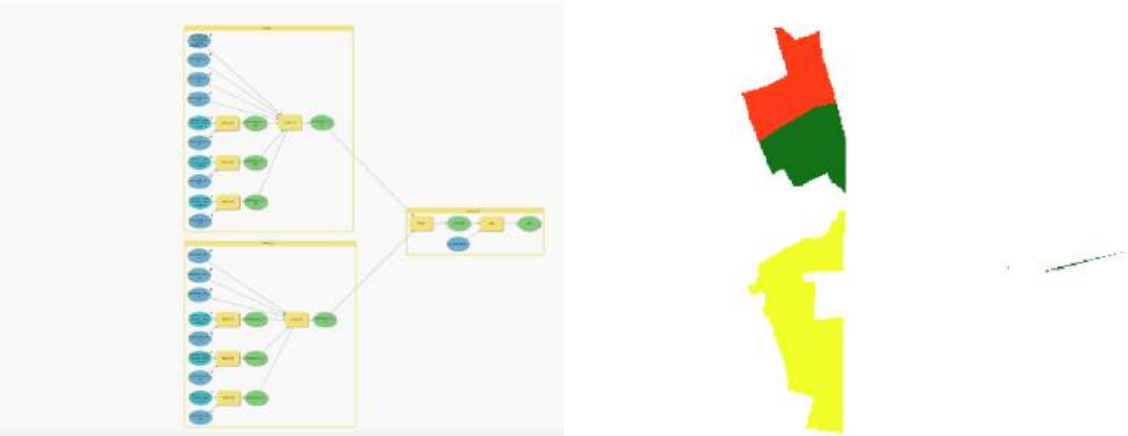

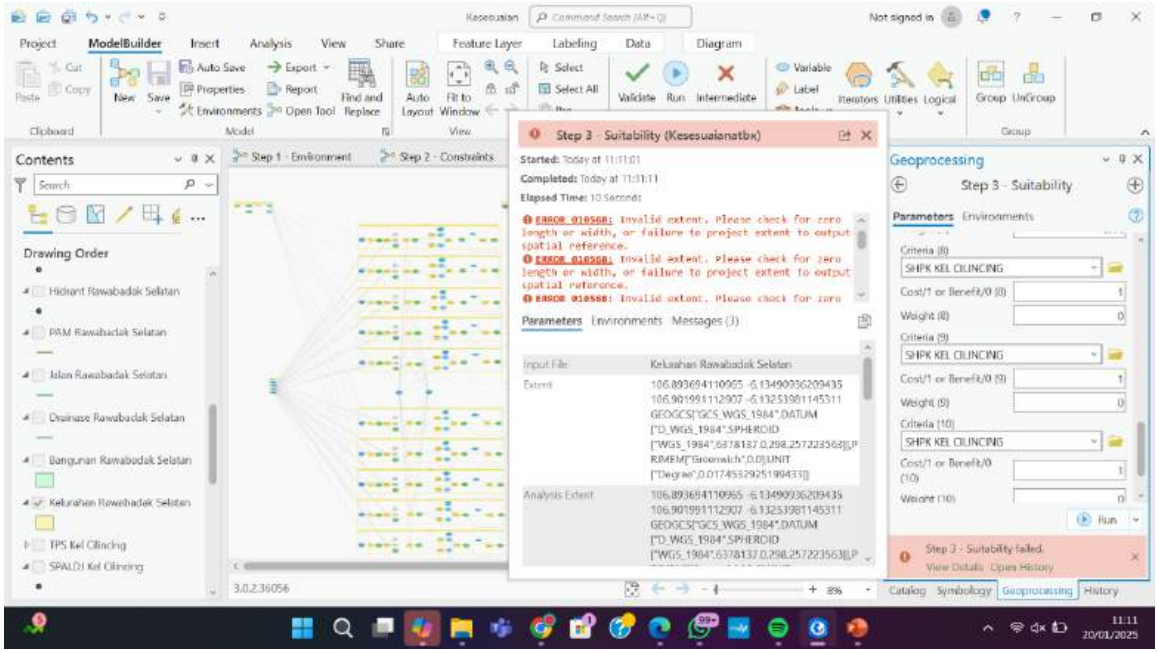

Lampiran 2.19

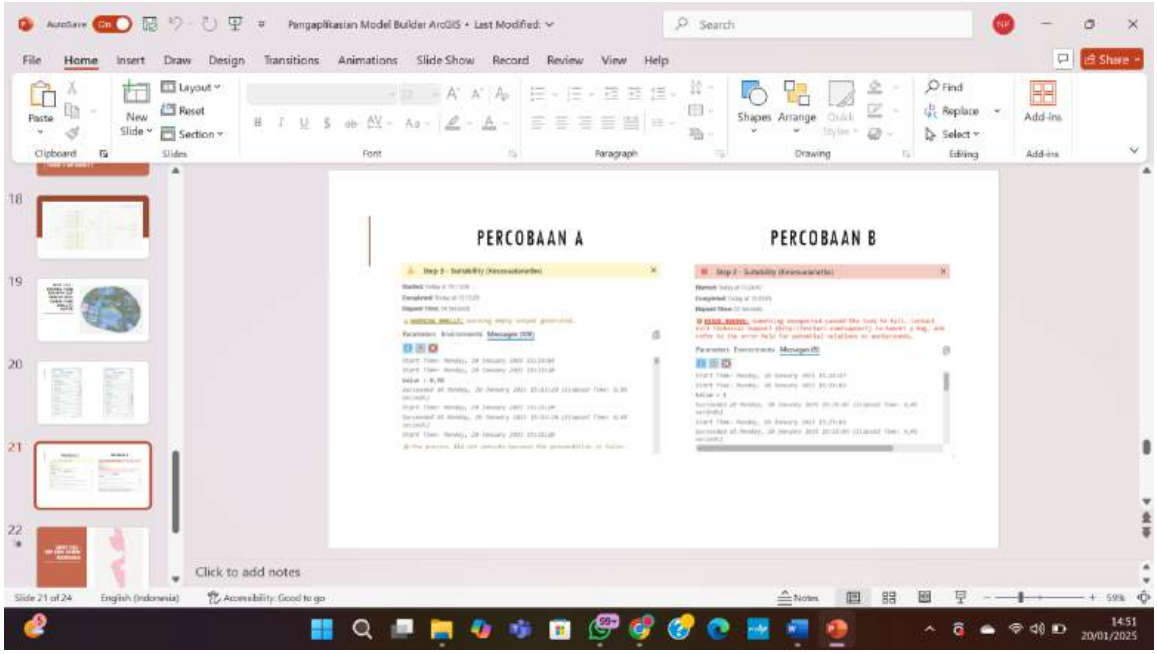

Lampiran 2.20

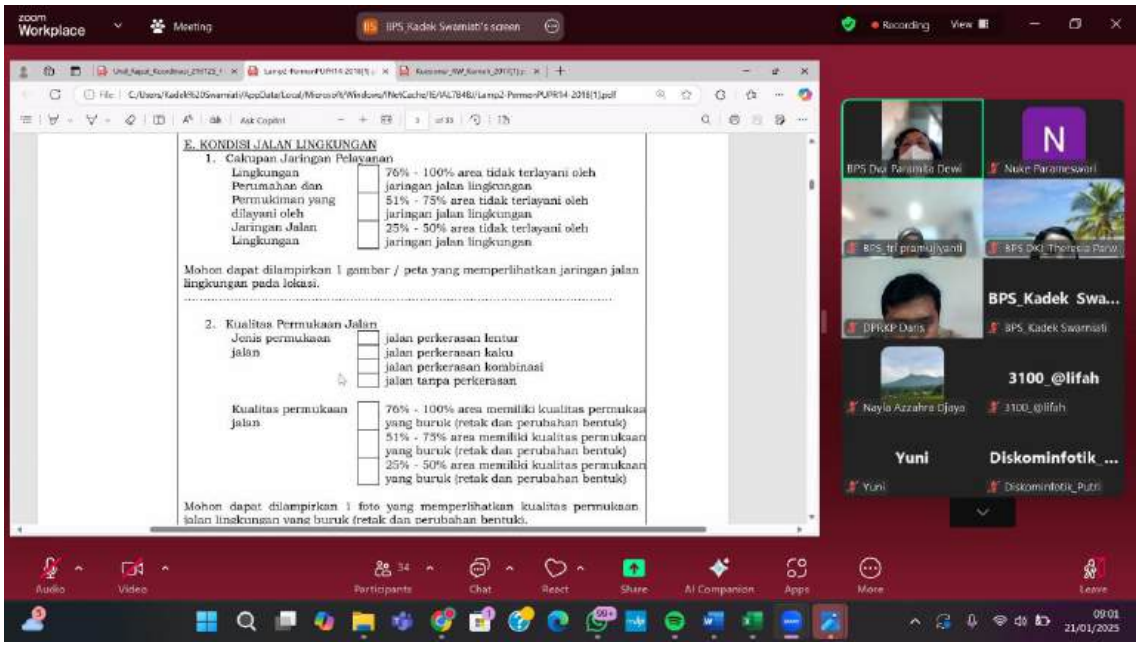

Lampiran 2.21

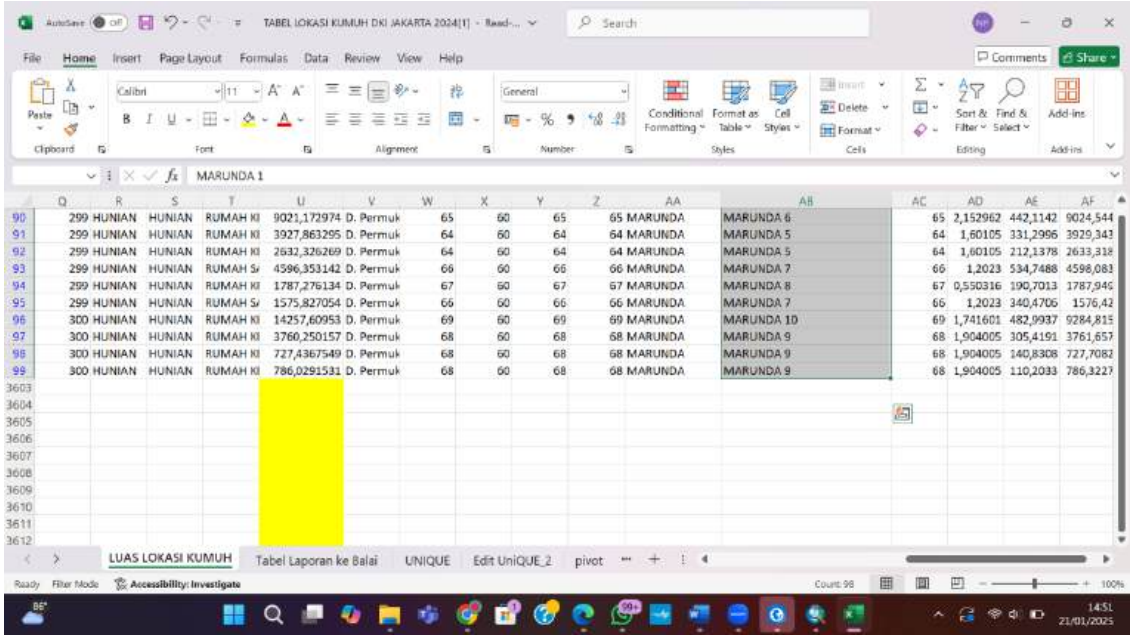

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
90	299	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	9021,172974	D. Permuk	65	60	65	65	MARUNDA	MARUNDA 6	65	2,152962	442,1142	9024,544
91	299	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	3927,863295	D. Permuk	64	60	64	64	MARUNDA	MARUNDA 5	64	1,60105	331,2966	3929,343
92	299	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	2632,326269	D. Permuk	64	60	64	64	MARUNDA	MARUNDA 5	64	1,60105	212,1378	2633,318
93	299	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH Sı	4596,353142	D. Permuk	66	60	66	66	MARUNDA	MARUNDA 7	66	1,2023	534,7488	4598,083
94	299	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	1787,276134	D. Permuk	67	60	67	67	MARUNDA	MARUNDA 8	67	0,550316	190,7013	1787,946
95	299	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH Sı	1575,827054	D. Permuk	66	60	66	66	MARUNDA	MARUNDA 7	66	1,2023	340,4706	1576,42
96	300	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	14257,60953	D. Permuk	69	60	69	69	MARUNDA	MARUNDA 10	69	1,741601	482,9937	9284,815
97	300	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	3760,250157	D. Permuk	68	60	68	68	MARUNDA	MARUNDA 9	68	1,904005	305,4191	3761,657
98	300	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	727,4367549	D. Permuk	68	60	68	68	MARUNDA	MARUNDA 9	68	1,904005	140,8308	727,7082
99	300	HUNIAN	HUNIAN	RUMAH KI	786,0291531	D. Permuk	68	60	68	68	MARUNDA	MARUNDA 9	68	1,904005	110,2033	786,3227

Lampiran 2.22

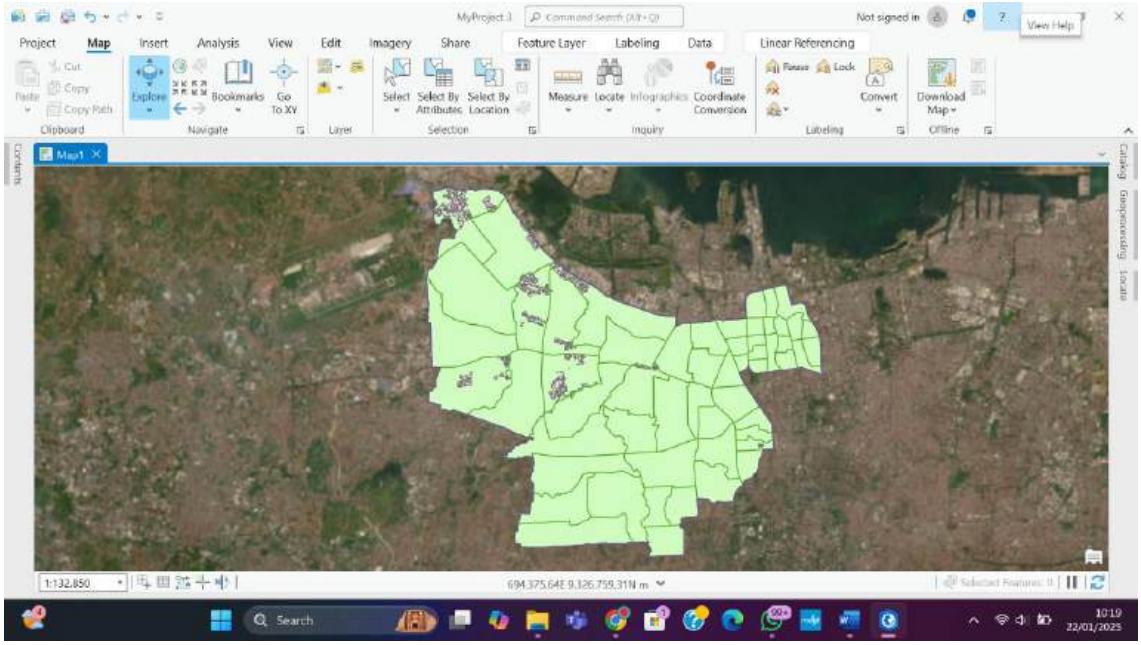

Lampiran 2.23

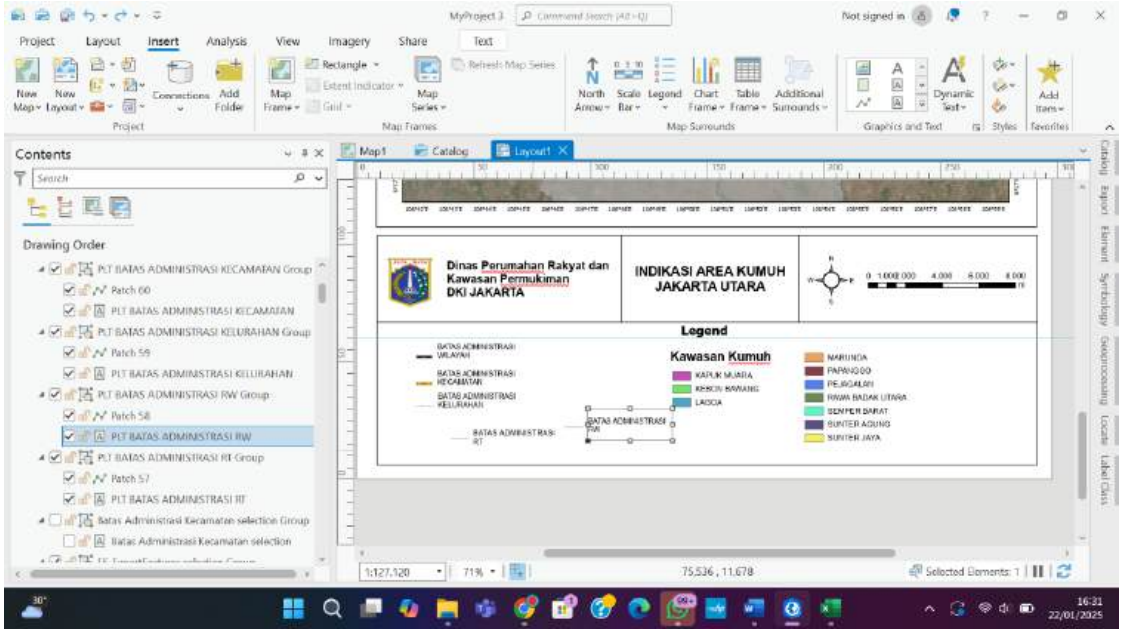

Lampiran 2.24

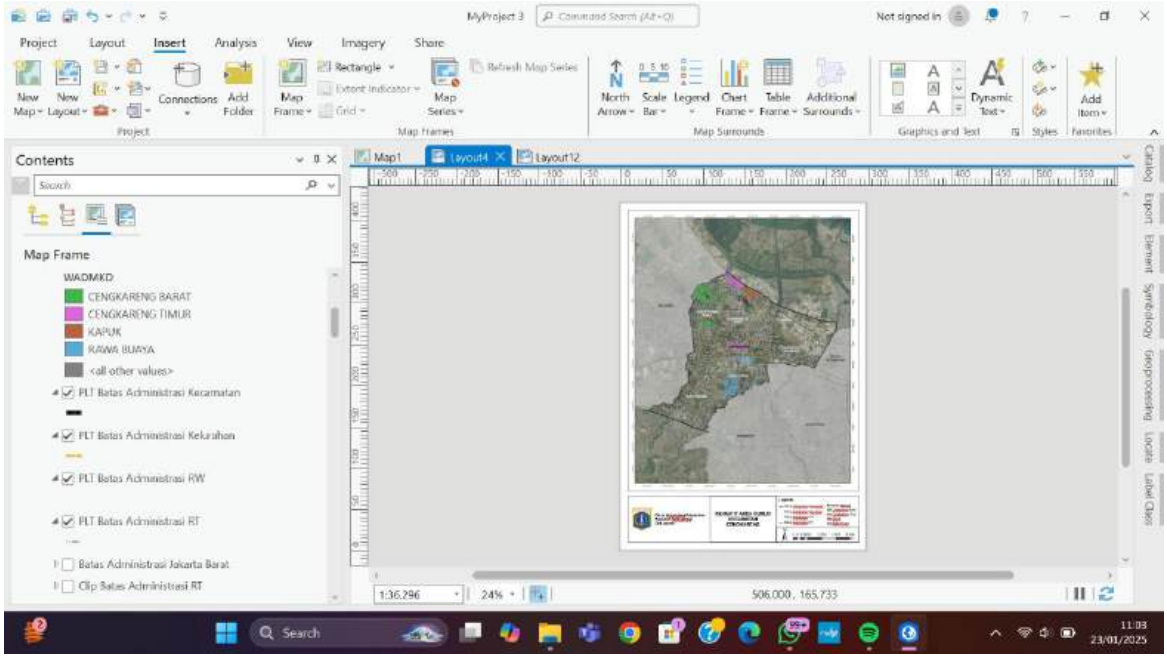

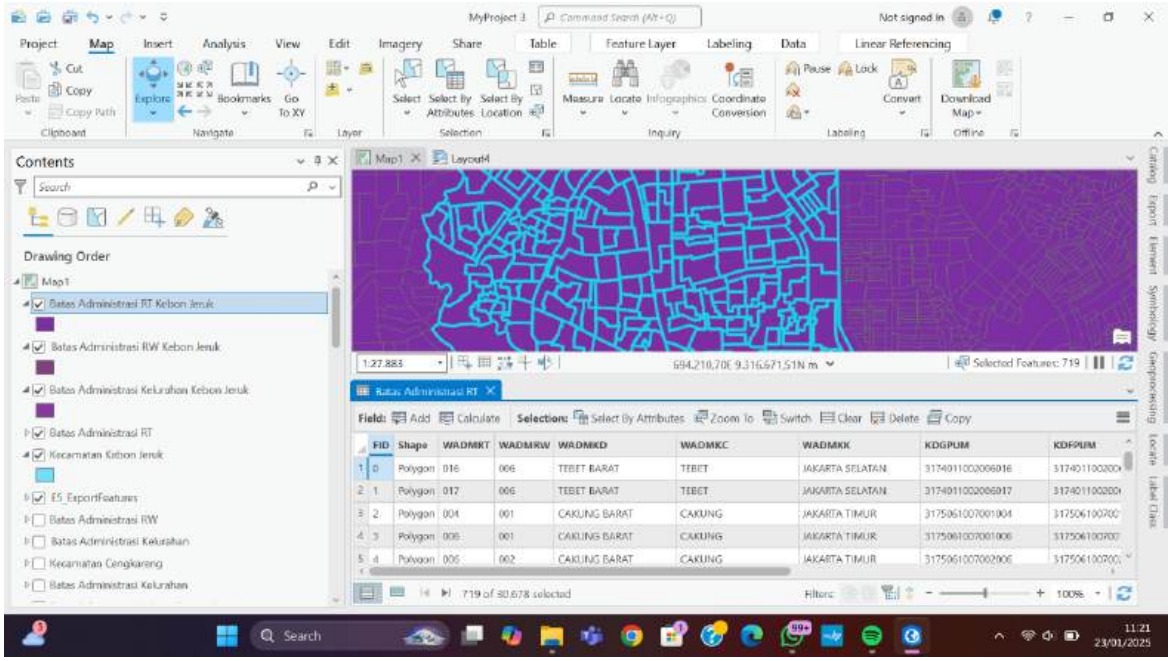

Lampiran 2.25

Lampiran 2.26

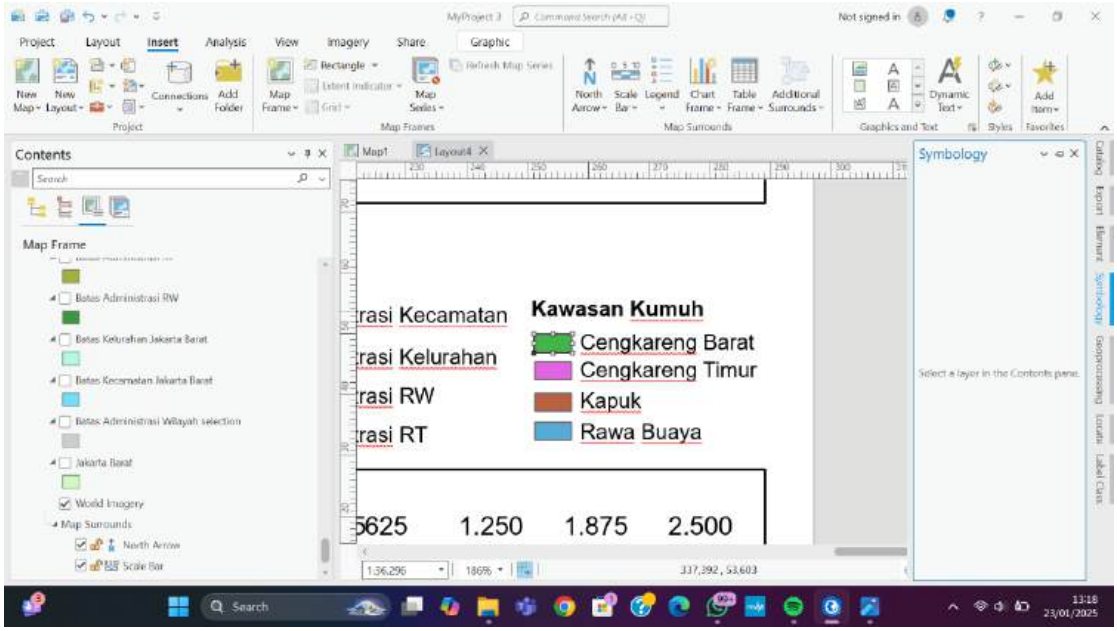

Lampiran 2.27

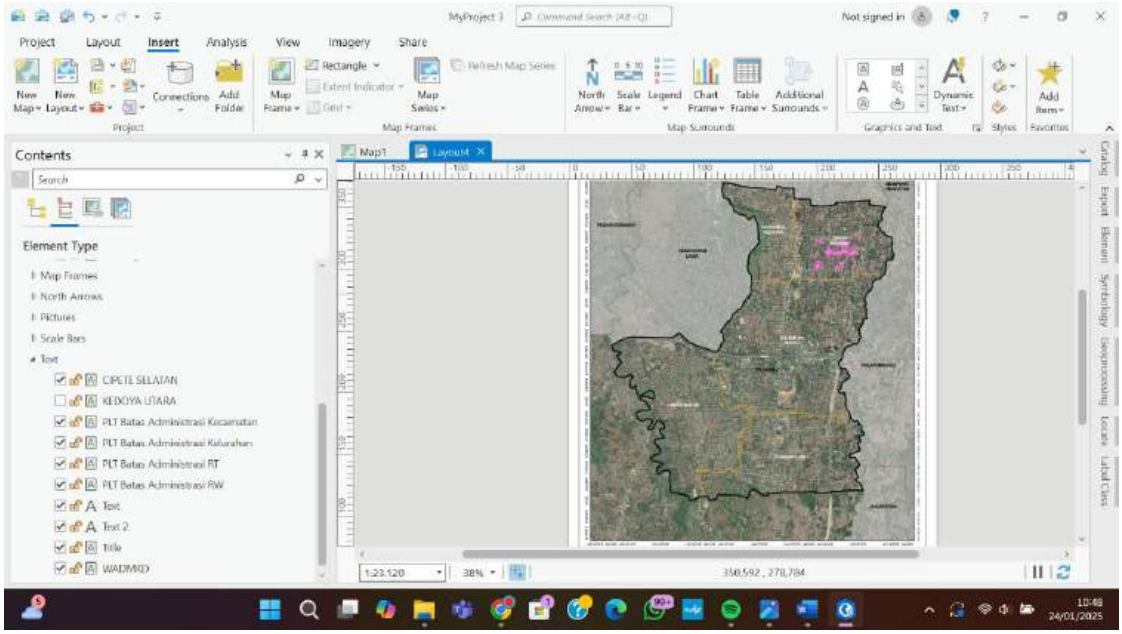

Lampiran 2.28

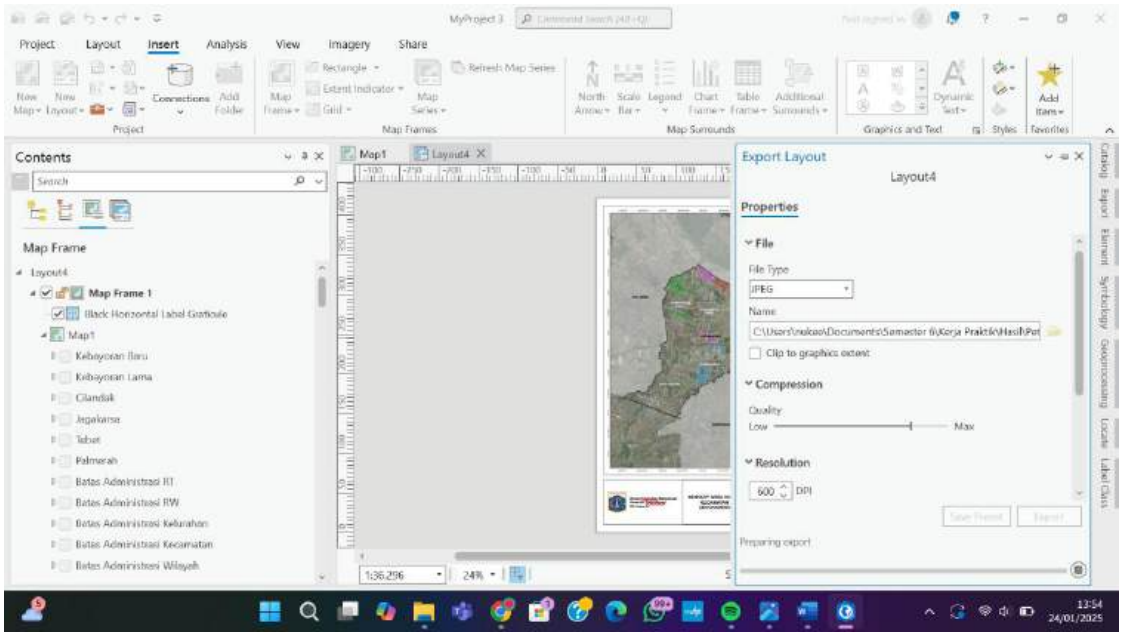

Lampiran 2.29

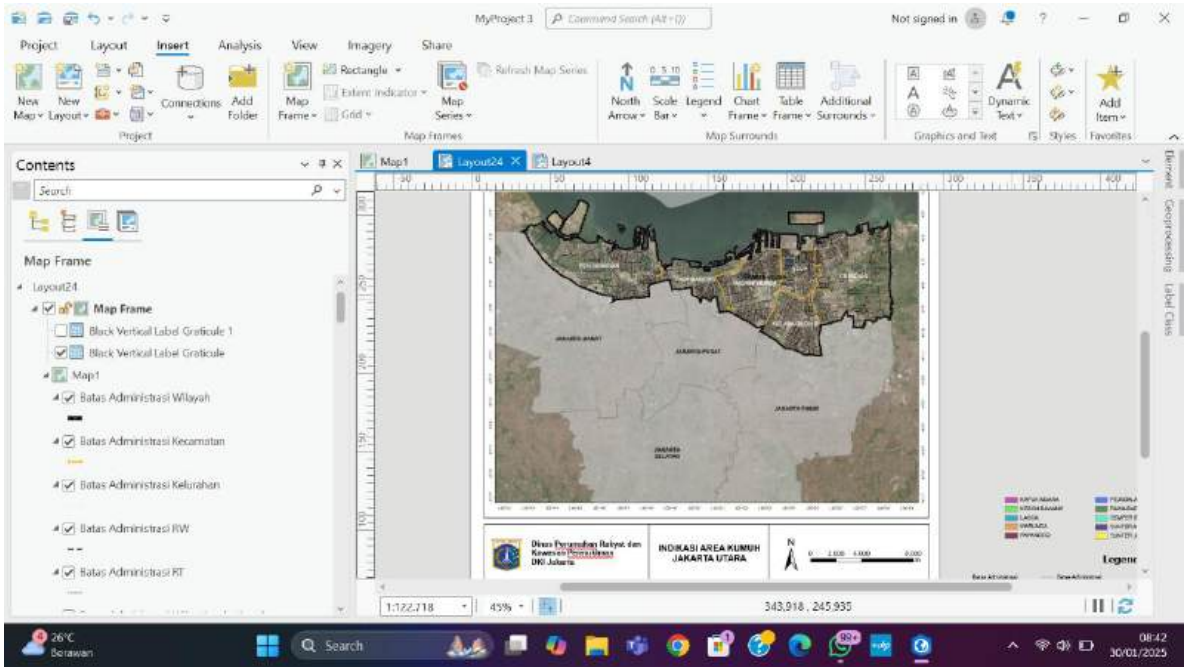

Lampiran 2.30

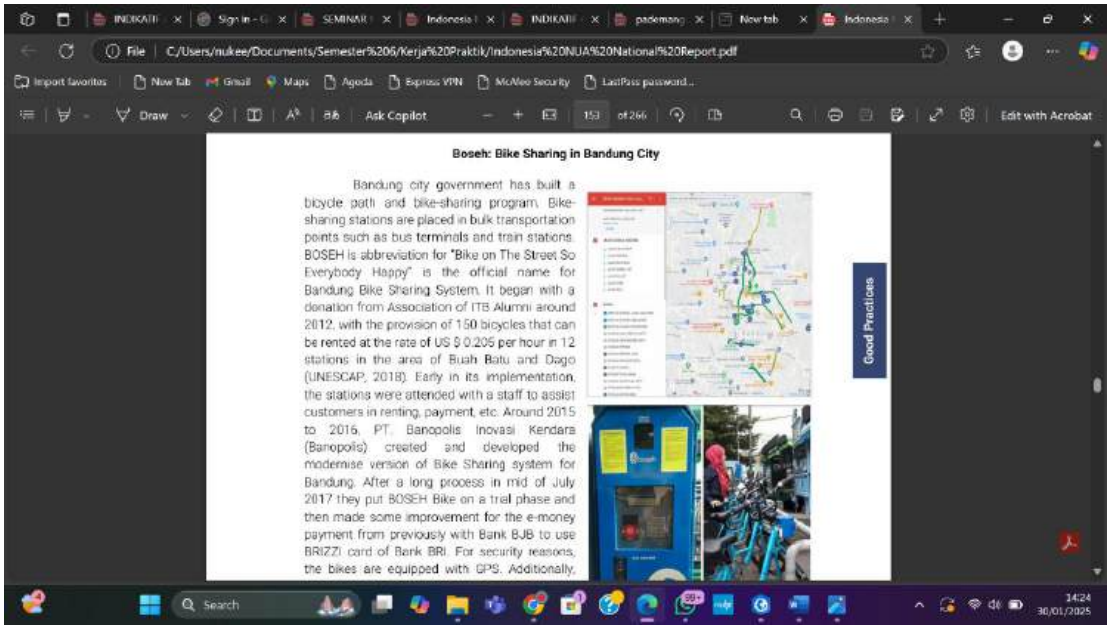

Boseh: Bike Sharing in Bandung City

Bandung city government has built a bicycle path and bike-sharing program. Bike-sharing stations are placed in bulk transportation points such as bus terminals and train stations. BOSEH is abbreviation for "Bike on The Street So Everybody Happy" is the official name for Bandung Bike Sharing System. It began with a donation from Association of ITB Alumni around 2012, with the provision of 150 bicycles that can be rented at the rate of US $ 0.205 per hour in 12 stations in the area of Buah Batu and Dago (UNESCAP, 2018). Early in its implementation, the stations were attended with a staff to assist customers in renting, payment, etc. Around 2015 to 2016, PT. Banopolis Inovasi Kendara (Banopolis) created and developed the modernise version of Bike Sharing system for Bandung. After a long process in mid of July 2017 they put BOSEH Bike on a trial phase and then made some improvement for the e-money payment from previously with Bank BJB to use BRIZZI card of Bank BRI. For security reasons, the bikes are equipped with GPS. Additionally,

Good Practices

Lampiran 2.31

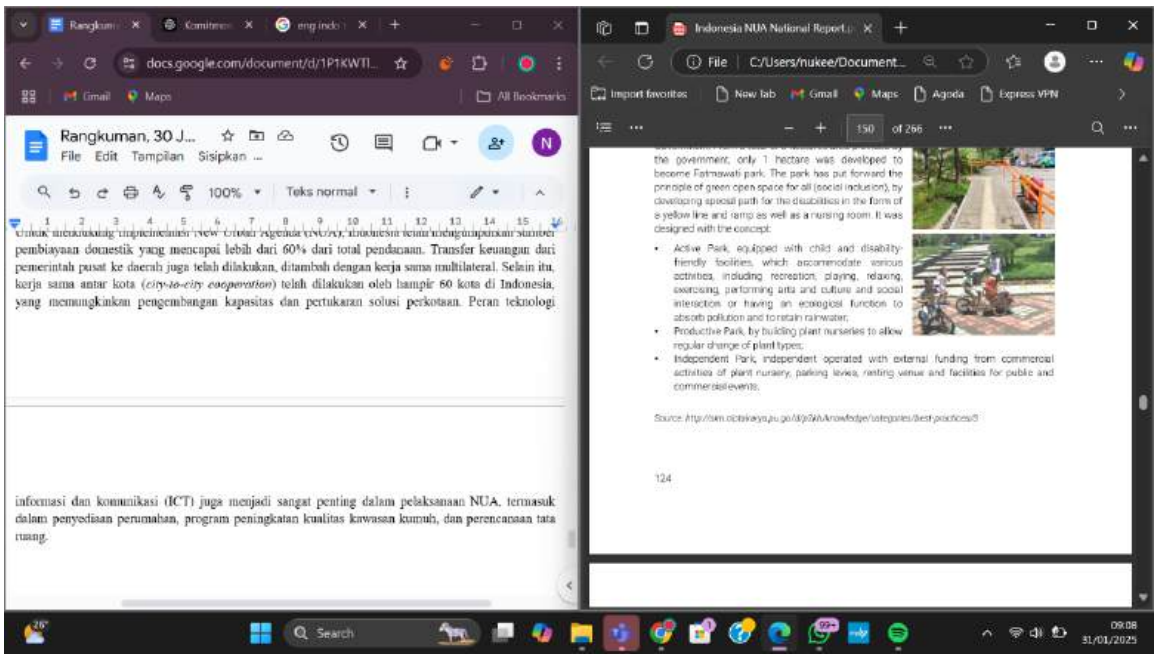

pembiayaan domestik yang mencapai lebih dari 60% dari total pendanaan. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah juga telah dilakukan, ditambah dengan kerja sama multilateral. Selain itu, kerja sama antar kota (*city-to-city cooperation*) telah dilakukan oleh hampir 60 kota di Indonesia, yang memungkinkan pengembangan kapasitas dan pertukaran solusi perkotaan. Peran teknologi

informasi dan komunikasi (ICT) juga menjadi sangat penting dalam pelaksanaan NUA, termasuk dalam penyediaan perumahan, program peningkatan kualitas kawasan kumuh, dan perencanaan tata ruang.

the government, only 1 hectare was developed to become Fatmawati park. The park has put forward the principle of green open space for all (social inclusion), by developing special path for the disabilities in the form of a yellow line and ramp as well as a nursing room. It was designed with the concept:

- Active Park, equipped with child and disability-friendly facilities, which accommodate various activities, including recreation, playing, relaxing, exercising, performing arts and culture and social interaction or having an ecological function to absorb pollution and to retain rainwater;
- Productive Park, by building plant nurseries to allow regular change of plant types;
- Independent Park, independent operated with external funding from commercial activities of plant nursery, parking levies, resting venue and facilities for public and commercial events.

124

Lampiran 2.32

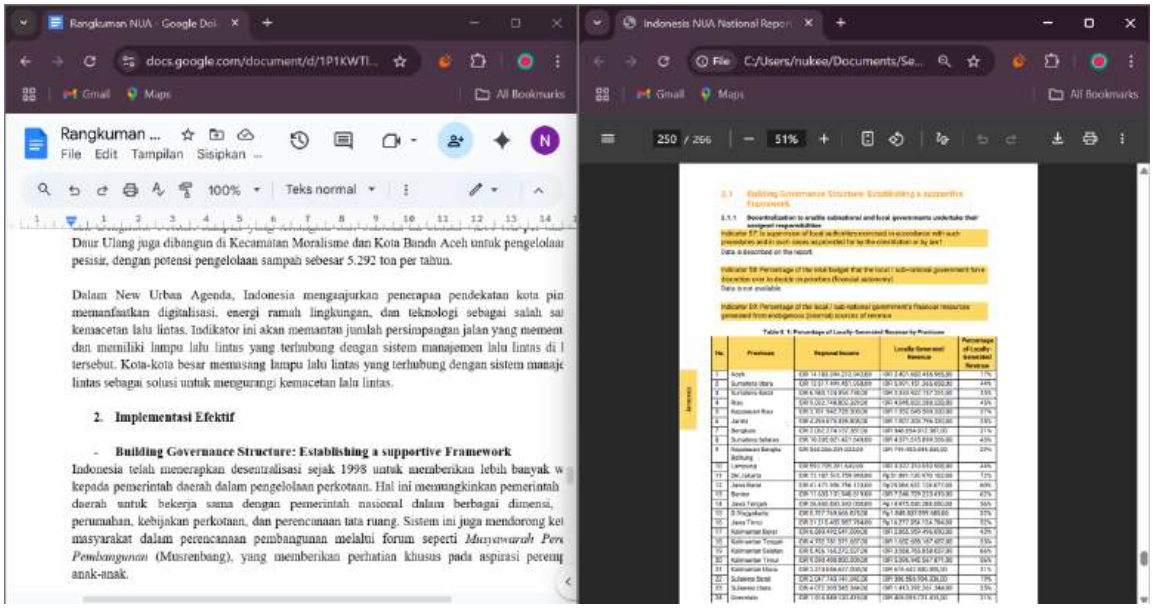

Lampiran 2.33

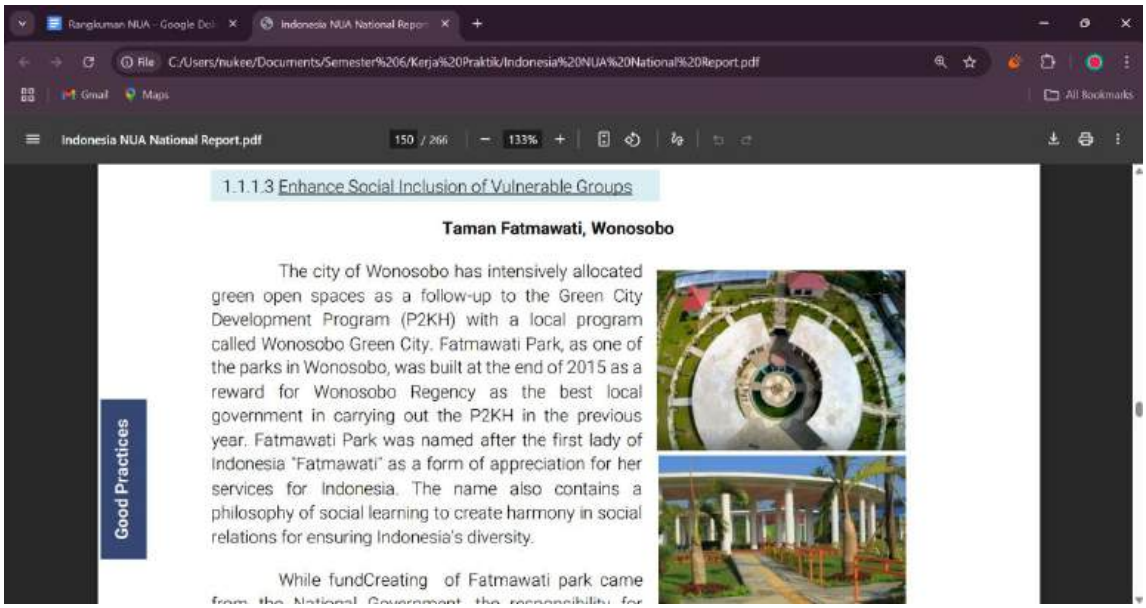

Lampiran 2.34

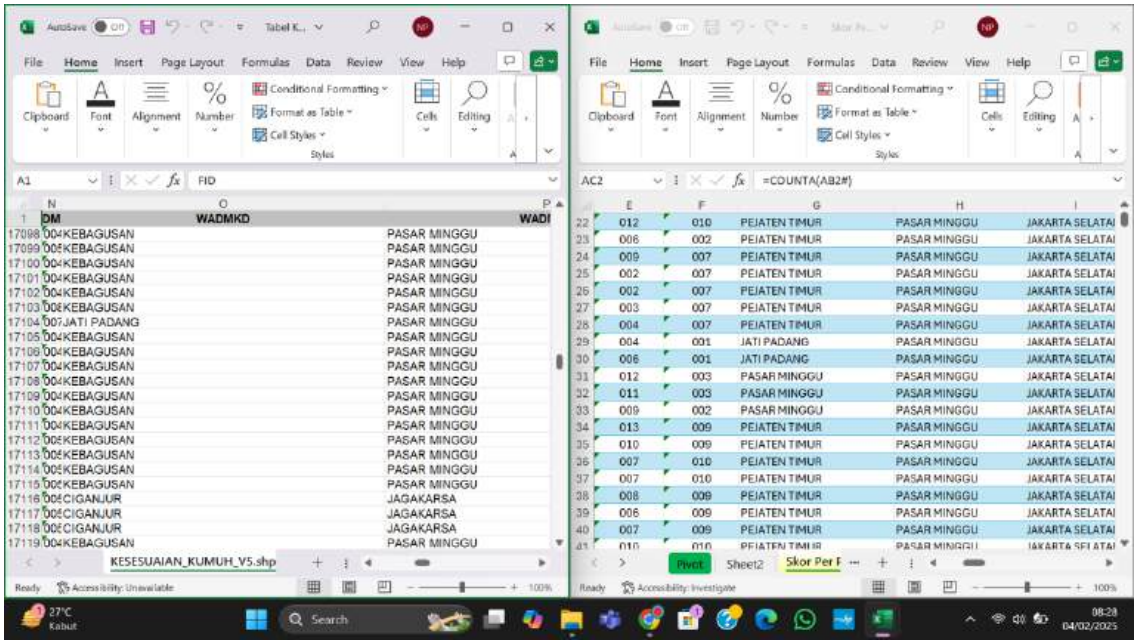

Lampiran 2.35

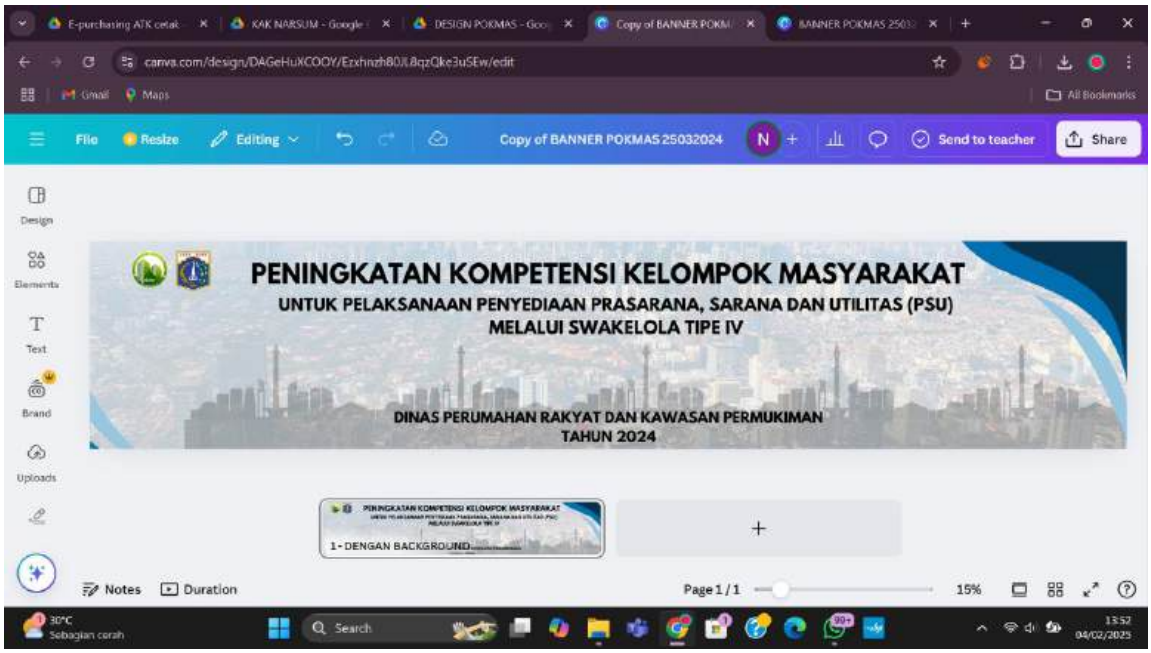

Lampiran 2.36

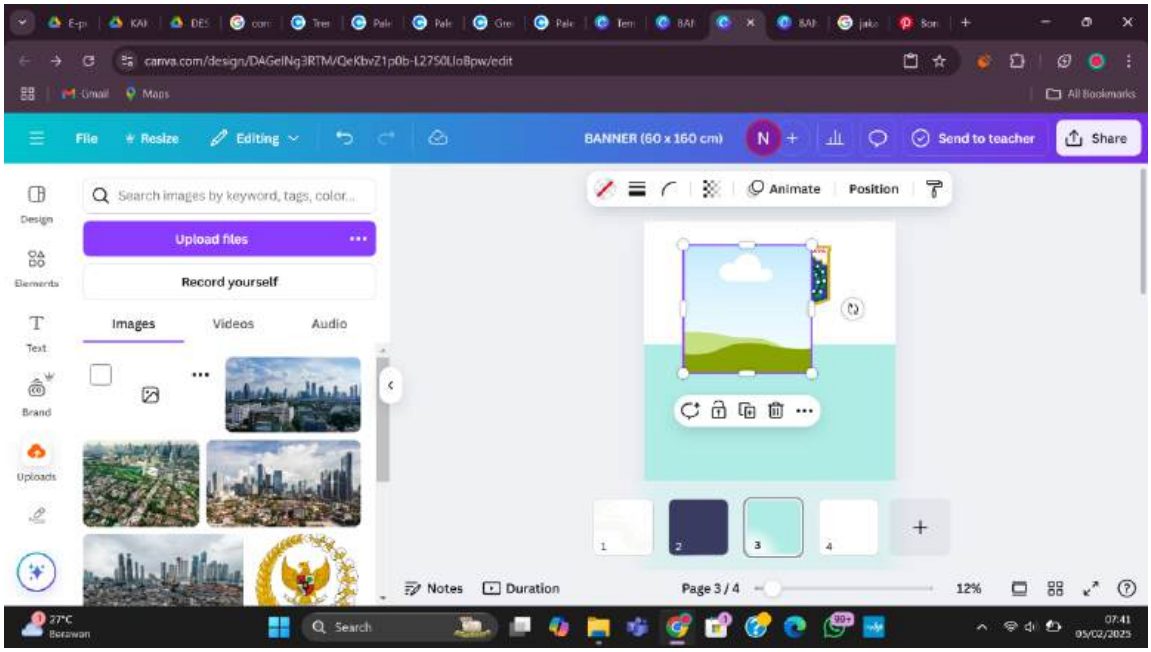

Lampiran 2.37

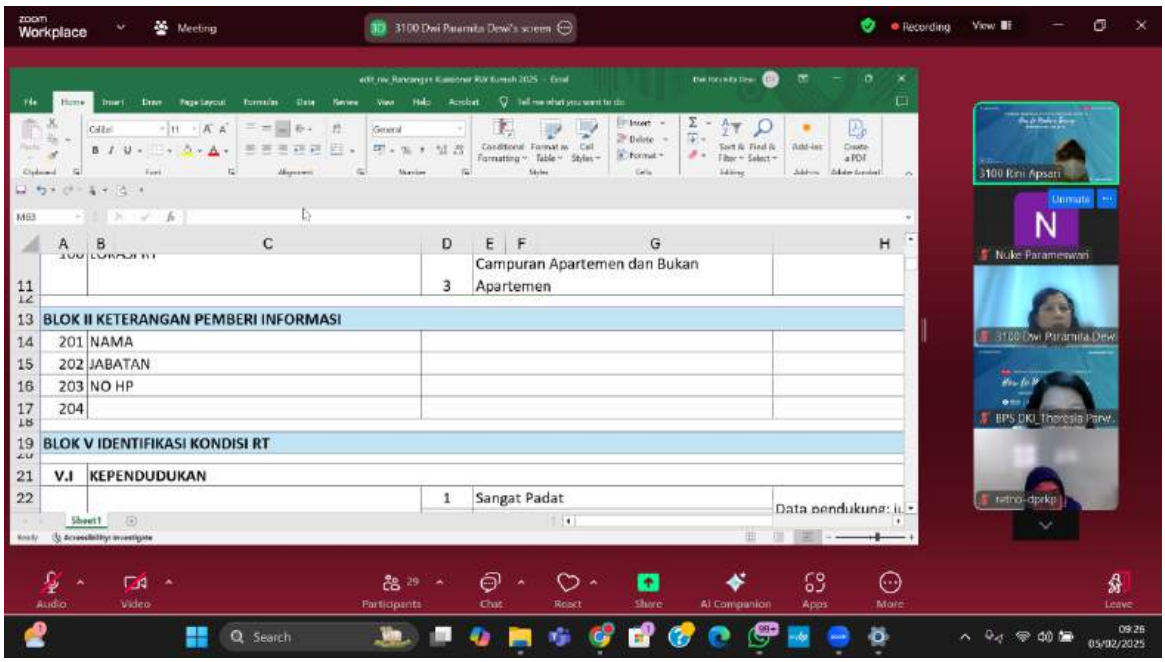

Lampiran 2.38

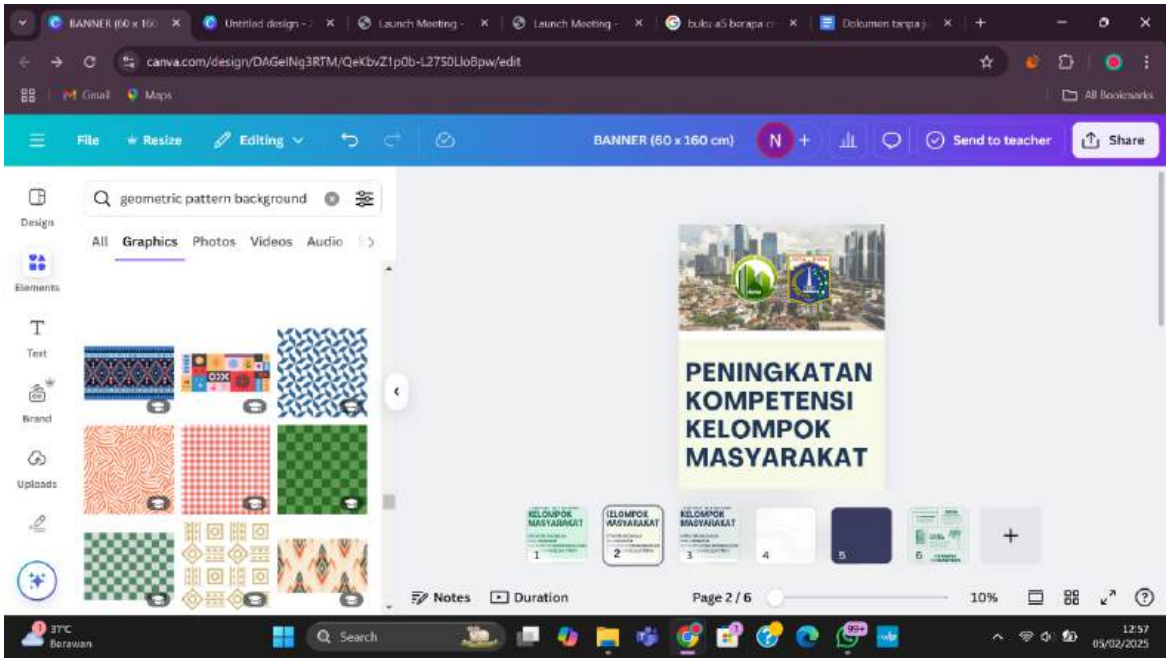

Lampiran 2.39

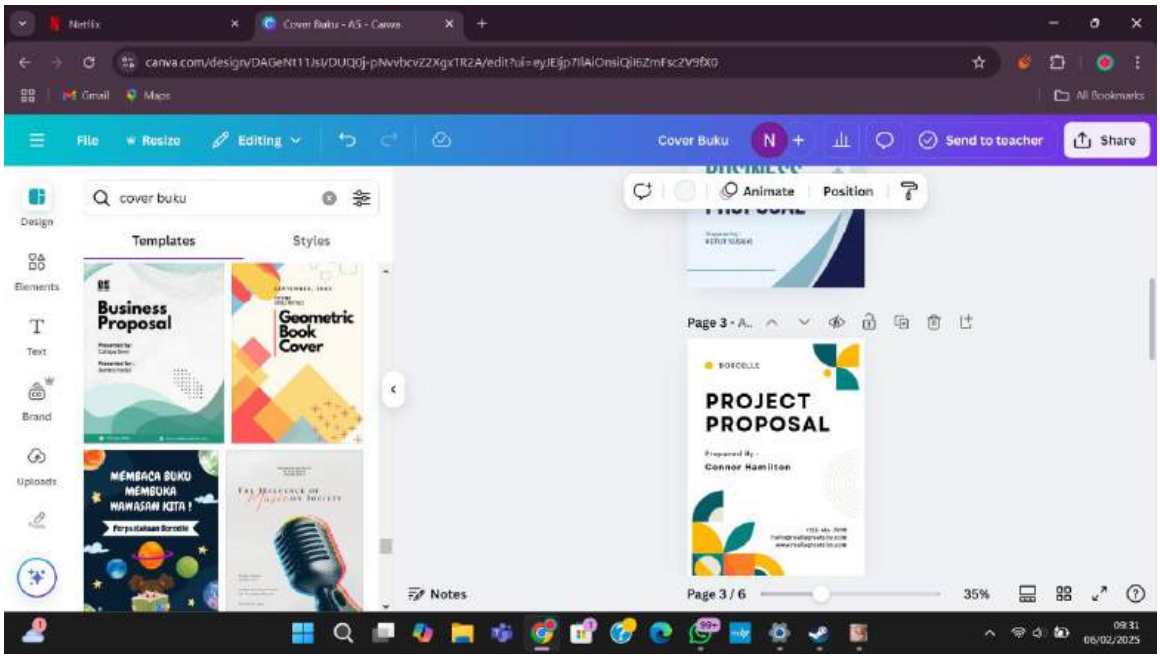

Lampiran 2.40

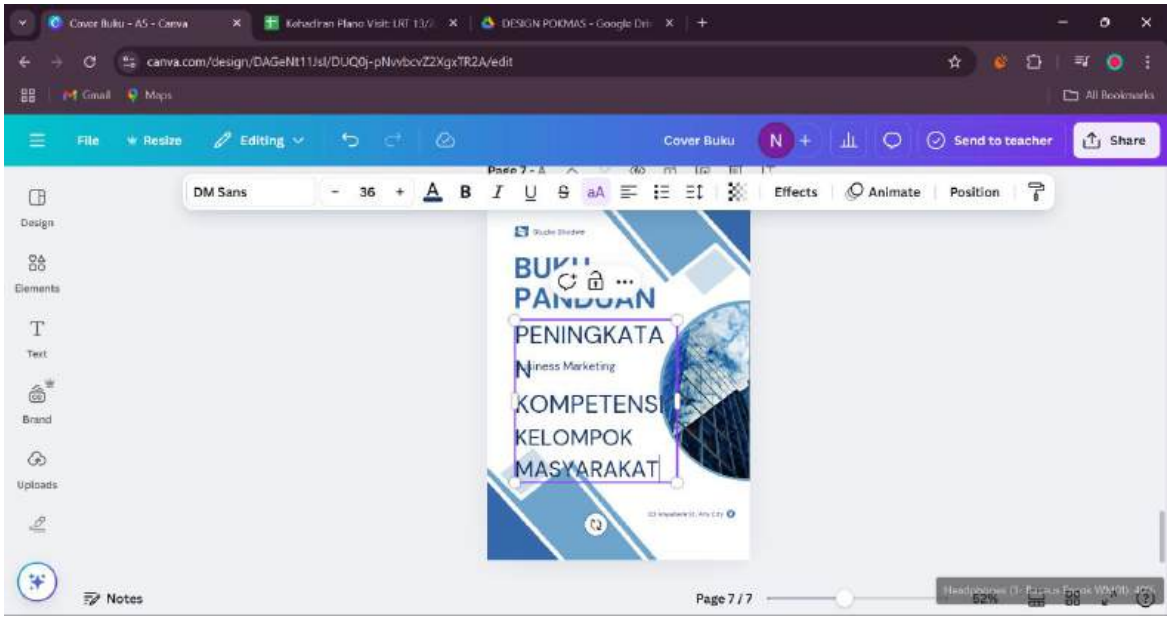

Lampiran 2.41

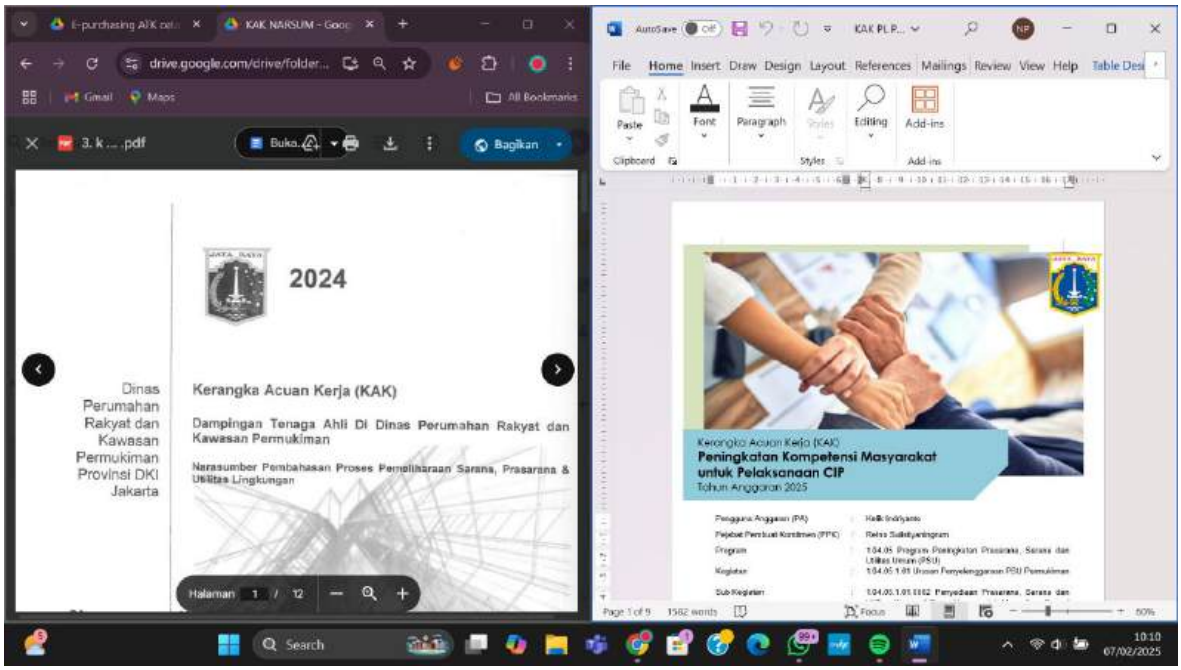

Lampiran 2.42

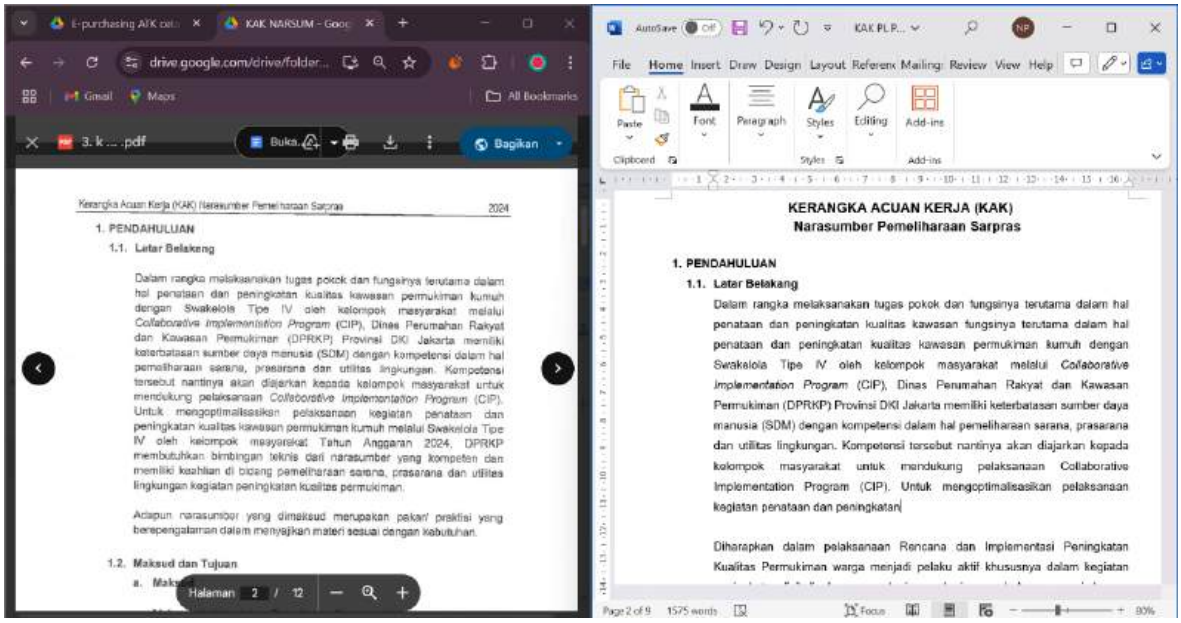

Lampiran 2.43

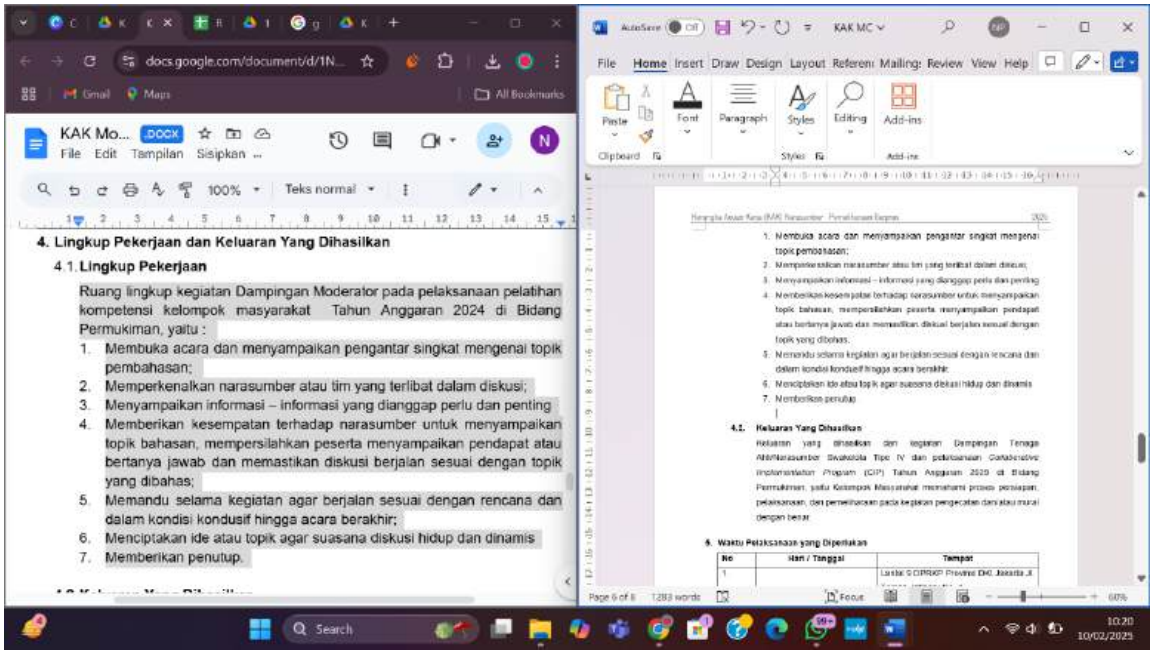

Lampiran 2.44

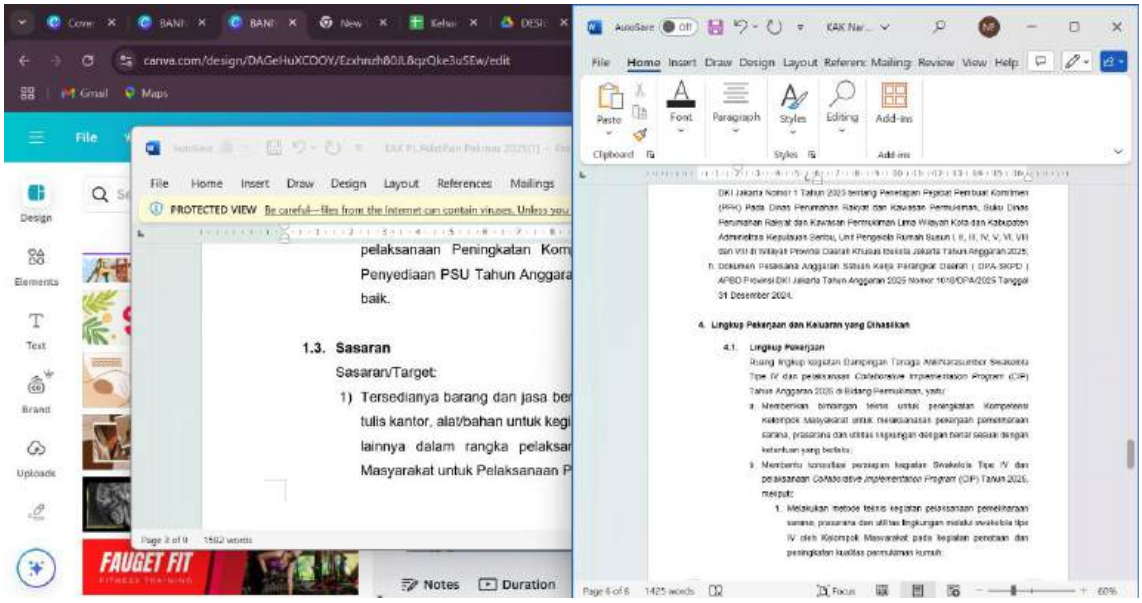

Lampiran 2.45

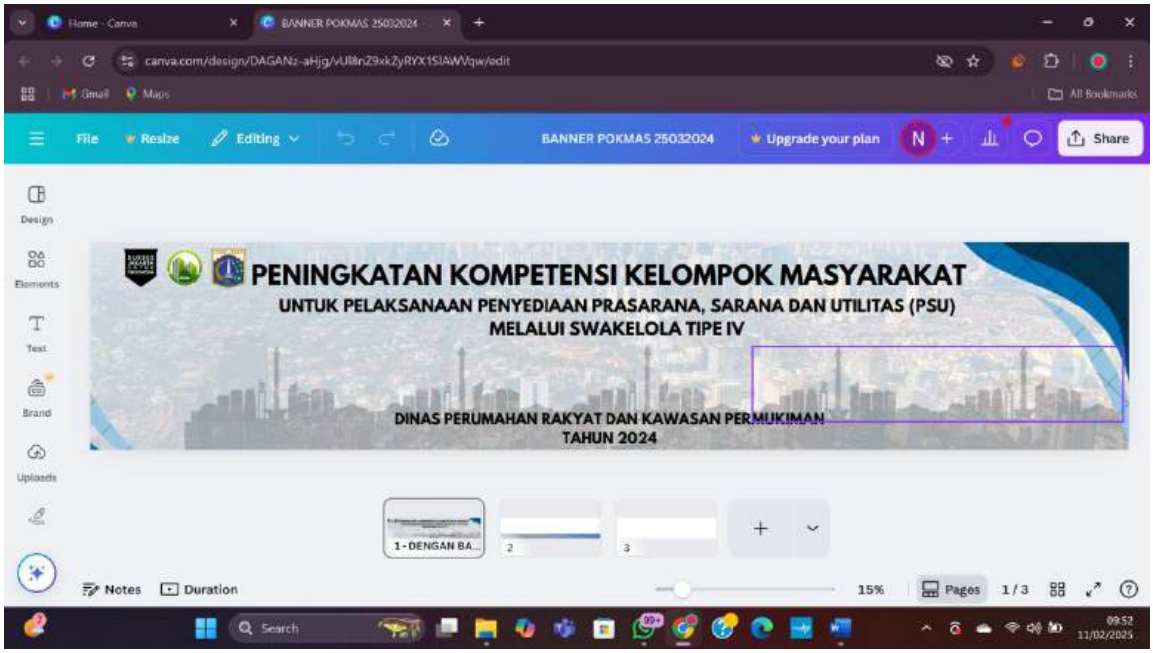

Lampiran 2.46

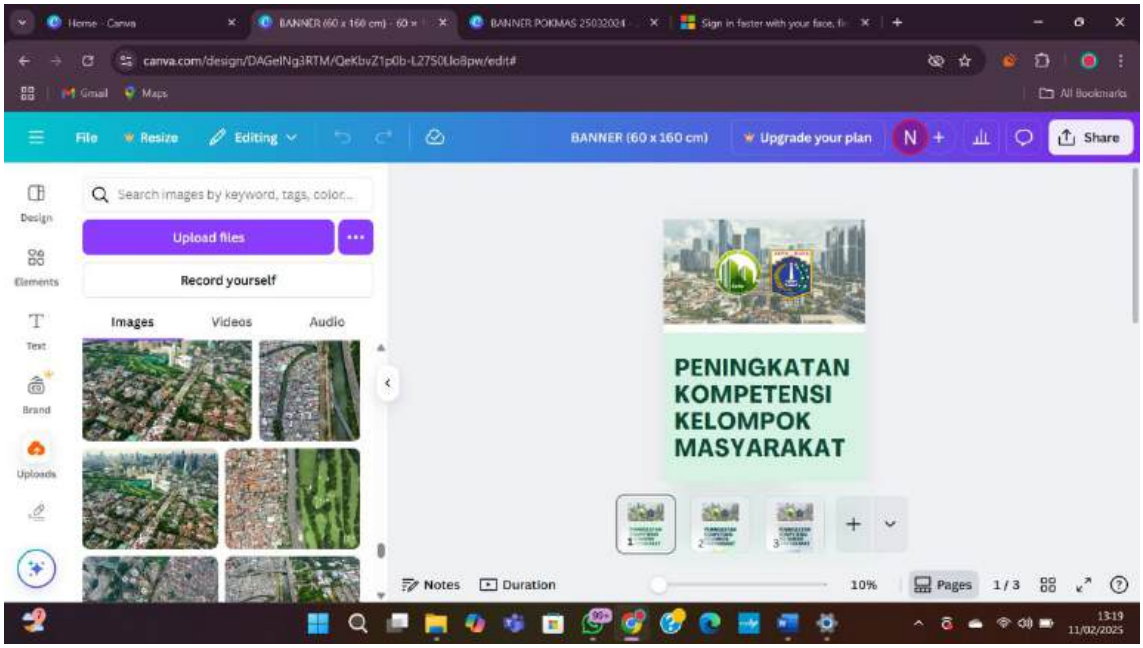

Lampiran 2.47

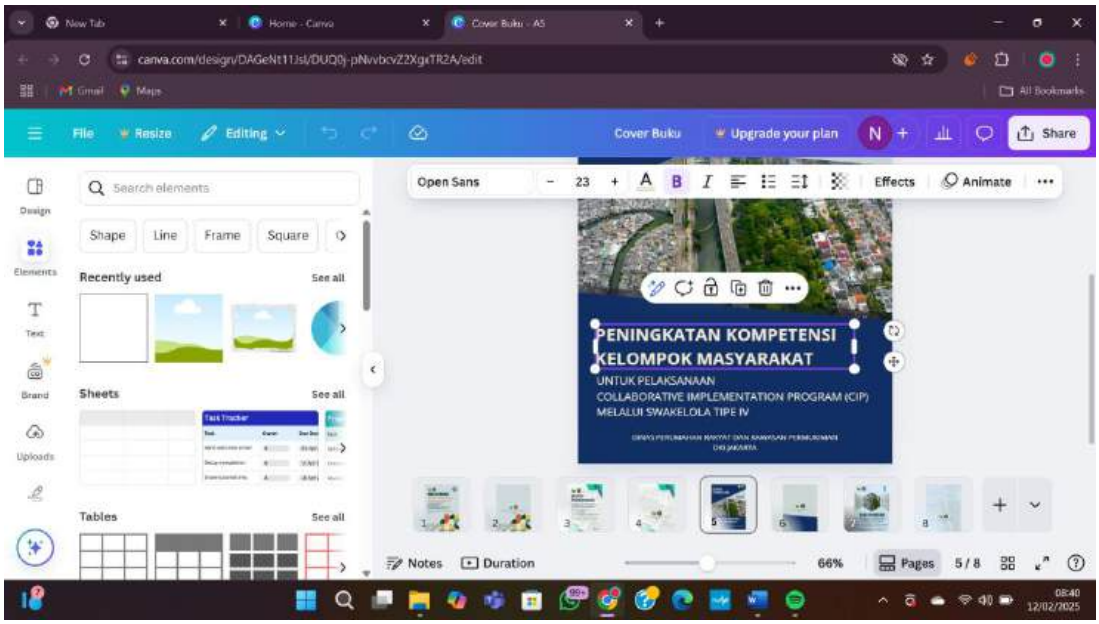

Lampiran 2.48

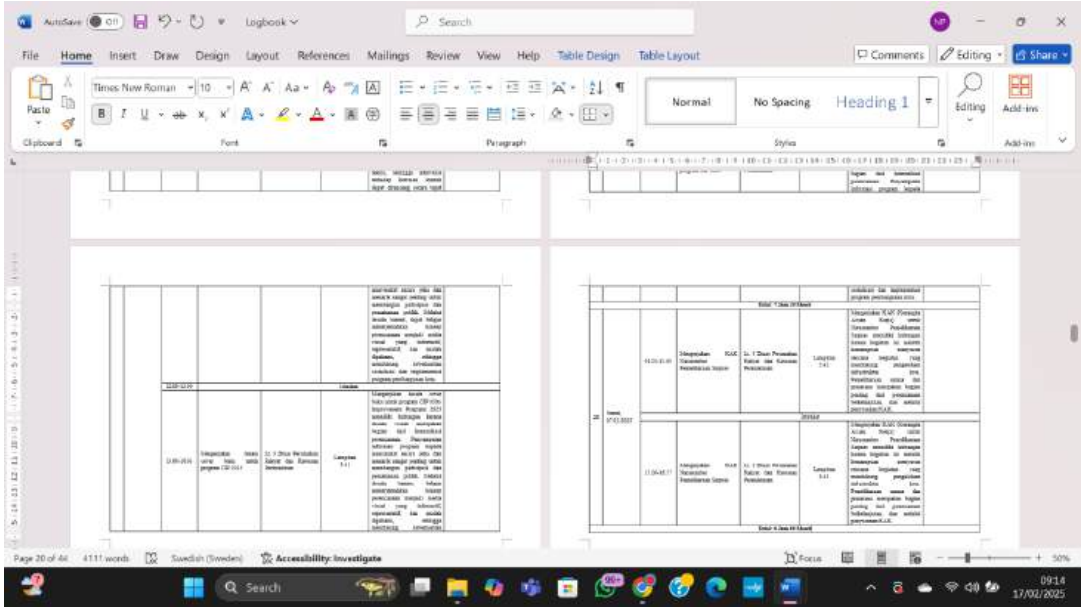

Lampiran 2.49

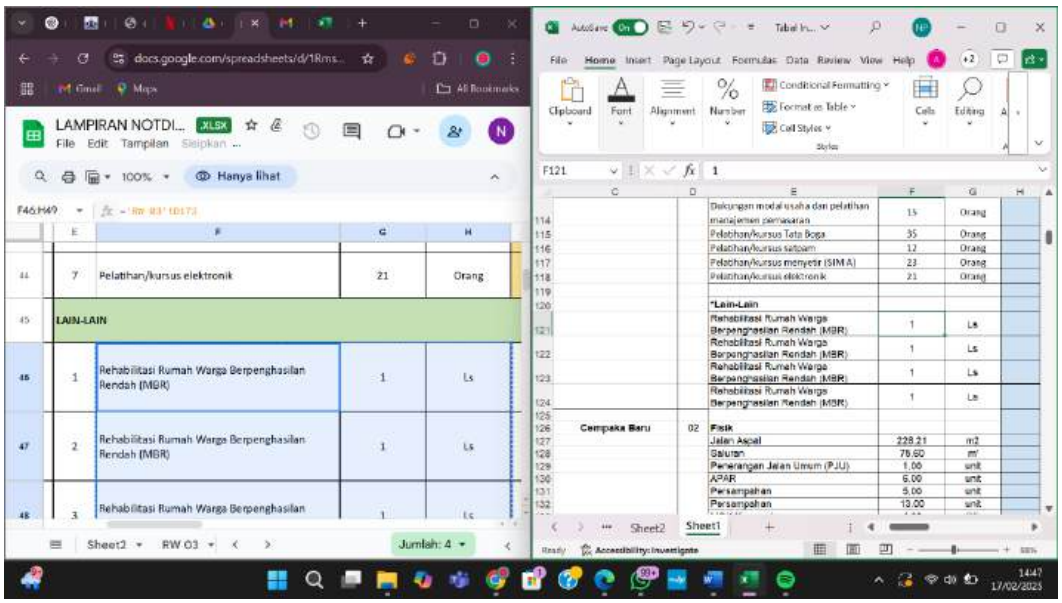

Lampiran 2.50

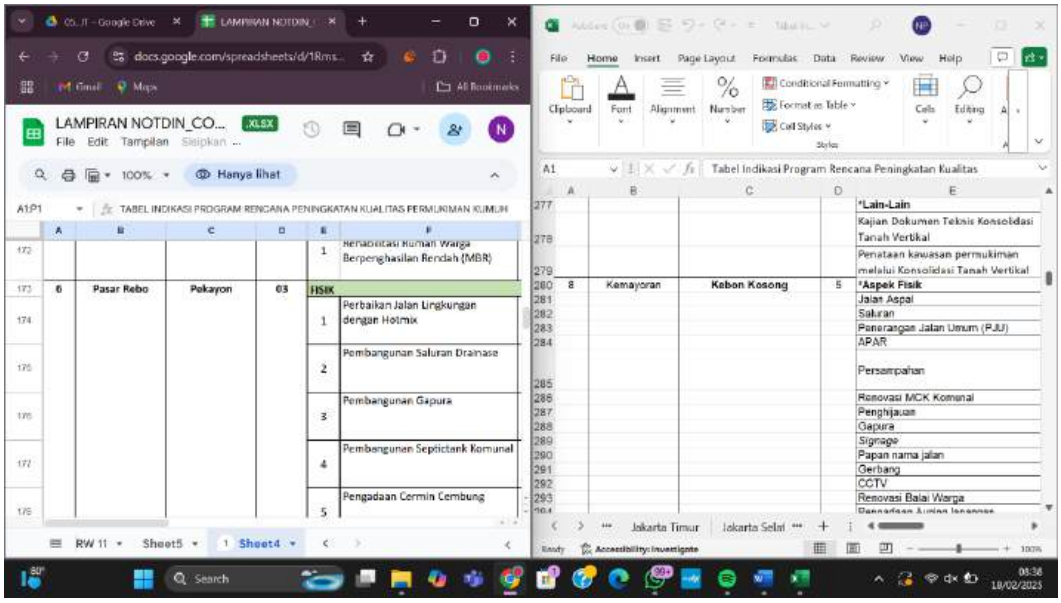

Lampiran 2.51

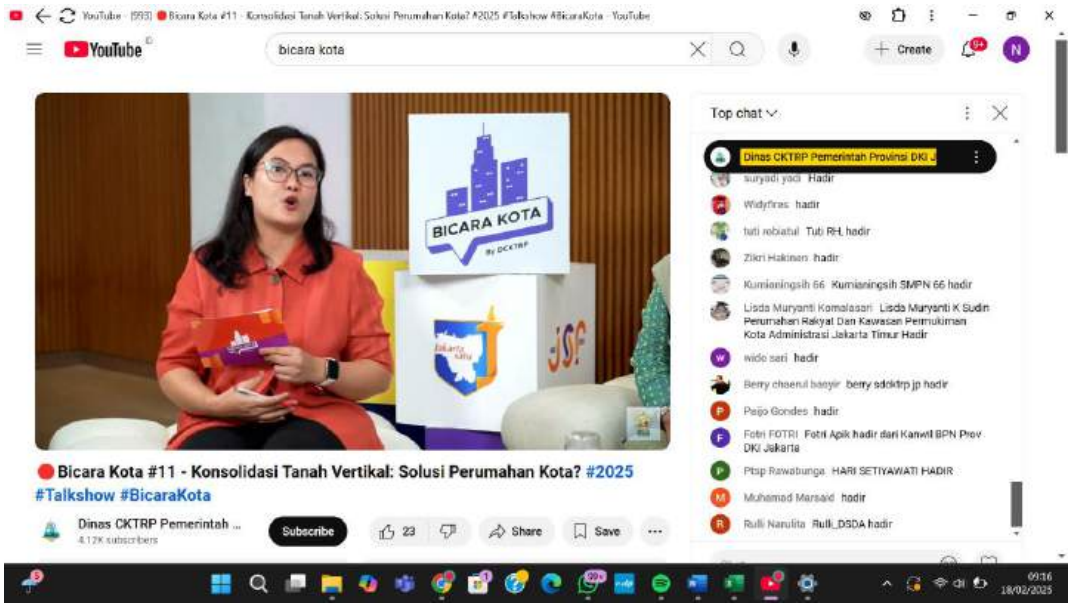

Lampiran 2.52

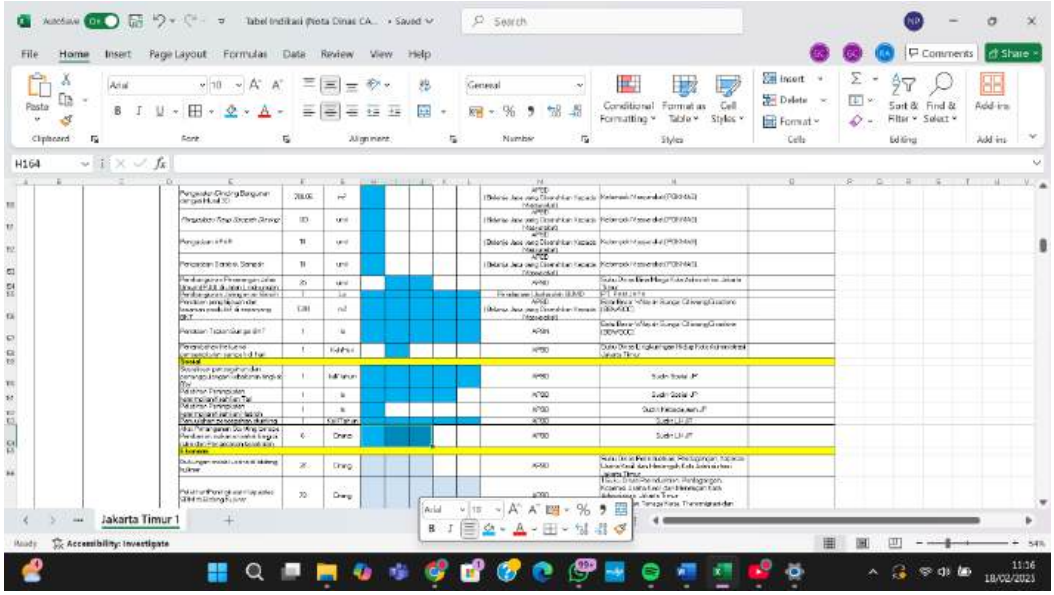

Lampiran 2.53

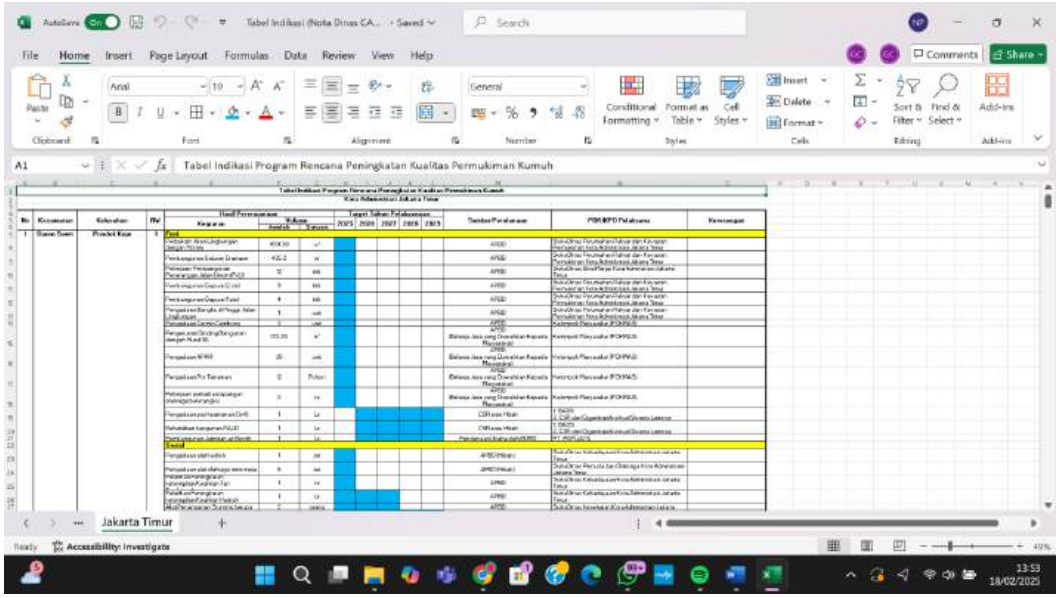

Lampiran 2.54

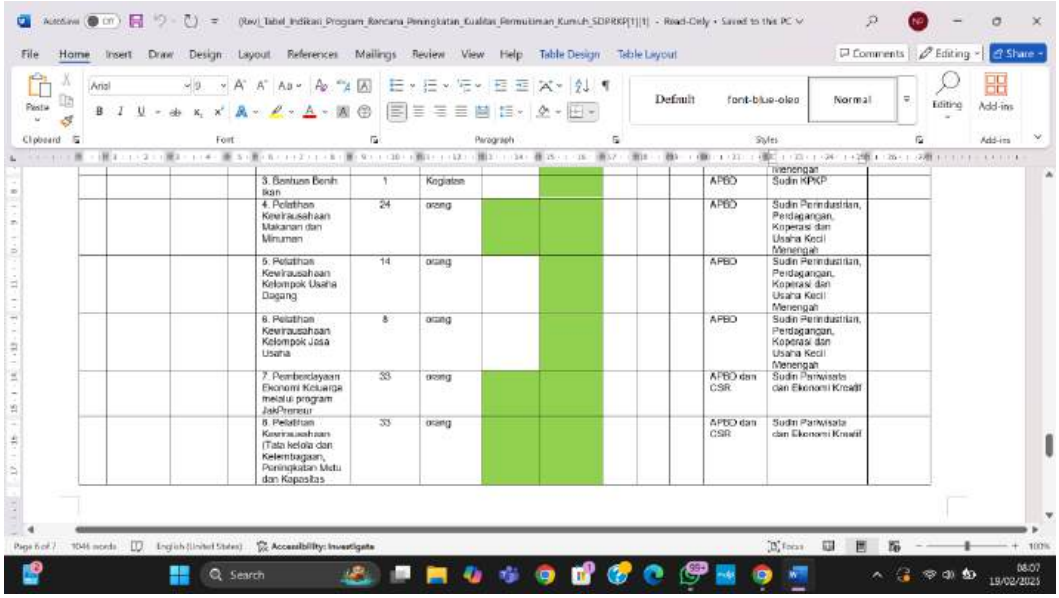

				3. Bantuan Benih Ikan	1	Kegiatan					APBD	Menengah Sudin KPKP	
				4. Pelatihan Kewirausahaan Makanan dan Minuman	24	orang					APBD	Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
				5. Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Usaha Dagang	14	orang					APBD	Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
				6. Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Jasa Usaha	8	orang					APBD	Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
				7. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui program JakPreneur	33	orang					APBD dan CSR	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				8. Pelatihan Kewirausahaan (Tata kelola dan Kelembagaan, Peningkatan Mutu dan Kapasitas	33	orang					APBD dan CSR	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

Lampiran 2.55

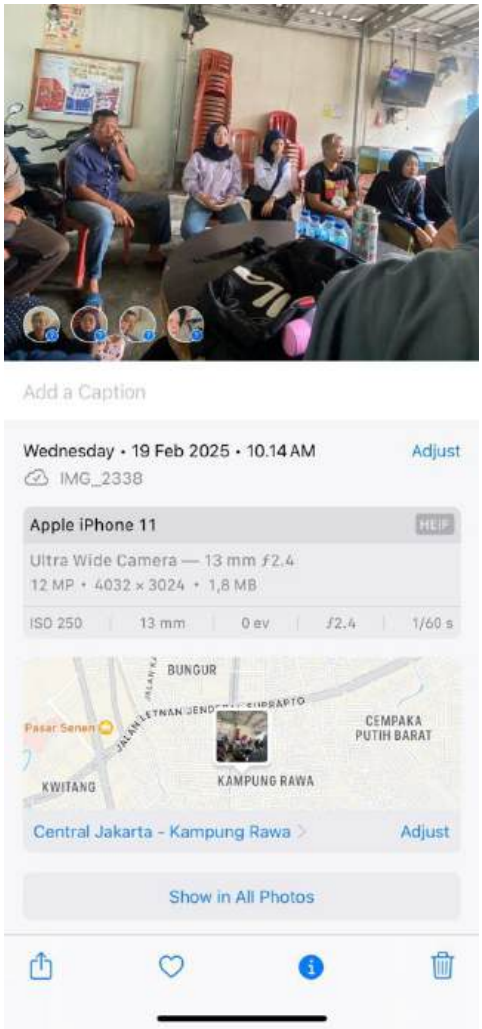

Lampiran 2.56

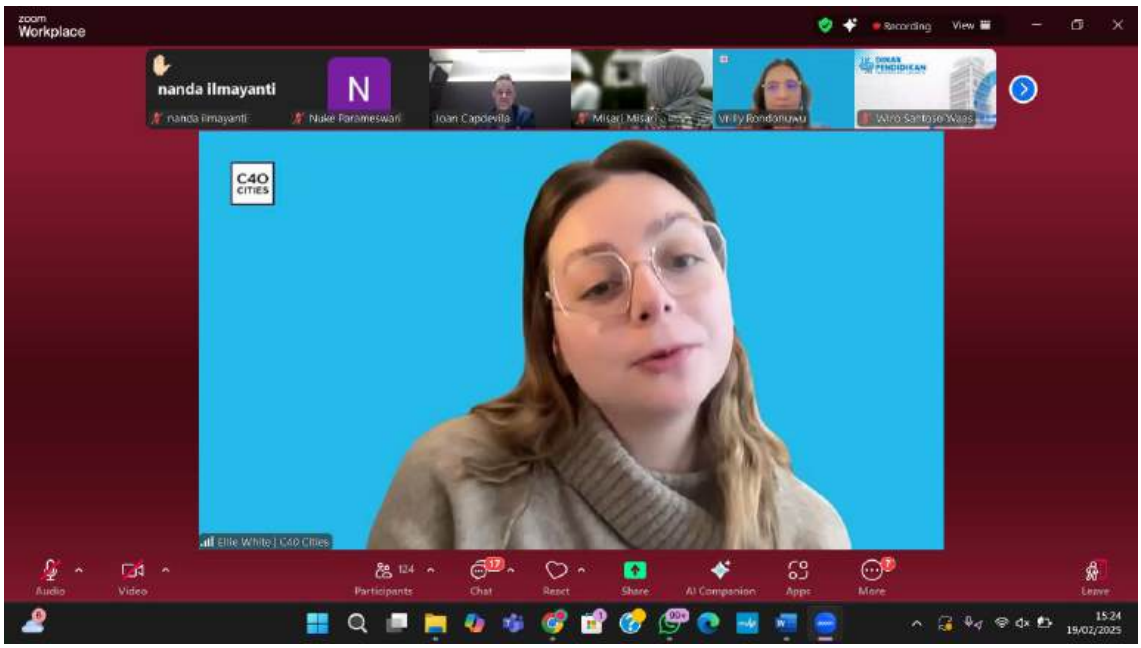

Lampiran 2.57

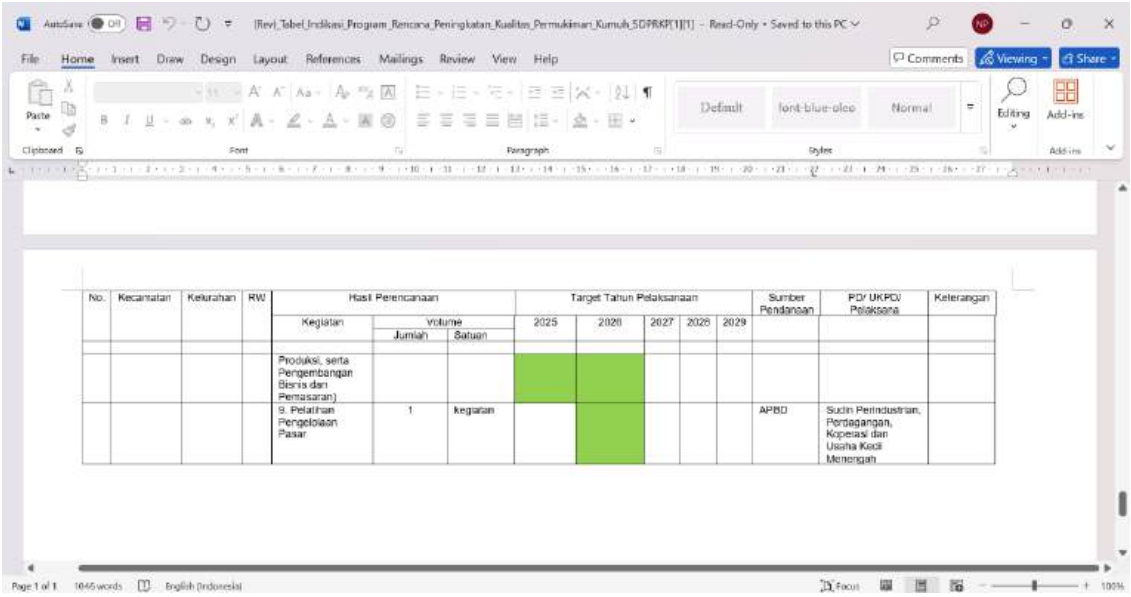

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	Hasil Perencanaan			Target Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	PD/ UKPD Pelaksana	Keterangan
				Kegiatan	Volume		2025	2026	2027	2028	2029			
					Jumlah	Satuan								
				Produksi, serta Pengembangan Bisnis dan Pemasaran)										
				9. Pelatihan Pengelolaan Pasar	1	kegiatan						APBD	Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Lampiran 2.58

Lampiran 2.59

https://docs.google.com/document/d/1LYLYYoCZ2M4DUlDbmXOPqf6sHFsPsaaAFI9z9U3Ls1I/edit?usp=sharing

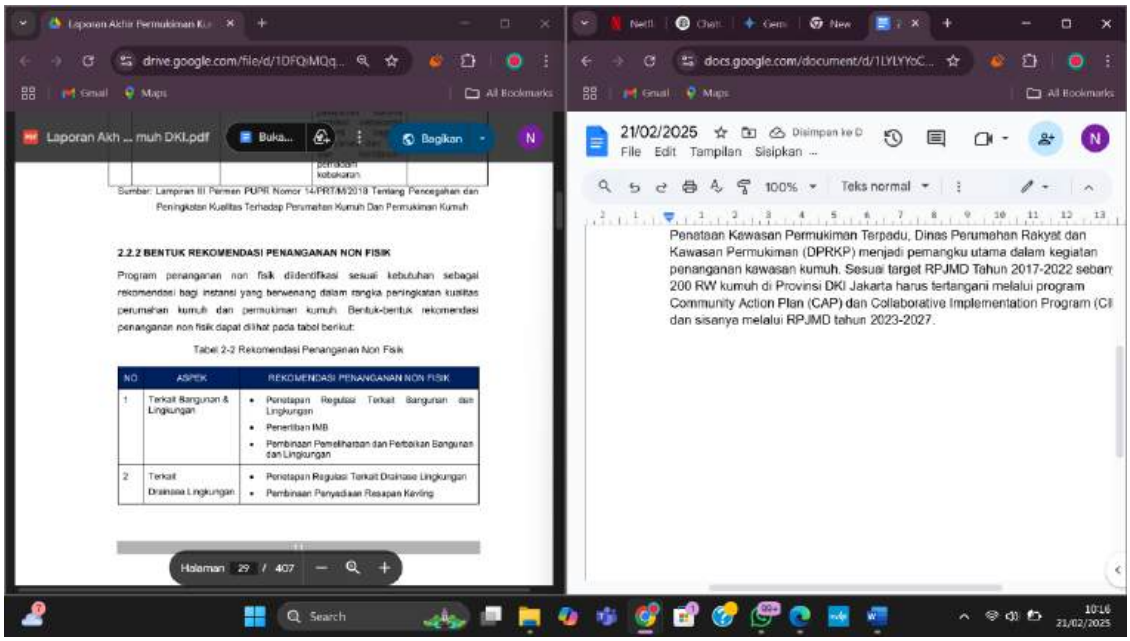

Lampiran 2.60

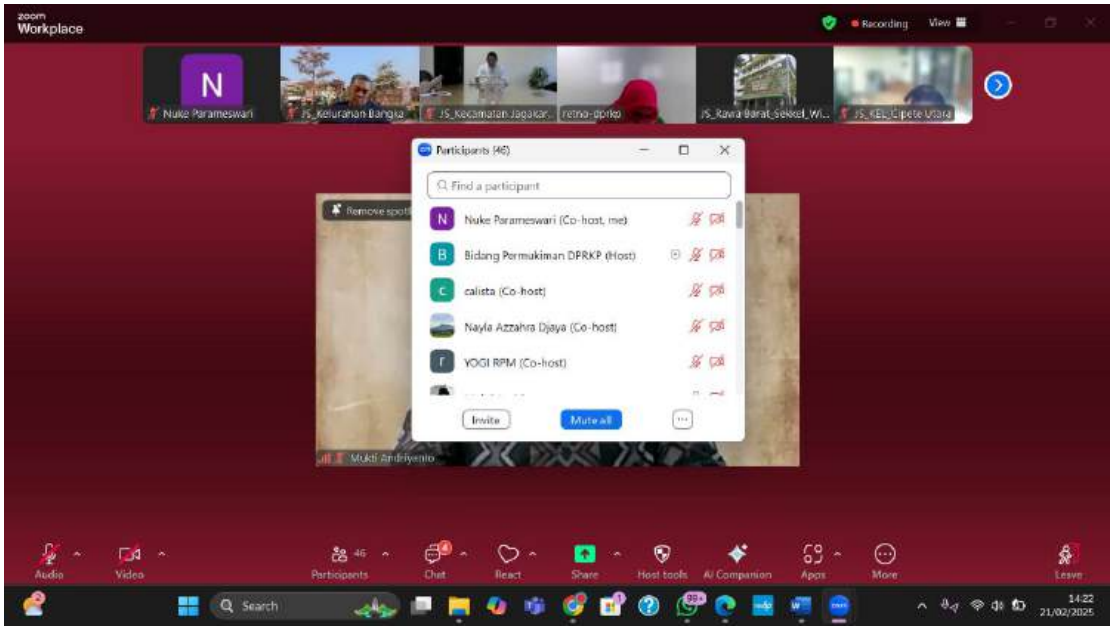

BUKTI BIMBINGAN

MATA KULIAH KERJA PRAKTIK

SEMESTER GENAP 2024-2025

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T.

Disusun Oleh:

Randi An-nissa Putri Ramadhanty

083002200005

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

Bukti Bimbingan Kerja Praktik

Nama : Randi An-nissa Putri Ramadhanty

NIM : 083002200005

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T.

No	Hari/Tanggal	Hasil Asistensi	Bukti Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Selasa, 21 Januari 2025	Mengarahkan yang dihitung pekerjaan di instansi. Menjelaskan pengisian format logbook kerja praktik. Menjelaskan bagaimana seharusnya durasi pekerjaan.		
2	Kamis, 17 Juli 2025	Menjelaskan kelengkapan lampiran logbook untuk meng-klaim pekerjaan yang dilakukan. Menjelaskan penyusunan PPT untuk sidang kerja praktik.		

LAPORAN KERJA PRAKTIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DKI JAKARTA

BIDANG PERMUKIMAN

SUB KELOMPOK PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA SARANA PERMUKIMAN

Disusun untuk memenuhi persyaratan lulus mata kulia Kerja Praktik

Dosen Pengampu:

Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K.

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

Disusun Oleh:

Randi An-nissa Putri Ramadhanty

083002200005

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DKI JAKARTA

BIDANG PERMUKIMAN

SUB KELOMPOK PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA SARANA PERMUKIMAN

Diajukan Oleh:

Randi An-nissa Putri Ramadhanty

083002200005

Disetujui:

21 Juli 2025

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktik hingga menyelesaikan laporan kerja praktik tepat pada waktunya. Laporan kerja praktik ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktik. Selesainya laporan kerja praktik ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta yang telah mengizinkan praktikan untuk melaksanakan kerja praktik.
2. Bapak Kelik Indriyanto, S.T, M.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
3. Ibu Ir. Retno Sulistyaningrum, MAP selaku Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
4. Bapak Daris Sugiarto, ST selaku Ketua Subkelompok Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana Sarana Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
5. Bapak Donald Ganitua Sianturi, S.T. selaku pembimbing di Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
6. Seluruh Staff dan Tenaga Ahli pada Bidang Permukiman yang telah memberikan bantuan selama praktikan menjalankan kerja praktik.
7. Ibu Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K. selaku dosen penanggung jawab mata kuliah kerja praktik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan kerja praktik.
8. Ibu Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan kerja praktik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunannya.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Proses Mendapatkan Tempat Kerja Praktik 1

1.3. Tujuan 2

1.4. Manfaat 2

BAB II DESKRIPSI TEMPAT KERJA PRAKTIK **4**

2.1. Profil Singkat Instansi Kerja Praktik 4

2.2. Struktur Organisasi 7

2.3. Posisi Praktikan 8

2.4. Deskripsi Tugas Praktikan 9

BAB III JADWAL KEGIATAN DAN SUBSTANSI PEKERJAAN **12**

3.1. Jadwal Kerja Praktikan 12

3.2. Substansi yang Disumbangkan Praktikan 33

BAB IV ANALISIS **34**

4.1. Manfaat Praktis dan Teoritis bagi Praktikan 34

4.1.1. Manfaat Praktis bagi Praktikan 34

4.1.2. Manfaat Teoritis bagi Praktikan 34

4.2. Kelebihan dan Kekurangan Instansi Kerja Praktik 35

4.2.1. Kelebihan Instansi Kerja Praktik 35

4.2.2. Kekurangan Instansi Kerja Praktik 35

4.3. Kelebihan dan Kekurangan Praktikan di Instansi Kerja Praktik 35

4.3.1. Kelebihan Praktikan selama Mengikuti Kerja Praktek 36

4.3.2. Kekurangan Praktikan selama Mengikuti Kerja Praktek 36

BAB V PENUTUP 37

5.1. Masukan Perbaikan bagi Penyelenggara Mata Kuliah Kerja Praktek 37

DAFTAR PUSTAKA 38

LAMPIRAN 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan di Instansi Kerja Praktik 39
Lampiran 2. 1. Mempelajari Laporan Kegiatan Pelaksanaan Diskusi Rencana Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 40
Lampiran 2. 2. Mempelajari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dan SE DJCK Nomor 39 Tahun 2020 40
Lampiran 2. 3. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Konsultasi Tugas Akhir Mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal (TKV) 40
Lampiran 2. 4. Mengikuti Rapat Teknis dengan Tenaga Ahli mengenai Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 41
Lampiran 2. 5. Menyusun dan Mengisi Logbook KP 41
Lampiran 2. 6. Merapihkan Notulensi Rapat Laporan Akhir Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta 41
Lampiran 2. 7. Mengisi Logbook KP 41
Lampiran 2. 8. Menyusun Laporan KP 42
Lampiran 2. 9. Melakukan diskusi terkait Program Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan (Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh) serta KTV Palmerah dan Tanah Tinggi 42
Lampiran 2. 10. Mengisi Logbook KP 42
Lampiran 2. 11. Merangkum Dokumen mengenai Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh 43
Lampiran 2. 12. Merangkum Dokumen mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal Palmerah dan Tanah Tinggi 43
Lampiran 2. 13. Mengisi Laporan KP 43
Lampiran 2. 14. Mempelajari Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 44
Lampiran 2. 15. Mempelajari Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 44
Lampiran 2. 16. Membuat Tabel Monev POKJA PKP Tahun 2024 untuk Pemaparan Laporan Akhir Renja POKJA PKP 44
Lampiran 2. 17. Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 1 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 45
Lampiran 2. 18. Mengclip SHP Area kumuh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menjadi Area Kumuh Kelurahan pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 45
Lampiran 2. 19. Mengclip SHP Area kumuh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menjadi Area Kumuh Kelurahan pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 45

Lampiran 2. 20. Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 2 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 46
Lampiran 2. 21. Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 3 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 46
Lampiran 2. 22. Mengisi Logbook KP 46
Lampiran 2. 23. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 47
Lampiran 2. 24. Melakukan Pendataan RW Kumuh di Jakarta Selatan berdasarkan Kawasannya 47
Lampiran 2. 25. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Pusat 47
Lampiran 2. 26. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur 48
Lampiran 2. 27. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat 48
Lampiran 2. 28. Mengikuti Rapat Pengarahan Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 48
Lampiran 2. 29. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat 49
Lampiran 2. 30. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat 49
Lampiran 2. 31. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 5 Kecamatan di Kota Jakarta Selatan 49
Lampiran 2. 32. Merevisi Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat 50
Lampiran 2. 33. Mempelajari Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021 50
Lampiran 2. 34. Merangkum Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021 50
Lampiran 2. 35. Merangkum Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021 51
Lampiran 2. 36. Merangkum Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas 51
Lampiran 2. 37. Melakukan Pendataan RW Kumuh berdasarkan Nilai dari 7 Kriteria Kumuh 51
Lampiran 2. 38. Membuat Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 51
Lampiran 2. 39. Membuat Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 52
Lampiran 2. 40. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 52
Lampiran 2. 41. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Pembahasan Isi Kuesioner untuk Pelaksanaan e-Survey Pendataan RW Kumuh di Provinsi DKI TA 2025 52
Lampiran 2. 42. Melakukan Pendataan Kawasan Kumuh yang sudah ditangani dan belum ditangani 53

Lampiran 2. 43. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 53
Lampiran 2. 44. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 53
Lampiran 2. 45. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Narasumber Konstruksi Sederhana untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 54
Lampiran 2. 46. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 54
Lampiran 2. 47. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 54
Lampiran 2. 48. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 55
Lampiran 2. 49. Merunning Raw Data Menggunakan Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta 55
Lampiran 2. 50. Melakukan Bimbingan Akademik 55
Lampiran 2. 51. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 56
Lampiran 2. 52. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 56
Lampiran 2. 53. Merevisi Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025 56
Lampiran 2. 54. Mengisi dan Merapihkan Logbook KP 57
Lampiran 2. 55. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan 57
Lampiran 2. 56. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan 57
Lampiran 2. 57. Mengikuti dan Menotulensi Webinar Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV): Solusi Permasalahan Kebutuhan Tanah Untuk Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan 58
Lampiran 2. 58. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan 58
Lampiran 2. 59. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 58
Lampiran 2. 60. Mengikuti Pertemuan Ke-3 terkait Perencanaan KTV dan Survey Lokasi KTV di Kecamatan Johar Baru 59
Lampiran 2. 61. Mengikuti Webinar Reinventing Cities 59

Lampiran 2. 62. Mempelajari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023.....59
Lampiran 2. 63. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Koordinasi Rencana Strastegis Informasi Geospasial 2023 - 2026.....60
Lampiran 2. 64. Mempelajari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023.....60
Lampiran 2. 65. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Persiapan Penghunian Rumah Susun Jagakarsa dengan Kelurahan yang ada di Jakarta Selatan.....60
Lampiran 3. Hasil Penilaian Instansi Kerja Praktik.....61
Lampiran 4. Bukti Bimbingan Kerja Praktik dengan Dosen Pembimbing.....62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerja praktik adalah fase dimana mahasiswa dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, dengan menempatkan mahasiswa langsung di dalam sebuah lingkungan atau tempat kerja untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja, serta menerapkan ilmunya dalam dunia kerja. Pada umumnya kegiatan kerja praktek yang dilakukan pada salah satu instansi yang memiliki lingkup pekerjaan berkaitan dengan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti telah mempersiapkan mata kuliah yaitu Kerja Praktik (KP) yang merupakan mata kuliah wajib pada semester enam (VI) sebelum mahasiswa menyusun Tugas Akhir (TA). Kerja praktik merupakan salah satu media komunikasi yang memungkinkan adanya pertukaran informasi antara mahasiswa dan tempat kerja praktik. Kerja praktik ini memiliki syarat minimal jam kerja yang harus terpenuhi yaitu 175 jam dan dilaksanakan pada saat libur antara semester agar mahasiswa fokus dalam menjalankan kerja praktik.

1.2. Proses Mendapatkan Tempat Kerja Praktik

Prosedur yang harus ditempuh mahasiswa untuk dapat melakukan Kerja Praktik (KP) dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan ini merupakan syarat yang ditentukan oleh Jurusan Universitas Trisakti. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktikan mencari informasi terkait beberapa instansi yang berkaitan dengan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (November 2024)
2. Praktikan mengisi formulir surat permohonan kerja praktik dan meneruskan formulir kepada koordinator kerja praktik untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan lalu di ajukan kepada pihak sekretaris jurusan Teknik Planologi dan didisposisikan surat permohonan melakukan kerja praktik kepada Wakil Dekan I Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan untuk ditanda tangani (11/15 November 2024).
3. Praktikan menyerahkan surat permohonan melakukan kerja praktik yang sudah ditanda tangani oleh Wakil Dekan I kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (5 Desember 2024)

4. Praktikan mendapatkan surat balasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (18 Desember 2024)
5. Praktikan mendapatkan surat penerimaan untuk melakukan kerja praktik dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya termuat mengenai tanggal awal untuk memulai kerja praktik hingga batas akhir kerja praktik serta penempatan posisi. (20 Desember 2024) (Lampiran 1).
6. Praktikan melakukan kerja praktik yang dimulai pada tanggal 8 Januari 2024 – 21 Februari 2025.

1.3. Tujuan

Tujuan praktikan melakukan kerja praktik di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan dan memperluas perspektif serta pengetahuan praktikan mengenai ilmu perencanaan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata.
2. Memahami secara mendalam kebijakan, strategi, dan program DPRKP DKI Jakarta dalam menangani isu perumahan, terutama penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi DPRKP DKI Jakarta dalam menjalankan program perumahan, serta mempelajari solusi dan pendekatan inovatif untuk mengatasinya.
4. Memahami peran dan fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini DPRKP DKI Jakarta, sebagai pelaku utama dalam perencanaan dan penyediaan perumahan serta permukiman berkelanjutan.
5. Meningkatkan keterampilan profesional praktikan, seperti analisis data, penyusunan laporan, komunikasi, dan kerja sama dalam lingkungan birokrasi pemerintah.
6. Memperoleh pengalaman langsung tentang mekanisme kerja, kendala operasional, serta dinamika pengambilan keputusan di instansi pemerintah terkait perumahan dan permukiman.

1.4.Manfaat

Manfaat praktikan melakukan kerja praktik di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam perencanaan perumahan di kota besar, termasuk program rusunawa, penanganan daerah kumuh, dan proses relokasi penduduk.
2. Meningkatkan kompetensi dalam analisis spasial dan teknik perencanaan wilayah, seperti pemetaan, survei lapangan, serta pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS).
3. Memahami mekanisme kebijakan dan pengelolaan perumahan serta permukiman, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil program.
4. Melatih kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, konsultan perencana, dan warga masyarakat.
5. Mengenal langsung masalah nyata dalam perencanaan kota, seperti terbatasnya lahan, tingginya populasi, dan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Memperluas pemahaman tentang sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah dalam mewujudkan perumahan serta permukiman yang berkelanjutan.
7. Memperluas koneksi profesional dengan praktisi perencanaan dan lembaga pemerintah di tingkat provinsi.

BAB II
DESKRIPSI TEMPAT KERJA PRAKTIK

2.1. Profil Singkat Instansi Kerja Praktik

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Gambar 2.1. Logo Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dibentuk sebagai implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi tugas wajib pelayanan dasar di bidang perumahan dan permukiman. Pembentukan dinas ini berlandaskan berbagai regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga DKI Jakarta, serta menciptakan kawasan permukiman yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari urusan wajib, DPRKP resmi dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang

permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
10. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
11. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
12. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
13. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU permukiman;
14. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
15. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kawasan permukiman;
16. Pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian;
17. Pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman;

18. Fasilitasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman;
19. Fasilitasi penyelesaian sengketa penghunian perumahan;
20. Penanganan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan lingkup tugasnya;
21. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
23. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
24. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
25. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
26. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 5unit kerja yang terbagi menjadi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan, Bidang Permukiman, Bidang Pembiayaaan dan Kemitraan Perumahan, dan Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bidang Perumahan berfokus pada penyelenggaraan perencanaan perumahan, Bidang Permukiman berfokus pada perencanaan permukiman, Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan berfokus pada pelaksanaan pembiayaan, penyediaan tanah serta pengelolaan asset, dan Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat berfokus pada pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan regulasi perumahan dan kawasan permukiman dan pengembangan peran serta masyarakat rusunawa.

Pada pelaksanaan kerja praktek, praktikan menempati posisi sebagai Staff Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berfokus pada perencanaan permukiman. Bidang Permukiman mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

   Melaksanakan perencanaan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

b. Fungsi

1. Penyusunan, koordinasi dan pemantapan rencana induk/ masterplan permukiman;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan/pelaksanaan penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman;
3. Penyusunan analisa kebutuhan, ketersediaan perumahan dan permukiman;
4. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan konsep pengembangan permukiman;
5. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi perencanaan atau pelaksanaan penyediaan permukiman terhadap mitra kerja konstruksi dalam rangka pengembangan permukiman;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perizinan dan non perizinan dalam rangka pengembangan permukiman;

c. Fungsi Lainnya

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

2.2.Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta yang terdiri dari beberapa bidang dan sub bidang yang akan menjalankan pekerjaan lebih spesifik dapat dilihat melalui gambar berikut.

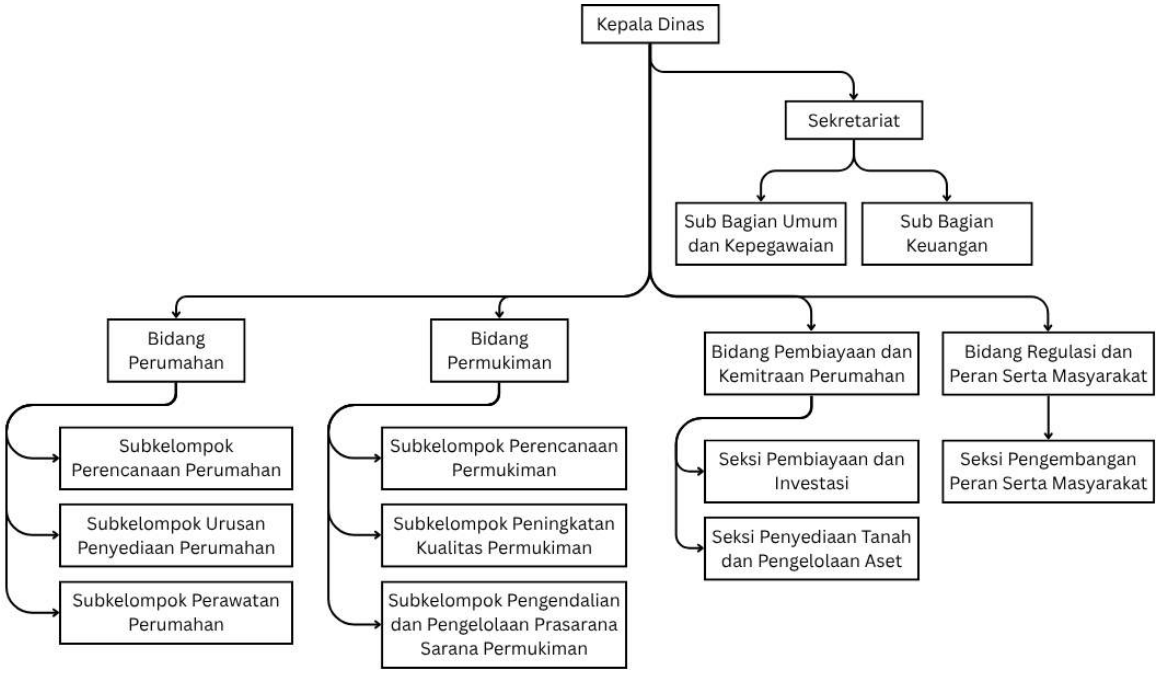

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DPRKP DKI Jakarta

2.3. Posisi Praktikan

Pada saat pelaksanaan kerja praktik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, praktikan ditempatkan di bawah Subkelompok Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana Sarana Permukiman, yang berfokus pada pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan infrastruktur serta fasilitas permukiman di wilayah Jakarta. Adapun posisi praktikan dijelaskan melalui gambar berikut.

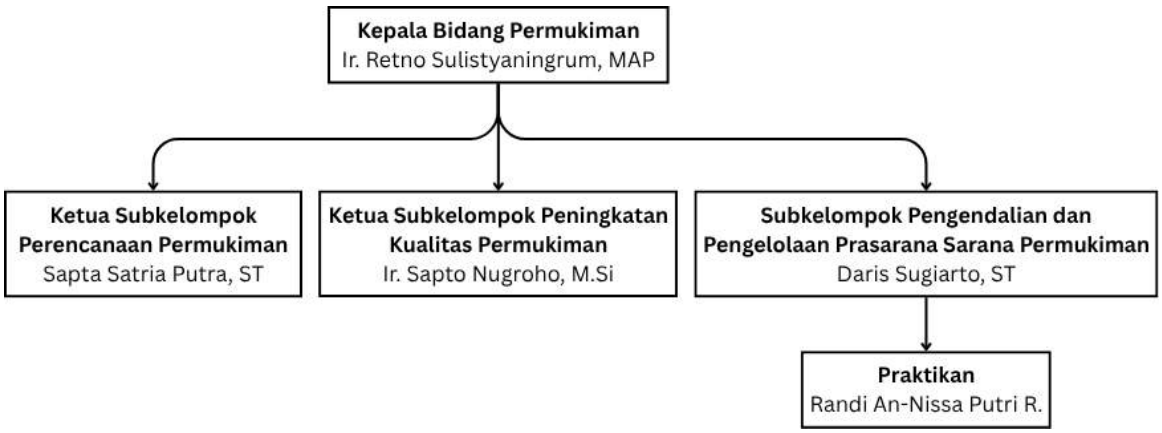

Gambar 2. 3 Posisi Praktikan

2.4. Deskripsi Tugas Praktikan

Selama melaksanakan kerja praktik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, praktikan melakukan pekerjaan untuk membantu bawah Subkelompok Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana Sarana Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa tugas yang dikerjakan praktikan terbagi menjadi dua, yakni tugas yang diberikan sebagai bahan pembalajaran pribadi untuk praktikan, dan tugas yang diberikan kepada praktikan untuk turut membantu pekerjaan pada sub kelompok pengendalian dan pengelolaan prasarana sarana permukiman sehingga hasil dari tugas yang diberikan kepada praktikan kemudian digunakan oleh bidang permukiman. Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meringkas beberapa peraturan dan dokumen terkait perencanaan permukiman yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan permukiman, sebagai berikut,
    a. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Diskusi Rencana Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
    b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    c. SE DJCK Nomor 39 Tahun 2020 Pedoman Rencana Kawasan Permukiman
    d. Dokumen mengenai Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh
    e. Dokumen mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal Palmerah dan Tanah Tinggi
    f. Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023
    g. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
    h. Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021
2. Menggunakan *software ArcGIS* untuk:
    a. Menganalisis data kesesuaian area kumuh menggunakan *Model Builder* melalui 3 Tahap. Praktikan memperoleh kesempatan untuk mempelajari dan menjalankan pengaplikasian *Model Builder* guna menganalisis kesesuaian area kumuh di DKI

Jakarta. Analisis ini dilakukan berdasarkan kriteria kawasan kumuh menggunakan data SHP yang disediakan oleh DPRKP serta mengembangkan alur kerja analisis geospasial. Proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, antara lain:

- Tahap 1 *Environment*
- Tahap 2 *Constraint*
- Tahap 3 *Suitability*

Hasil akhir dari proses ini berupa peta klasifikasi kesesuaian area kumuh di wilayah DKI Jakarta yang terbagi dalam beberapa kelas.

b. Melakukan analisis spasial dengan *tool Clip*. Praktikan melakukan proses analisis spasial dengan memanfaatkan *tool Clip* pada *ArcGIS* untuk memproses data SHP kawasan kumuh di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Mengubah SHP dari level kecamatan menjadi level kelurahan yang digunakan sebagai database DPRKP.

c. Membuat peta indikasi kumuh Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kota. Praktikan membuat peta indikasi kumuh di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang akan digunakan oleh DPRKP.

d. Membuat peta indikasi kumuh Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kecamatan. Praktikan membuat peta indikasi kumuh di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan berdasarkan Kecamatan yang akan digunakan oleh DPRKP.

3. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025. Praktikan diberi tanggung jawab untuk menyusun *Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS)* sebagai bagian dari program Tahun Anggaran 2025. Tugas ini meliputi penyusunan konten, pengorganisasian panduan, dan pembuatan desain.

4. Melakukan pendataan kawasan kumuh di Jakarta Selatan, antara lain:

a. Praktikan melaksanakan tugas pendataan kawasan kumuh di Jakarta Selatan dengan menyesuaikan data dari *Open Atribute Tabel* di aplikasi *ArcGIS* dan disesuaikan dengan tabel menggunakan *Microsoft Excel*.

b. Praktikan melakukan kegiatan pendataan kawasan kumuh berdasarkan nilai dari 7 kriteria kumuh di DKI Jakarta dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

c. Praktikan melakukan pendataan kawasan kumuh yang sudah ditangani dan belum ditangani untuk rencana program peningkatan kualitas permukiman menggunakan *Microsoft Excel*.

5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk Program Peningkatan Kompetensi POKMAS TA 2025. Praktikan bertugas menyusun dua dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam rangka program peningkatan kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025, yaitu:
   a. Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman
   b. Kerangka Acuan Kerja Narasumber Konstruksi Sederhana
6. Melakukan survey Konsolidasi Tanah Vertikal bersama staff Bidang Perumahan. Praktikan diberikan kesempatan untuk mengikuti survey Bersama staff Bidang Perumahan untuk melihat lokasi yang berpotensi untuk pembangunan KTV di daerah Jakarta Pusat dan mendengarkan diskusi dengan masyarakat yang bersedia melakukan KTV.

BAB III

JADWAL KEGIATAN DAN SUBSTANSI PEKERJAAN

3.1. Jadwal Kerja Praktikan

Praktikan melaksanakan kerja praktik pada Bidang Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 30 hari kerja atau 210 jam kerja di luar waktu istirahat, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 hingga 21 Februari 2025, dan telah memenuhi waktu minimal pelaksanaan kerja praktik. Secara umum, jam kerja praktikan mengikuti jam kerja pegawai, yakni mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB pada hari Senin - Kamis dan 08.00 - 16.30 WIB pada hari Jumat. Selama melaksanakan kerja praktik, praktikan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang rinciannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Kerja Praktikan

Keterangan: Tabel Jadwal Kegiatan Praktik merupakan hitungan jam kerja sesuai yang dikerjakan oleh peserta KP. Jam kerja kantor dimulai pukul jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
1	Rabu, 08/01/2025	08.00 – 09.00	Perkenalan dengan lingkungan kerja terkait tugas dan program-program yang dilakukan oleh DPRKP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		09.00 – 13.00	Mempelajari Laporan Kegiatan Pelaksanaan Diskusi Rencana Kerja	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat	Lampiran 2.1	Mengetahui isi dari laporan kegiatan rencana kerja POKJA PKP terkait	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	dan Kawasan Permukiman		rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 14.00	Mempelajari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; SE DJCK Nomor 39 Tahun 2020 Pedoman Rencana Kawasan Permukiman	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.2	Mengetahui isi dari pedoman rencana kawasan permukiman serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	
		14.00 – 16.00	Mengikuti dan Menotulensi Rapat Konsultasi Tugas Akhir Mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal (TKV)	Ruang Rapat, Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.3	Adanya KTV ini bermula dari program perbaikan rumah deret yang menggunakan anggaran CSR, Konsolidasi Tanah Vertikal pertama kali	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						dilakukan di Palmerah kemudian Tanah Tinggi. KTV tidak dapat disebut program karena tidak ditargetkan akan tetapi tergantung ketersediaan masyarakat.	
Total: 7 Jam							
2	Kamis, 09/01/2025	09.00 – 11.30	Mengikuti Rapat Teknis dengan Tenaga Ahli mengenai Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025	Ruang Rapat, Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.4	Pendataan RW Kumuh Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan data makro berdasarkan 7 indikator dan 1 indikator tambahan yaitu jarak ke bantaran sungai (khusus DKI Jakarta), karena DKI Jakarta merupakan daerah rawan banjir.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 14.30	Menyusun dan Mengisi Logbook KP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.5		
		14.30 – 16.00	Merapihkan Notulensi Rapat Laporan Akhir Pendataan Kumuh DKI Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.6	Pendataan RW Kumuh Provinsi DKI Jakarta Tahunx 2025 menggunakan data makro berdasarkan 7	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						indikator dan 1 indikator tambahan yaitu jarak ke bantaran sungai (khusus DKI Jakarta), karena DKI Jakarta merupakan daerah rawan banjir.	
Total: 5 Jam 30 Menit							
3	Jumat, 10/01/2025	08.00 – 08.30	Mengisi Logbook KP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.7		
		08.30 – 11.00	Menyusun Laporan KP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.8		
		11.30 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Melakukan diskusi terkait Program Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan (Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh) serta KTV Palmerah dan Tanah Tinggi	Ruang Rapat, Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.9	Mengetahui mengenai Program Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan (Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh) serta KTV Palmerah dan Tanah Tinggi.	
Total: 6 Jam							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
4	Senin, 13/01/2025	08.00 – 08.30	Mengisi Logbook KP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.10		
		08.30 – 13.00	Merangkum Dokumen mengenai Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.11	Mengetahui terkait Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 14.00	Merangkum Dokumen mengenai Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		14.00 – 16.00	Merangkum Dokumen mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal Palmerah dan Tanah Tinggi	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.12	Mengetahui terkait Program KTV yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta.	
Total: 7 Jam							
5	Selasa, 14/01/2025	09.00 – 13.00	Mengisi Laporan KP		Lampiran 2.13		
Total: 3 Jam							
6	Rabu, 15/01/2025	08.00 – 13.00	Mempelajari Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.14	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta			menggunakan 7 indikator.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Mempelajari Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.15	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh menggunakan 7 indikator.	
Total: 7 Jam							
7	Kamis, 16/01/2025	08.00 – 13.00	Membuat Tabel Monev POKJA PKP Tahun 2024 untuk Pemaparan Laporan Akhir Renja POKJA PKP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.16	Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 1 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.17	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh menggunakan 7 indikator.	
Total: 7 Jam							
8	Jumat, 17/01/2025	08.00 – 13.00	Mengclip SHP Area kumuh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menjadi Area Kumuh	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.18	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Kelurahan pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta			menggunakan 7 indikator.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Mengclip SHP Area kumuh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menjadi Area Kumuh Kelurahan pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.19	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh menggunakan 7 indikator.	
Total: 7 Jam							
9	Senin, 20/01/2025	08.00 – 13.00	Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 2 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.20	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh menggunakan 7 indikator.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 3 pada ArcGIS untuk Menganalisis	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.21	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta			menggunakan 7 indikator.	
Total: 7 Jam							
10	Selasa, 21/01/2025	08.00 – 08.30	Mengisi Logbook KP	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.22		
		08.30 – 11.30	Mengikuti dan Menotulensi Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025	Zoom Meeting	Lampiran 2.23	Pemaparan oleh BPS terkait indikator RW kumuh berdasarkan BPS, Permen PUPR, dan Perkim. Penyepakatan masalah penyebutan menggunakan kawasan atau wilayah administrasi, survey berdasarkan aturan permen pupr, dan untuk teknis masalah surveynya akan ada penyesuaian. Survey menggunakan Jak Survei, anggaran melalui dana hibah	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Melakukan Pendataan RW Kumuh di Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat	Lampiran 2.24	Melakukan pendataan menggunakan Microsoft Excel	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Selatan berdasarkan Kawasannya	dan Kawasan Permukiman			
Total: 7 Jam							
11	Rabu, 22/01/2025	08.15 – 11.25	Membuat Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Pusat	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.25	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.31	Membuat Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.26	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
Total: 6 Jam 41 Menit							
12	Kamis, 23/01/2025	08.12 – 13.00	Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.27	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.10 – 15.23	Mengikuti dan Menotulensi Rapat Pengarahan Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta	Ruang Rapat, Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.28	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh.	
		15.30 – 16.51	Membuat Peta Indikatif Area Kumuh	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat	Lampiran 2.29	Penerapan perangkat lunak (software) GIS	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat	dan Kawasan Permukiman		untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
Total: 7 Jam 22 Menit							
13	Jumat, 24/01/2025	07.37 – 11.30	Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.30	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
		11.30 – 13.00	Istirahat				
		13.10 – 17.07	Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 5 Kecamatan di Kota Jakarta Selatan untuk RPJMN	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.31	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
Total: 7 Jam 50 Menit							
14	Kamis, 30/01/2025	07.35 – 13.00	Merevisi Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk RPJMN	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.32	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi indikatif area kumuh.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.05 – 16.00	Mempelajari Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.33	Mengetahui isi Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021	
Total: 7 Jam 20 Menit							
15	Jumat, 31/01/2025	07.40 – 11.30	Merangkum Dokumen Voluntary National	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat	Lampiran 2.34	Mengetahui isi Dokumen Voluntary National	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021	dan Kawasan Permukiman		Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021	
		11.30 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.30	Merangkum Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.35	Mengetahui isi Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021	
Total: 7 jam 20 Menit							
16	Senin, 03/02/2025	07.55 – 13.00	Merangkum Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.36	Mengetahui isi Peraturan mengenai Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Melakukan Pendataan RW Kumuh berdasarkan Nilai dari 7 Kriteria Kumuh	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.37	Melakukan pendataan menggunakan Microsoft Excel	
Total: 7 Jam 5 Menit							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
17	Selasa, 04/02/2025	07.35 – 13.00	Membuat Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.38		
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Membuat Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.39		
Total: 7 Jam 25 Menit							
18	Rabu, 05/02/2025	07.50 – 09.00	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.40	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
		09.00 – 11.50	Mengikuti dan Menotulensi Rapat Pembahasan Isi Kuesioner untuk Pelaksanaan e-Survey Pendataan RW Kumuh	*Zoom Meeting*	Lampiran 2.41	Rapat membahas penyempurnaan kuesioner untuk pendataan elektronik kawasan kumuh di DKI	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			di Provinsi DKI TA 2025			Jakarta Tahun Anggaran 2025	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Melakukan Pendataan Kawasan Kumuh yang sudah ditangani dan belum ditangani	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.42	Melakukan pendataan menggunakan Microsoft Excel	
Total: 7 Jam							
19	Kamis, 06/02/2025	07.40 – 13.00	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.43	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.44	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
Total: 7 Jam 20 Menit							
20	Jumat, 07/02/2025	08.02 – 11.30	Menyusun Kerangka Acuan Kerja Narasumber Konstruksi Sederhana untuk Peningkatan	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.45		

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
			Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025				
		11.30 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.30	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.46	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
Total: 6 Jam 58 Menit							
21	Senin, 10/02/2025	07.53 – 13.00	Menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.47		
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.48	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
Total: 7 Jam 7 Menit							
22	Selasa, 11/02/2025	07.50 – 11.37	Merunning Raw Data Menggunakan Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.49	Penerapan perangkat lunak (software) GIS untuk mengidentifikasi kesesuaian area kumuh menggunakan 7 indikator	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 14.00	Melakukan Bimbingan Akademik	Zoom Meeting	Lampiran 2.50		
		14.00 – 16.00	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.51	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
Total: 7 Jam 10 Menit							
23	Rabu, 12/02/2025	08.00 – 13.00	Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.52	Buku panduan ini menjadi alat operasional untuk mentransformasikan perencanaan top-down menjadi bottom-up yang lebih responsif.	
Total: 4 Jam							
Keterangan: Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 izin tidak masuk karena ada kegiatan company visit ke LRT Jakarta							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
24	Jumat, 14/02/2025	08.00 – 11.30	Merevisi Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.53		
Total: 3 jam 30 Menit							
25	Senin, 17/02/2025	08.00 – 13.00	Mengisi dan Merapihkan Logbook Kerja Praktek	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.54		
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.07	Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.55	Penyelarasan data menggunakan Microsoft Excel dibandingkan dengan data spasial (ArcGIS)	
Total: 7 Jam 7 Menit							
26	Selasa, 18/02/2025	07.55 – 09.00	Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.56	Penyelarasan data menggunakan Microsoft Excel dibandingkan dengan data spasial (ArcGIS)	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		09.00 – 11.20	Mengikuti dan Menotulensi Webinar Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV): Solusi Permasalahan Kebutuhan Tanah Untuk Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan	YouTube Live	Lampiran 2.57	Program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pembangunan dan perbaikan rumah dengan pendekatan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di Palmerah dan Tanah Tinggi, Di Palmerah (RW 08), teridentifikasi 79 rumah tidak layak huni (73% rusak sedang-berat) dengan 6 KK bersedia bergabung dalam KTV 4 lantai (9 unit), sementara di Tanah Tinggi (RW 12) terdapat 55 rumah (78% rusak sedang) dengan 8 KK siap KTV.	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 15.30	Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.58	Penyelarasan data menggunakan Microsoft Excel dibandingkan dengan data spasial (ArcGIS)	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
Total: 5 Jam 55 Menit							
27	Rabu, 19/02/2025	08.00 – 09.00	Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.59	Penyelarasan data menggunakan Microsoft Excel dibandingkan dengan data spasial (ArcGIS)	
		09.10 – 13.58	Mengikuti Pertemuan Ke-3 terkait Perencanaan KTV dan Survey Lokasi KTV di Kecamatan Johar Baru	Balai Warga RW 02, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat	Lampiran 2.60	Survey sosialisasi program KTV di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berkaitan erat karena kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam perencanaan kawasan kumuh. Sosialisasi dan survey lapangan penting untuk memahami kebutuhan masyarakat, meningkatkan keterlibatan warga, serta memastikan perencanaan dan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.	
		14.00 – 16.00	Mengikuti Webinar *Reinventing Cities*	Zoom Meeting	Lampiran 2.61		
Total: 7 Jam 48 Menit							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
28	Kamis, 20/02/2025	08.00 – 13.00	Mempelajari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.62	Mengetahui isi dari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023	
		13.00 – 13.00	Istirahat				
		13.00 – 16.00	Mengikuti dan Menotulensi Rapat Koordinasi Rencana Strastegis Informasi Geospasial 2023 - 2026	Ruang Rapat, Lantai 2, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Lampiran 2.63	Data geospasial menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, pemantauan pembangunan, dan pengambilan kebijakan berbasis spasial. Informasi geospasial digunakan untuk analisis zonasi, identifikasi kawasan kumuh, mitigasi bencana, serta integrasi program pembangunan antar-sektor. Selain itu, rencana strategis ini memperkuat koordinasi data antara instansi pemerintah (seperti BIG, PUPR, dan pemda), mendukung implementasi *smart city* dan pembangunan berkelanjutan.	
Total: 7 Jam							

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
29	Jumat, 21/02/2025	08.00 – 11.30	Mempelajari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023	Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampiran 2.64	Mengetahui isi dari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023	
		11.30 – 13.00	Istirahat				
		14.00 – 16.00	Mengikuti dan Menotulensi Rapat Persiapan Penghunian Rumah Susun Jagakarsa dengan Kelurahan yang ada di Jakarta Selatan.	Zoom Meeting	Lampiran 2.65	Rapat membahas alokasi 40% unit Rusun Jagakarsa (726 unit) untuk warga berpenghasilan rendah (MBR) terdampak pembangunan, dengan syarat memiliki KTP DKI, berkeluarga, dan terdampak proyek sosial. Warga yang sudah dapat ganti rugi tidak berhak. Dibahas juga rencana normalisasi Sungai Krukut dan Kali Ciliwung yang masih tahap persiapan, dengan beberapa titik terdampak di Pejaten Timur dan Rawajati. Beberapa kelurahan melaporkan warga terdampak banjir namun data belum	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
						lengkap. Walikota menekankan perlunya koordinasi dengan BBWS CC dan Dinas SDA untuk penetapan patok terase dan klarifikasi rencana teknis. Rapat juga menanggapi usulan pembukaan rusun untuk warga non-terdampak.	
Total: 5 Jam 30 Menit							
TOTAL JAM KERJA:							

3.2. Substansi yang Disumbangkan Praktikan

Selama melaksanakan kerja praktik, praktikan mendapat kesempatan untuk turut serta dalam menotulensi rapat, merangkum peraturan-peraturan terkait pembangunan permukiman, mengikuti survey lokasi, membantu membuat peta, serta menyusun buku. Beberapa substansi yang disumbangkan praktikan selama melakukan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Menotulensi rapat-rapat
2. Merangkum peraturan dan dokumen terkait perencanaan permukiman
3. Menganalisis spasial menggunakan ArcGIS
4. Membuat peta indikatif area kumuh DKI Jakarta untuk RPJMN
5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) TA 2025
6. Menyusun dan mendesain Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025
7. Membantu pendataan RW kumuh di Jakarta Selatan berdasarkan kawasannya dan kriterianya

BAB IV
ANALISIS

4.1. Manfaat Praktis dan Teoritis bagi Praktikan

Selama melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, praktikan memperoleh berbagai manfaat, baik dari sisi praktik lapangan maupun penguatan pemahaman teoritis. Beberapa manfaat yang di dapatkan adalah sebagai berikut.

4.1.1. Manfaat Praktis bagi Praktikan

Manfaat praktis yang praktikan rasakan setelah melakukan kerja praktik adalah memberikan gambaran dan pengalaman di dunia kerja secara profesional dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota terutama keterkaitannya dengan Mata Kuliah Perencanaan Perumahan, yang meliputi:

1. Pemahaman langsung terhadap sistem kerja instansi pemerintah di bidang permukiman.
2. Pengalaman langsung dalam implementasi kebijakan perumahan dan permukiman.
3. Peningkatan keterampilan teknis seperti analisis spasial dan penggunaan tools perencanaan dalam pengaplikasian *ArcGIS*.
4. Pemahaman operasional program prioritas seperti rusunawa dan penanganan kawasan kumuh di DKI Jakarta.
5. Pengembangan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim dalam lingkungan kerja profesional.
6. Pengalaman mengikuti proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program, seperti pembangunan KTV atau penataan kawasan kumuh.
7. Jejaring profesional dengan praktisi di bidang tata kota dan perumahan;

4.1.2. Manfaat Teoritis bagi Praktikan

Manfaat teoritis yang dirasakan oleh praktikan setelah melakukan kerja praktik adalah memberikan gambaran dan pengalaman di dunia kerja secara profesional dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, yang meliputi:

1. Praktikan dapat menguji relevansi teori-teori perencanaan wilayah dalam konteks perkotaan Jakarta yang dinamis.

2. Refleksi kritis terhadap kesenjangan antara konsep akademis dan implementasi kebijakan
3. Pemahaman holistik tentang sistem pengelolaan kawasan permukiman
4. Analisis tantangan aktual dalam pembangunan berkelanjutan
5. Penguatan *framework* berpikir dalam penyusunan kebijakan publik

4.2. Kelebihan dan Kekurangan Instansi Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, terdapat kelebihan dan kekurangan instansi yang praktikan dapatkan. Beberapa kelebihan dan kekurangan yang di dapatkan adalah sebagai berikut.

4.2.1. Kelebihan Instansi Kerja Praktik

1. Instansi memberikan tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, sehingga praktikan dapat mengaplikasikan pengetahuan akademik secara langsung.
2. Pembimbing senantiasa memberikan bimbingan dan arahan ketika praktikan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas.
3. Pembimbing maupun rekan kerja sangat terbuka dalam berbagi informasi terkait pekerjaan, sehingga memudahkan proses pembelajaran.
4. Lingkungan kerja di Bidang Perumahan DPRKP Provinsi DKI Jakarta sangat mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan, menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan.

4.2.2. Kekurangan Instansi Kerja Praktik

1. Kualitas Wi-Fi yang kurang optimal seringkali menghambat kelancaran pengerjaan tugas dan aktivitas kerja.
2. Kondisi ruangan yang cenderung panas pada waktu-waktu tertentu dapat mengganggu konsentrasi selama bekerja.

4.3. Kelebihan dan Kekurangan Praktikan di Instansi Kerja Praktik

Seorang praktikan yang masih dalam masa belajar dan belum pernah bekerja secara profesional di suatu instansi pemerintahan merasa mendapatkan pengalaman baru serta

kesempatan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa kuliah. Dalam melakukan kerja praktek di Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukian Provinsi DKI Jakarta, praktikan mencoba mengenali kelebihan serta kekurangan diri sendiri, sehingga dapat menjadi masukan untuk meningkatkan diri sendiri.

4.3.1. Kelebihan Praktikan selama Mengikuti Kerja Praktek

1. Praktikan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami alur tugas, dan berintegrasi dengan baik bersama rekan kerja maupun pembimbing.
2. Praktikan aktif bertanya dan mencari informasi ketika menghadapi kesulitan, menunjukkan sikap proaktif dalam memahami pekerjaan.
3. Pengetahuan dari perkuliahan, khususnya dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
4. Praktikan menjaga etika kerja, menghormati aturan instansi, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.
5. Praktikan mampu menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.
6. Praktikan selalu mengikuti arahan dengan baik dan aktif bertanya ketika menghadapi kesulitan, menunjukkan sikap terbuka dalam proses pembelajaran.
7. Praktikan memiliki motivasi belajar yang tinggi, disiplin dalam bekerja, serta bertanggung jawab penuh terhadap setiap tugas yang diberikan.
8. Praktikan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta menerima kritik dan saran dengan baik sebagai bahan untuk pengembangan kompetensi diri.

4.3.2. Kekurangan Praktikan selama Mengikuti Kerja Praktek

1. Praktikan terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna dan memahami tugas-tugas yang diberikan, terutama yang bersifat teknis atau belum pernah dipelajari sebelumnya.
2. Praktikan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Model Builder di ArcGIS, sehingga membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Masukan Perbaikan bagi Penyelenggara Mata Kuliah Kerja Praktek

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama menjalani kerja praktik, terdapat sejumlah saran yang dapat disampaikan kepada Penyelenggara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja praktik pada tahun ajaran selanjutnya. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Program studi sebaiknya menetapkan dosen pembimbing sebelum kerja praktik dimulai, sehingga mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan arahan sejak persiapan hingga pelaksanaan di instansi.
2. Program studi perlu membuat daftar instansi yang pernah menjadi lokasi kerja praktik mahasiswa sebelumnya, khususnya yang relevan dengan bidang PWK. Database ini dapat membantu mahasiswa angkatan berikutnya dalam memilih tempat kerja praktik sesuai minat dan keahlian mereka.
3. Program studi dapat menjalin kerja sama lebih intensif dengan instansi terkait, seperti DPRKP, Bappeda, atau dinas tata kota, untuk memastikan mahasiswa mendapatkan proyek atau tugas yang relevan dengan bidang keilmuan PWK.
4. Perlu adanya sistem pemantauan berkala selama kerja praktik, seperti laporan progres atau kunjungan dosen ke instansi, untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang optimal.

Dengan implementasi saran-saran di atas, pelaksanaan kerja praktik di tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat lebih terstruktur, relevan, dan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Teknik Planologi Universitas Trisakti. 2025. Pedoman Kerja Praktek.

dprkp.jakarta.go.id (2020). Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-tugasdanfungsi

dprkp.jakarta.go.id (2020). Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-strukturorganisasi

dprkp.jakarta.go.id (2020). Profil Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile pejabatstruktural

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan di Instansi Kerja Praktik

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 34833708, 3865369, Fax: 3847151
JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 8161/HM.03.04 — 18 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Kerja Praktik

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Nomor 1493/AK.1.03/FALTL/XI/2024 Hal Permohonaan Kerja Praktik, dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk melakukan kegiatan Kerja Praktik mulai dari 8 Januari 2025 sampai dengan 21 Februari 2025.

Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama	:	Randi An-Nissa Putri Ramadhanty
NIM	:	083002200005
Kontak	:	08829646818

Selanjutnya agar yang bersangkutan menghubungi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,
Sekretaris Dinas

Meli Budiastuti
NIP 198805171994032004

Tembusan :

- Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 2. 1. Mempelajari Laporan Kegiatan Pelaksanaan Diskusi Rencana Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

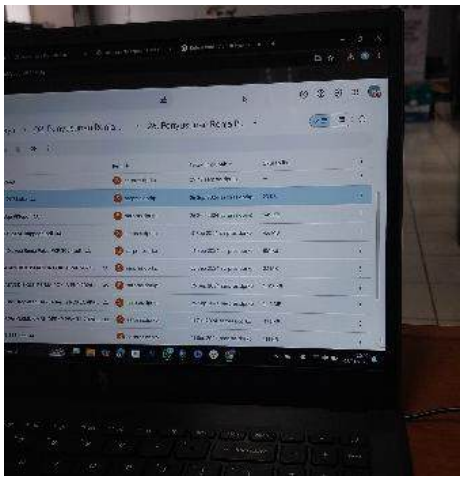

Lampiran 2. 2. Mempelajari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dan SE DJCK Nomor 39 Tahun 2020

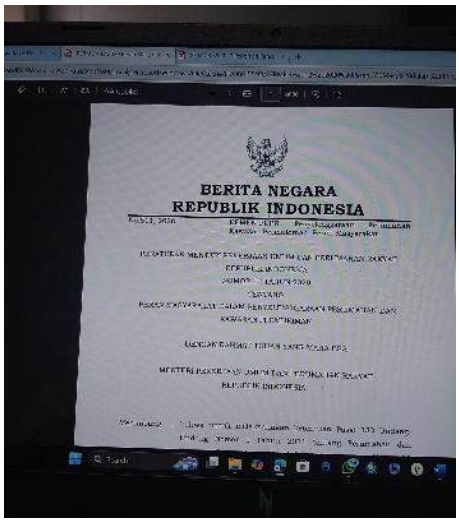

Lampiran 2. 3. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Konsultasi Tugas Akhir Mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal (TKV)

Lampiran 2. 4. Mengikuti Rapat Teknis dengan Tenaga Ahli mengenai Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025

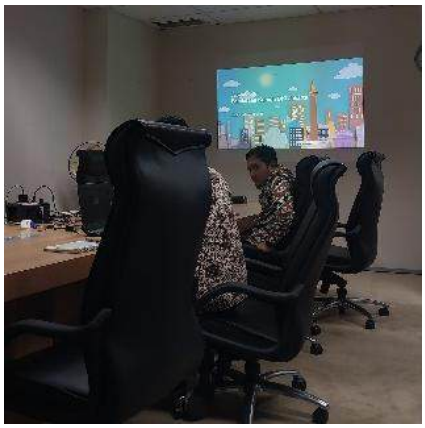

Lampiran 2. 5. Menyusun dan Mengisi Logbook KP

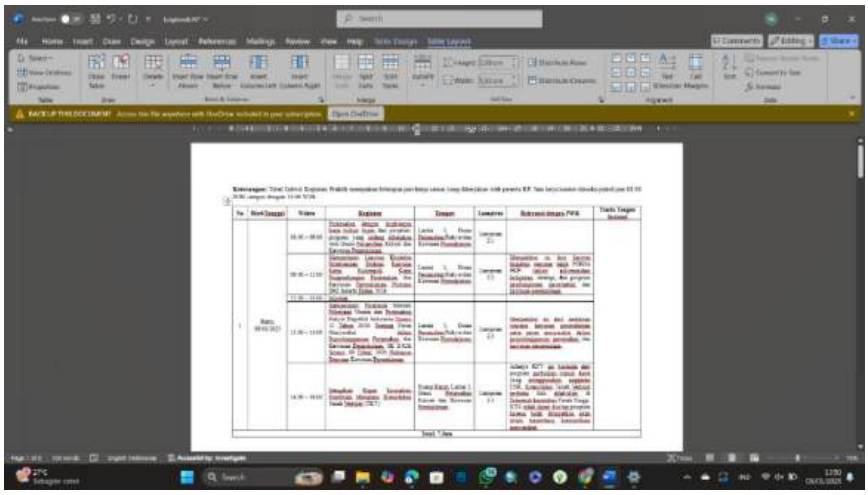

Lampiran 2. 6. Merapihkan Notulensi Rapat Laporan Akhir Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta

https://docs.google.com/document/d/1xBWL2xsM6pf7ZGrIFVJWAMlxEsW-4uELmupqGhLdsyI/edit?usp=sharing

Lampiran 2. 7. Mengisi Logbook KP

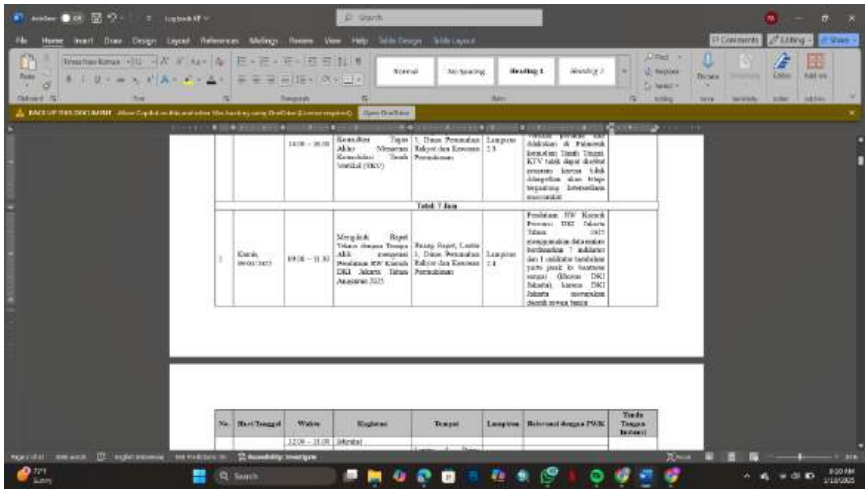

Lampiran 2. 8. Menyusun Laporan KP

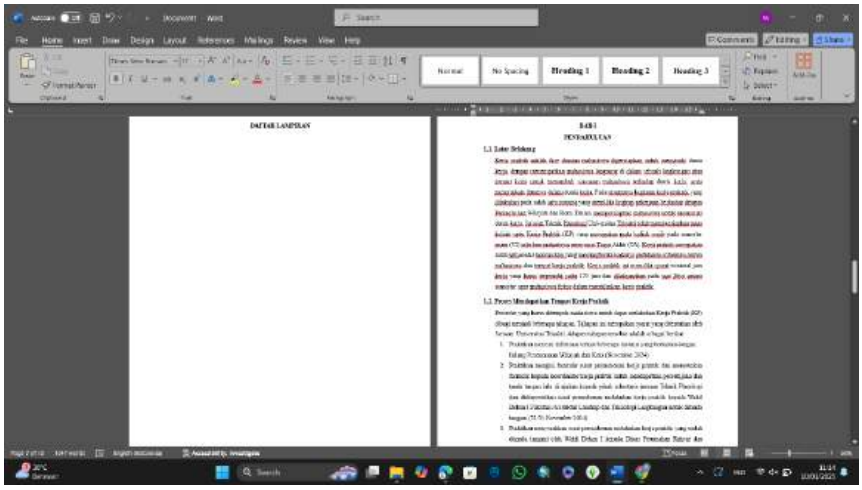

Lampiran 2. 9. Melakukan diskusi terkait Program Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan (Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh) serta KTV Palmerah dan Tanah Tinggi

Lampiran 2. 10. Mengisi Logbook KP

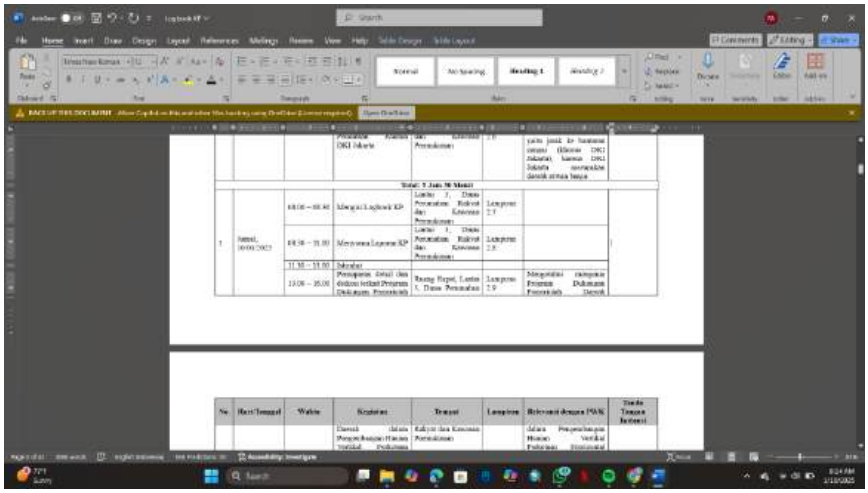

Lampiran 2. 11. Merangkum Dokumen mengenai Horizontal Learning: Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh

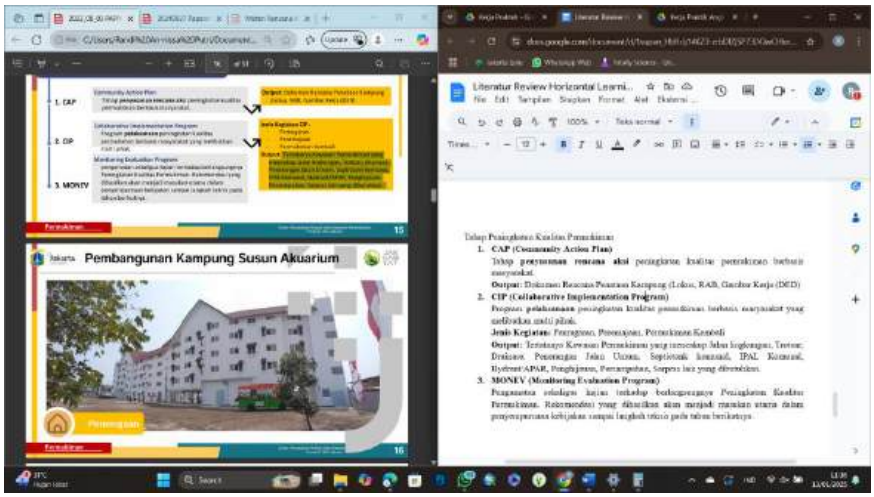

Lampiran 2. 12. Merangkum Dokumen mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal Palmerah dan Tanah Tinggi

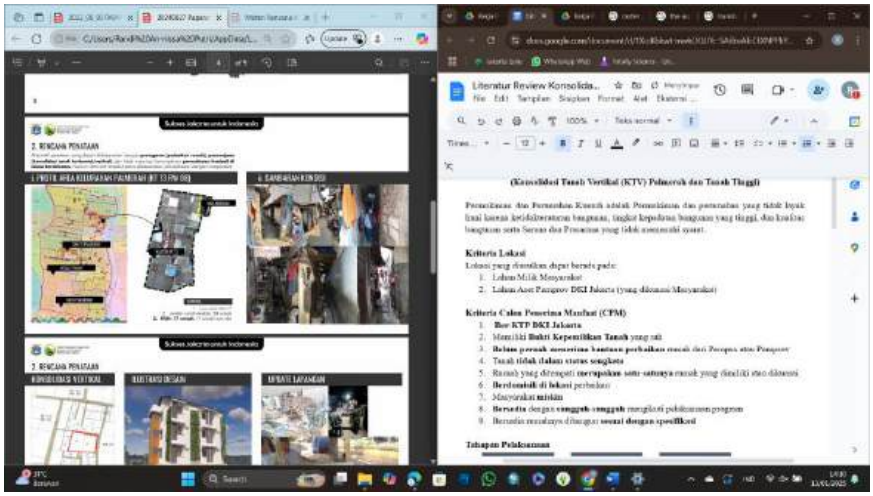

Lampiran 2. 13. Mengisi Laporan KP

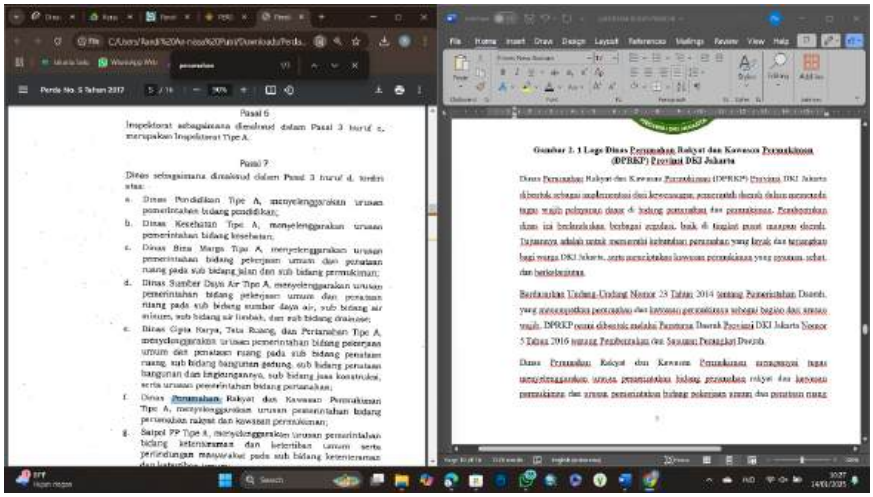

Lampiran 2. 14. Mempelajari Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

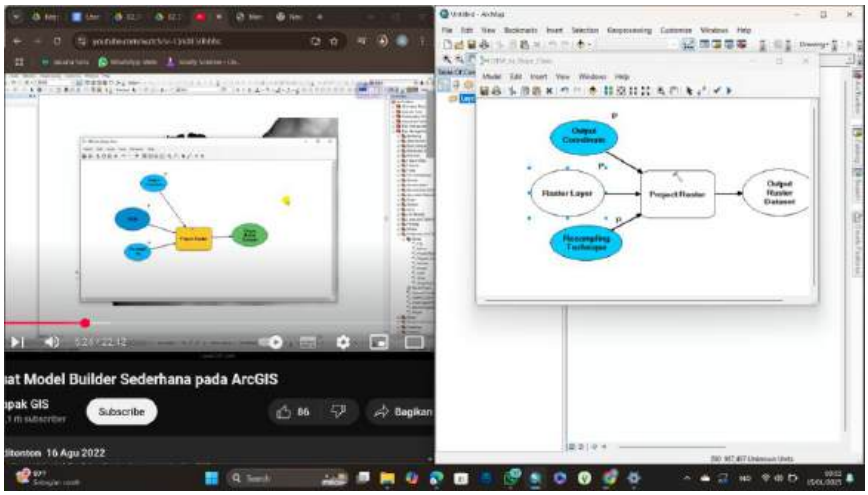

Lampiran 2. 15. Mempelajari Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

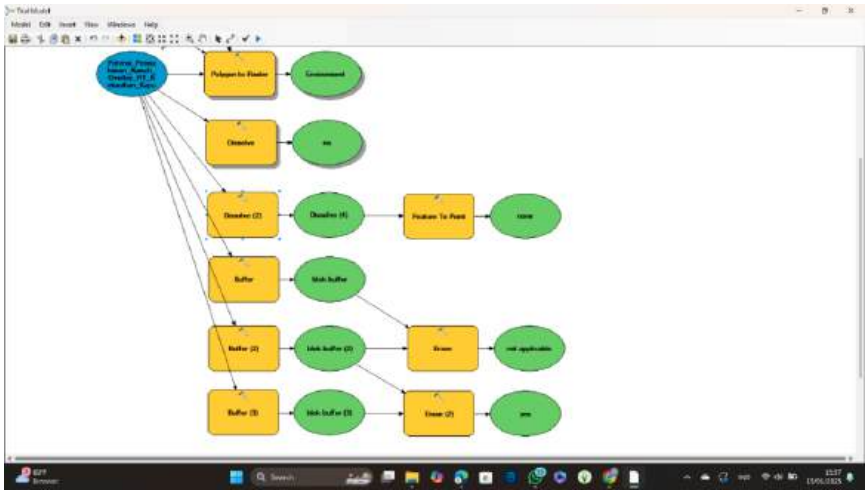

Lampiran 2. 16. Membuat Tabel Monev POKJA PKP Tahun 2024 untuk Pemaparan Laporan Akhir Renja POKJA PKP

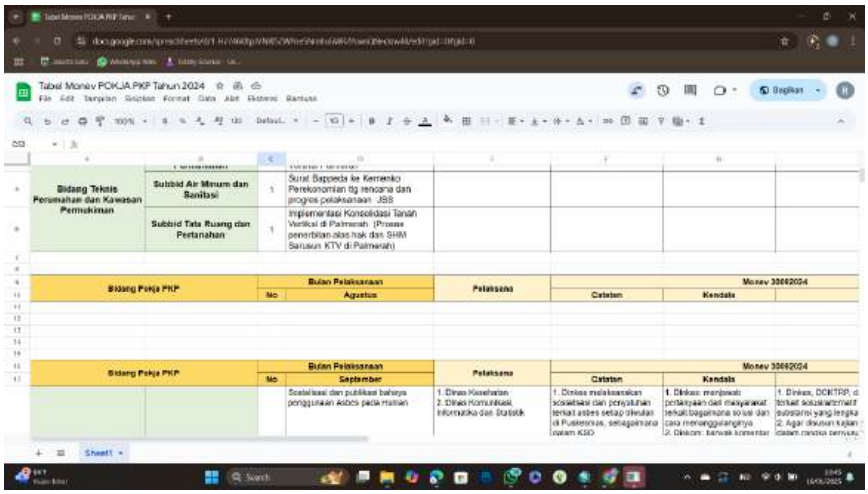

Lampiran 2. 17. Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 1 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

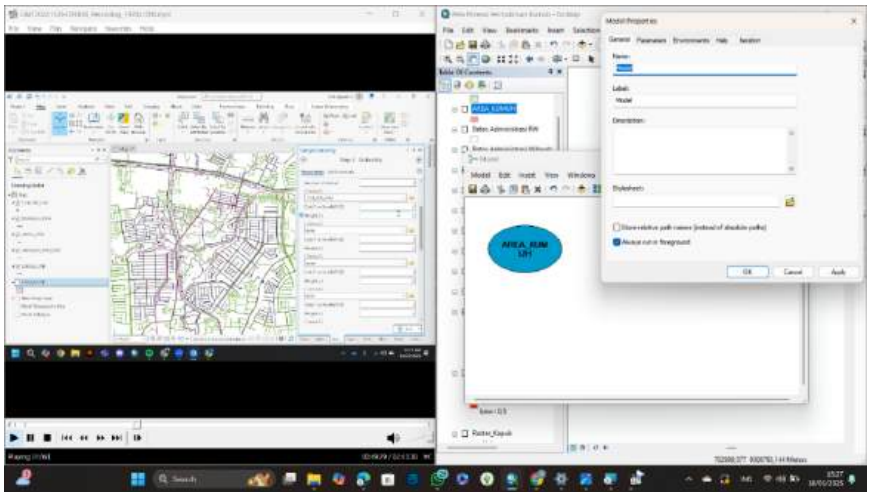

Lampiran 2. 18. Mengclip SHP Area kumuh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menjadi Area Kumuh Kelurahan pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

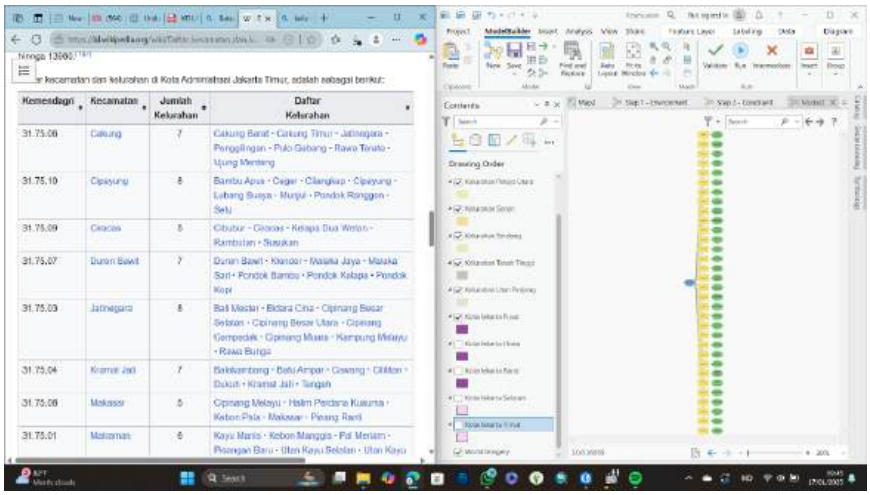

Lampiran 2. 19. Mengclip SHP Area kumuh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menjadi Area Kumuh Kelurahan pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

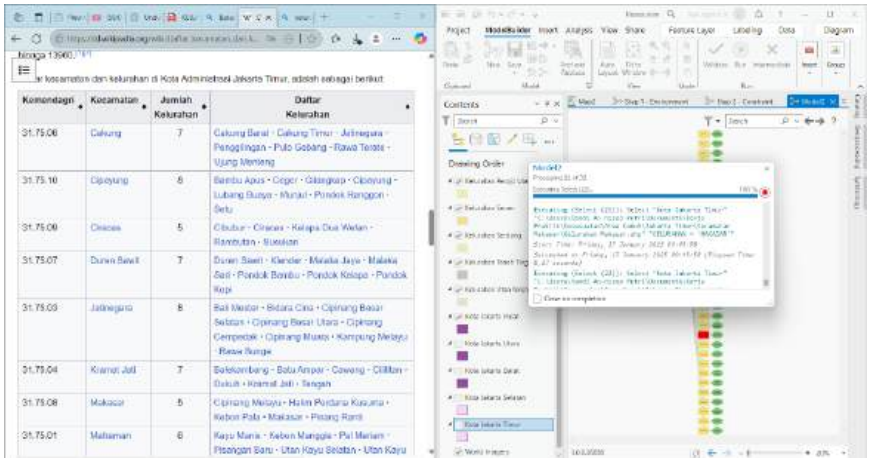

Lampiran 2. 20. Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 2 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

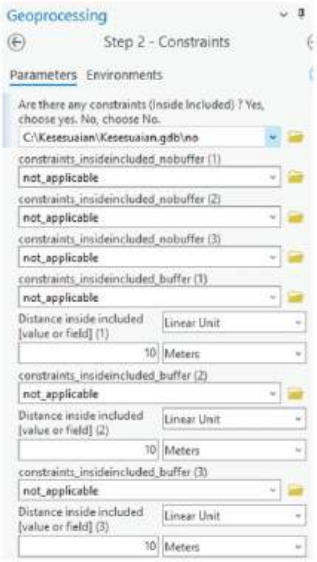

Lampiran 2. 21. Mencoba Mengaplikasian Model Builder Tahap 3 pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

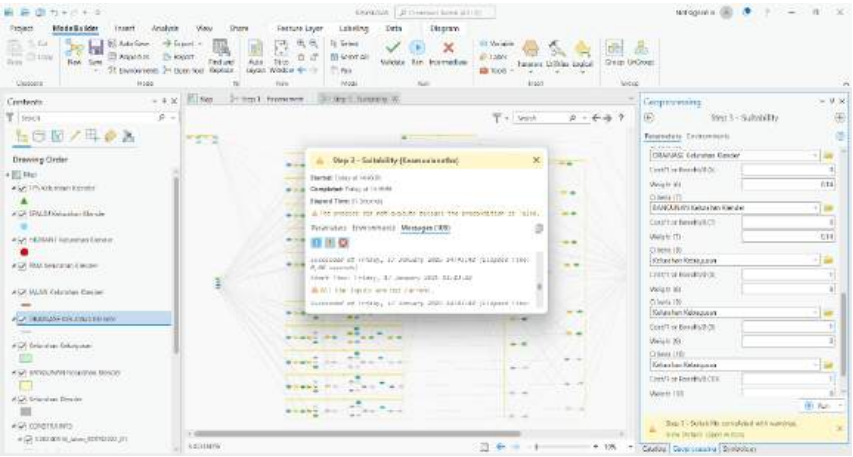

Lampiran 2. 22. Mengisi Logbook KP

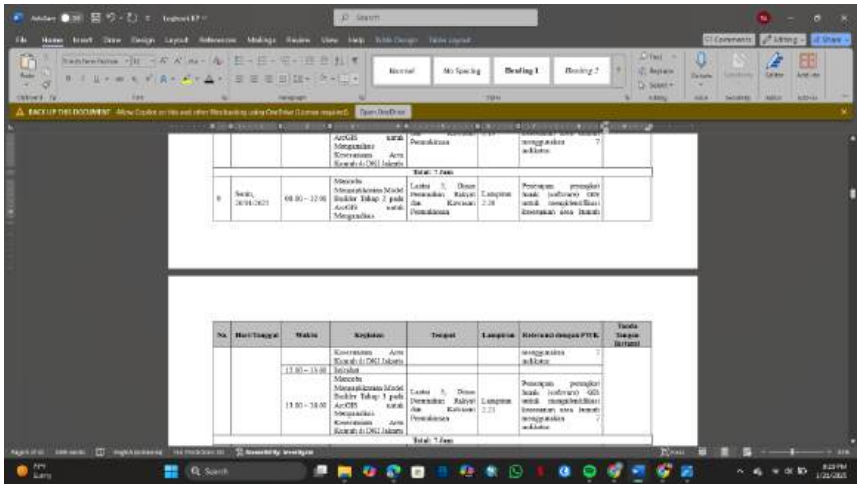

Lampiran 2. 23. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025

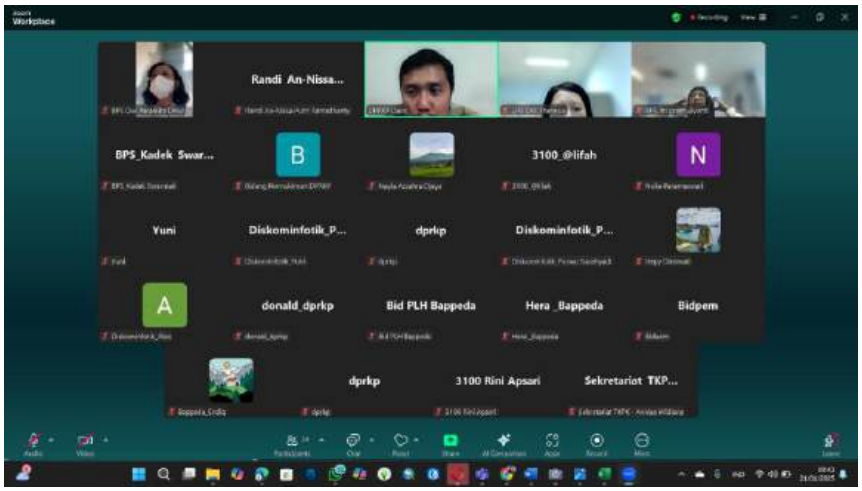

Lampiran 2. 24. Melakukan Pendataan RW Kumuh di Jakarta Selatan berdasarkan Kawasannya

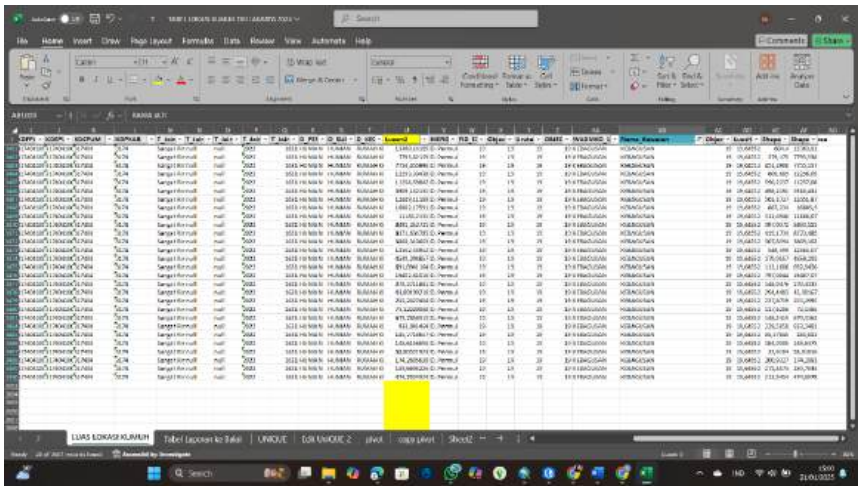

Lampiran 2. 25. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Pusat

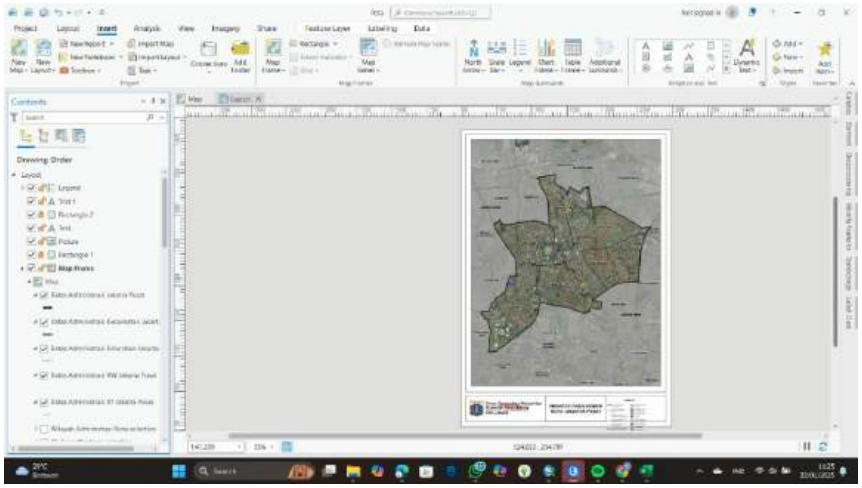

Lampiran 2. 26. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur

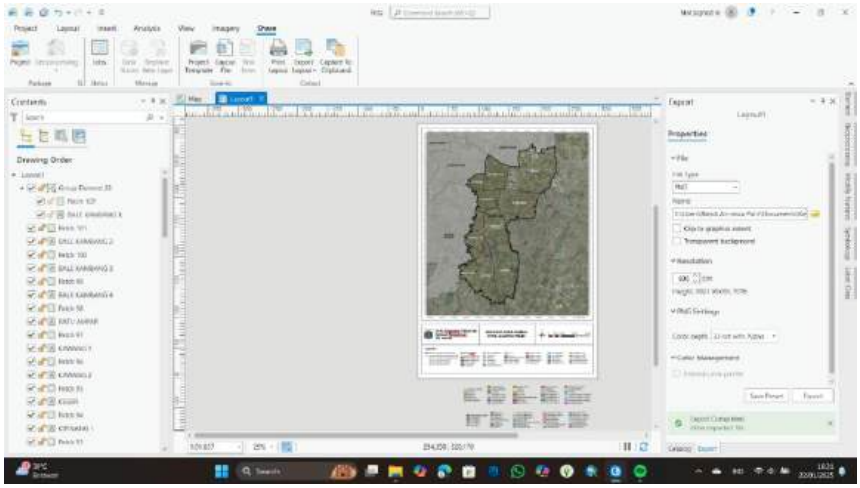

Lampiran 2. 27. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat

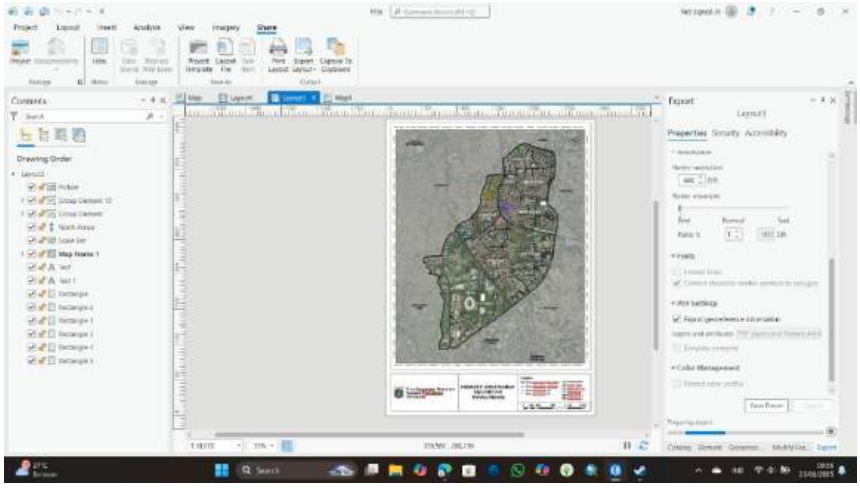

Lampiran 2. 28. Mengikuti Rapat Pengarahan Pengaplikasian Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

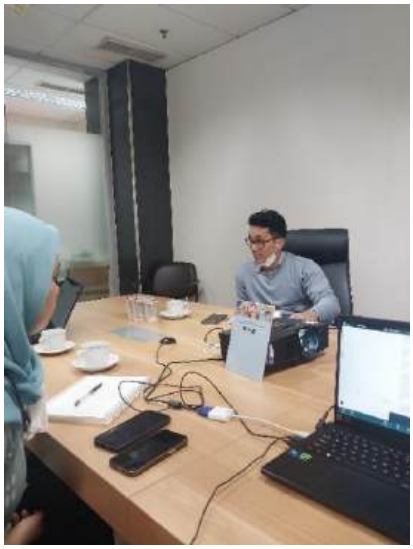

Lampiran 2. 29. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat

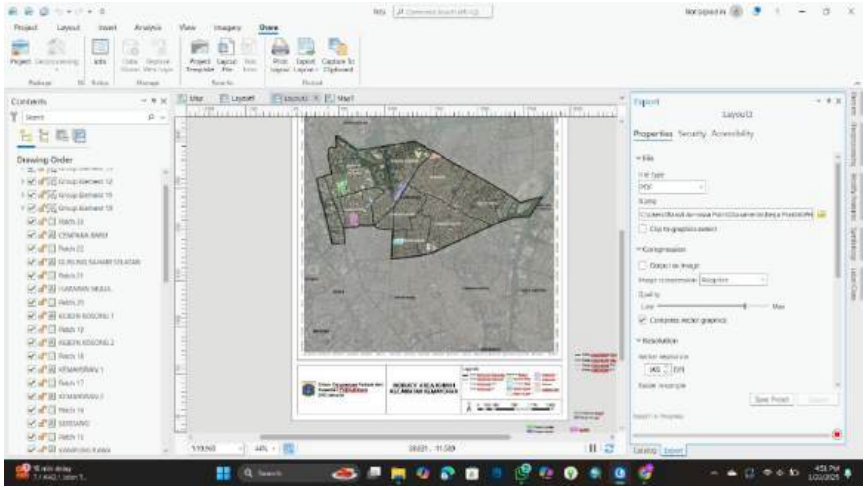

Lampiran 2. 30. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 7 Kecamatan di Kota Jakarta Pusat

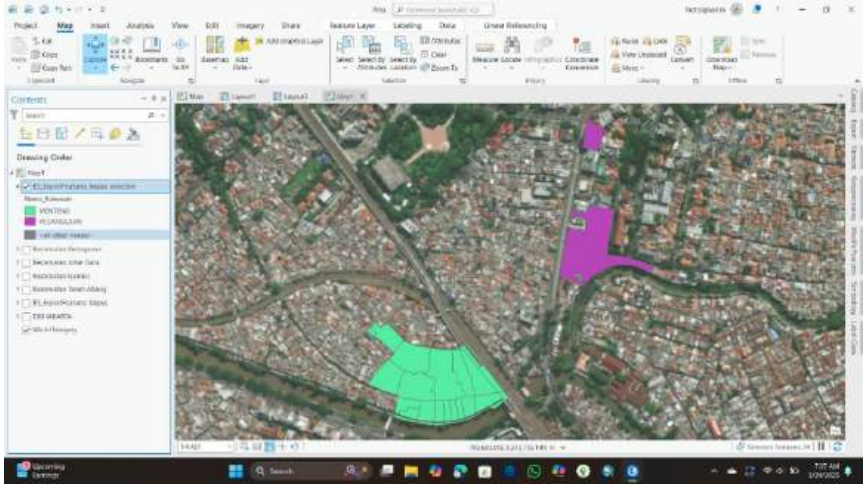

Lampiran 2. 31. Membuat Peta Indikatif Area Kumuh 5 Kecamatan di Kota Jakarta Selatan

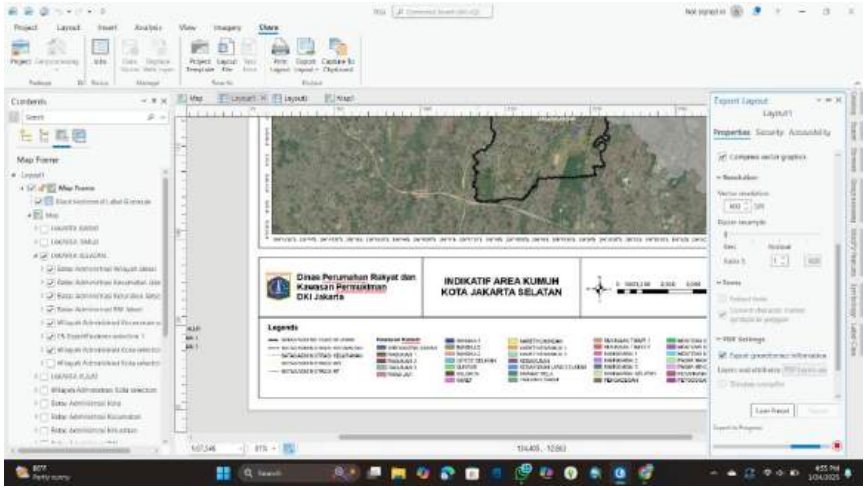

Lampiran 2. 32. Merevisi Peta Indikatif Area Kumuh Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat

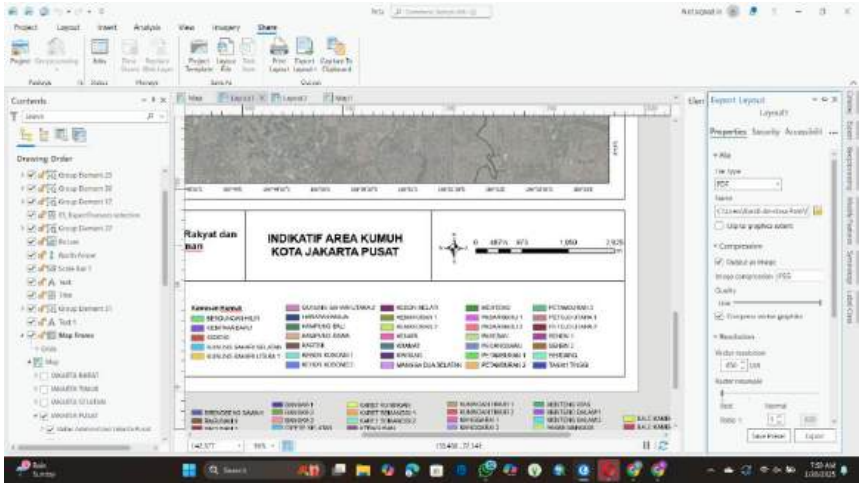

Lampiran 2. 33. Mempelajari Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021

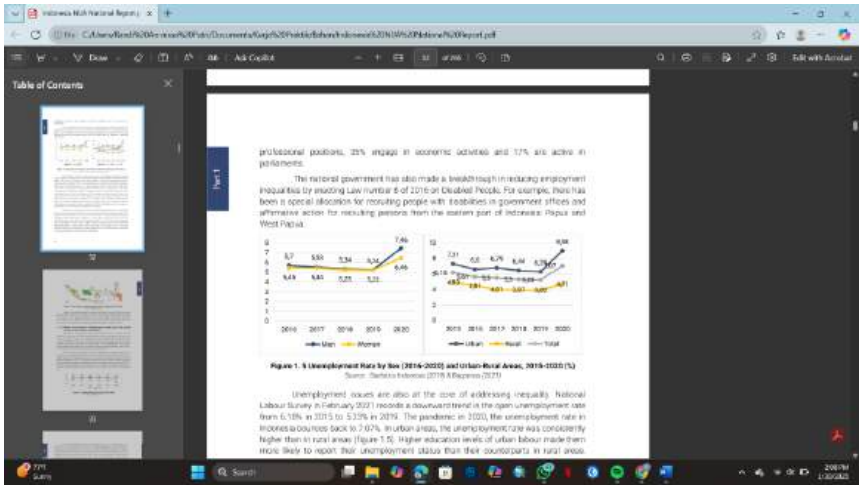

Lampiran 2. 34. Merangkum Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021

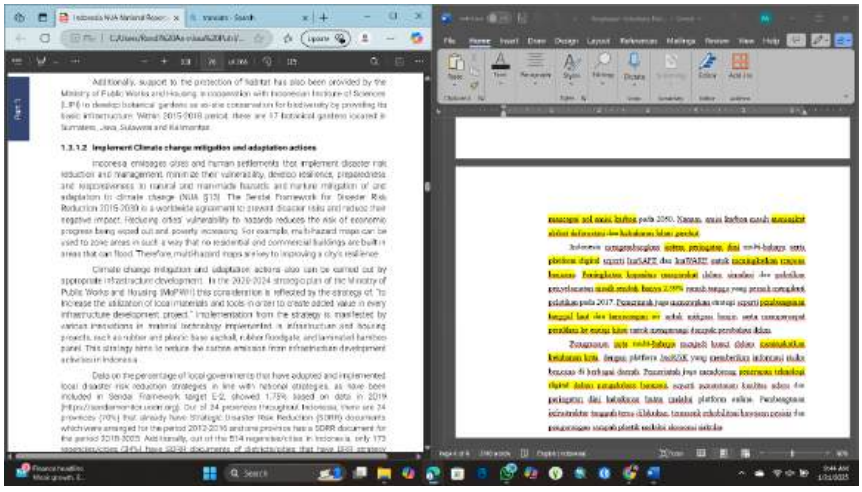

Lampiran 2. 35. Merangkum Dokumen Voluntary National Review for Implementation of New Urban Agenda Final Report 2021

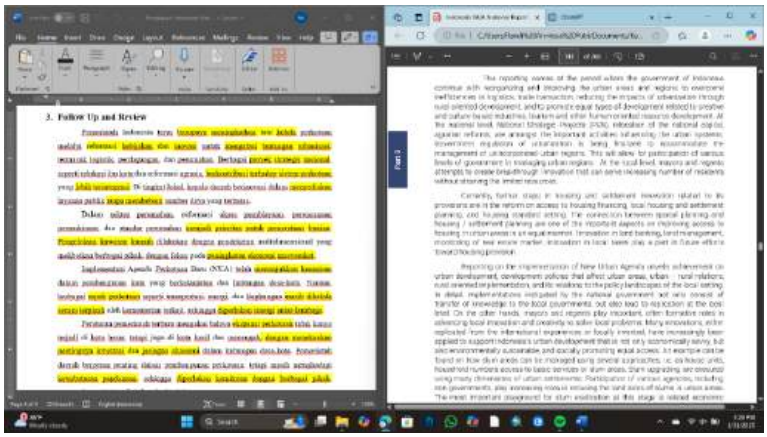

Lampiran 2. 36. Merangkum Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

https://docs.google.com/document/d/1wICstf4HFO0e0LJlyFBB_NDPPbl3JUpPkgolGoCS6ts/edit?usp=sharing

Lampiran 2. 37. Melakukan Pendataan RW Kumuh berdasarkan Nilai dari 7 Kriteria Kumuh

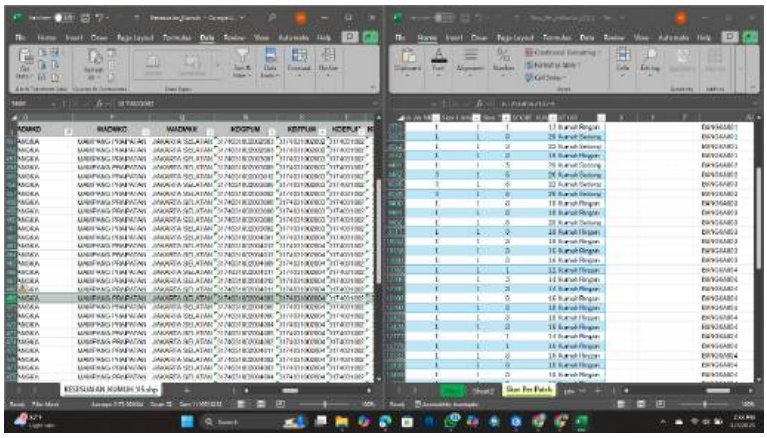

Lampiran 2. 38. Membuat Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

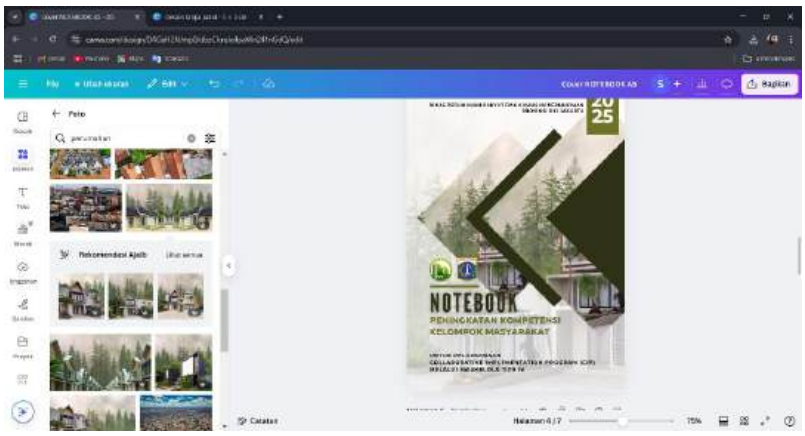

Lampiran 2. 39. Membuat Desain Cover Buku untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

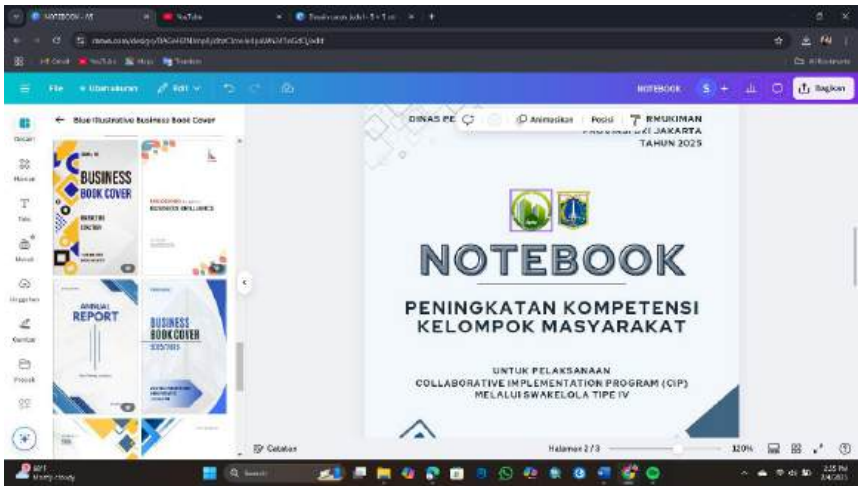

Lampiran 2. 40. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

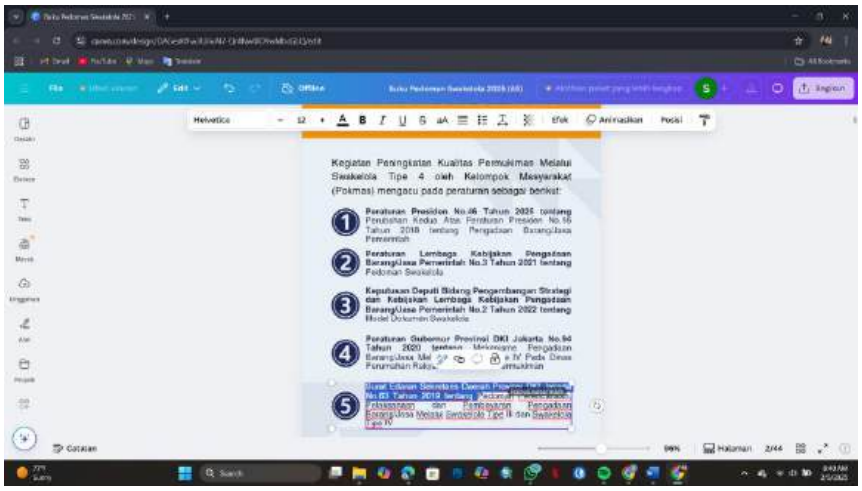

Lampiran 2. 41. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Pembahasan Isi Kuesioner untuk Pelaksanaan e-Survey Pendataan RW Kumuh di Provinsi DKI TA 2025

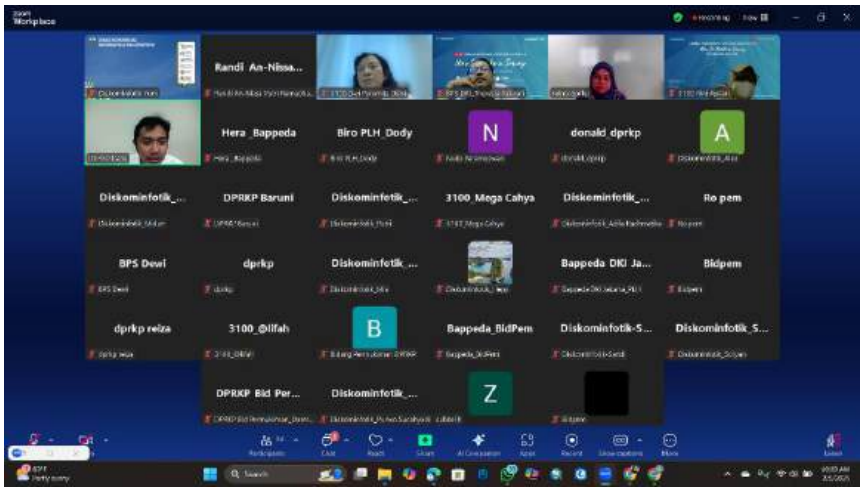

Lampiran 2. 42. Melakukan Pendataan Kawasan Kumuh yang sudah ditangani dan belum ditangani

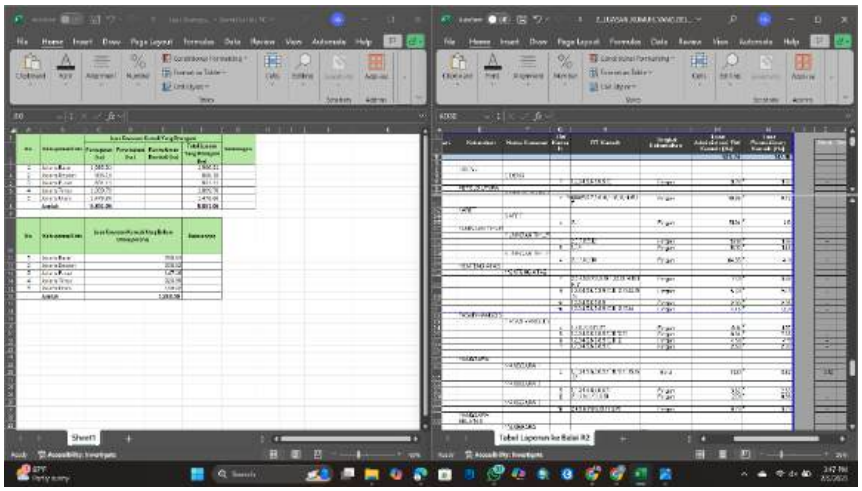

Lampiran 2. 43. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

Lampiran 2. 44. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

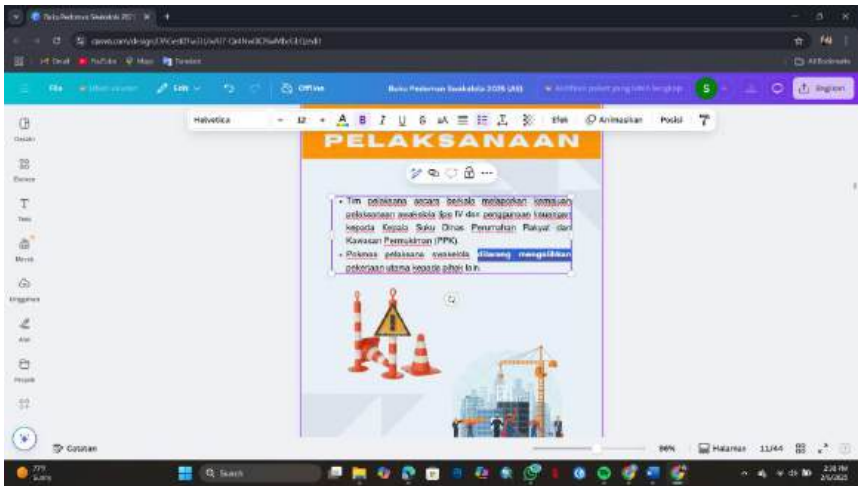

Lampiran 2. 45. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Narasumber Konstruksi Sederhana untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

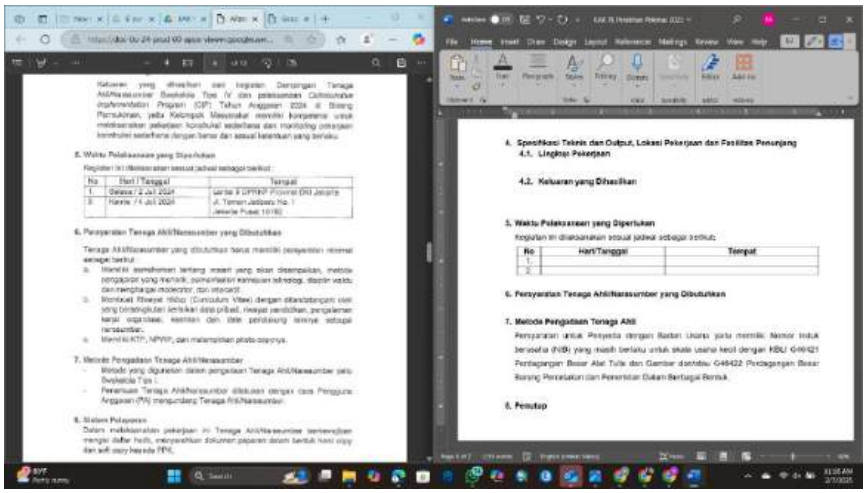

Lampiran 2. 46. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

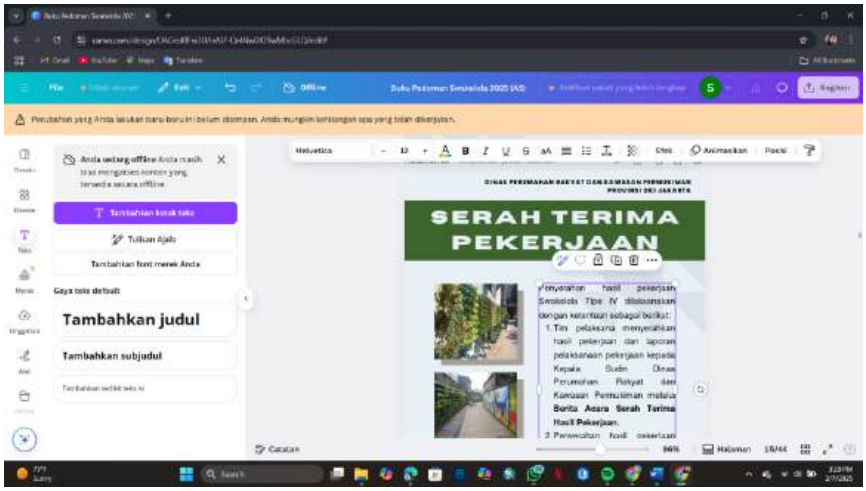

Lampiran 2. 47. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

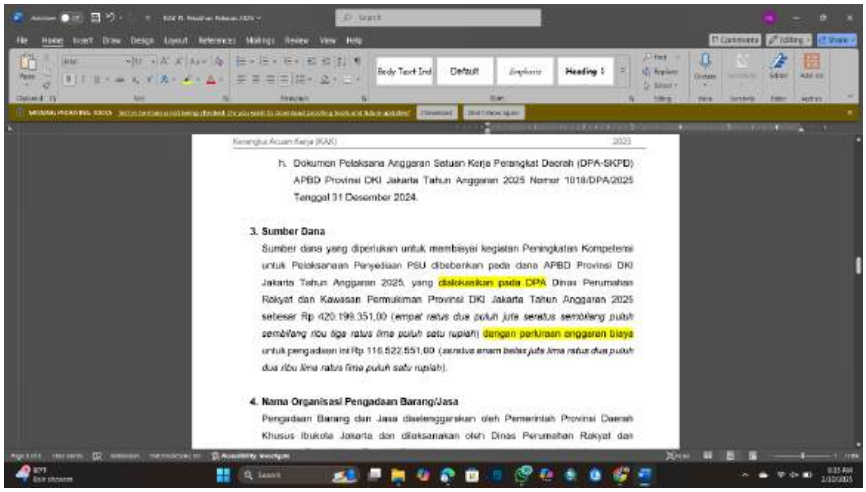

Lampiran 2. 48. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

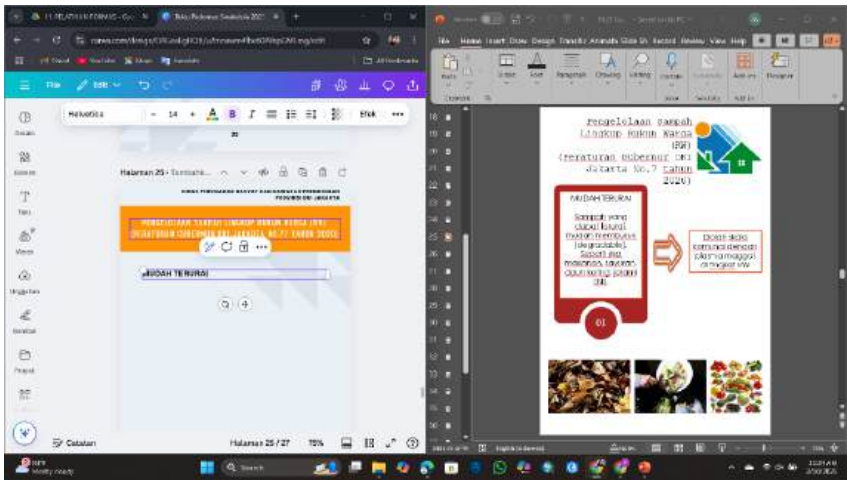

Lampiran 2. 49. Merunning Raw Data Menggunakan Model Builder pada ArcGIS untuk Menganalisis Kesesuaiaan Area Kumuh di DKI Jakarta

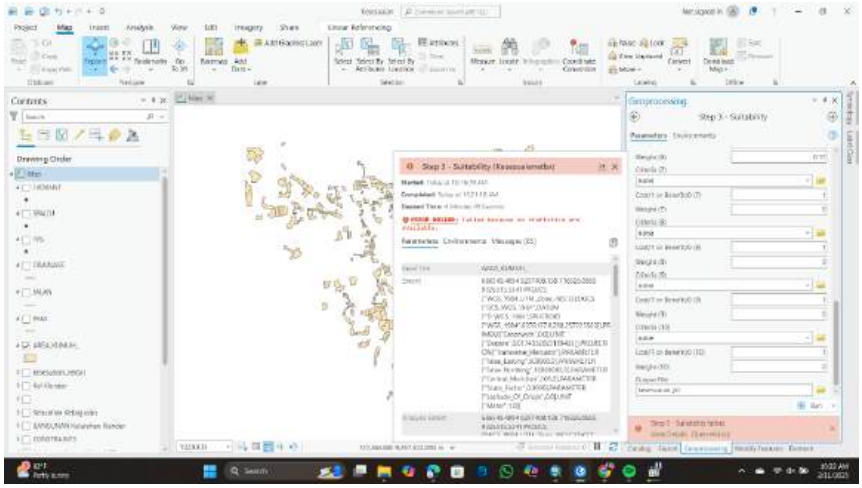

Lampiran 2. 50. Melakukan Bimbingan Akademik

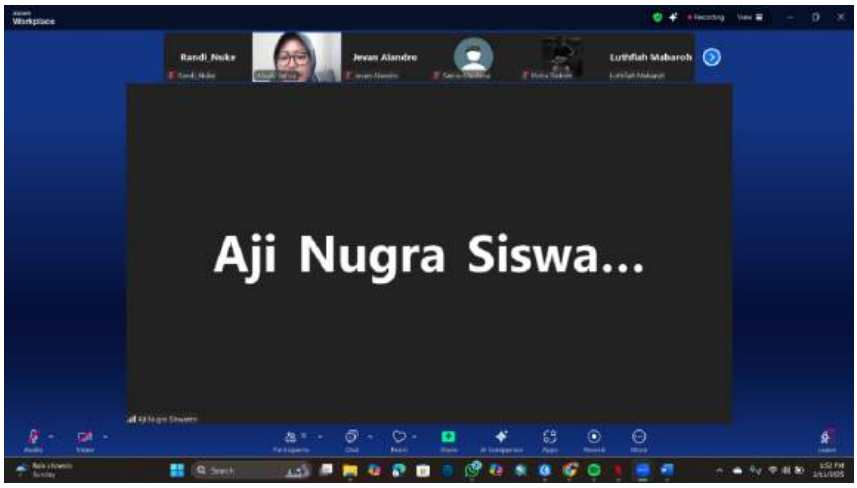

Lampiran 2. 51. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

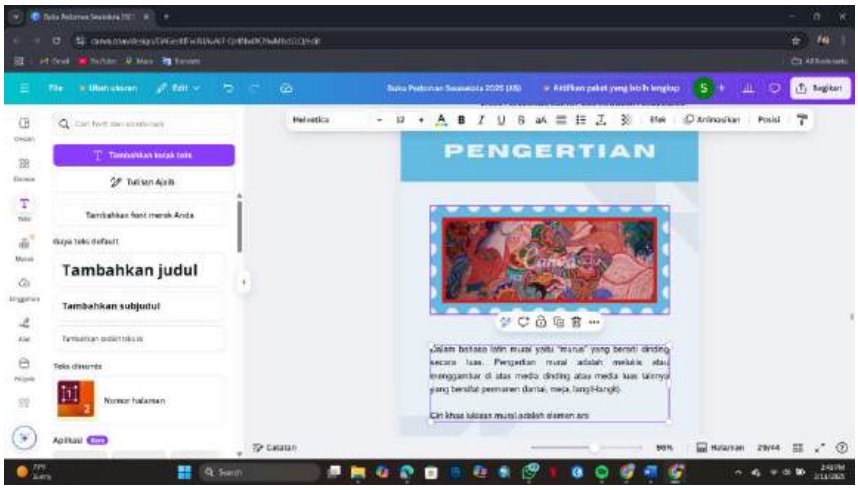

Lampiran 2. 52. Menyusun Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

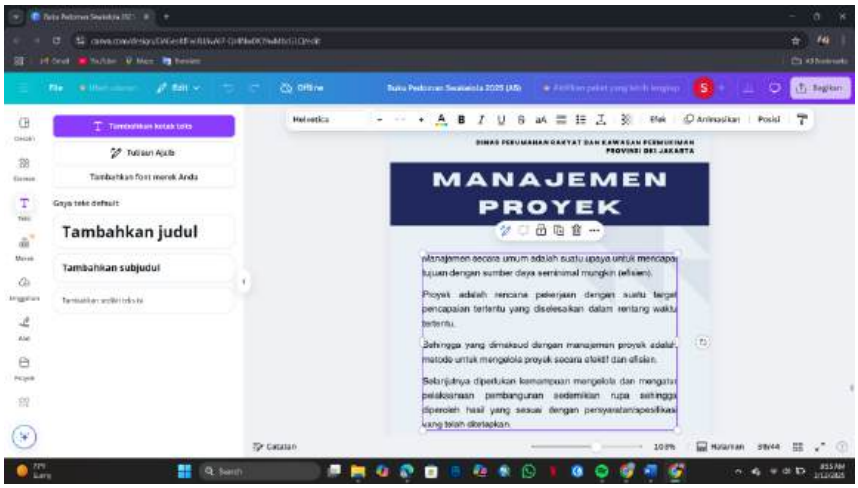

Lampiran 2. 53. Merevisi Buku Panduan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tahun Anggaran 2025

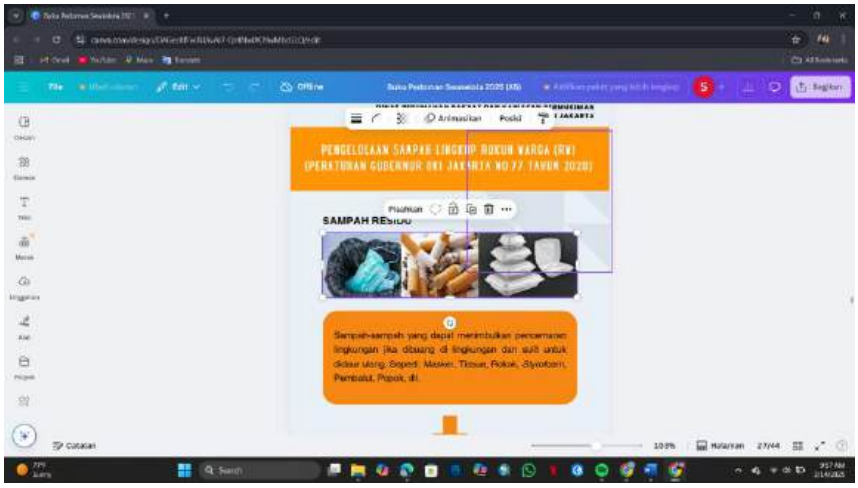

Lampiran 2. 54. Mengisi dan Merapihkan Logbook KP

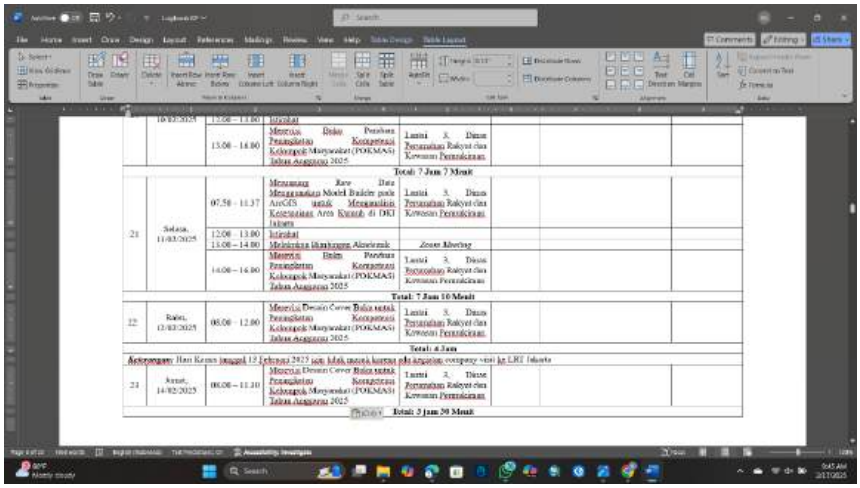

Lampiran 2. 55. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan

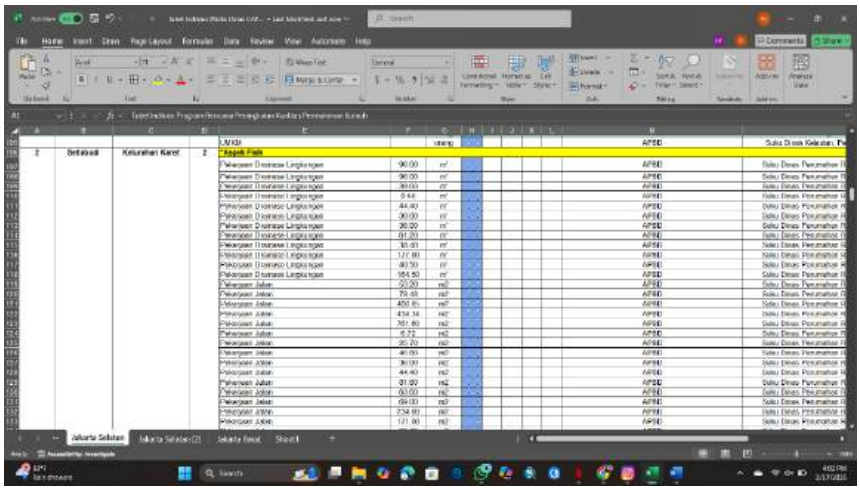

Lampiran 2. 56. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan

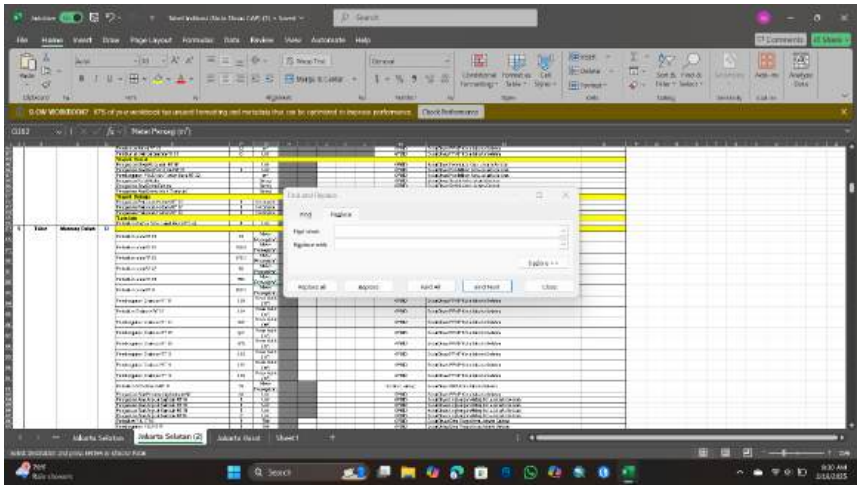

Lampiran 2. 57. Mengikuti dan Menotulensi Webinar Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV): Solusi Permasalahan Kebutuhan Tanah Untuk Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan

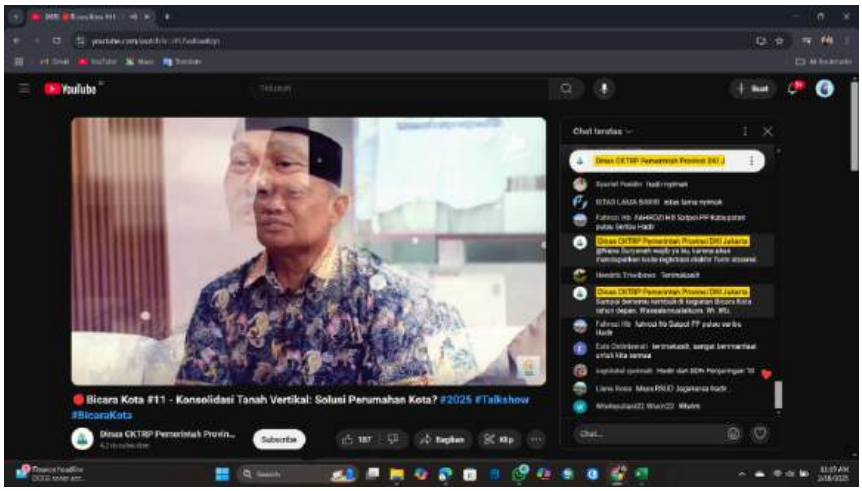

Lampiran 2. 58. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Selatan

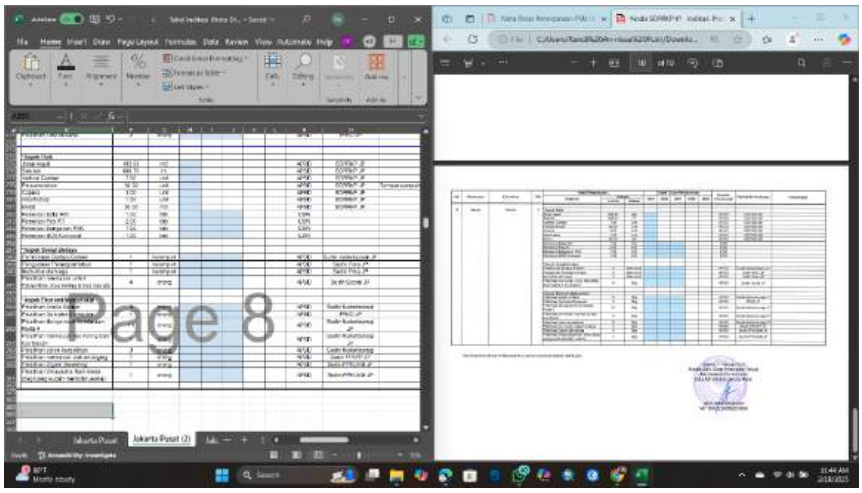

Lampiran 2. 59. Memperbaiki Tabel Indikasi Program Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

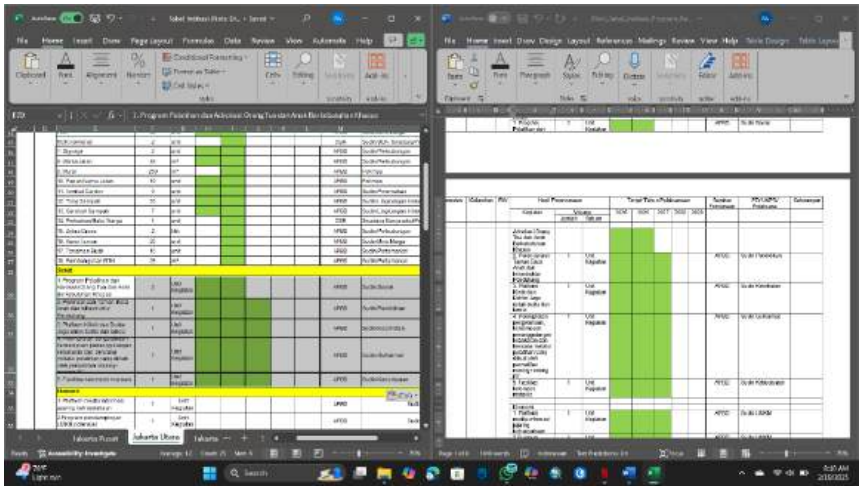

Lampiran 2. 60. Mengikuti Pertemuan Ke-3 terkait Perencanaan KTV dan Survey Lokasi KTV di Kecamatan Johar Baru

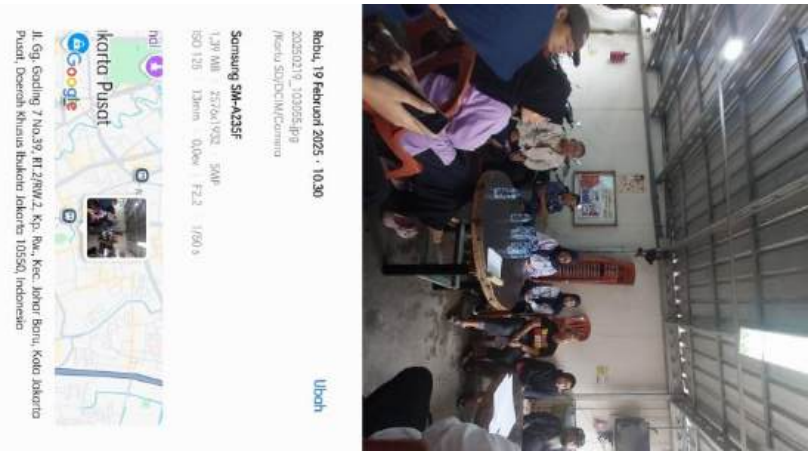

Lampiran 2. 61. Mengikuti Webinar Reinventing Cities

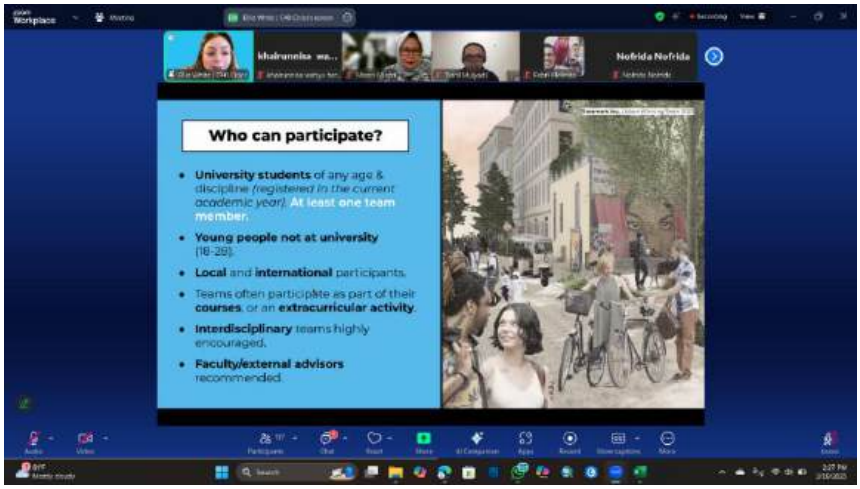

Lampiran 2. 62. Mempelajari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023

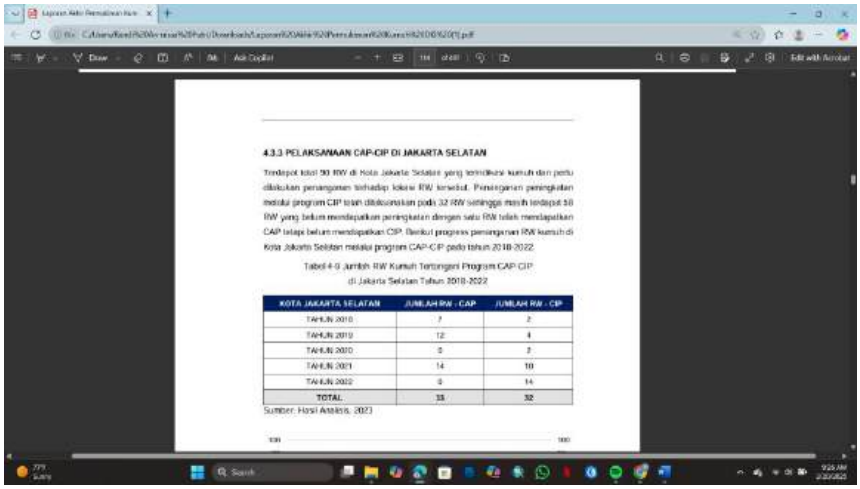

4.3.3 PELAKSANAAN CAP-CIP DI JAKARTA SELATAN

Terdapat total 90 RW di Kota Jakarta Selatan yang teridentasi kumuh dan perlu dilakukan penanganan terhadap lokasi RW tersebut. Pemerataan peningkatan melalui program CIP telah dilaksanakan pada 32 RW sehingga masih terdapat 58 RW yang belum mendapatkan peningkatan dengan satu RW telah mendapatkan CAP tetapi belum mendapatkan CIP. Berikut progress penanganan RW kumuh di Kota Jakarta Selatan melalui program CAP-CIP pada tahun 2018-2022.

Tabel 4-9 Jumlah RW Kumuh Tertangani Program CAP-CIP di Jakarta Selatan Tahun 2018-2022

KOTA JAKARTA SELATAN	JUMLAH RW - CAP	JUMLAH RW - CIP
TAHUN 2018	7	2
TAHUN 2019	12	4
TAHUN 2020	0	2
TAHUN 2021	14	10
TAHUN 2022	0	14
TOTAL	33	32

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Lampiran 2. 63. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Koordinasi Rencana Strastegis Informasi Geospasial 2023 - 2026

Lampiran 2. 64. Mempelajari Kajian Pemutakhiran Data Informasi Permukiman Kumuh 2023

6.2 GAMBARAN PELAKSANAAN CAP DAN CIP HASIL SURVEY LAPANGAN

Lampiran 2. 65. Mengikuti dan Menotulensi Rapat Persiapan Penghunian Rumah Susun Jagakarsa dengan Kelurahan yang ada di Jakarta Selatan.

https://docs.google.com/document/d/1hC09LusDzv6sLAegGXTqMMe86X-QQuLsGqakbhYMhm4/edit?usp=sharing

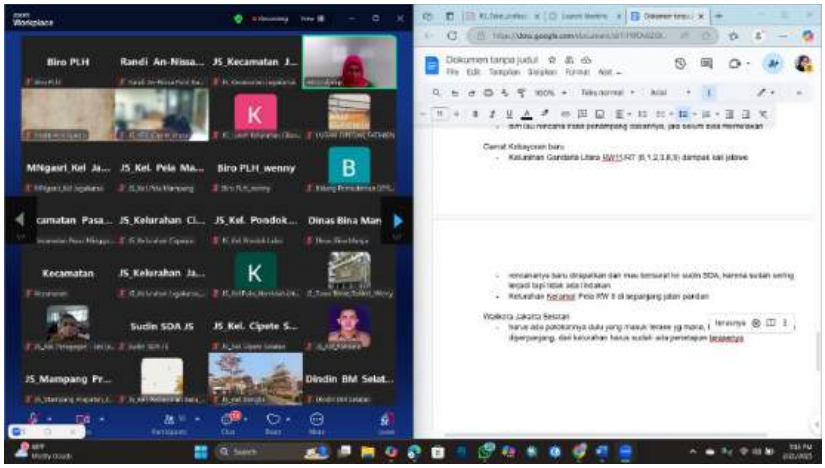

Lampiran 3. Hasil Penilaian Instansi Kerja Praktik

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Taman Jatibaru No.1 Telp/Fax. 34833708, 3865369, 3847151
JAKARTA

Kode Pos : 10150

Nomor : 1403/NM.03.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kerja Praktik

21 Maret 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan
Universitas Trisakti
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti Nomor 163/AK.04.14/FALTL/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Penilaian Kerja Praktik, berikut disampaikan penilaian kepada:

Nama : Randi An-Nissa Putri Ramadhanty
NIM : 083002200005
Masa Magang : 8 Januari – 21 Februari 2025

Adapun hasil penilaian kerja praktin yang bersangkutan, yaitu:

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Kedisiplinan	88
2	Kerajinan	86
3	Keterampilan	89
4	Motivasi Diri	89
5	Keaktifan	84
6	Kreatifitas	87

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas

Meli Budiastuti
NIP 196805171994032004

Tembusan :
1. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 4. Bukti Bimbingan Kerja Praktik dengan Dosen Pembimbing

Bukti Bimbingan Kerja Praktik

Nama : Randi An-nissa Putri Ramadhanty

NIM : 083002200005

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T.

No	Hari/Tanggal	Hasil Asistensi	Bukti Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Selasa, 21 Januari 2025	Mengarahkan yang dihitung pekerjaan di instansi. Menjelaskan pengisian format logbook kerja praktik. Menjelaskan bagaimana seharusnya durasi pekerjaan.		
2	Kamis, 17 Juli 2025	Menjelaskan kelengkapan lampiran logbook untuk meng-klaim pekerjaan yang dilakukan. Menjelaskan penyusunan PPT untuk sidang kerja praktik.	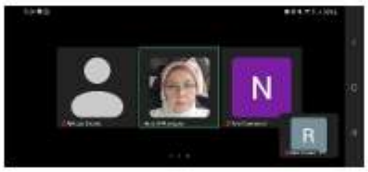	

BUKTI BIMBINGAN

MATAKULIAH KERJA PRAKTIK

SEMESTER GENAP 2024-2025

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

Disusun Oleh:

Aji Nugra Siswanto

083002200007

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

Bukti Bimbingan Kerja Praktik

Nama : Aji Nugra Siswanto

NIM : 083002200007

Pembimbing : Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Dokumentasi Bimbingan	TTD Pembimbing
1.	Selasa, 21 Januari 2025	- Pengarahan pekerjaan pada instansi. - Menjelaskan format tabel logbook kerja praktik.	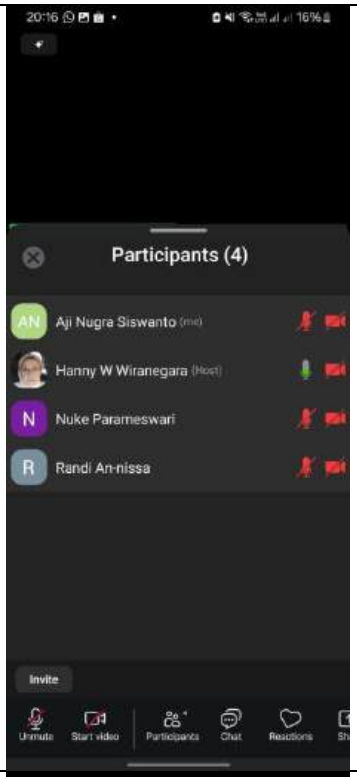	
2.	Kamis, 17 Juli 2025	- Membahas kelengkapan logbook kerja praktik beserta lampiran. - Membahas pnyusunan *Powerpoint* untuk sidang KP	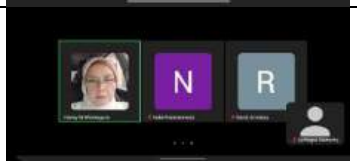	

LAPORAN KERJA PRAKTIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PERUMAHAN

SUB KELOMPOK PERENCANAAN PERUMAHAN

Disusun untuk memenuhi persyaratan lulus mata kuliah Kerja Praktik

Dosen Pengampu:

Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K.

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

Disusun Oleh:

Aji Nugra Siswanto

083002200007

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG PERUMAHAN

SUB KELOMPOK PERENCANAAN PERUMAHAN

Diajukan Oleh:

Aji Nugra Siswanto

0830022000007

Disetujui:

19 Juli 2025

Dosen Pembiming:

Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktik hingga menyelesaikan laporan kerja praktik tepat pada waktunya. Laporan kerja praktik ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktik. Selesainya laporan kerja praktik ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kelik Indriyanto, S.T, M.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
2. Bapak Ir. Chairul Lantip, M.SE selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
3. Ibu Prisca Anggia Putri, S.T., M.T. selaku Ketua Subkelompok Perencanaan Perumahan yang memberikan fasilitas dan arahan bagi praktikan untuk belajar dalam kegiatan kerja praktek.
4. Ibu Eltriyana Rofi'ah selaku mentor praktikan pada Subkelompok Perencanaan Bidang Perumahan yang memberikan bimbingan, arahan, masukan, evaluasi, fasilitas selama praktikan menjalankan kerja praktek.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Tenaga Ahli, Senior Asisten Profesional, dan Asisten Profesional pada Subkelompok Perencanaan Bidang Perumahan yang telah memberikan bantuan selama praktikan menjalankan kerja praktik
6. Ibu Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K. selaku dosen penanggung jawab mata kuliah kerja praktik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan kerja praktik
7. Ibu Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan kerja praktik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunannya.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 19 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Proses Mendapatkan Tempat Kerja Praktik 6
1.3 Tujuan 7
1.4 Manfaat 7
BAB II 8
DESKRIPSI TEMPAT KERJA PRAKTIK 8
2.1 Profil Singkat Instansi Kerja Praktik 8
2.2 Struktur Organisasi 12
2.3 Posisi Praktikan 13
2.4 Deskripsi Tugas Praktikan 13
BAB III 15
JADWAL KEGIATAN DAN SUBSTANSI PEKERJAAN 15
3.1 Jadwal Kerja Praktikan 15
3.2 Substansi yang Disumbangkan Praktikan 31
BAB IV 32
ANALISIS 32
4.1 Manfaat Praktis dan Teoritis bagi Praktikan 32
4.1.1 Manfaat Praktis 32
4.1.2 Manfaat Teoritis bagi Praktikan 32
4.2 Kelebihan dan Kekurangan Instansi Kerja Praktek 33
4.2.1 Kelebihan Instansi Kerja Praktik 33
4.2.2 Kekurangan Instansi Kerja Praktik 33
4.3 Kekurangan dan Kelebihan Praktikan di Tempat Kerja Praktik 33
4.3.1 Kelebihan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik 34
4.3.2 Kekurangan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik 34
BAB V 35
PENUTUP 35
5.1 Masukan Perbaikan bagi Penyelenggara Mata Kuliah Kerja Praktik 35
DAFTAR PUSTAKA 36
LAMPIRAN 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja praktek merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja dengan memasuki lingkungan kerja untuk menambah pengalaman dan wawasan ilmu praktis, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bekal diri. Kerja praktek juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa terutama dalam bidang yang ditekuni oleh mahasiswa serta salah satu media komunikasi yang memungkinkan adanya pertukaran informasi antara mahasiswa dan tempat kerja praktik.

Kerja praktik juga merupakan salah satu mata kuliah dari kurikulum yang dilaksanakan oleh kurikulum perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti. Mata kuliah ini menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kerja praktik baik di lembaga publik maupun swasta yang terlibat dalam perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa melakukan kerja praktik pada saat liburan antara semester V dan VI agar tidak mengganggu waktu perkuliahan.

Kegiatan perencanaan wilayah dan kota terus mengalami perkembangan dan semakin kompleks, tidak hanya mencakup aspek tata ruang atau fisik suatu lingkungan binaan berkelanjutan, tetapi juga berbagai aspek non fisik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perencanaan wilayah dan akan memiliki cakupan yang luas baik cakupan fisik, cakupan ekonomi, cakupan geografi, cakupan sosial dan budaya, serta cakupan politik.

Praktikan mengambil kesempatan untuk melaksanakan kerja praktek di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selama 1 bulan sesuai dengan persyaratan minimal jam kerja yang harus terpenuhi yaitu 175 jam. Praktikan tertarik untuk melakukan kerja praktik Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta karena Bidang Perumahan yang memiliki jangkauan yang cukup banyak melibatkan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota seperti Perencanaan Rumah Susun, Kajian Lokasi Perencanaan, Penyusunan Laporan RP3KP, Penyusunan AMDAL dan ANDALALIN, serta Penentuan lokasi Rumah Susun Baru. Praktikan tertarik untuk menyaksikan secara langsung

dan mempelajari terkait perencanaan pembangunan Rusunawa yang dilakukan oleh Bidang Perumahan.

1.2 Proses Mendapatkan Tempat Kerja Praktik

Proses yang harus dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan tempat kerja praktik adalah sebagai berikut :

1. Praktikan mencari berbagai informasi mengenai instansi yang berkaitan dengan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota.
2. Praktikan mengisi formulir surat permohonan kerja praktik dan meneruskan formulir kepada koordinator kerja praktik untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan lalu di ajukan kepada pihak sekretaris jurusan Teknik Planologi dan didisposisikan surat permohonan melakukan kerja praktik kepada Wakil Dekan I Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan untuk ditanda tangani.
3. Praktikan menyerahkan surat permohonan melakukan kerja praktik yang sudah ditanda tangani oleh Wakil Dekan I kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (5 Desember 2025)
4. Praktikan mendapatkan surat balasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (18 Desember 2025)
5. Praktikan mendapatkan surat penerimaan untuk melakukan kerja praktik dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya termuat mengenai tanggal awal untuk memulai kerja praktik hingga batas akhir kerja praktik serta penempatan posisi. (20 Desember 2025)
6. Praktikan melakukan kerja praktik yang dimulai pada tanggal 8 Januari 2024 – 21 Februari 2025.

1.3 Tujuan

Tujuan praktikan melakukan kerja praktik di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat menempuh mata kuliah Kerja Praktik, yaitu dengan melakukan kerja praktik dalam instansi terkait dalam jangka waktu minimal 175 jam kerja.
2. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari mata kuliah yang telah dilalui baik secara teoritikal maupun studio.
3. Memperoleh gambaran terkait cara kerja dan pengalaman dibidang keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota terutama terkait perencanaan rumah susun.
4. Mengetahui berbagai peraturan serta tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan rumah susun.
5. Menumbuhkan sifat disiplin kerja, bekerja sama dalam tim, dan bertanggung jawab, serta sikap profesional dalam bekerja.

1.4 Manfaat

Beberapa manfaat yang dirasakan praktikan setelah menyelesaikan kerja praktik Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat untuk mengikuti mata kuliah kerja praktik setelah memenuhi persyaratan minimal 175 jam kerja.
2. Mendapatkan pengetahuan terkait aspek-aspek yang ditinjau dalam penyusunan rencana pembangunan rumah susun.
3. Mengetahui apa saja aspek yang dihitung dan bagaimana cara menghitung Rekayasa Lalu Lintas ketika ingin membangun rumah susun.
4. Mendapatkan *softskill* baru yaitu dapat mengoperasikan *software* Sketchup.
5. Mengetahui terkait penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rumah Susun.
6. Mendapatkan pengalaman bekerja dalam instansi yang berhubungan dengan planologi/perencanaan.
7. Mendapatkan relasi dengan para tenaga ahli dan juga asisten profesional pada Bidang Perumahan.

BAB II

DESKRIPSI TEMPAT KERJA PRAKTIK

2.1 Profil Singkat Instansi Kerja Praktik

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Gambar 2.1 Logo Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dibentuk sebagai implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi tugas wajib pelayanan dasar di bidang perumahan dan permukiman. Pembentukan dinas ini berlandaskan berbagai regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga DKI Jakarta, serta menciptakan kawasan permukiman yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari urusan wajib, DPRKP resmi dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang perumahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
10. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
11. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
12. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
13. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU permukiman;
14. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi perumahan;

15. Perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kawasan permukiman;
16. Pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian;
17. Pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman;
18. Fasilitasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman;
19. Fasilitasi penyelesaian sengketa penghunian perumahan;
20. Penanganan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan lingkup tugasnya;
21. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
23. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
24. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
25. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
26. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 unit kerja yang terbagi menjadi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Bidang Perumahan, Bidang Permukiman, Bidang Pembiayaaan dan Kemitraan Perumahan, dan Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bidang Perumahan berfokus pada penyelenggaraan perencanaan perumahan, Bidang Permukiman berfokus pada perencanaan permukiman, Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan berfokus pada pelaksanaan pembiayaan, penyediaan tanah serta pengelolaan asset, dan Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat berfokus pada pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan regulasi perumahan dan kawasan permukiman dan pengembangan peran serta masyarakat rusunawa.

Pada pelaksanaan kerja praktek, praktikan menempati posisi sebagai Staff Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang berfokus pada perencanaan perumahan. Bidang Perumahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

   Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan perumahan, penyediaan perumahan, dan perawatan perumahan.

b. Fungsi

   1. Pengkordinasian dan pelaksanaan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan perawatan perumahan;
   3. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan konsep pengembangan perencanaan, penyediaan, dan perawatan perumahan;
   4. Pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi, fasilitasi kelayakan bangunan perumahan, konsultasi serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan penyediaan dan pelaksanaan perawatan perumahan;
   5. Mengoordinasikan pengembangan partisipasi komunitas profesional dalam urusan perencanaan, penyediaan dan perawatan perumahan rakyat.

c. Fungsi Lainnya

   1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
   3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
   4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
   5. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

6. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari beberapa bidang dan sub bidang yang akan menjalankan pekerjaan lebih spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.2.

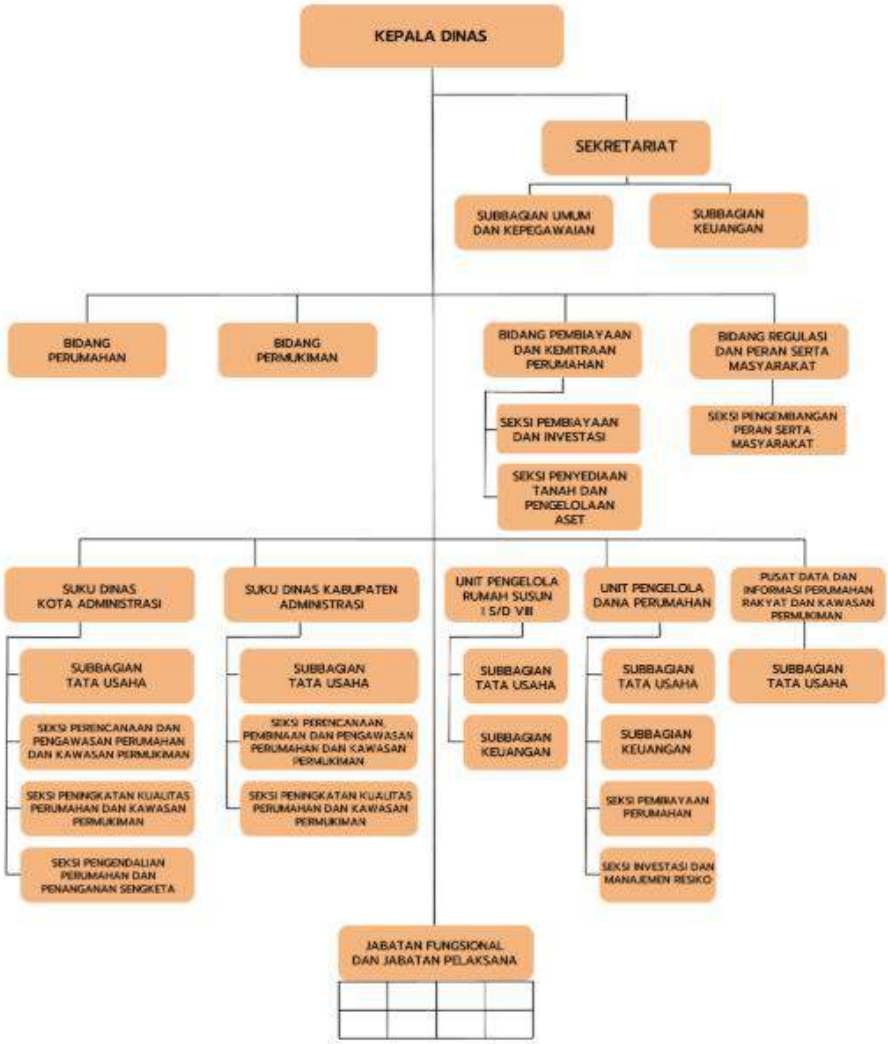

Gambar 2.2 Skruktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

2.3 Posisi Praktikan

Pada saat pelaksanaan kerja praktik di Dinas Perumahan Raykat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, praktikan ditempatkan pada Subkelompok Perencanaan Perumahan yang berfokus pada pembangunan rumah susun.

Gambar 2.3 Posisi Praktikan

2.4 Deskripsi Tugas Praktikan

Selama melakukan kerja praktik pada Sub Kelompok Perencanaan Bidang Perumahan, praktikan diarahkan pekerjaan sebagai berikut :

1. Menggunakan *software* ArcGIS untuk :
    1. Menganalisis perletakan massa bangunan.
    2. Menghitung luas lahan yang berpotensi untuk dibangun.

3. Melakukan *Buffer* area rencana rumah susun untuk melihat potensi pembangunan tower.
4. Membuat peta administrasi Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Penjaringan kemudian di *convert* menjadi bentuk .Dwg.
5. Membuat peta potensi rencana pembangunan rumah susun di Stasiun Pasar Senen.

2. Meringkas beberapa peraturan terkait perencanaan Rumah Susun yang akan digunakan untuk acuan dalam melakukan perencanaan Rumah Susun Sederhana Sewa, sebagai berikut,
   1. Pergub No. 20 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Bangunan.
   2. Pergub No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
   3. IRK Rusunawa Rawa Bebek
   4. Pergub No.26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah
   5. Rancangan Pergub tentang Pedoman Standarisasi Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah,
   6. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026.
   7. SNI 03-7013-2004 mengenai Tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana,
   8. Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 Tentang: Pedoman Mengenai Dampak Penting.
   9. Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa.
   10. PP No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
   11. Perpres No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3. Menganalisis KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) di Bendungan Hilir, Gor Bulungan, Gelanggang Remaja Tebet dan Pasar Gondangdia terhadap Bandara Halim Perdana Kusuma. Hal ini digunakan untuk mengetahui KDB, KTB, KLB, KTB, klasifikasi KKOP dan jarak terhadap bandara sehingga dapat merencanakan pembangunan Rusunawa berdasarkan batas-batas tersebut.

4. Menghitung intensitas pemanfaatan lahan Rusunawa Rawa Bebek dan menghitung luas ruangan kantor camat dengan kategori wajib, bersyarat dan disarankan.

BAB III

JADWAL KEGIATAN DAN SUBSTANSI PEKERJAAN

3.1 Jadwal Kerja Praktikan

Praktikan melaksanakan kerja praktik pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selama 28 hari kerja atau 186 jam 6 Menit jam kerja di luar waktu istirahat, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025, dan telah memenuhi waktu minimal pelaksanaan kerja praktik. Secara umum, jam kerja praktikan mengikuti jam kerja pegawai, yakni mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB. Selama melaksanakan kerja praktik, praktikan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang rinciannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Praktikan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
1.	Rabu, 8 Januari 2025	08.00 - 10.30	Mengubah File Dalam Format .dwg (AutoCAD) Menjadi .shp (ArcGIS)	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.1	Pengaplikasian software Arcgis	
		10.30 - 12.00	Menganalisis Perletakan Massa Bangunan Rusunawa Rawa Bebek	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.2	Melihat perletakan massa bangunan pada Site Plan Rusunawa Rawa Bebek dengan bangunan eksisting	
		13.00 – 14.35	Melihat Perbedaan Pada Overlay Site Plan Rusunawa Rawa Bebek dengan Google Earth	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.3	Mencari perbedaan antara Site Plan Rusunawa Rawa Bebek dengan kondisi bangunan eksisting	
		14.35 – 15.35	Menghitung Luas Lahan Yang Berpotensi Untuk Dibangun Tower Baru pada Rusunawa Rawa Bebek	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.4	Menghitung luas lahan kosong yang dapat direncakan untuk menjadi bangunan tower baru	
		15.35 – 16.00	Menyusun Logbook	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6			
		Total jam kerja : 7 Jam					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
2	Kamis, 9 Januari 2025	08.00 – 12.00	Meringkas Pergub No. 20 Tahun 2024	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.5	Mengetahui apa saja yang dipertimbangkan ketika ingin membangun gedung Rusunawa (Intensitas, KDB, KLB, KDH, GSB, GSJ dan Jarak Bebas Bangunan)	
		13.00 – 16.00					
		Total jam kerja : 7 Jam					
3	Senin, 13 Januari 2025	08.00 – 12.00	Meringkas Pergub No. 31 Tahun 2022 dan IRK Rusunawa Rawa Bebek	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.6	Mengetahui apa saja yang dipertimbangkan ketika ingin membangun gedung Rusunawa (Persyaratan, ITBX serta zoning)	
		13.00 – 16.00					
		Total jam kerja : 7 Jam					
4	Selasa, 14 Januari 2025	08.00 – 12.00	Membuat peta Potensi tower baru beserta dengan radiusnya	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.7	Pengaplikasian software Arcgis dan mengetahui aspek apa saja yang harus berada didalam radius tower Rusunawa (800m – 1200m)	

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.00 – 13.15	Briefing mengenai pekerjaan selama Kerja Praktik di Bidang Perumahan DPRKP DKI Jakarta	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6			
		13.15 – 16.00	Meringkas Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.8	Mengetahui bahwa terdapat project besar yaitu, pembangunan 1 juta rumah susun di DKI Jakarta yang di mandatkan kepada bidang perumahan DPRKP DKI Jakarta dan faktor-faktor pembangunan hunian vertikal	
		Total jam kerja : 7 Jam					
5	Rabu, 15 Januari 2025	08.00 – 11.44	Menghitung untuk pembangunan tower baru Rusunawa Rawa Bebek	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.9	Menghitung luas lahan kosong yang akan dikembangkan menjadi bangunan baru dengan perhitungan berdasarkan peraturan.	
		13.0 – 15.53	Meringkas SNI 03-7013-2004 mengenai Tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.10	Mengetahui terkait standar penyediaan fasilitas umum dan sosial untuk rumah susun sederhana.	
		Total jam kerja : 5 Jam 53 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
6	Kamis, 16 Januari 2025	09.30 – 12.23	Mengikuti dan menotulensi Rapat Asistensi/Review DED Rusun Marunda Cluster A	Ruang Rapat, Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.11	Mengetahui aspek-aspek yang ditinjau dan dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan Rusun Marunda Cluster A	
		13.00 – 16.07	Memeriksa kata dan kalimat dalam penyusunan Laporan Akhir RP3KP Provinsi DKI Jakarta	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.12	Mengetahui tipologi dan sub tipologi perumahan, syarat-syarat pembangunan, peremajaan dan pemugaran dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Total jam kerja : 6 Jam					
7	Jumat, 17 Januari 2025	07.45 – 11.00	Memeriksa kata dan kalimat dalam penyusunan Laporan Akhir RP3KP Provinsi DKI Jakarta	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.13	Mengetahui data-data yang diperlukan terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		13.00 – 15.30					
		Total jam kerja : 6 Jam 45 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
8	Senin, 20 Januari 2025	08.00 – 12.18	Menghitung Intensitas Pemanfaatan Lahan Rusunawa Rawa Bebek	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.14	Menghitung KDB, KTB, KLB, KTB, dan meninjau KKOP Rusunawa Rawa Bebek	
		13.00 – 14.30	Menghitung Jarak Ujung Landasan Pacu Bandara Halim Perdanakusuma ke Pasar Bendungan Hilir, Gor Bulungan, Gelanggang Remaja Tebet dan Pasar Gondangdia	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.15	Menganalisis klasifikasi KKOP pada lokasi yang akan direncanakan untuk dibangun rusunawa	
		14.30 – 16.30	Menganalisis KKOP Pasar Bendungan Hilir, Gor Bulungan, Gelanggang Remaja Tebet dan Pasar Gondangdia terhadap Bandara Halim Perdana Kusuma	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.16	Mengetahui batasan ketinggian bangunan untuk merencanakan pembangunan rusunawa	
		Total jam kerja : 7 Jam 48 Menit					
9	Selasa, 21 Januari 2025	08.00 – 12.30	Membantu menyusun pemberkasan DED Rusunawa Marunda Cluster A yang telah diapprove oleh ketua bidang perumahan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6			
		Total jam kerja : 4 Jam 30 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
10	Rabu, 22 Januari 2025	08.00 – 11.25	Mereview paparan mengenai Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.17	Mengetahui program-program pemerintah yang akan dilakukan untuk hunian vertikal dan juga data data kondisi eksisting di DKI Jakarta	
		13.04 – 14.13					
		Total jam kerja : 4 Jam 34 Menit					
11	Kamis, 23 Januari 2025	09.03 – 12.35	Mengikuti Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Rusunawa Daan Mogot Km 18	*Zoom Meeting Confrence*	Lampiran 2.18	Mengetahui aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam penyusunan Amdal Rusunawa Daan Mogot Km 18	
		13.28 – 15.55	Membuat Notulensi Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Rusunawa Daan Mogot Km 18	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.19		
		Total jam kerja : 5 Jam 59 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
12	Jumat, 24 Januari 2025	08.24 – 11.13	Meringkas Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 Tentang: Pedoman Mengenai Dampak Penting	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.20	Mengetahui mengenai pedoman ukuran dampak penting dalam penyusunan Amdal	
		13.05 – 16.37	Mempelajari dan Mengaplikasikan Software SketchUp di Rusunawa Rawa Bebek	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.21	Pengaplikasian software Sketchup untuk merencanakan tower baru pada Rusunawa Rawa Bebek	
		Total jam kerja : 6 Jam 21 Menit					
13	Kamis, 30 Januari 2025	08.23 – 11.32	Mereview Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.22	Mengetahui aspek apa saja yang ditinjau dalam manajemen rekayasa lalu lintas saat merencanakan pembangunan Rumah Susun (bangkitan, tarikan, fasilitas pejalan kaki, dan lainnya)	
		13.31 – 16.52	Mereview Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.23	Mengetahui aspek apa saja yang ditinjau dalam manajemen rekayasa lalu lintas saat merencanakan pembangunan Rumah Susun (bangkitan, tarikan, fasilitas pejalan kaki, dan lainnya)	
		Total jam kerja : 6 Jam 30 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
14	Jumat, 31 Januari 2025	09.13 – 11.13	Melanjutkan review Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.24	Mengetahui cara perhitungan bangkitan dan tarikan dalam rekayasa lalu lintas saat merencanakan pembangunan Rumah Susun	
		13.12 – 16.47	Menghitung dan menginput IRK, Jarak, dan KKOP Pasar dan Gor terhadap Stasiun Terdekat	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.25	Mengetahui aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan masterplan rumah susun	
		Total jam kerja : 5 Jam 35 Menit					
15	Senin, 3 Februari 2025	08.22 – 11.34	Mendigitasi dan Menghitung luas lahan gor dan pasar yang akan dijadikan Rusunawa dengan aplikasi Google Earth	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.26	Pengaplikasian software Google Earth untuk menghitung luas lahan dalam persiapan perencanaan masterplan	
		13.24 – 16.35	Mendigitasi wilayah rencana pembangunan pada Gor Bulungan dan mengubah file .shp menjadi .dwg	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.27	Pengaplikasian software Arcgis dan menghitung luas lahan Gor Bulungan untuk direncanakan menjadi Rusunawa baru	
		Total jam kerja : 6 Jam 23 Menit					
16	Selasa, 4 Februari 2025	08.23 – 11.47	Membuat peta Administrasi Kebayoran Baru dan merubah file dari .shp menjadi .dwg	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.28	Pengaplikasian software Arcgis	

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.13 – 15.52	Membuat peta Kelurahan Penjaringan dan merubah file dari .shp menjadi .dwg	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.29	Pengaplikasian software Arcgis	
		Total jam kerja : 6 Jam 3 Menit					
17	Rabu, 5 Februari 2025	08.32 – 12.03	Meringkas dan menyelaraskan Pergub No.26 Tahun 2013 dengan Rancangan Pergub tentang Pedoman Standarisasi Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.30	Mengetahui luas ruangan yang diperlukan untuk membangun kantor dan rumah camat pada rencana pembangunan Rusunawa, mengetahui perbedaan dalam setiap kategori kantor camat dan cara penentuan luasannya	
		13.32 – 16.40	Menghitung luas ruangan kantor camat dengan kategori wajib, bersyarat dan disarankan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.31	Mengetahui luas ruangan yang diperlukan untuk membangun kantor dan rumah camat pada rencana pembangunan Rusunawa dan mengetahui perbedaan dalam setiap kategori kantor camat	
		Total jam kerja : 6 Jam 39 Menit					
18	Kamis, 6 Februari 2025	09.00 – 12.03	Menghitung dan menginput harga satuan bahan konstruksi DKI Jakarta 2025 untuk mengestimasi biaya pembangunan rusun	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.32	Mengetahui perkiraan rencana anggaran dalam perencanaan pembangunan Rusunawa	
		13.00 – 14.47					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		15.02 – 16.31	Meringkas PP No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.33	Mengetahui terkait jenis, pemanfaatan serta penyelenggaraan rumah susun	
		Total jam kerja : 7 Jam 19 Menit					
19	Jumat, 7 Februari 2025	09.12 – 15.53	Melakukan survey ke Kampung Jimpitan KB 2 Kota Tangerang	Kampung Jimpitan KB 2, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten	Lampiran 2.34	Melakukan survey lokasi dengan tujuan untuk melaksanakan *pilot project* calon RPTRA dalam program kota layak anak	
		Total jam kerja : 6 Jam 41 Menit					
20	Senin, 10 Februari 2025	08.46 – 11.53	Melanjutkan ringkasan PP No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.35	Mengetahui terkait jenis, pemanfaatan serta penyelenggaraan rumah susun	
		13.05 – 17.13	Membuat Peta *Buffer* kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang sudah tidak dipakai	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.36	Mengetahui fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana peribadatan yang berada didalam radius 800m – 1200m dan pengaplikasian *sofware* Arcgis	
		Total jam kerja : 7 Jam 13 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
21	Selasa, 11 Februari 2025	08.32 – 12.03	Membantu menyusun pemaparan kajian usulan Rusun baru pada bekas Kantor Kecamatan Mampang Prapatan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.37	Mengetahui aspek apa saja yang dikaji dalam penyusunan pemaparan calon rumah susun baru serta berkontribusi dalam pengusulan konsep design bangunan Rusun tersebut (*Sustainable & Green Building* dan *Inclusive Building)*	
		13.16 – 16.52	Membantu notulensi rapat Koordinasi Platform Pendataan Basis Data Perumahan TA 2025	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.38	Membahas mengenai sinkronisasi data spasial antara Jakarta Satu, DCKTRP dan DPRKP	
		Total jam kerja : 7 Jam 7 Menit					
22	Rabu, 12 Februari 2025	08.32 – 11.27	Menginput harga pasar kayu dan *plywood* untuk pembuatan AHSP konstruksi rusunawa tahun anggaran 2025	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.39	Mengetahui perkiraan rencana anggaran dalam perencanaan pembangunan Rusunawa dan mengetahui kelas kayu yang cocok untuk rumah susun	
		13.00 – 13.42	Perwalian Mata Kuliah	*Zoom Meeting Confrence*	Lampiran 2.40		

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.45 – 16.49	Melanjutkan penginputan harga pasar kayu dan *plywood* untuk pembuatan AHSP konstruksi rusunawa tahun anggaran 2025	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.41	Mengetahui perkiraan rencana anggaran dalam perencanaan pembangunan Rusunawa dan mengetahui kelas kayu yang cocok untuk rumah susun	
		Total jam kerja : 6 Jam 41 Menit					
23	Kamis, 13 Februari 2025	09.22 – 11.15	Meringkas Perpres No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.42	Mengetahui pengadaan tanah yang wajib dibangun untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah serta pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah	
		13.08 – 16.35					
		Total jam kerja : 5 Jam 20 Menit					
23	Jumat, 14 Februari 2025	08.37 – 11.00	Menginput harga pasar paku untuk pembuatan AHSP konstruksi rusunawa tahun anggaran 2025	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.43	Mengetahui perkiraan rencana anggaran dalam perencanaan pembangunan Rusunawa dan mengetahui jenis paku yang dibutuhkan untuk rumah susun	

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.01 – 17.53	Membuat peta radius Kantor Kecamatan Palmerah dan Cipayung dan convert ke format .DWG untuk direncanakan sebagai rumah susun baru	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.44	Melihat keberadaan stasiun dan halte pada radius 800m dan 1200m dari kantor kecamatan Palmerah dan Cipayung yang akan direncanakan menjadi rumah susun	
		Total jam kerja : 7 Jam 15 Menit					
24	Senin, 17 Februari 2025	08.15 – 11.06	Menganalisis pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan sekitar stasiun Pasar Senen (Penentuan *Loading Dock* dan arus lalu lintas kendaraan)	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.45	Mengimplementasikan konsep *historical* dan TOD pada kawasan stasiun pasar senen yang akan dikembangkan menjadi rumah susun dan pengaturan lalu lintas pada jalanan disekiar stasiun pasar senen	
		13.02 – 16.43					
		Total jam kerja : 6 Jam 32 Menit					
25	Selasa, 18 Februari 2025	10.12 – 15.27	Melakukan Sosialisasi Pendataan Basis Data Perumahan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 pada Kelurahan Kembangan Utara	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.46	Mengimplementasikan tahap awal dalam rangka pendataan/survey dengan melakukan sosialisasi kepada para pemangku jabatan di Kelurahan Kembangan Utara	
		Total jam kerja : 5 Jam 15 Menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
26	Rabu, 19 Februari 2025	08.45 – 11.32	Menganalisis pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan sekitar stasiun Pasar Senen (Penentuan Rencana lokasi rumah susun baru dan *in and out* kendaraan)	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.47	Mengimplementasikan konsep *historical* dan TOD pada kawasan stasiun pasar senen yang akan dikembangkan menjadi rumah susun dan pengaturan lalu lintas pada jalanan disekiar stasiun pasar senen	
		13.10 – 17.03					
		Total jam kerja : 6 Jam 40 Menit					
27	Kamis, 20 Februari 2025	07.43 – 11.36	Membuat Peta radius 800m dari kantor kecamatan jatinegara untuk direncanakan menjadi rumah susun	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.48	Melihat keberadaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sarana peribadatan pada radius 800m dari kantor kecamatan Jatinegara yang akan direncanakan menjadi rumah susun	
		13.02 – 16.35	Menyusun laporan kerja praktik dan merapihkan logbook kegiatan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.49		
		Total jam kerja : 7 Jam 26 Menit					
28	Jumat, 21 Februari 2025	08.47 – 11.02	Melakukan Asistensi dan merevisi rencana pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 2.50	Merancang konsep *historical* dan TOD pada kawasan stasiun pasar senen yang akan dikembangkan menjadi	

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relevansi dengan PWK	Tanda Tangan Instansi
		13.23 – 14.07	sekitar stasiun Pasar Senen (Penentuan Rencana lokasi rumah susun baru dan *in and out* kendaraan)			rumah susun dan pengaturan lalu lintas pada jalan disekiar stasiun pasar senen	
		14.10 – 16.48	Melakukan penyerahan Logbook untuk ditandatangani, mengambil form penilaian kerja praktik dari instansi, dan perpisahan hari terakhir	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6			
		Total jam kerja : 5 Jam 37 Menit					
Total Jam Kerja 186 Jam 6 Menit							

3.2 Substansi yang Disumbangkan Praktikan

Selama melaksanakan kerja praktik, praktikan mendapat kesempatan untuk turut serta dalam menotulensi rapat, meringkas peraturan-peraturan terkait rumah susun, mengikuti survey lokasi, serta membantu merencanakan pembangunan rumah susun. Beberapa substansi yang disumbangkan praktikan selama melakukan kerja praktik adalah sebagai berikut:

a. Menotulensi rapat
    1. Rapat Asistensi/Review DED Rusun Marunda Cluster A
    2. Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Rusunawa Daan Mogot Km 18
    3. Rapat Koordinasi Platform Pendataan Basis Data Perumahan TA 2025
b. Meringkas dan Mereview Peraturan
    1. Pergub No. 20 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Bangunan
    2. Pergub No. 31 Tahun 2022 dan IRK Rusunawa Rawa Bebek
    3. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026
    4. SNI 03-7013-2004 mengenai Tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana
    5. Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 Tentang: Pedoman Mengenai Dampak Penting
    6. Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa
    7. PP No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
    8. Perpres No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
c. Membantu merencanakan pembangunan rumah susun baru

BAB IV

ANALISIS

4.1 Manfaat Praktis dan Teoritis bagi Praktikan

Terhitung sejak tanggal 8 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025, praktikan telah menyelesaikan masa kerja praktik selama 28 hari kerja dengan total waktu kerja 186 jam yang dilaksanakan di Bidang Perumahan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, dan telah memenuhi waktu yang telah ditentukan untuk mengikuti mata kuliah kerja praktik. Selama masa kerja praktik, praktikan merasakan berbagai manfaat yang diperoleh, yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun beberapa manfaat yang dirasakan praktikan adalah sebagai berikut.

4.1.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang praktikan rasakan setelah melakukan kerja praktik adalah memberikan gambaran dan pengalaman di dunia kerja secara profesional dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota terutama keterkaitannya dengan Mata Kuliah Perencanaan Perumahan, yang meliputi:

- Peningkatan kemampuan dalam membuat notulensi rapat. Diberikan arahan serta masukan terkait pembuatan notulensi rapat.
- Peningkatan kepercayaan diri dalam bekerjasama dengan berbagai pihak guna menyelesaikan pekerjaan.
- Bertambahnya kemampuan praktikan dalam melakukan perencanaan dan konsep pembangunan rumah susun.
- Menambah *sotf skill* praktikan pada software Sketchup.

4.1.2 Manfaat Teoritis bagi Praktikan

Manfaat teoritis yang dirasakan oleh praktikan setelah melakukan kerja praktik adalah memberikan gambaran dan pengalaman di dunia kerja secara profesional dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, yang meliputi:

- Praktikan mendapatkan wawasan mengenai tahapan untuk merencanakan pembangunan rumah susun baru.

- Praktikan mendapatkan pengetahuan terkait aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pembangunan rumah susun.
- Praktikan mendapatkan wawasan dalam penyusunan dokumen ANDAL.
- Praktikan mendapatkan wawasan mengenai aspek-aspek dalam dokumen KMRLL (Kajian Rekayasa Manajemen Lalu Lintas).

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Instansi Kerja Praktek

Selama melakukan kerja praktek di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, praktikan mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kelebihan instansi kerja praktik, di antaranya:

4.2.1 Kelebihan Instansi Kerja Praktik

- Instansi kerja praktik selalu memberi tugas yang relevan dengan bidang studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan pembimbing serta rekan kerja senantiasa membimbing praktikan dalam pengerjaan tugas.
- Pembimbing serta rekan kerja selalu terbuka untuk berbagi informasi terkait pekerjaan
- Suasana yang terdapat pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengedepankan rasa kekeluargaan yang membuat suasana kerja lebih nyaman.
- Pembimbing serta rekan kerja sangat ramah terhadap praktikan sehingga praktikan merasa nyaman selama melakukan Kerja Praktik.

4.2.2 Kekurangan Instansi Kerja Praktik

- Terkadang koneksi internet *wifi* tidak berjalan secara optimal sehingga mengganggu kelancaran pengerjaan tugas dan pekerjaan yang diberikan.

4.3 Kekurangan dan Kelebihan Praktikan di Tempat Kerja Praktik

Praktikan sebagai seorang mahasiswa yang belum memiliki pengalaman bekerja secara profesional pada suatu instansi pemerintahan merasakan adanya pengalaman baru dan kesempatan untuk dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa kuliah tertempuh. Sehingga dalam pelaksanaannya, praktikan mencoba untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan praktikan selama melakukan kerja praktik pada Bidang Perumahan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukian Provinsi DKI Jakarta yang dapat menjadi masukan bagi pribadi praktikan.

4.3.1 Kelebihan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik

- Dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik
- Dapat beradaptasi, berinteraksi dan berkoordinasi dengan para pegawai di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan baik.
- Praktikan dapat mengikuti arahan dan tidak malu bertanya apabila ada kesulitan/kendala dalam penyelesaian tugas.

4.3.2 Kekurangan Praktikan Selama Mengikuti Kerja Praktik

- Praktikan membutuhkan waktu untuk dapat berinteraksi dengan nyaman dengan para pekerja di Bidang Perumahan.
- Praktikan terkadang segan untuk meminta pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Masukan Perbaikan bagi Penyelenggara Mata Kuliah Kerja Praktik

Berdasarkan pengalaman yang praktikan dapatkan selama melaksanakan kerja praktik, terdapat beberapa masukan yang dapat diberikan untuk Penyelenggara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja praktek pada tahun ajaran berikutnya. Masukannya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pihak jurusan dapat memberikan dosen pembimbing kerja praktek pada saat kegiatan kerta praktek dimulai, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan arahan dan bimbingan sebelum memulai kegiatan kerja praktek pada instansi terkait.
2. Pihak jurusan diharapkan mempunyai data terkait instansi yang pernah dijadikan tempat kerja praktek mahasiswa sebelumnya yang relevan dengan Perencanaan Wilayah dan Kota, sehingga angkatan berikutnya bisa mendapatkan rekomendasi tempat kerja praktek yang baik dan lebih memudahkan mahasiswa dalam menentukan instansi sesuai dengan bidang/pekerjaan yang akan diminati.

DAFTAR PUSTAKA

dprkp.jakarta.go.id (2020). Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-tugasdanfungsi

dprkp.jakarta.go.id (2020). Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-strukturorganisasi

dprkp.jakarta.go.id (2020). Profil Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=profile-pejabatstruktural

dprkp.jakarta.go.id (2020). Organisasi Bidang Peerumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses melalui https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=organization-perumahan

Teknik Planologi Universitas Trisakti. 2025. Pedoman Kerja Praktek.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Kerja Praktik pada Instansi KP

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 34833708, 3865369, Fax: 3847151
JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 8159/HM. 03.04 — 18 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Kerja Praktik

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Nomor 1494/AK.1.03/FALTL/XI/2024 Hal Permohonaan Kerja Praktik, dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk melakukan kegiatan Kerja Praktik mulai dari 8 Januari 2025 sampai dengan 21 Februari 2025.

Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama	:	Aji Nugra Siswanto
NIM	:	083002200007
Kontak	:	081288110578

Selanjutnya agar yang bersangkutan menghubungi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,
Sekretaris Dinas

Meli Budiastuti
NIP 196805171994032004

Tembusan :
- Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 2.1. Mengubah File Dalam Format (.dwg) Menjadi (.shp)

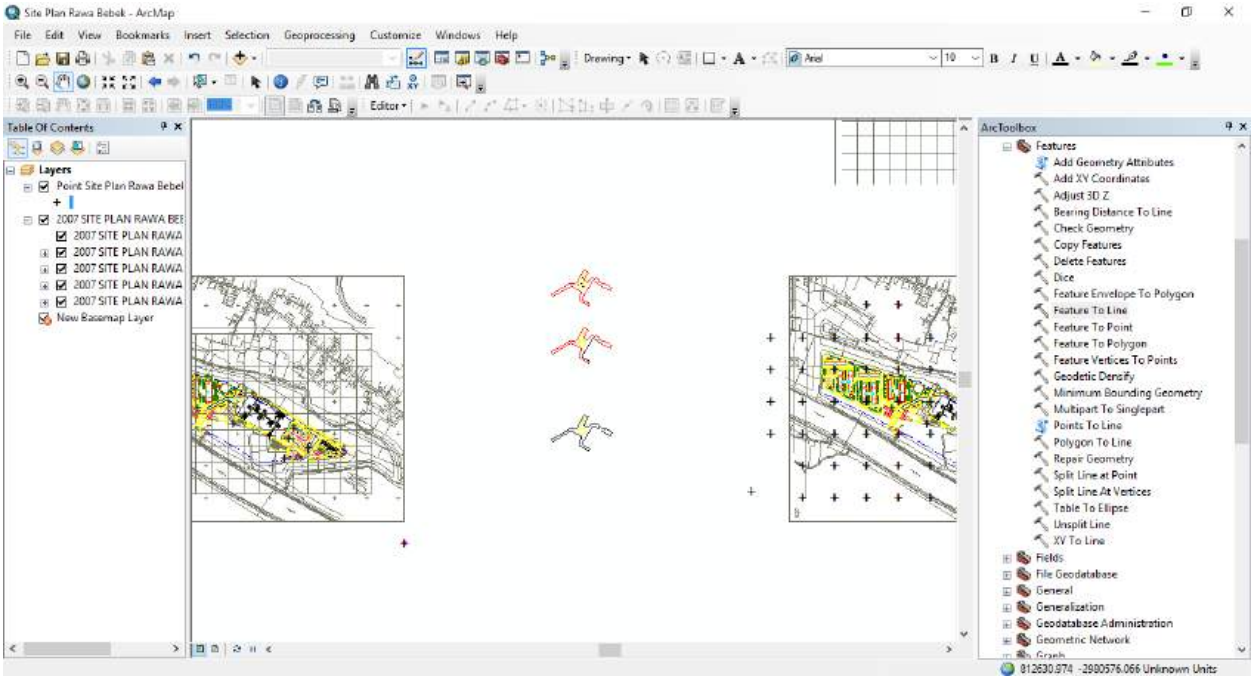

Lampiran 2.2. Analisis Perletakan Massa Bangunan

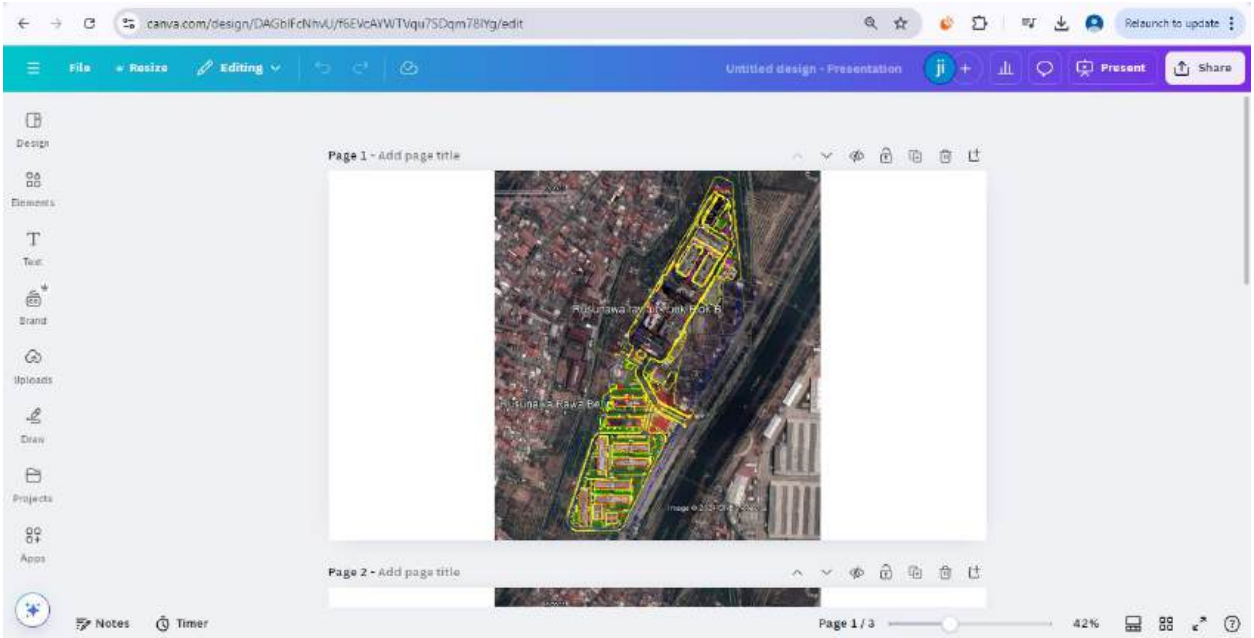

Lampiran 2.3. Analisis Perbedaan Pada Overlay Site Plan dengan Google Earth

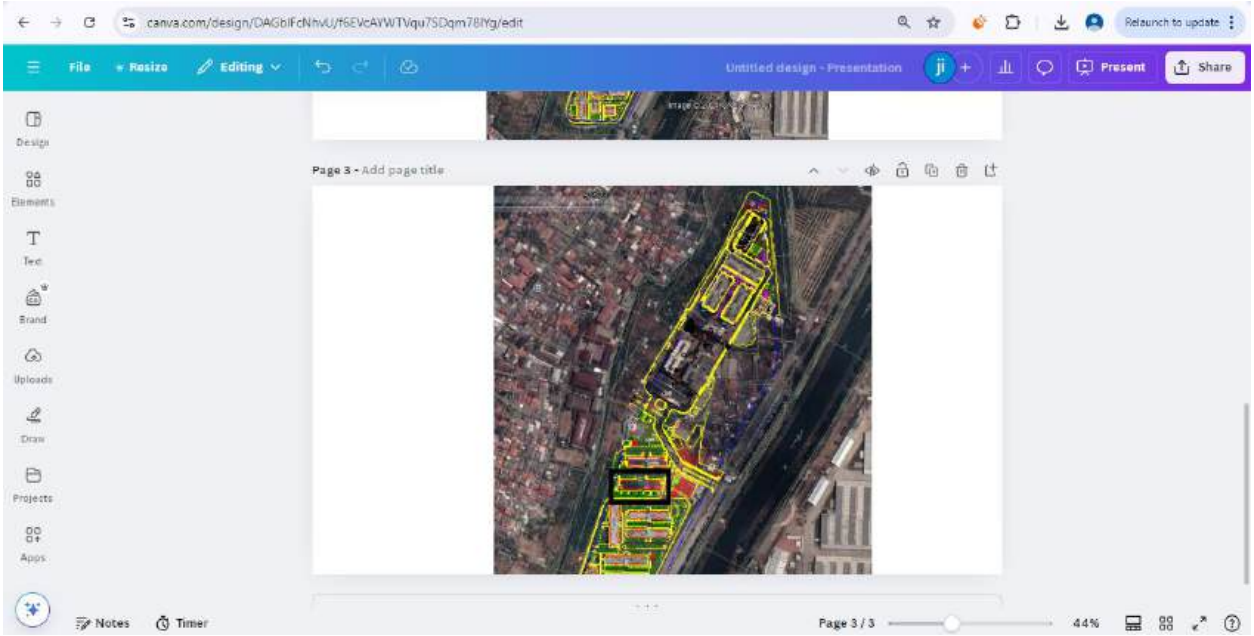

Lampiran 2.4. Menghitung Luas Lahan Yang Berpotensi Untuk Dibangun Tower Baru

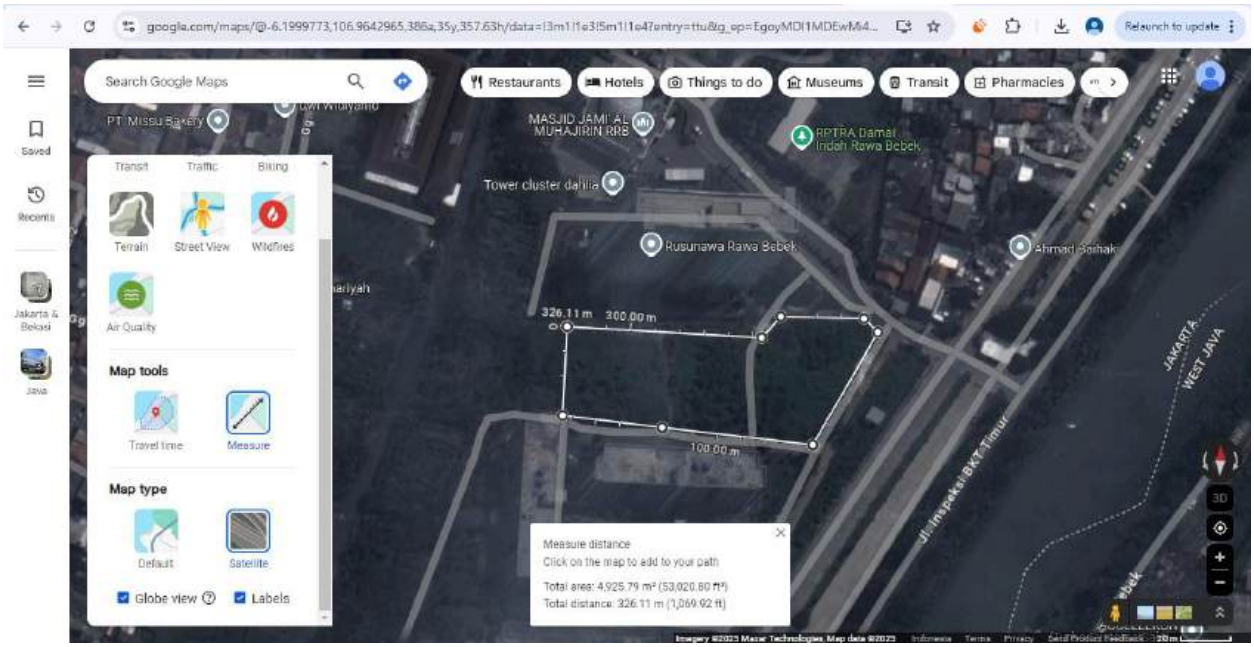

Lampiran 2.5. Meringkas Pergub 20 Tahun 2024

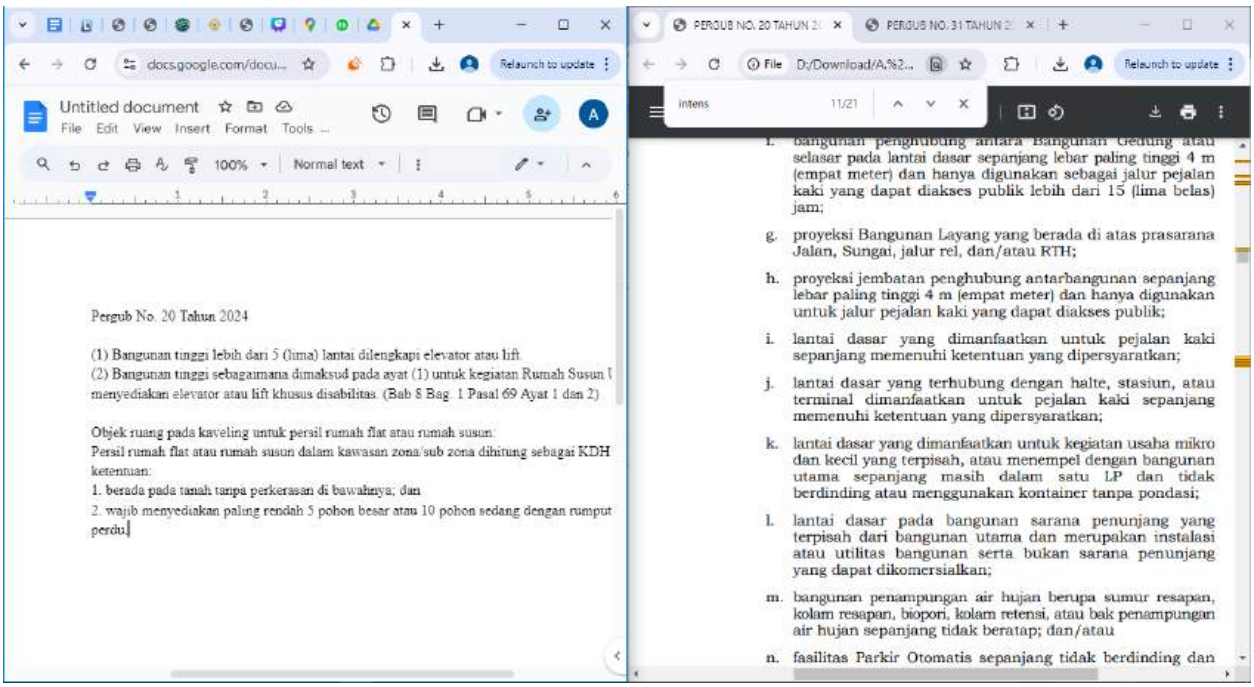

Untitled document

Pergub No. 20 Tahun 2024

(1) Bangunan tinggi lebih dari 5 (lima) lantai dilengkapi elevator atau lift.
(2) Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Rumah Susun I menyediakan elevator atau lift khusus disabilitas. (Bab 8 Bag. 1 Pasal 69 Ayat 1 dan 2)

Objek ruang pada kaveling untuk persil rumah flat atau rumah susun:
Persil rumah flat atau rumah susun dalam kawasan zona/sub zona dihitung sebagai KDH ketentuan:
1. berada pada tanah tanpa perkerasan di bawahnya; dan
2. wajib menyediakan paling rendah 5 pohon besar atau 10 pohon sedang dengan rumput perdu.

i. bangunan penghubung antara Bangunan Gedung atau selasar pada lantai dasar sepanjang lebar paling tinggi 4 m (empat meter) dan hanya digunakan sebagai jalur pejalan kaki yang dapat diakses publik lebih dari 15 (lima belas) jam;

g. proyeksi Bangunan Layang yang berada di atas prasarana Jalan, Sungai, jalur rel, dan/atau RTH;

h. proyeksi jembatan penghubung antarbangunan sepanjang lebar paling tinggi 4 m (empat meter) dan hanya digunakan untuk jalur pejalan kaki yang dapat diakses publik;

i. lantai dasar yang dimanfaatkan untuk pejalan kaki sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;

j. lantai dasar yang terhubung dengan halte, stasiun, atau terminal dimanfaatkan untuk pejalan kaki sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;

k. lantai dasar yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil yang terpisah, atau menempel dengan bangunan utama sepanjang masih dalam satu LP dan tidak berdinding atau menggunakan kontainer tanpa pondasi;

l. lantai dasar pada bangunan sarana penunjang yang terpisah dari bangunan utama dan merupakan instalasi atau utilitas bangunan serta bukan sarana penunjang yang dapat dikomersialkan;

m. bangunan penampungan air hujan berupa sumur resapan, kolam resapan, biopori, kolam retensi, atau bak penampungan air hujan sepanjang tidak beratap; dan/atau

n. fasilitas Parkir Otomatis sepanjang tidak berdinding dan

Lampiran 2.6. Meringkas Pergub 31 Tahun 2022

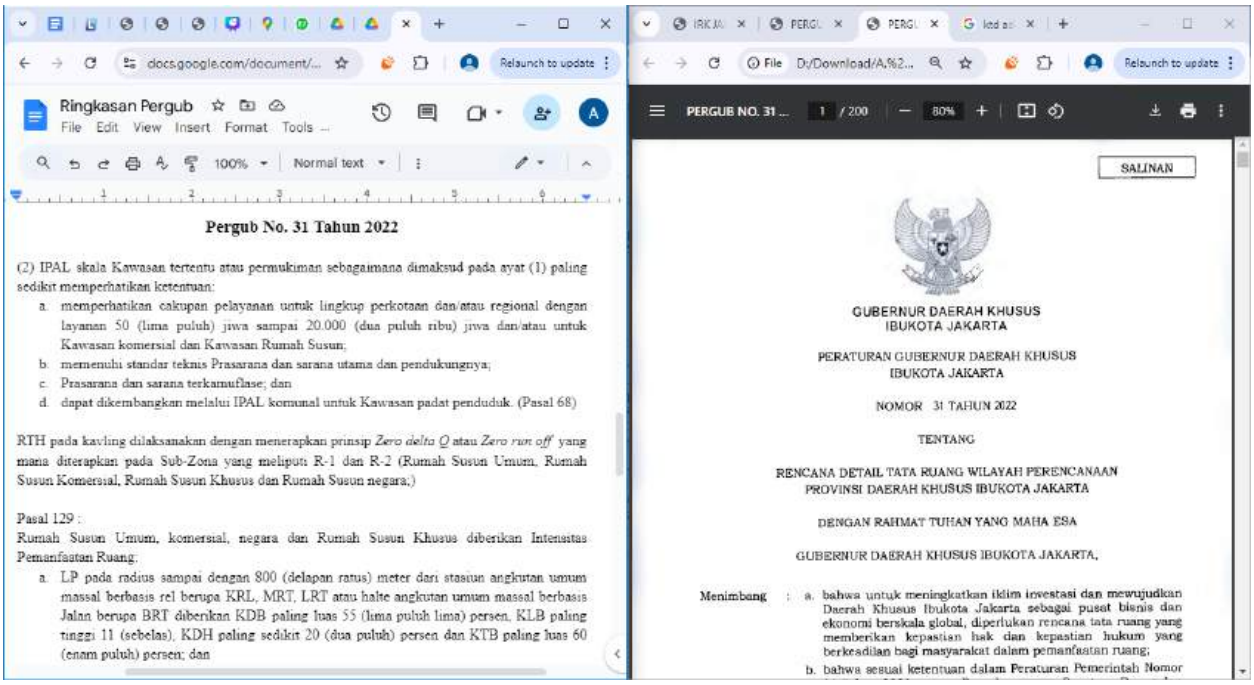

Ringkasan Pergub

Pergub No. 31 Tahun 2022

(2) IPAL skala Kawasan tertentu atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan ketentuan:
a. memperhatikan cakupan pelayanan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa dan/atau untuk Kawasan komersial dan Kawasan Rumah Susun;
b. memenuhi standar teknis Prasarana dan sarana utama dan pendukungnya;
c. Prasarana dan sarana terkamuflase; dan
d. dapat dikembangkan melalui IPAL komunal untuk Kawasan padat penduduk. (Pasal 68)

RTH pada kavling dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *Zero delta Q* atau *Zero run off* yang mana diterapkan pada Sub-Zona yang meliputi R-1 dan R-2 (Rumah Susun Umum, Rumah Susun Komersial, Rumah Susun Khusus dan Rumah Susun negara;)

Pasal 129 :
Rumah Susun Umum, komersial, negara dan Rumah Susun Khusus diberikan Intensitas Pemanfaatan Ruang:
a. LP pada radius sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari stasiun angkutan umum massal berbasis rel berupa KRL, MRT, LRT atau halte angkutan umum massal berbasis Jalan berupa BRT diberikan KDB paling luas 55 (lima puluh lima) persen, KLB paling tinggi 11 (sebelas), KDH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan KTB paling luas 60 (enam puluh) persen; dan

SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan mewujudkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi berskala global, diperlukan rencana tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

Lampiran 2.7. Membuat peta radius

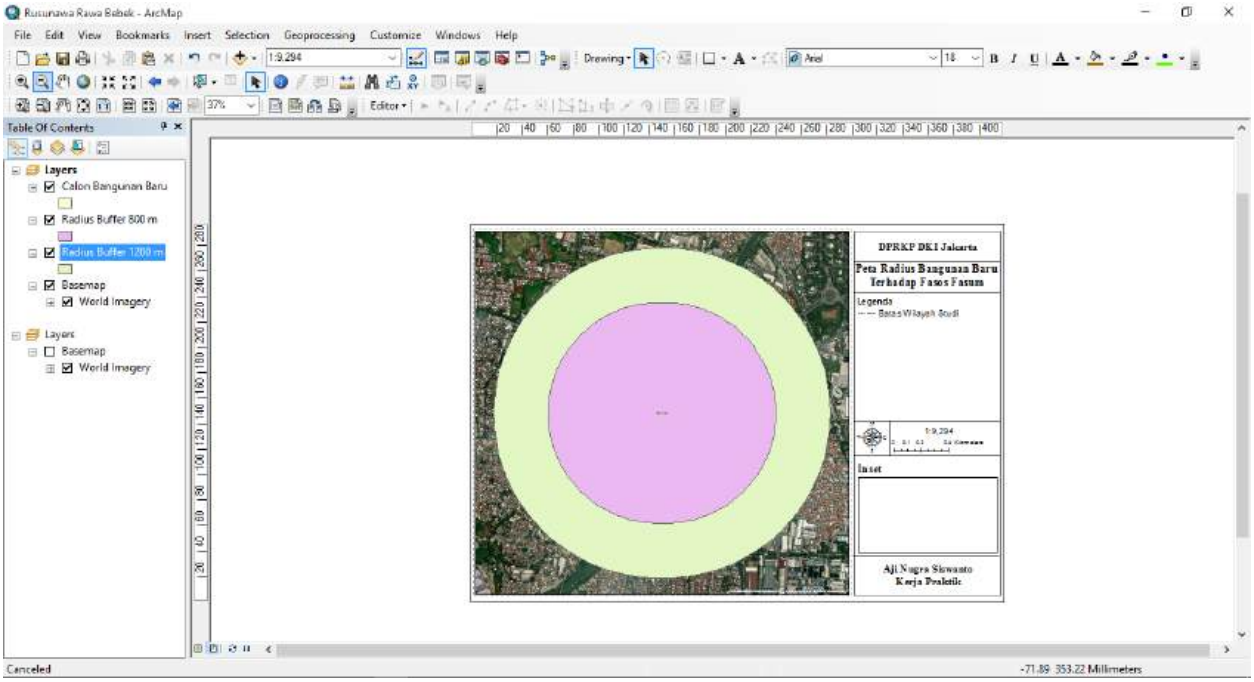

Lampiran 2.8 Meringkas Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023-2026

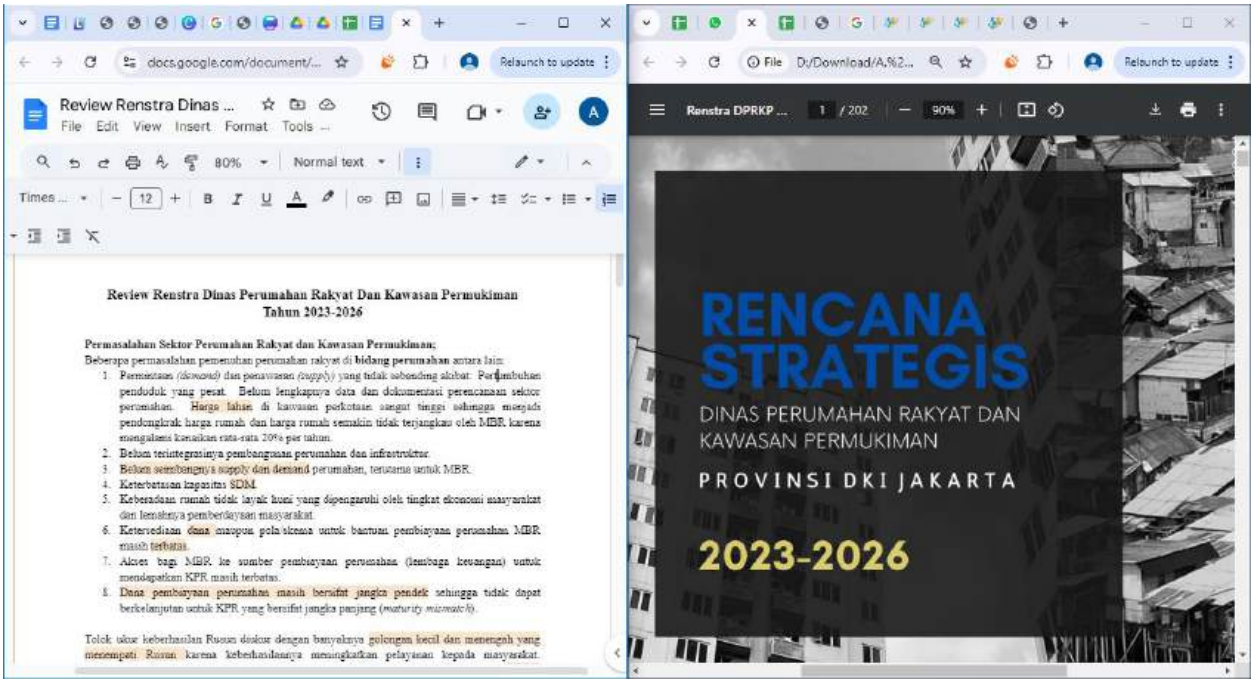

Lampiran 2.9 Menghitung luasan lahan kosong dan luas potensi tower baru

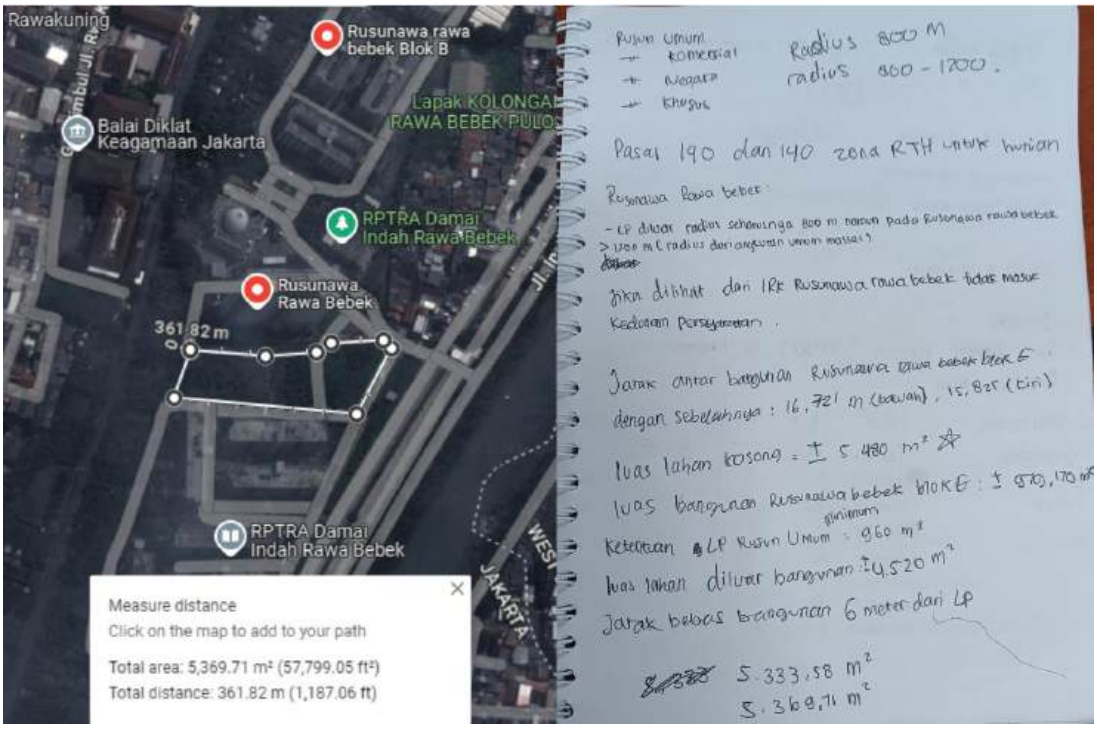

Lampiran 2.10 Meringkas SNI 03-7013-2004

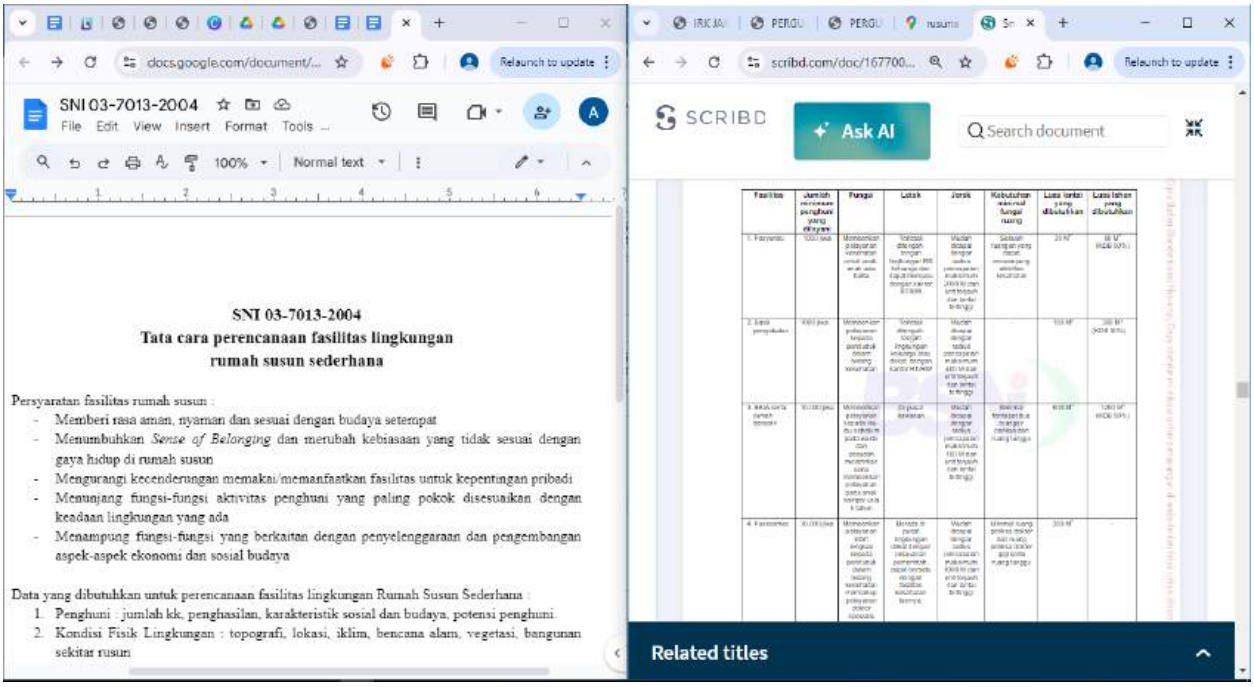

Lampiran 2.11 Menotulensi Asistensi/review DED Rumah Susun Marunda Cluster A

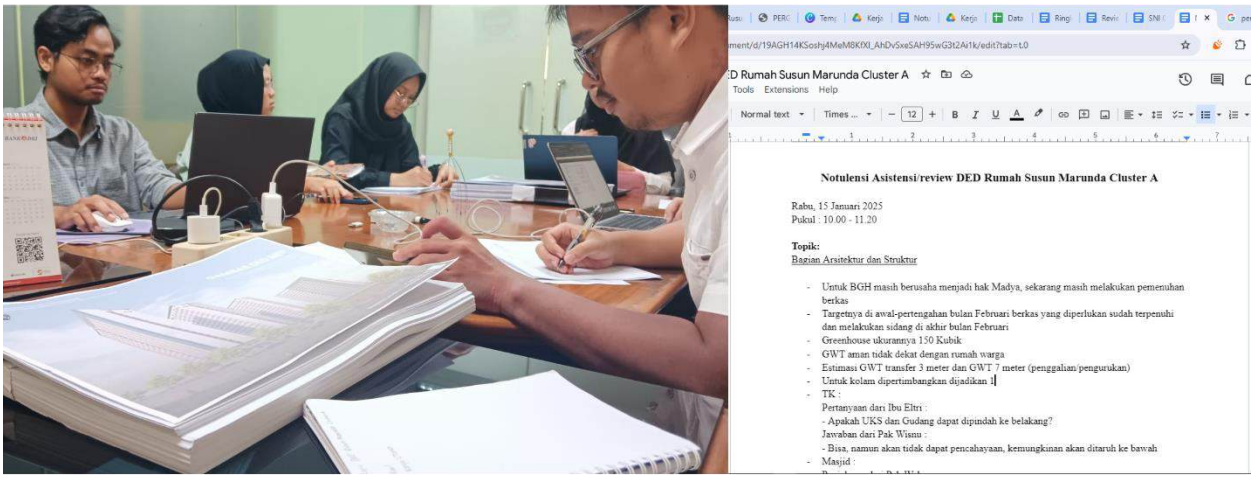

Lampiran 2.12 Memeriksa kata dan kalimat dalam penyusunan Laporan Akhir RP3KP Provinsi DKI Jakarta

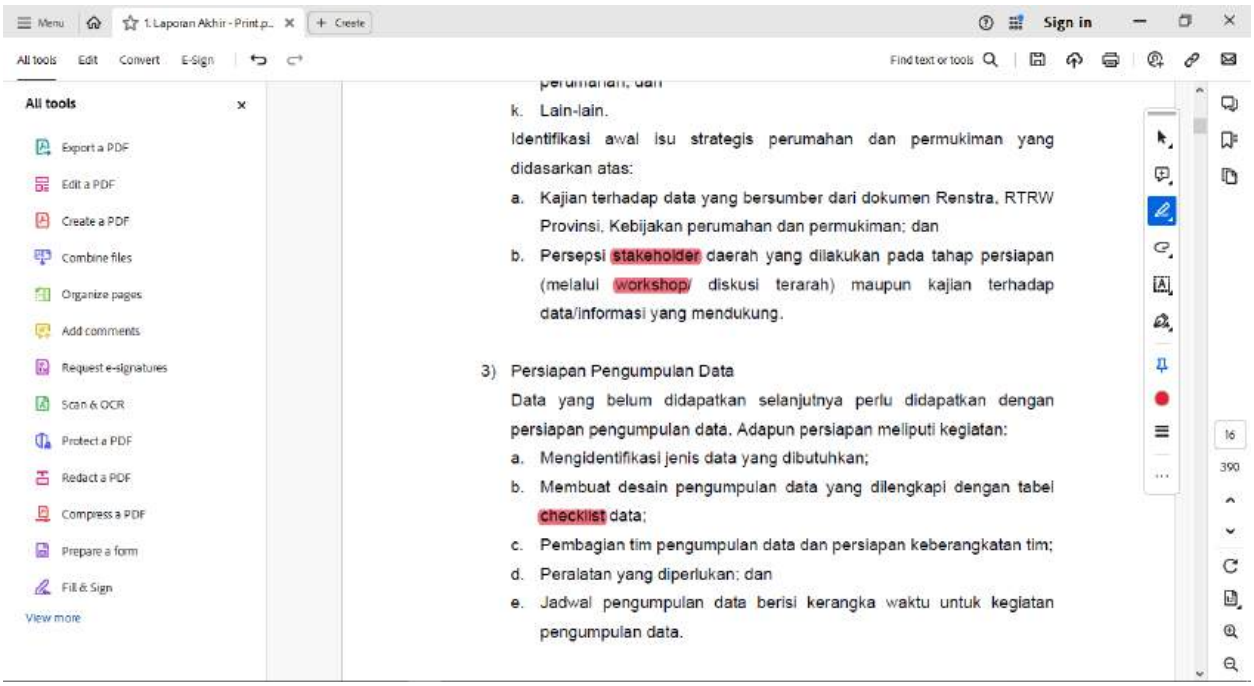

Lampiran 2.13 Memeriksa kata dan kalimat dalam penyusunan Laporan Akhir RP3KP Provinsi DKI Jakarta

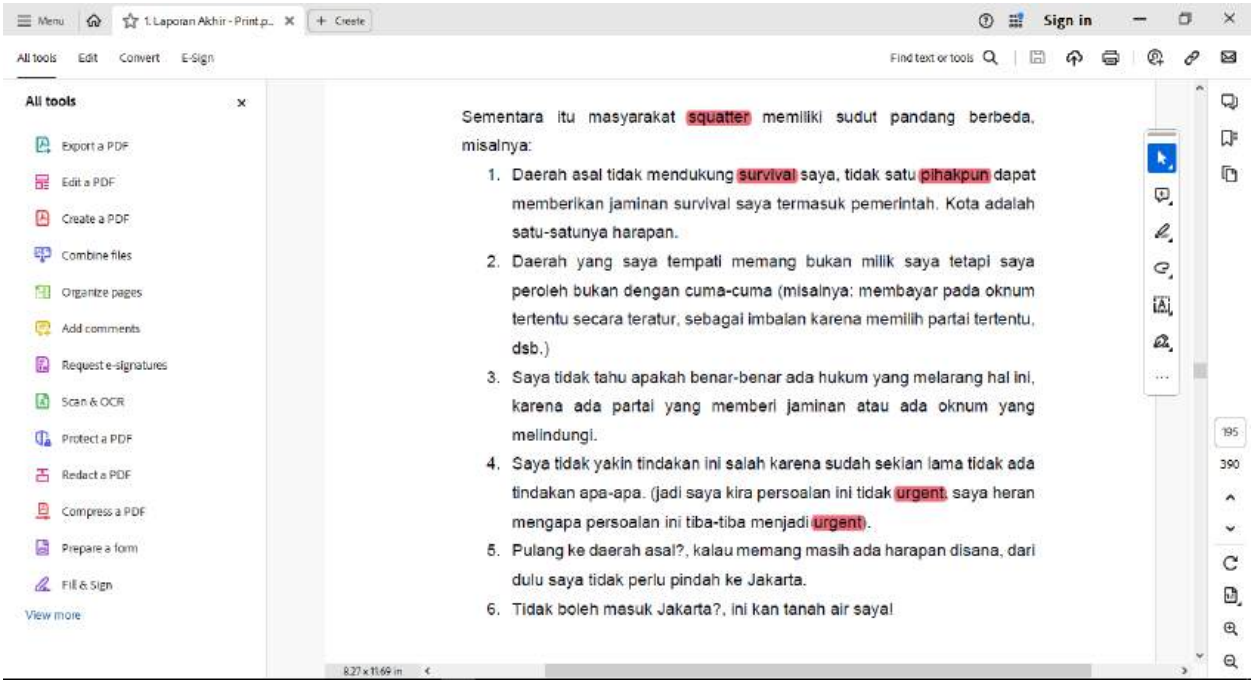

Sementara itu masyarakat squatter memiliki sudut pandang berbeda, misalnya:

1. Daerah asal tidak mendukung survival saya, tidak satu pihakpun dapat memberikan jaminan survival saya termasuk pemerintah. Kota adalah satu-satunya harapan.
2. Daerah yang saya tempati memang bukan milik saya tetapi saya peroleh bukan dengan cuma-cuma (misalnya: membayar pada oknum tertentu secara teratur, sebagai imbalan karena memilih partai tertentu, dsb.)
3. Saya tidak tahu apakah benar-benar ada hukum yang melarang hal ini, karena ada partai yang memberi jaminan atau ada oknum yang melindungi.
4. Saya tidak yakin tindakan ini salah karena sudah sekian lama tidak ada tindakan apa-apa. (jadi saya kira persoalan ini tidak urgent, saya heran mengapa persoalan ini tiba-tiba menjadi urgent).
5. Pulang ke daerah asal?, kalau memang masih ada harapan disana, dari dulu saya tidak perlu pindah ke Jakarta.
6. Tidak boleh masuk Jakarta?, ini kan tanah air saya!

Lampiran 2.14 Menghitung Intensitas Pemanfaatan Lahan Rumah Susun Rawa Bebek

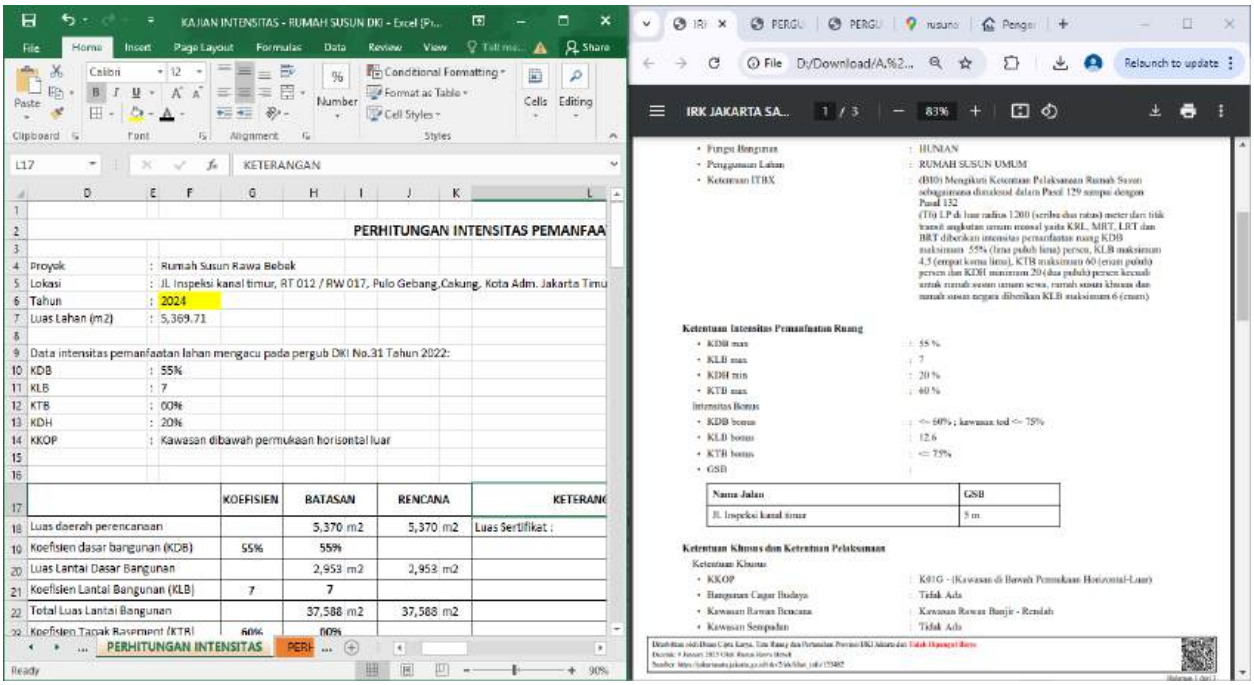

PERHITUNGAN INTENSITAS PEMANFAA

Proyek	:	Rumah Susun Rawa Bebek
Lokasi	:	Jl. Inspeksi kanal timur, RT 012 / RW 017, Pulo Gebang,Cakung, Kota Adm. Jakarta Timu
Tahun	:	2024
Luas Lahan (m2)	:	5,369.71

Data intensitas pemanfaatan lahan mengacu pada pergub DKI No.31 Tahun 2022:

KDB	:	55%
KLB	:	7
KTB	:	00%
KDH	:	20%
KKOP	:	Kawasan dibawah permukaan horisontal luar

	KOEFISIEN	BATASAN	RENCANA	KETERANG
Luas daerah perencanaan		5,370 m2	5,370 m2	Luas Sertifikat :
Koefisien dasar bangunan (KDB)	55%	55%		
Luas Lantai Dasar Bangunan		2,953 m2	2,953 m2	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	7	7		
Total Luas Lantai Bangunan		37,588 m2	37,588 m2	
Koefisien Tapak Basement (KTB)	60%	60%		

PERHITUNGAN INTENSITAS

- Fungsi Bangunan : HUNIAN
- Penggunaan Lahan : RUMAH SUSUN UMUM
- Ketentuan ITBX : (B10) Mengikuti Ketentuan Pelaksanaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 132 (T6) LP di luar radius 1,200 (seribu dua ratus) meter dari titik transit angkutan umum massal yaitu KRL, MRT, LRT dan BRT diberikan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 55% (lima puluh lima) persen, KLB maksimum 4,5 (empat koma lima), KTB maksimum 60 (enam puluh) persen dan KDH minimum 20 (dua puluh) persen kecuali untuk rumah susun umum sewa, rumah susun khusus dan rumah susun negara diberikan KLB maksimum 6 (enam)

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- KDB max : 55 %
- KLB max : 7
- KDH min : 20 %
- KTB max : 60 %

Intensitas Bonus

- KDB bonus : <= 60% ; kawasan ted <= 75%
- KLB bonus : 12.6
- KTB bonus : <= 75%
- GSB :

Nama Jalan	GSB
Jl. Inspeksi kanal timur	5 m

Ketentuan Khusus dan Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan Khusus

- KKOP : K81G - (Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar)
- Bangunan Cagar Budaya : Tidak Ada
- Kawasan Rawan Bencana : Kawasan Rawan Banjir - Rendah
- Kawasan Sempadan : Tidak Ada

Lampiran 2.15 Menghitung jarak lokasi terhadap Bandara Halim Perdanakusuma

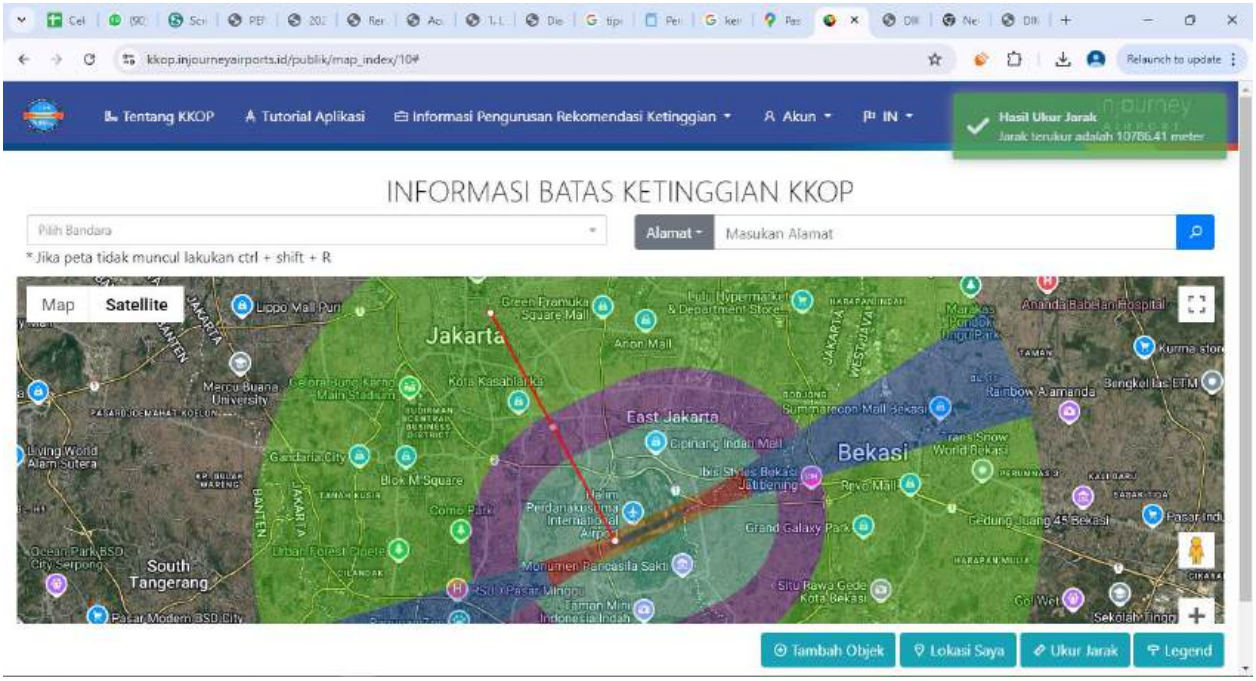

Lampiran 2.16 Menganalisis KKOP

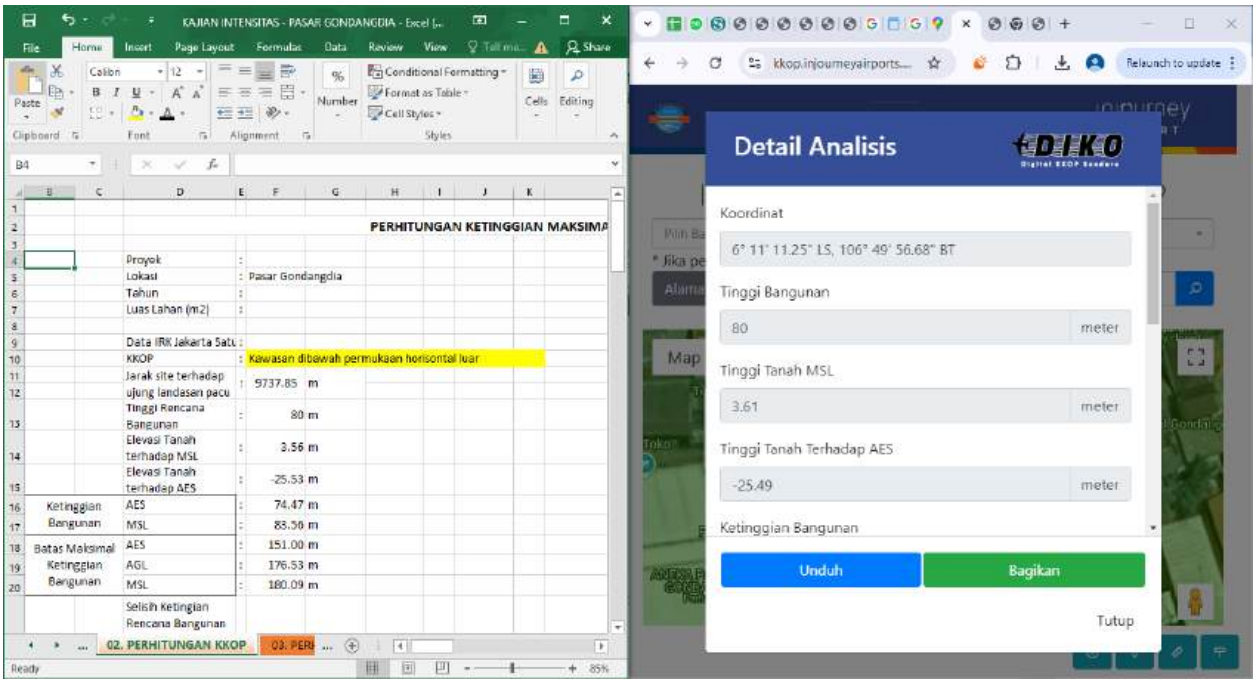

Lampiran 2.17 Meringkas paparan mengenai Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan

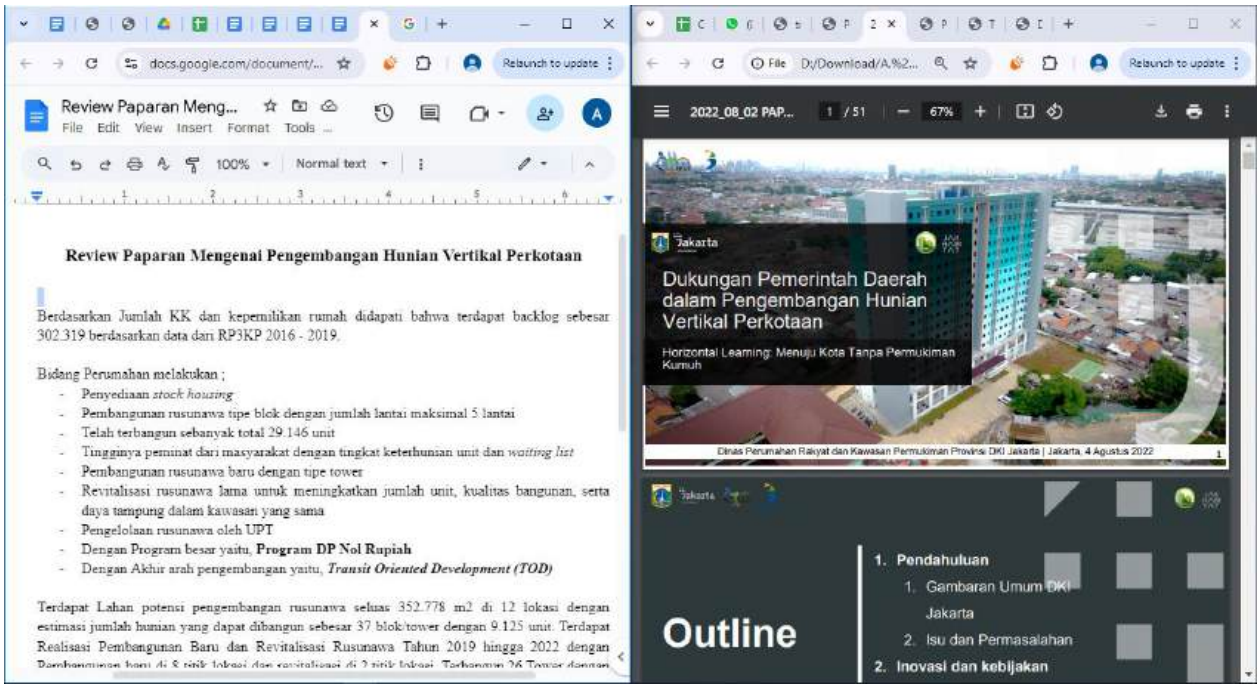

Lampiran 2.18 Mengikuti Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Rusunawa Daan Mogot Km 18

Lampiran 2.19 Membuat notulensi Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Rusunawa Daan Mogot Km 18

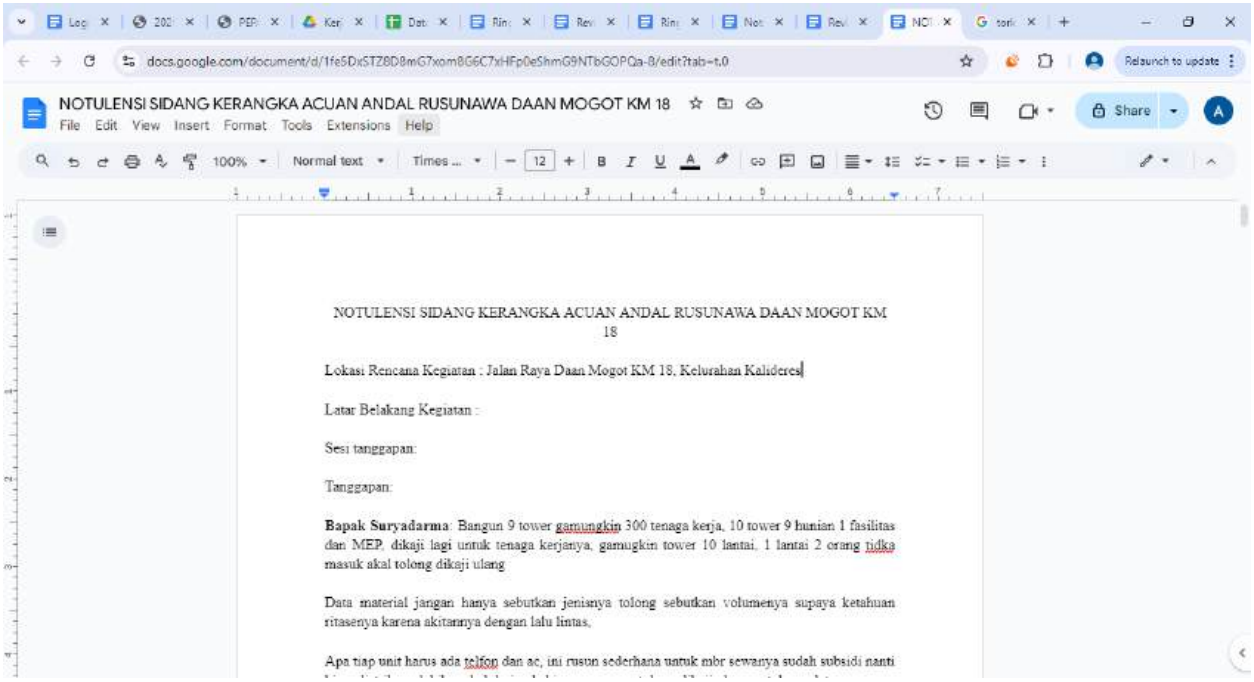

NOTULENSI SIDANG KERANGKA ACUAN ANDAL RUSUNAWA DAAN MOGOT KM 18

Lokasi Rencana Kegiatan : Jalan Raya Daan Mogot KM 18, Kelurahan Kalideres

Latar Belakang Kegiatan :

Sesi tanggapan:

Tanggapan:

Bapak Suryadarma: Bangun 9 tower gamungkin 300 tenaga kerja, 10 tower 9 hunian 1 fasilitas dan MEP, dikaji lagi untuk tenaga kerjanya, gamugkin tower 10 lantai, 1 lantai 2 orang tidka masuk akal tolong dikaji ulang

Data material jangan hanya sebutkan jenisnya tolong sebutkan volumenya supaya ketahuan ritasenya karena akitannya dengan lalu lintas.

Apa tiap unit harus ada telfon dan ac, ini rusun sederhana untuk mbr sewanya sudah subsidi nanti

Lampiran 2.20 Meringkas Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994

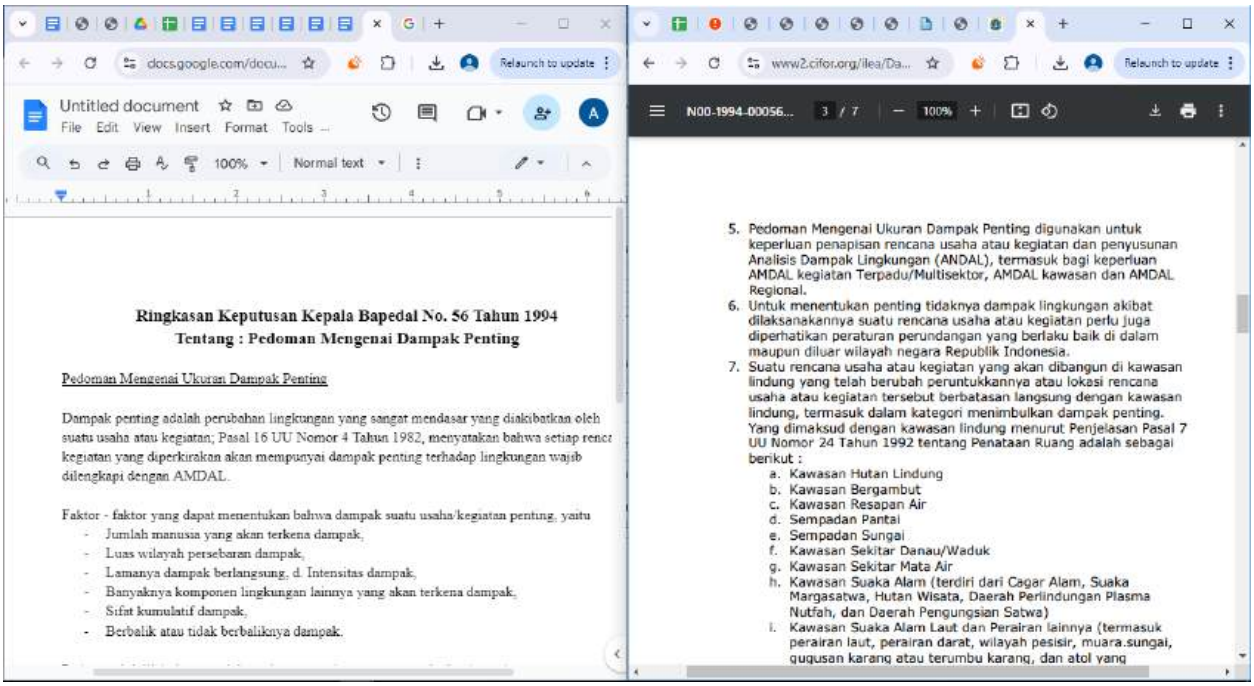

Ringkasan Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994
Tentang : Pedoman Mengenai Dampak Penting

Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan; Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 1982, menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Faktor - faktor yang dapat menentukan bahwa dampak suatu usaha/kegiatan penting, yaitu
- Jumlah manusia yang akan terkena dampak,
- Luas wilayah persebaran dampak,
- Lamanya dampak berlangsung, d. Intensitas dampak,
- Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak,
- Sifat kumulatif dampak,
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

5. Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting digunakan untuk keperluan penapisan rencana usaha atau kegiatan dan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), termasuk bagi keperluan AMDAL kegiatan Terpadu/Multisektor, AMDAL kawasan dan AMDAL Regional.
6. Untuk menentukan penting tidaknya dampak lingkungan akibat dilaksanakannya suatu rencana usaha atau kegiatan perlu juga diperhatikan peraturan perundangan yang berlaku baik di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia.
7. Suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun di kawasan lindung yang telah berubah peruntukkannya atau lokasi rencana usaha atau kegiatan tersebut berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting. Yang dimaksud dengan kawasan lindung menurut Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
   a. Kawasan Hutan Lindung
   b. Kawasan Bergambut
   c. Kawasan Resapan Air
   d. Sempadan Pantai
   e. Sempadan Sungai
   f. Kawasan Sekitar Danau/Waduk
   g. Kawasan Sekitar Mata Air
   h. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
   i. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara.sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang

Lampiran 2.21 Mempelajari dan Mengaplikasikan Sketchup

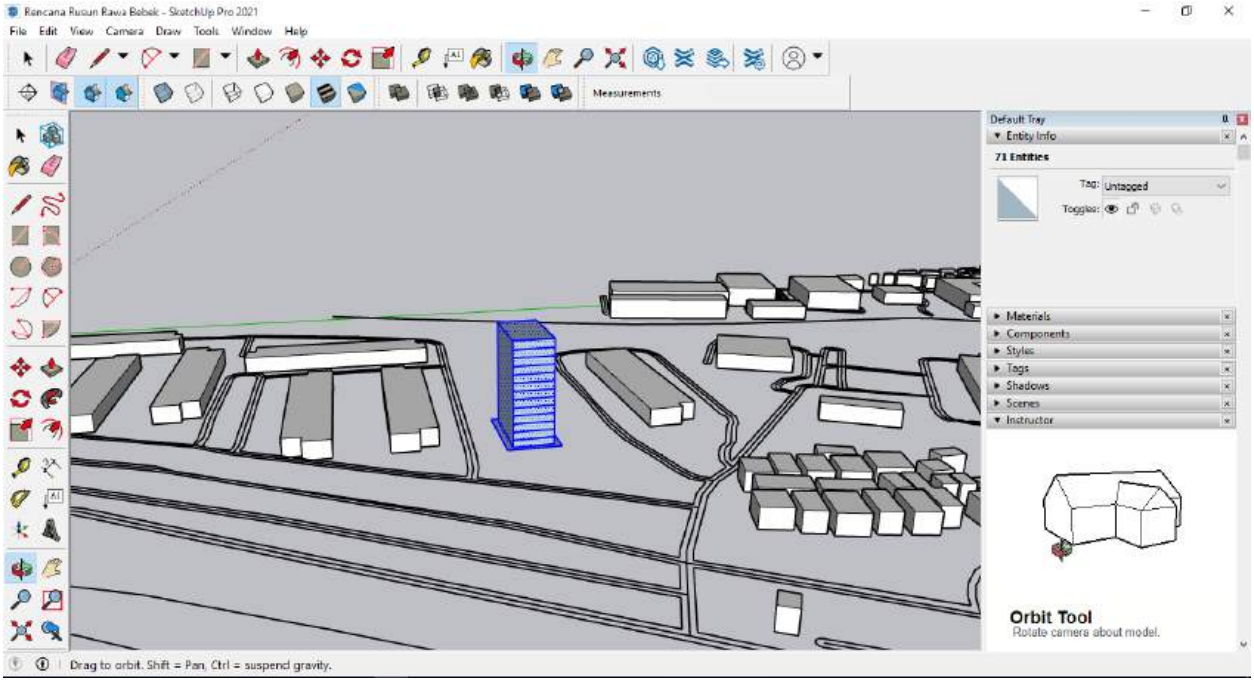

Lampiran 2.22 Mereview Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa

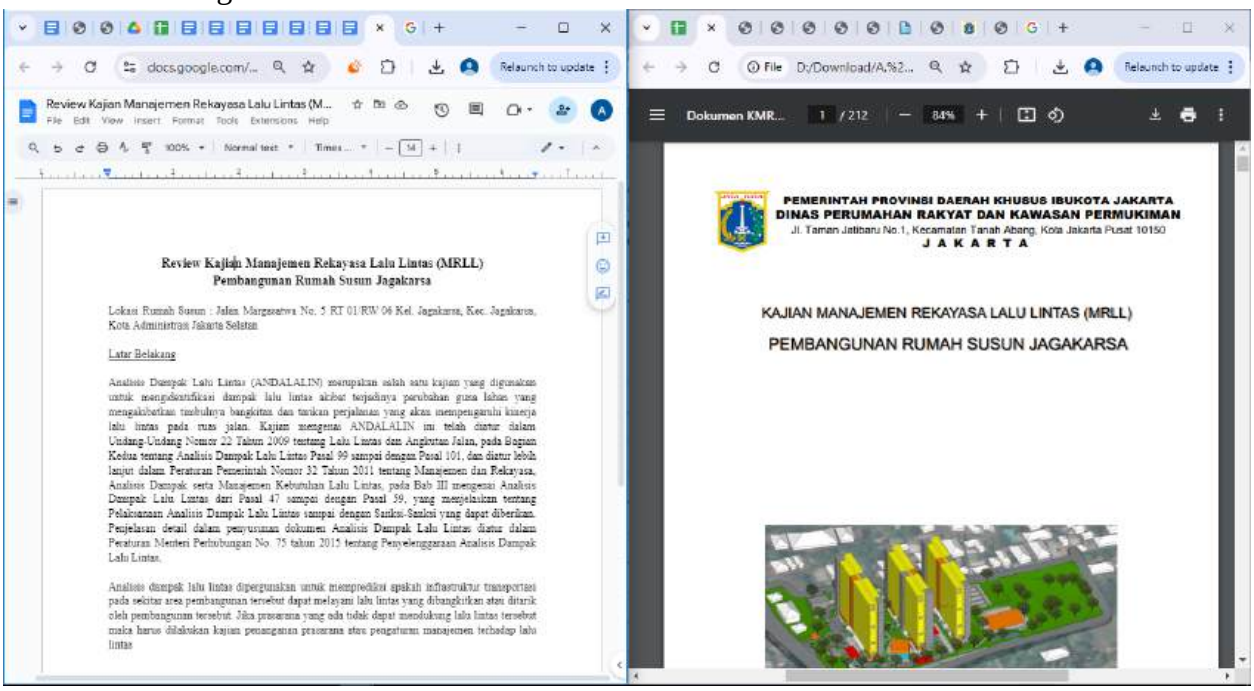

Lampiran 2.23 Mereview Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa

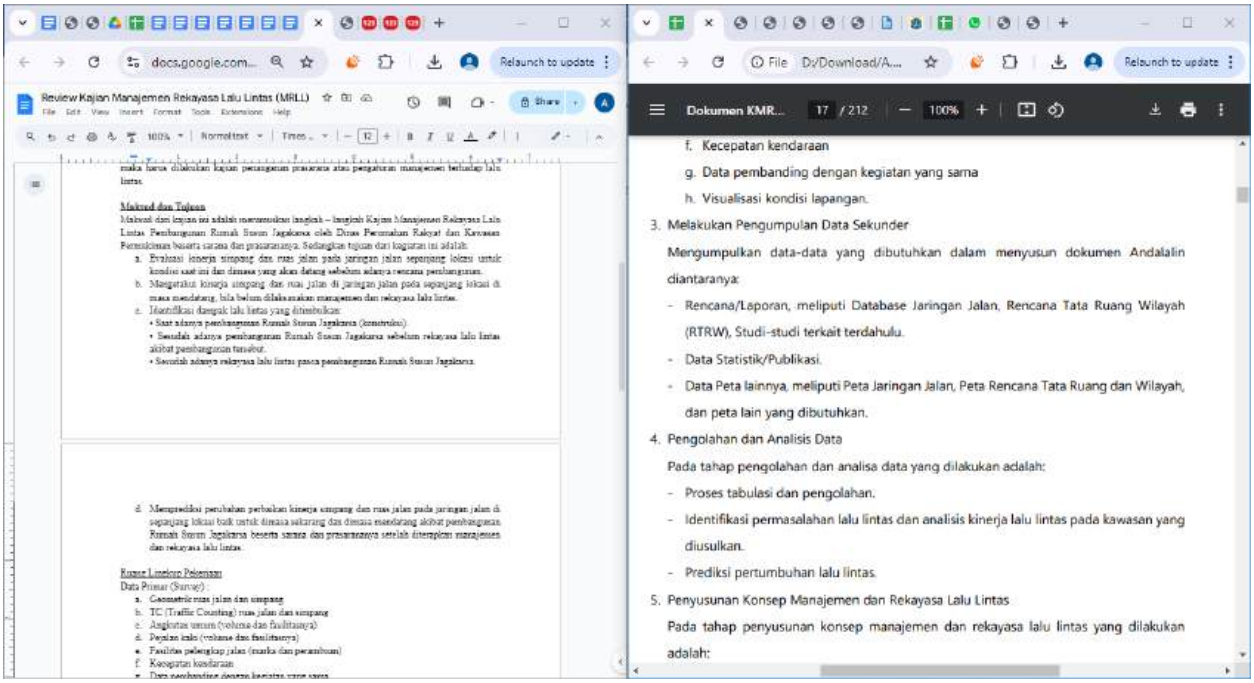

Lampiran 2.24 Melanjutkan review Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa

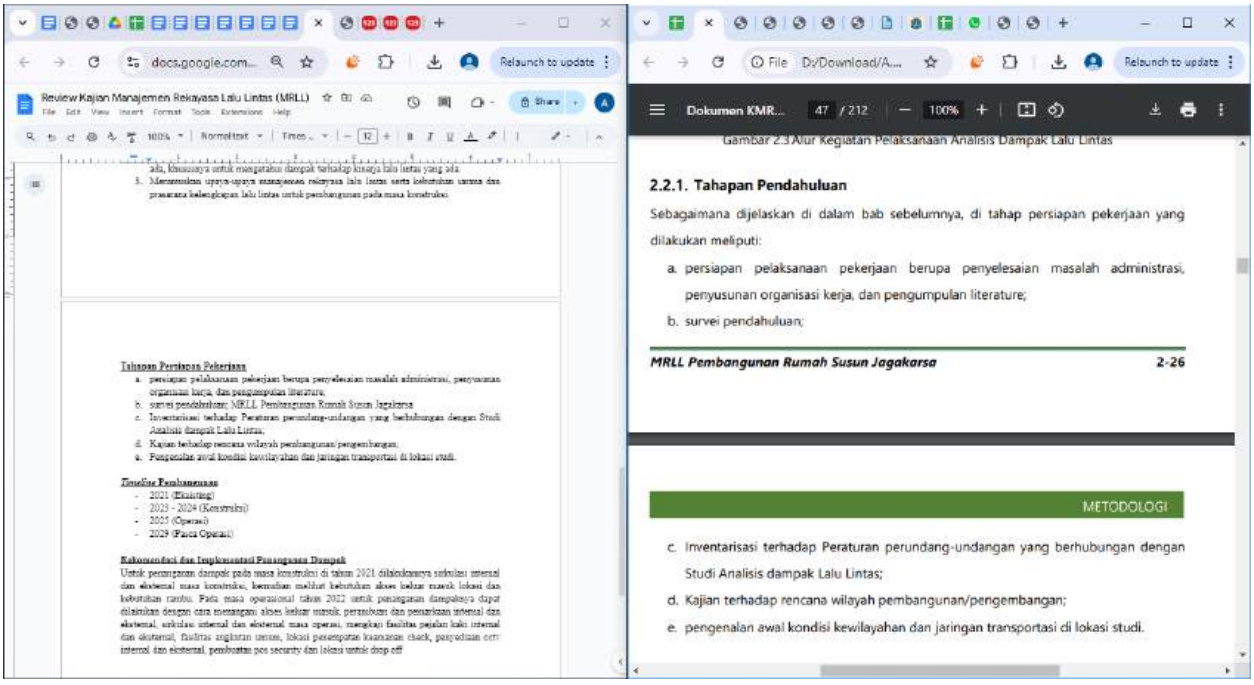

Lampiran 2.25 Menghitung Jarak, KKOP dan menginput IRK Pasar dan Gor terhadap Stasisun Terdekat

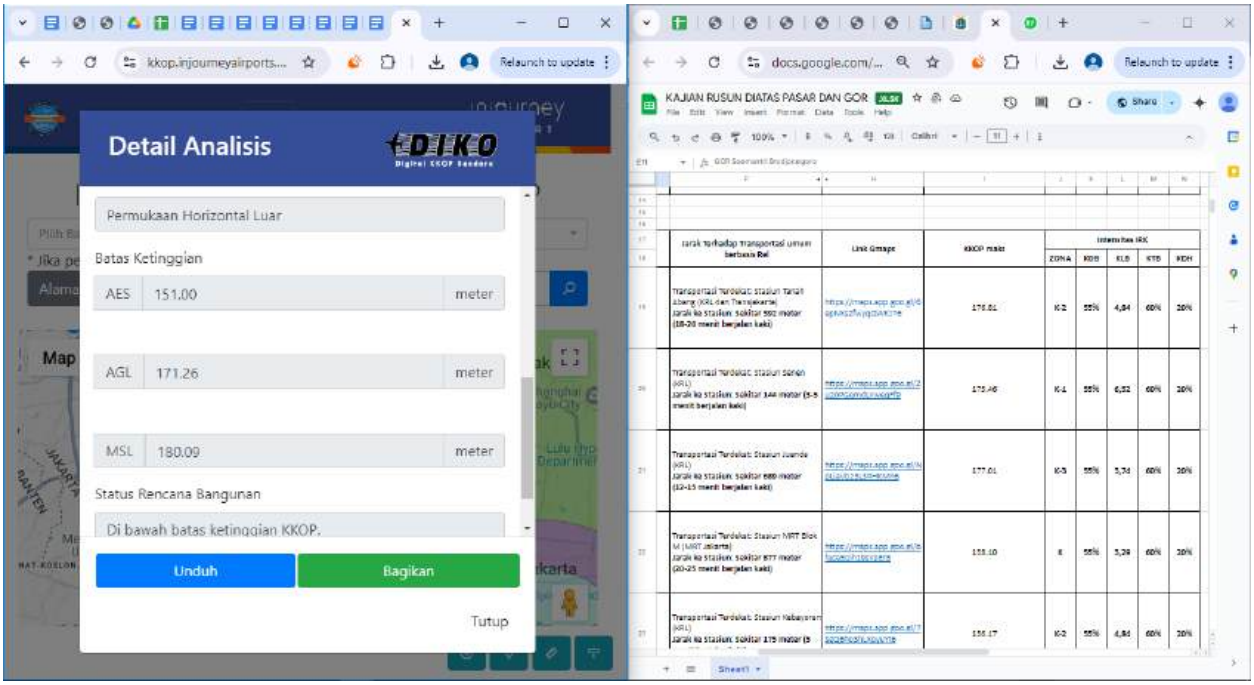

Lampiran 2.26 Mendigitasi dan Menghitung luas lahan gor dan pasar yang akan dijadikan Rusunawa dengan aplikasi Google Earth

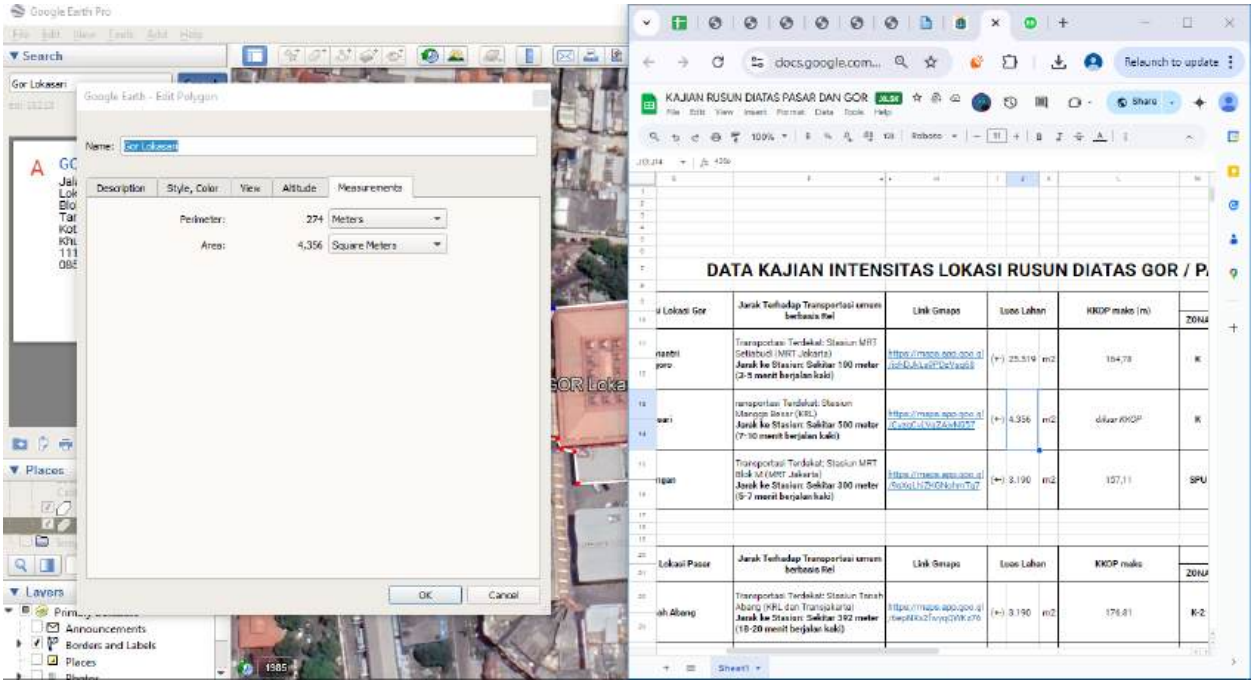

Lampiran 2.27 Mendigitasi wilayah rencana pembangunan dan mengubah file .shp menjadi .dwg

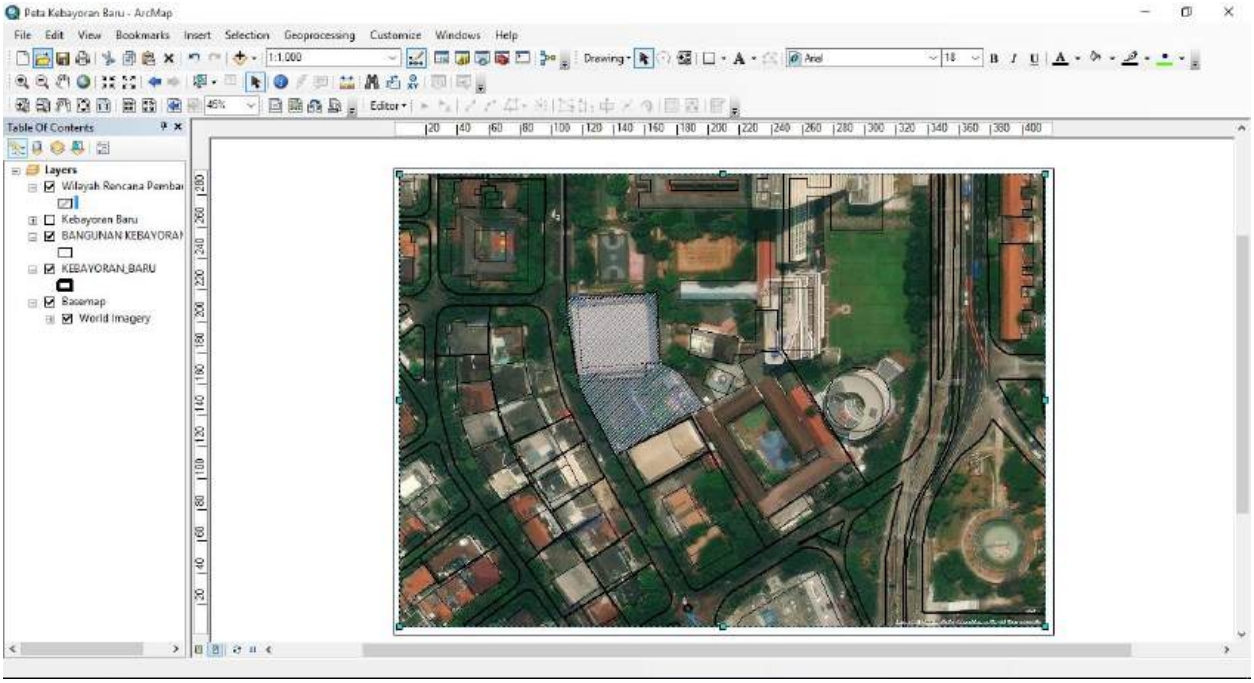

Lampiran 2.28 Mengubah file shp peta administrasi Kecamatan Kebayoran Baru menjadi file dwg

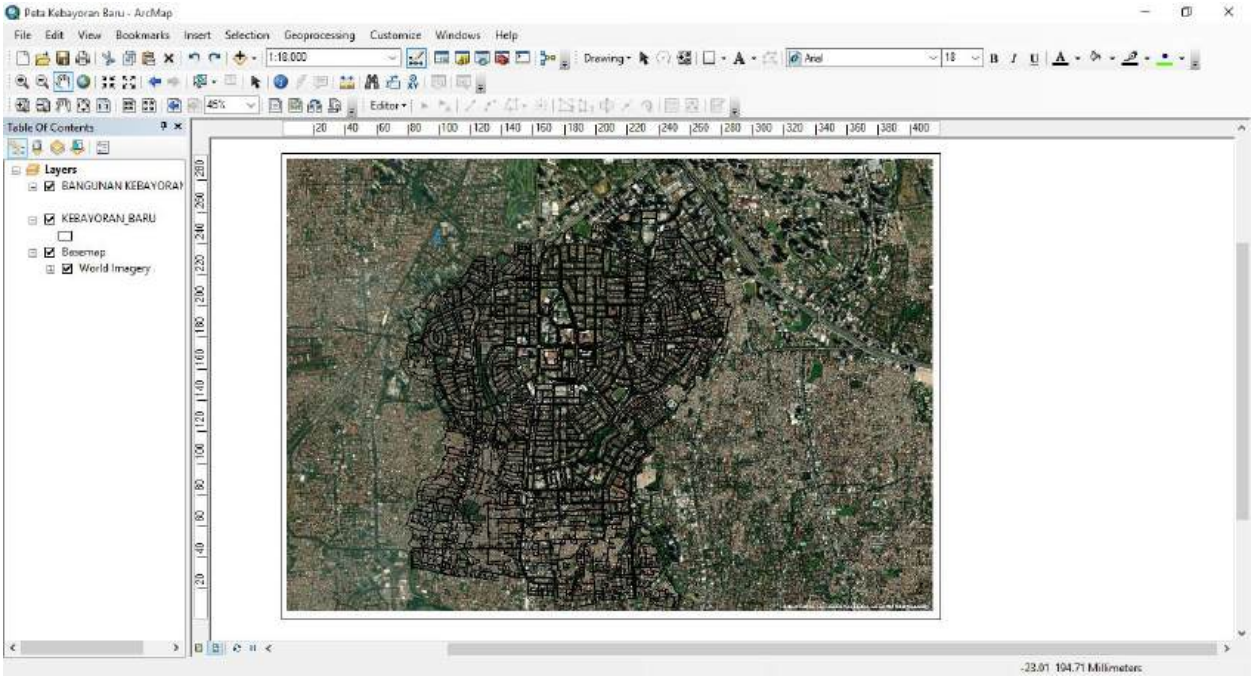

Lampiran 2.29 Mengubah file shp peta administrasi Kelurahan Penjaringan menjadi file dwg

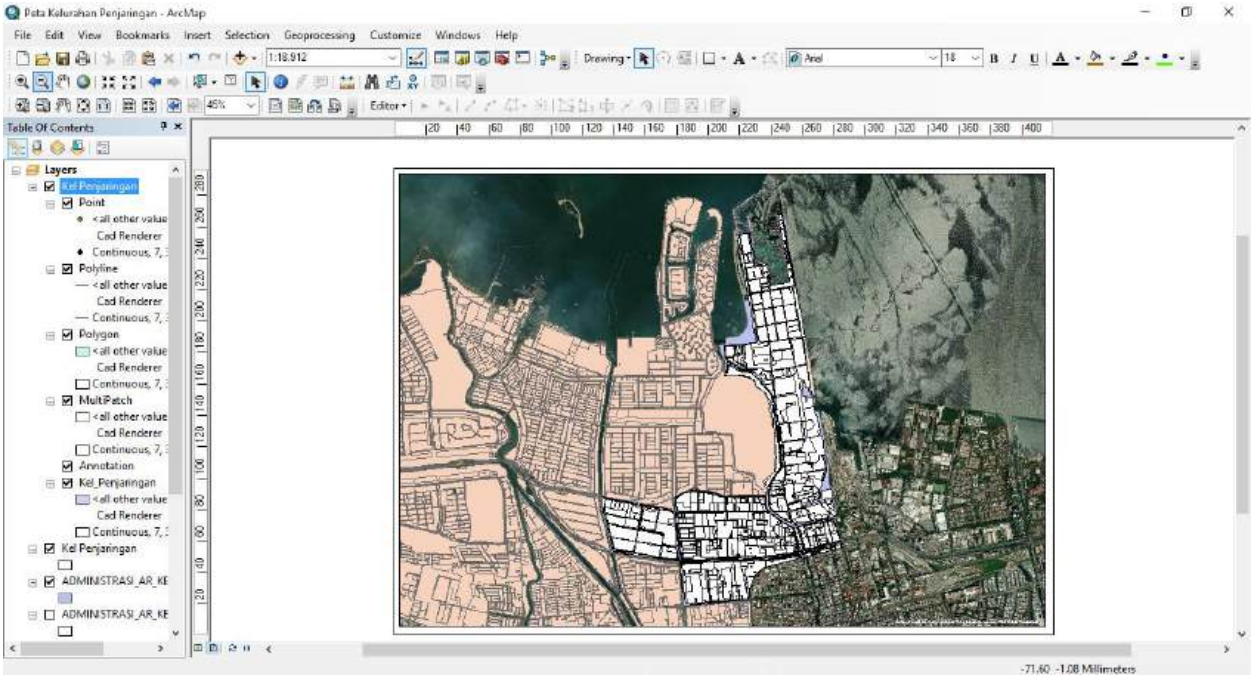

Lampiran 2.30 Meringkas menyelaraskan Pergub No.26 Tahun 2013 dengan Rancangan Pergub tentang Pedoman Standarisasi Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah

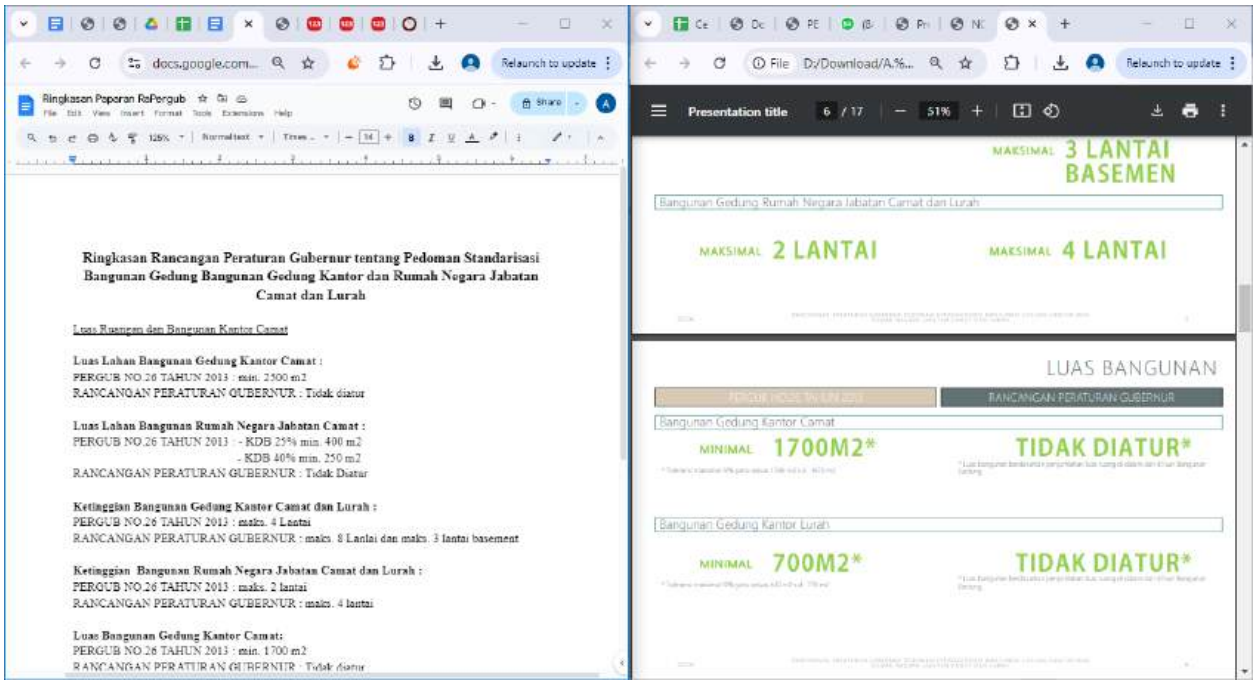

Ringkasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standarisasi Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah

Luas Ruangan dan Bangunan Kantor Camat

Luas Lahan Bangunan Gedung Kantor Camat :
PERGUB NO.26 TAHUN 2013 : min. 2500 m2
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR : Tidak diatur

Luas Lahan Bangunan Rumah Negara Jabatan Camat :
PERGUB NO.26 TAHUN 2013 : - KDB 25% min. 400 m2
- KDB 40% min. 250 m2
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR : Tidak Diatur

Ketinggian Bangunan Gedung Kantor Camat dan Lurah :
PERGUB NO.26 TAHUN 2013 : maks. 4 Lantai
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR : maks. 8 Lantai dan maks. 3 lantai basement

Ketinggian Bangunan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah :
PERGUB NO.26 TAHUN 2013 : maks. 2 lantai
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR : maks. 4 lantai

Luas Bangunan Gedung Kantor Camat:
PERGUB NO.26 TAHUN 2013 : min. 1700 m2
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR : Tidak diatur

Lampiran 2.31 Menghitung luas ruangan kantor camat dengan kategori wajib, bersyarat dan disarankan untuk dibangun pada Rusunawa

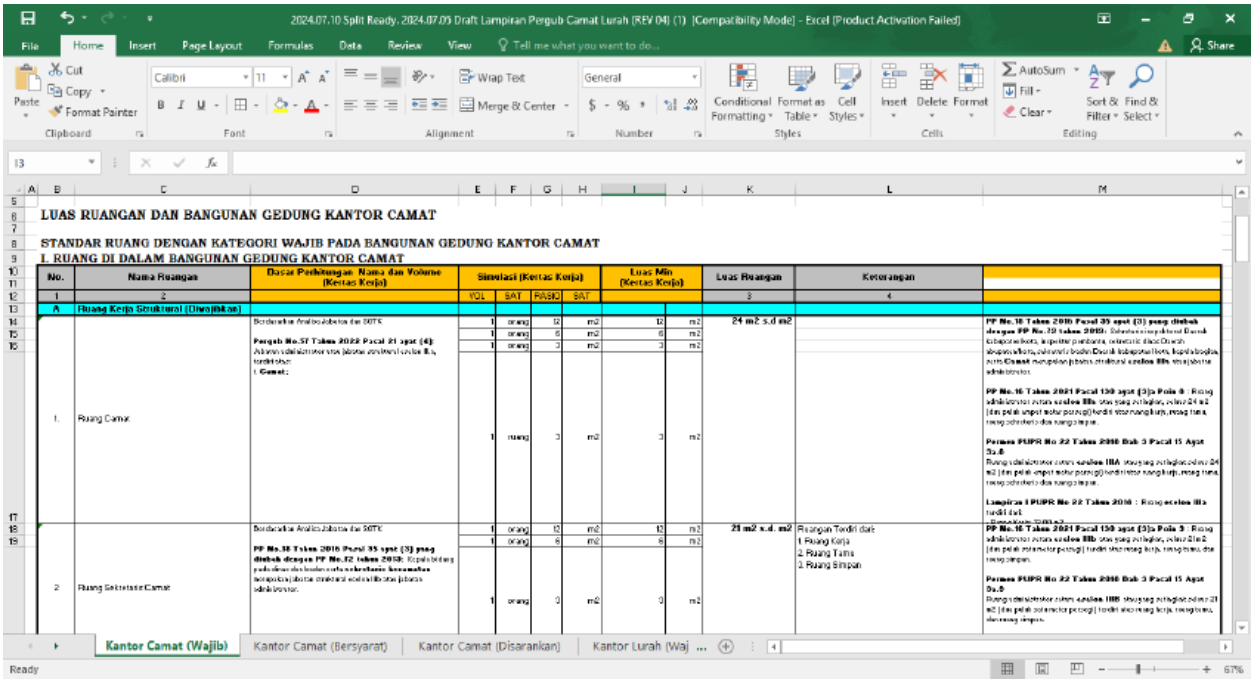

LUAS RUANGAN DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT

STANDAR RUANG DENGAN KATEGORI WAJIB PADA BANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT

I. RUANG DI DALAM BANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT

No.	Nama Ruangan	Dasar Perhitungan Nama dan Volume (Kertas Kerja)	Simulasi (Kertas Kerja)				Luas Min (Kertas Kerja)		Luas Ruangan	Keterangan	
			VOL	SAT	PASIO	SAT					
1	2								3	4	
A	Ruang Kerja Struktural (Diwajibkan)										
1.	Ruang Camat	Berdasarkan Analisa Jabatan dan SOTK **Pergub No.57 Tahun 2022 Pasal 21 ayat (4):** Adalah ketentuan yang jabatan struktural eselon IIIa, terdiri atas: 1. **Camat;**	1 1 1 1	orang orang orang ruang	12 6 3 3	m2 m2 m2 m2	12 6 3 3	m2 m2 m2 m2	24 m2 s.d m2		**PP No.18 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (3) yang diubah dengan PP No.30 Tahun 2019:** Sekretaris wilayah Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, inspektur kabupaten/kota, kepala badan, kepala Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala badan, kepala Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa yang diatur oleh daerah. **PP No.16 Tahun 2021 Pasal 150 ayat (3)a Poin 8** : Ruang adalah bersifat sesuai eselon IIIa atau yang setingkat, eselon 24 m2 (dan pelak unsur sekretariat paling) tanpa ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris dan ruang tunggu. **Permen PUPR No 22 Tahun 2018 Bab 3 Pasal 15 Ayat 3a.8** Ruang adalah bersifat sesuai eselon IIIA atau yang setingkat eselon 24 m2 (dan pelak unsur sekretariat paling) tanpa ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris dan ruang tunggu. **Lampiran I PUPR No 22 Tahun 2018** : Ruang eselon IIIa terdiri dari: - Ruang Kerja 24 m2
2.	Ruang Sekretaris Camat	Berdasarkan Analisa Jabatan dan SOTK **PP No.18 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (3) yang diubah dengan PP No.72 Tahun 2019:** Kepala biro pada dinas dan badan untuk urusan kesekretariatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.	1 1 1	orang orang orang	12 6 3	m2 m2 m2	12 6 3	m2 m2 m2	21 m2 s.d. m2	Ruangan Terdiri dari: 1 Ruang Kerja 2 Ruang Tamu 3 Ruang Simpan	**PP No.16 Tahun 2021 Pasal 150 ayat (3)a Poin 3** : Ruang adalah bersifat sesuai eselon IIIb atau yang setingkat, eselon 21m2 (dan pelak unsur sekretariat paling) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan. **Permen PUPR No 22 Tahun 2018 Bab 3 Pasal 15 Ayat 3a.8** Ruang adalah bersifat sesuai eselon IIIB atau yang setingkat, eselon 21 m2 (dan pelak unsur sekretariat paling) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan.

Lampiran 2.32 Menghitung dan menginput harga satuan bahan konstruksi DKI Jakarta 2025 untuk mengestimasi biaya pembangunan rusun

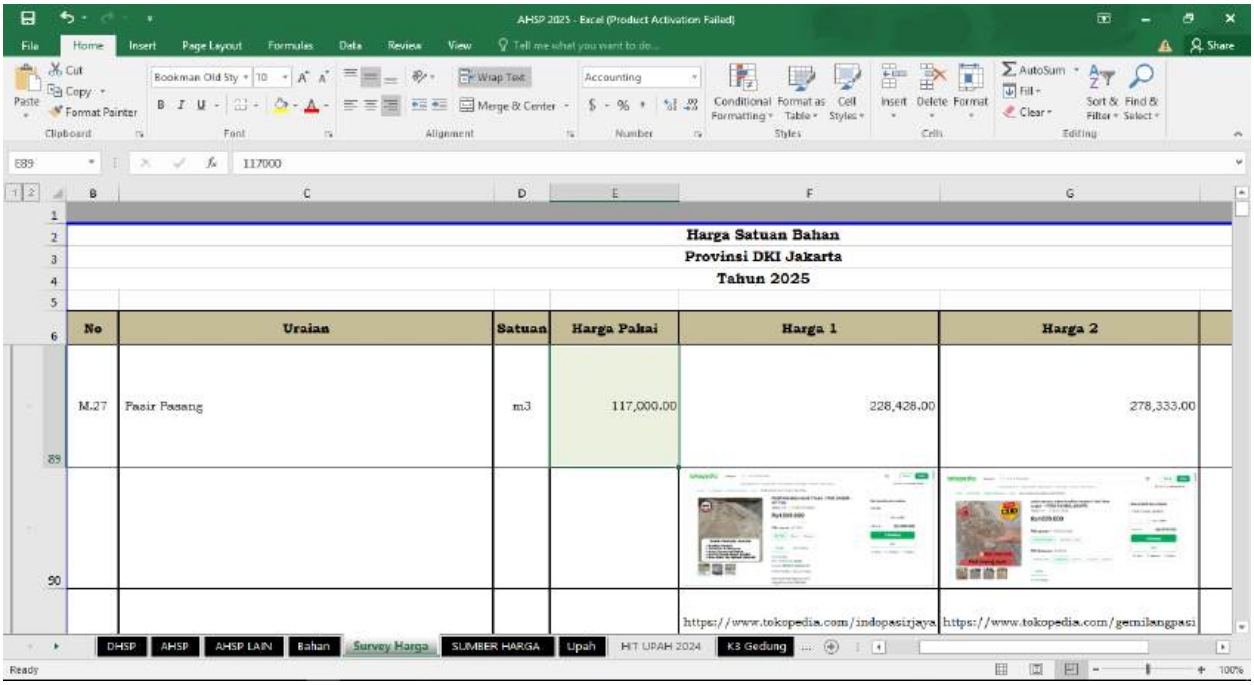

Harga Satuan Bahan
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Harga Pakai	Harga 1	Harga 2
M.27	Pasir Pasang	m3	117,000.00	228,428.00	278,333.00
				https://www.tokopedia.com/indopasirjaya	https://www.tokopedia.com/gemilanggasi

Lampiran 2.33 Meringkas PP No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

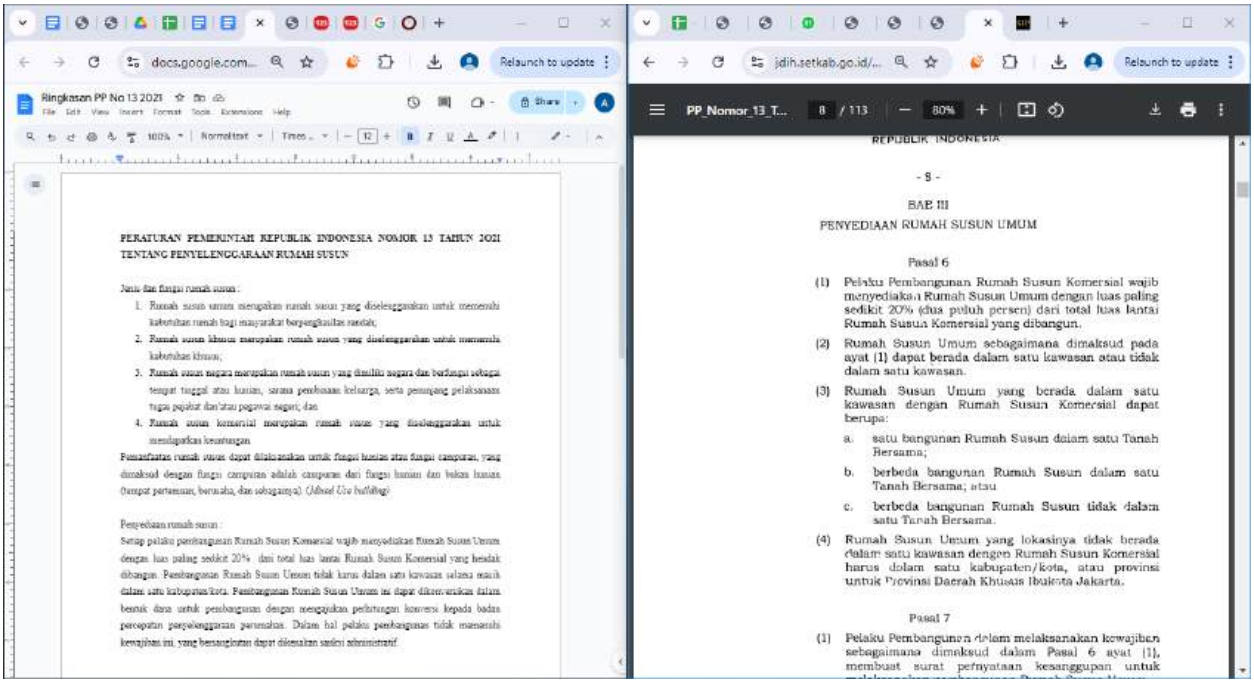

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

Jenis dan fungsi rumah susun :

1. Rumah susun umum merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Rumah susun khusus merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus;
3. Rumah susun negara merupakan rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri; dan
4. Rumah susun komersial merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memperoleh keuntungan.

Pemanfaatan rumah susun dapat ditaksukan untuk fungsi hunian atau fungsi campuran, yang dimaksud dengan fungsi campuran adalah campuran dari fungsi hunian dan bukan hunian (tempat pertemuan, berusaha, dan sebagainya). (Mixed Use building)

Penyediaan rumah susun :
Setiap pelaku pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang hendak dibangun. Pembangunan Rumah Susun Umum tidak harus dalam satu kawasan selama masih dalam satu kabupaten/kota. Pembangunan Rumah Susun Umum ini dapat diterjemahkan dalam bentuk dana untuk pembangunan dengan mengajukan perhitungan konversi kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan. Dalam hal pelaku pembangunan tidak memenuhi kewajiban ini, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif.

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III

PENYEDIAAN RUMAH SUSUN UMUM

Pasal 6

(1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.

(2) Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kawasan atau tidak dalam satu kawasan.

(3) Rumah Susun Umum yang berada dalam satu kawasan dengan Rumah Susun Komersial dapat berupa:

a. satu bangunan Rumah Susun dalam satu Tanah Bersama;

b. berbeda bangunan Rumah Susun dalam satu Tanah Bersama; atau

c. berbeda bangunan Rumah Susun tidak dalam satu Tanah Bersama.

(4) Rumah Susun Umum yang lokasinya tidak berada dalam satu kawasan dengan Rumah Susun Komersial harus dalam satu kabupaten/kota, atau provinsi untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

(1) Pelaku Pembangunan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membuat surat pernyataan kesanggupan untuk

Lampiran 2.34 Melakukan survey ke Kampung Jimpitan KB 2 Kota Tangerang

Lampiran 2.35 Meringkas PP No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

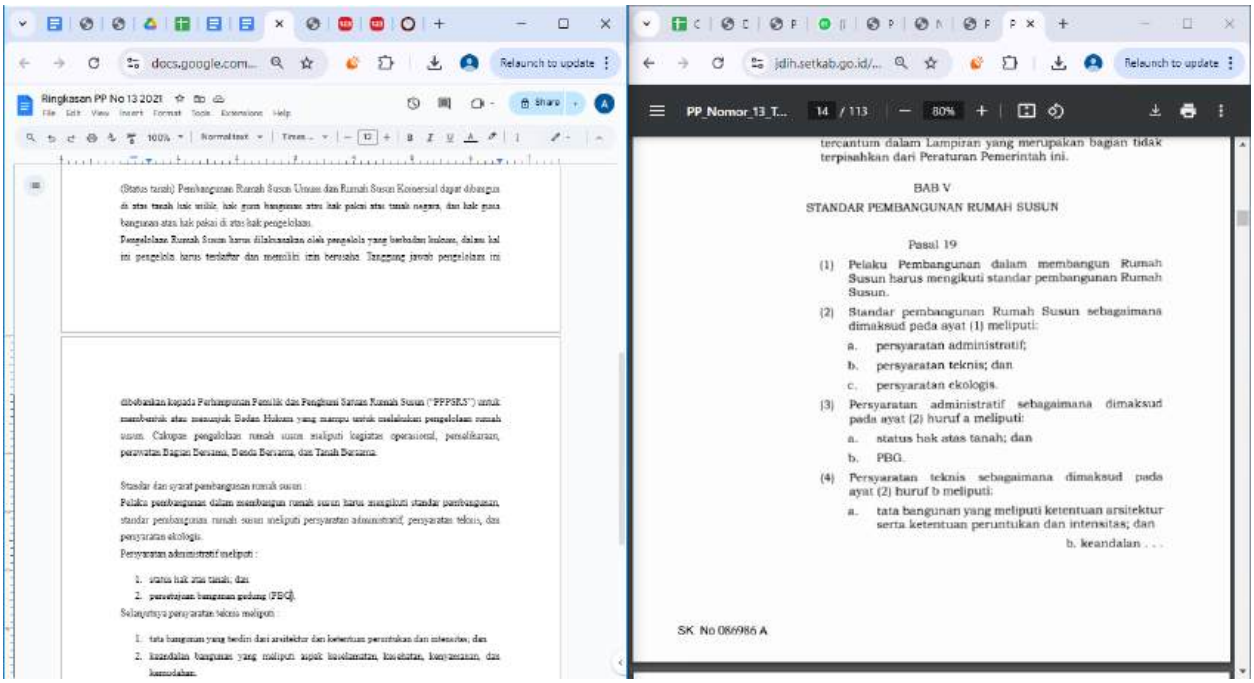

Lampiran 2.36 Membuat Peta *Buffer* kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang sudah tidak dipakai

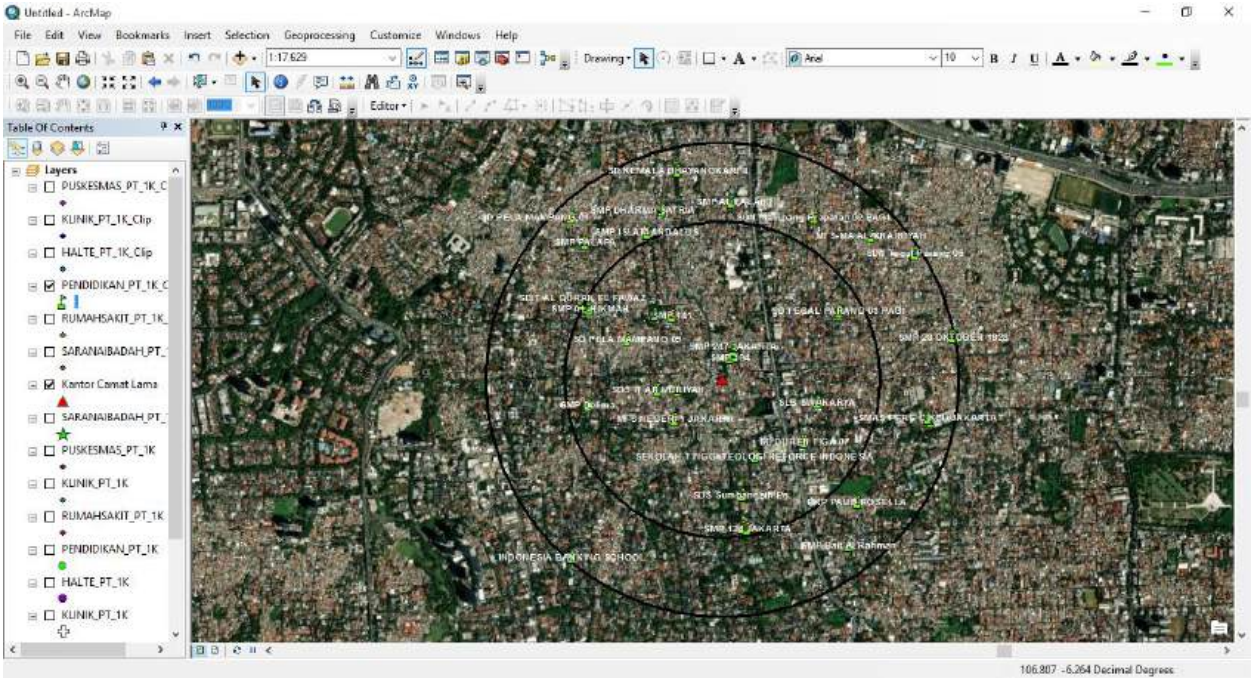

Lampiran 2.37 Membantu menyusun pemaparan kajian usulan Rusun baru pada bekas Kantor Kecamatan Mampang Prapatan

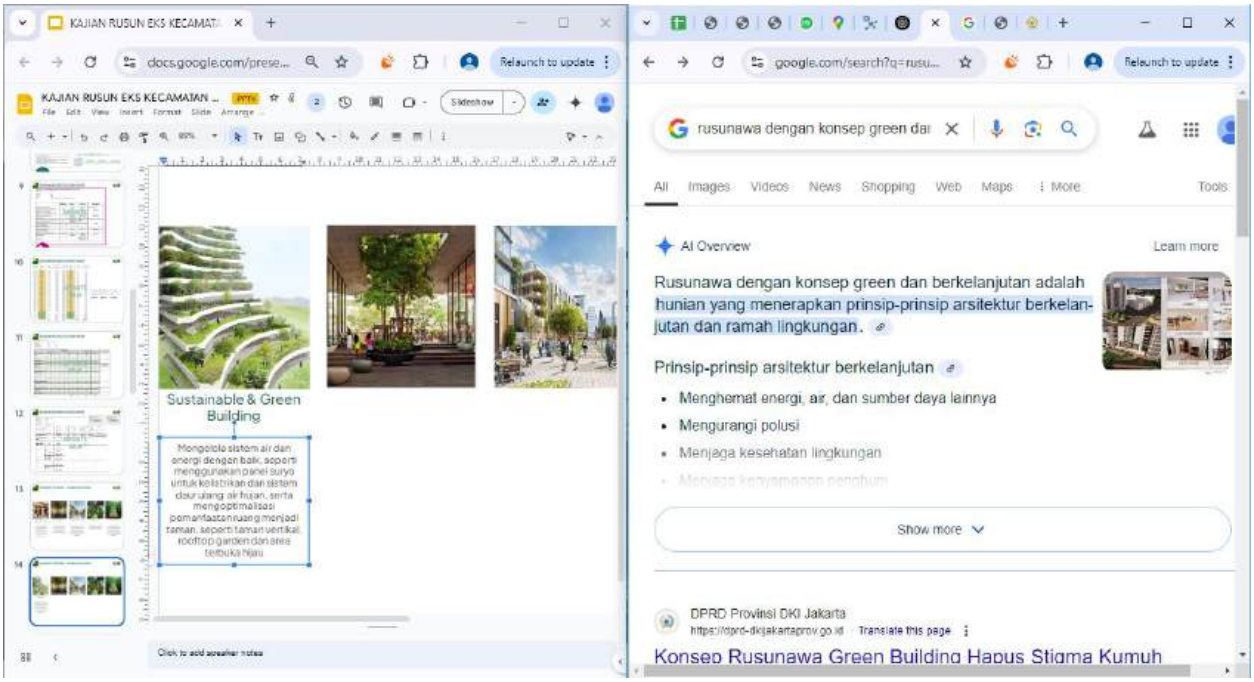

Lampiran 2.38 Membantu notulensi rapat Koordinasi Platform Pendataan Basis Data Perumahan TA 2025

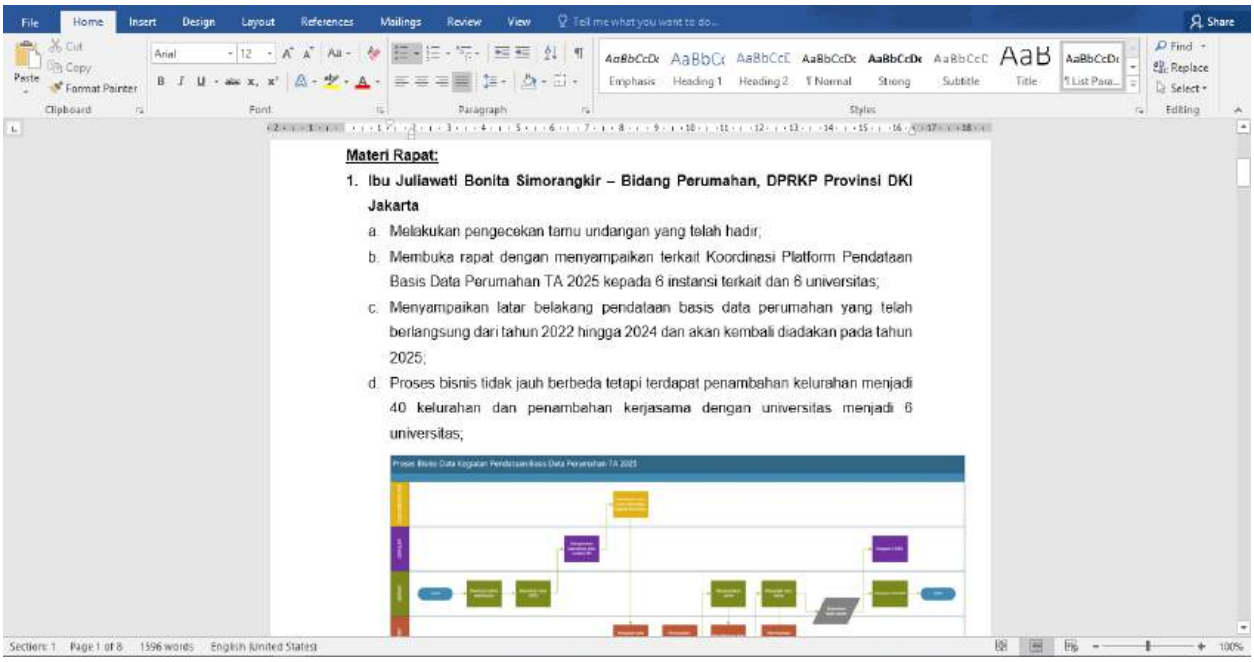

Materi Rapat:

1. **Ibu Juliawati Bonita Simorangkir – Bidang Perumahan, DPRKP Provinsi DKI Jakarta**
   a. Melakukan pengecekan tamu undangan yang telah hadir;
   b. Membuka rapat dengan menyampaikan terkait Koordinasi Platform Pendataan Basis Data Perumahan TA 2025 kepada 6 instansi terkait dan 6 universitas;
   c. Menyampaikan latar belakang pendataan basis data perumahan yang telah berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024 dan akan kembali diadakan pada tahun 2025;
   d. Proses bisnis tidak jauh berbeda tetapi terdapat penambahan kelurahan menjadi 40 kelurahan dan penambahan kerjasama dengan universitas menjadi 6 universitas;

Lampiran 2.39 Menginput harga pasar kayu dan *plywood* untuk pembuatan RAB konstruksi rusunawa tahun anggaran 2025

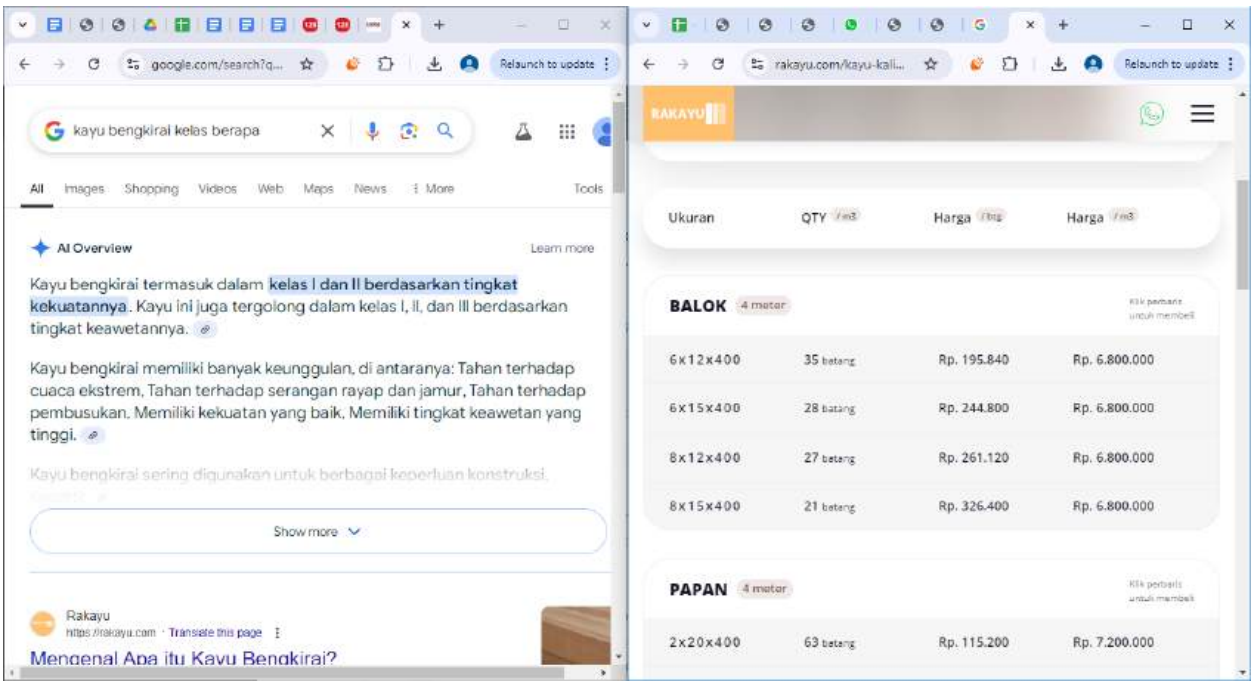

Lampiran 2.40 Perwalian mata kuliah

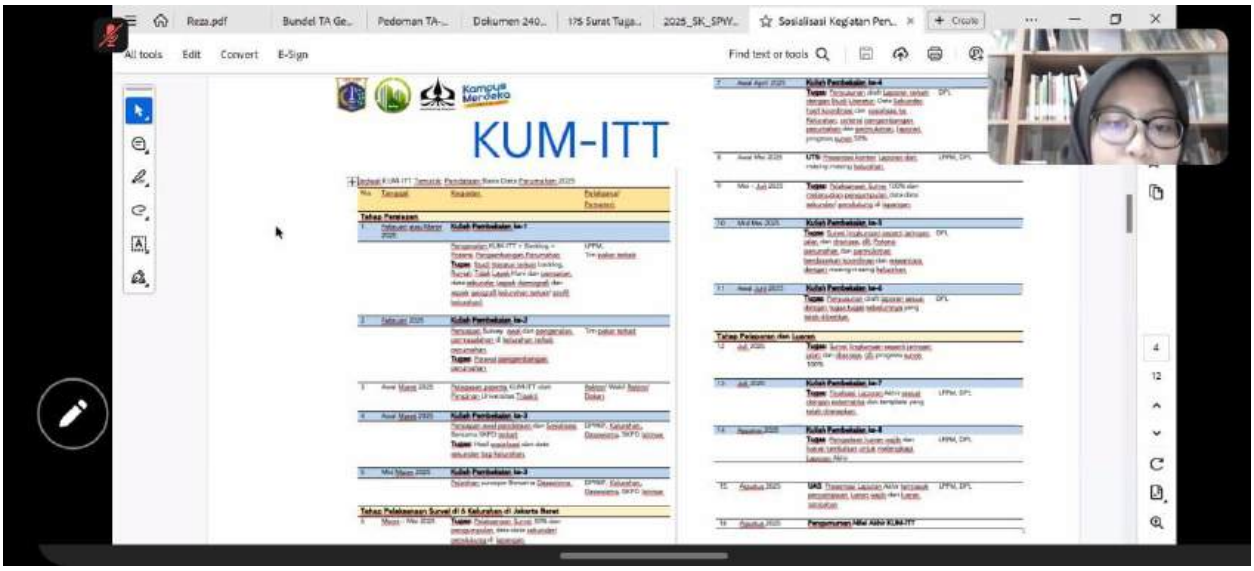

Lampiran 2.41 Menginput harga pasar kayu dan *plywood* untuk pembuatan RAB konstruksi rusunawa tahun anggaran 2025

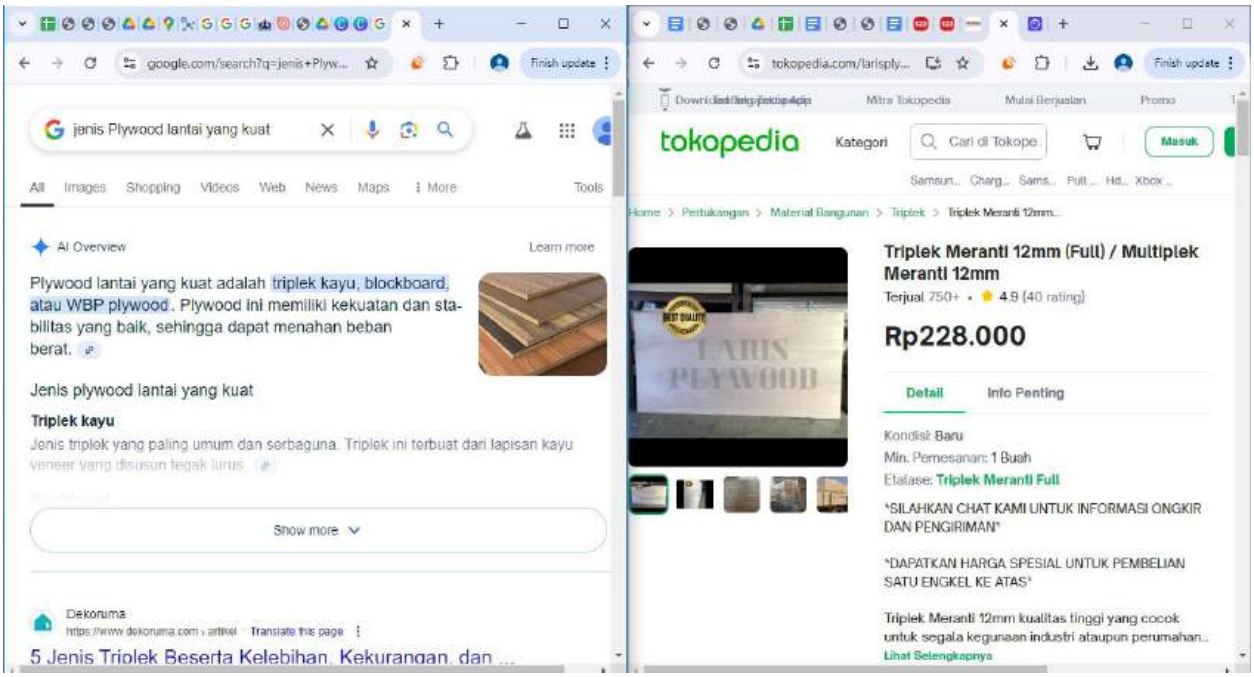

Lampiran 2.42 Meringkas Perpres No. 36 tahun 2005

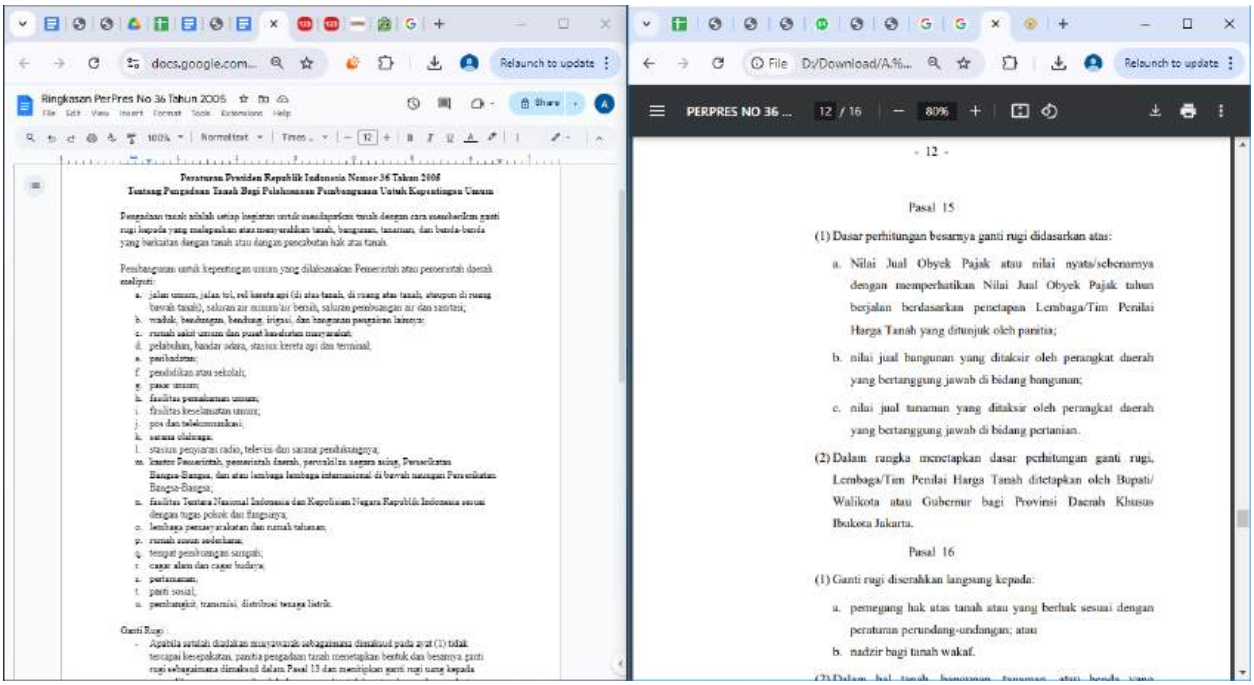

Lampiran 2.43 Menginput harga pasar paku untuk pembuatan AHSP konstruksi rusunawa tahun anggaran 2025

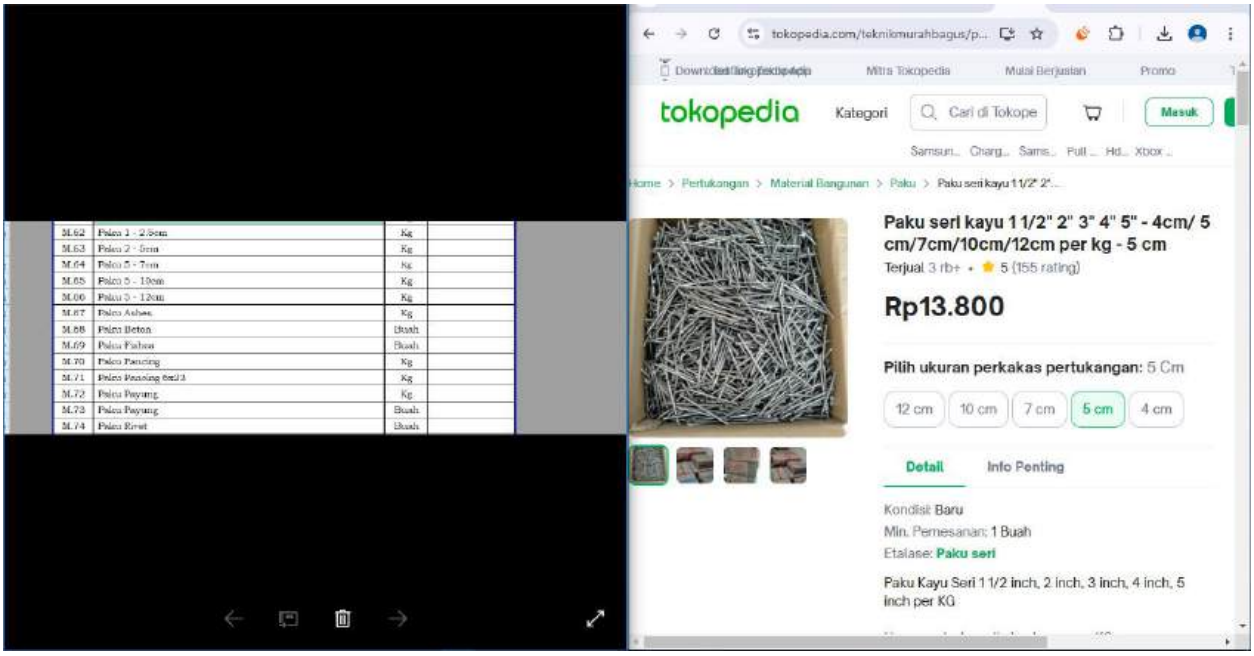

Lampiran 2.44 Membuat peta radius Kantor Kecamatan Palmerah dan Cipayung dan convert ke format .DWG untuk direncanakan sebagai rumah susun baru

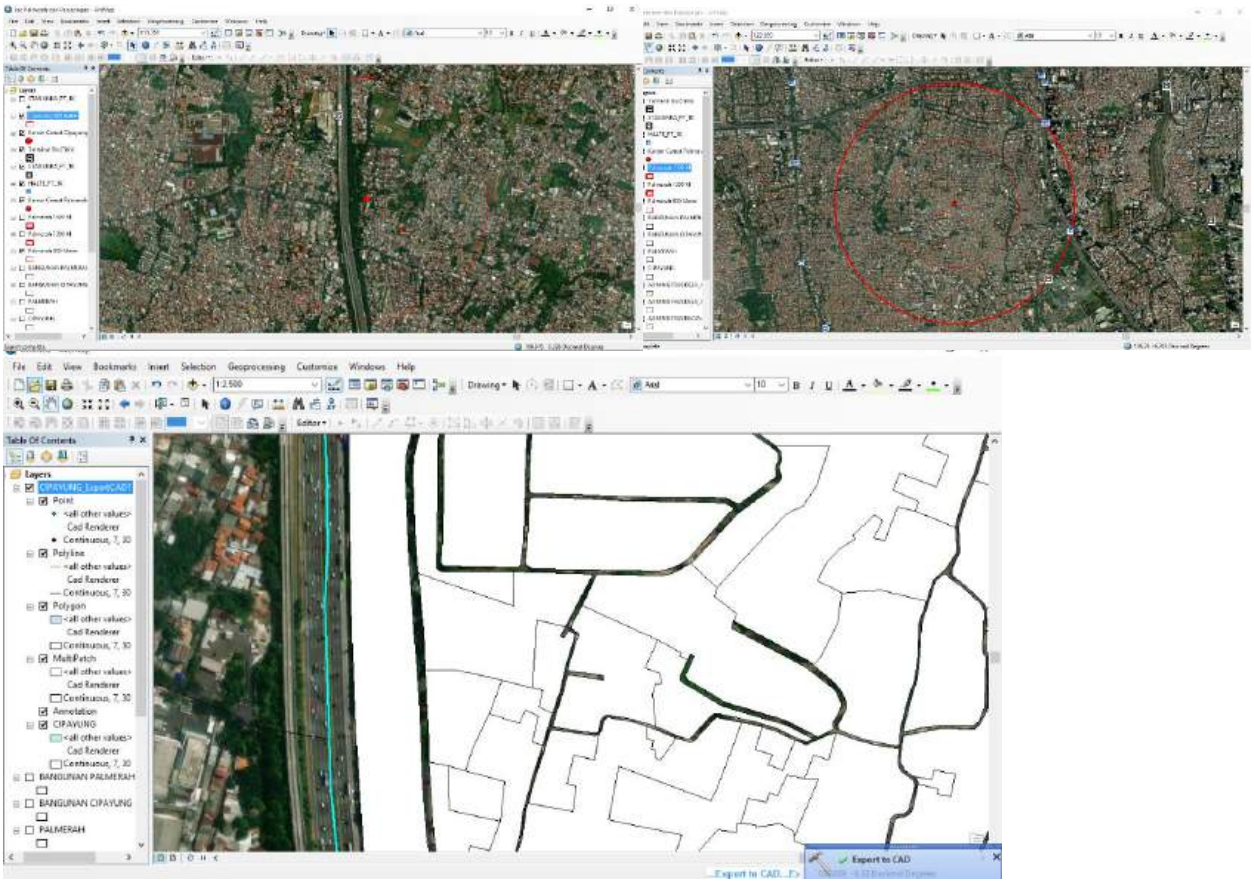

Lampiran 2.45 Menganalisis pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan sekitar stasiun Pasar Senen

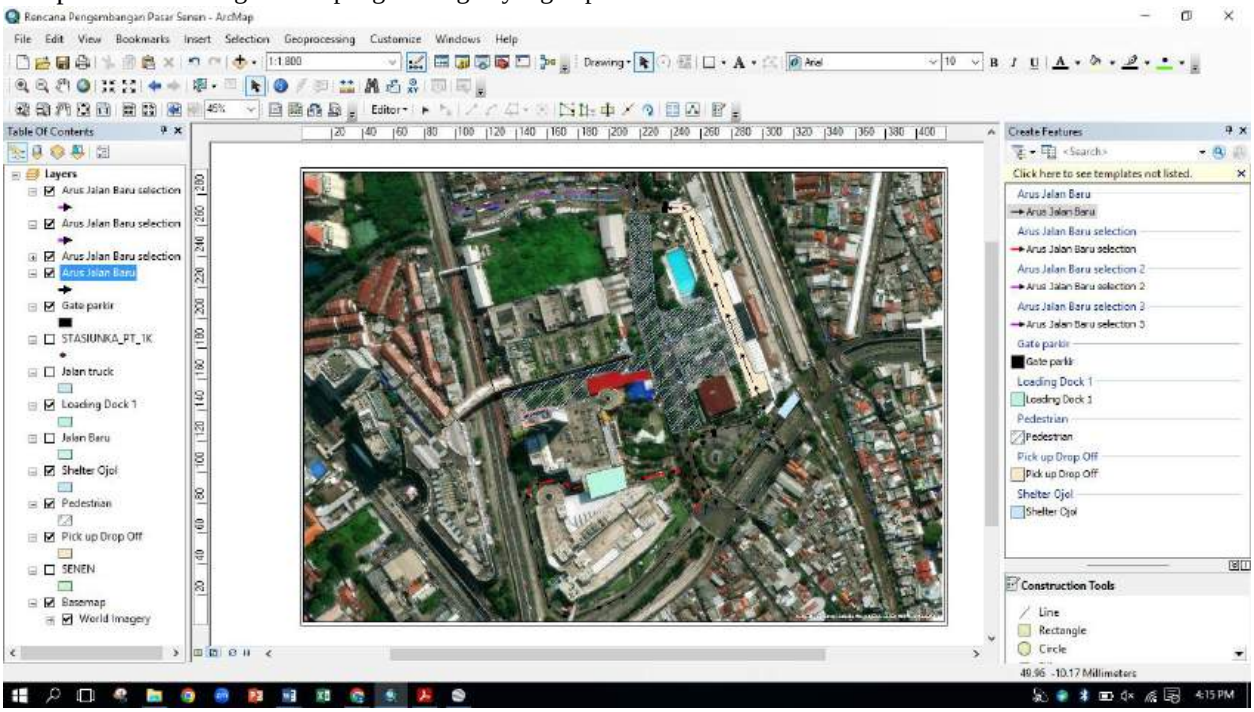

Lampiran 2.46 Sosialisasi Pendataan Basis Data Perumahan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 pada Kelurahan Kembangan Utara

Lampiran 2.47 Menganalisis pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan sekitar stasiun Pasar Senen

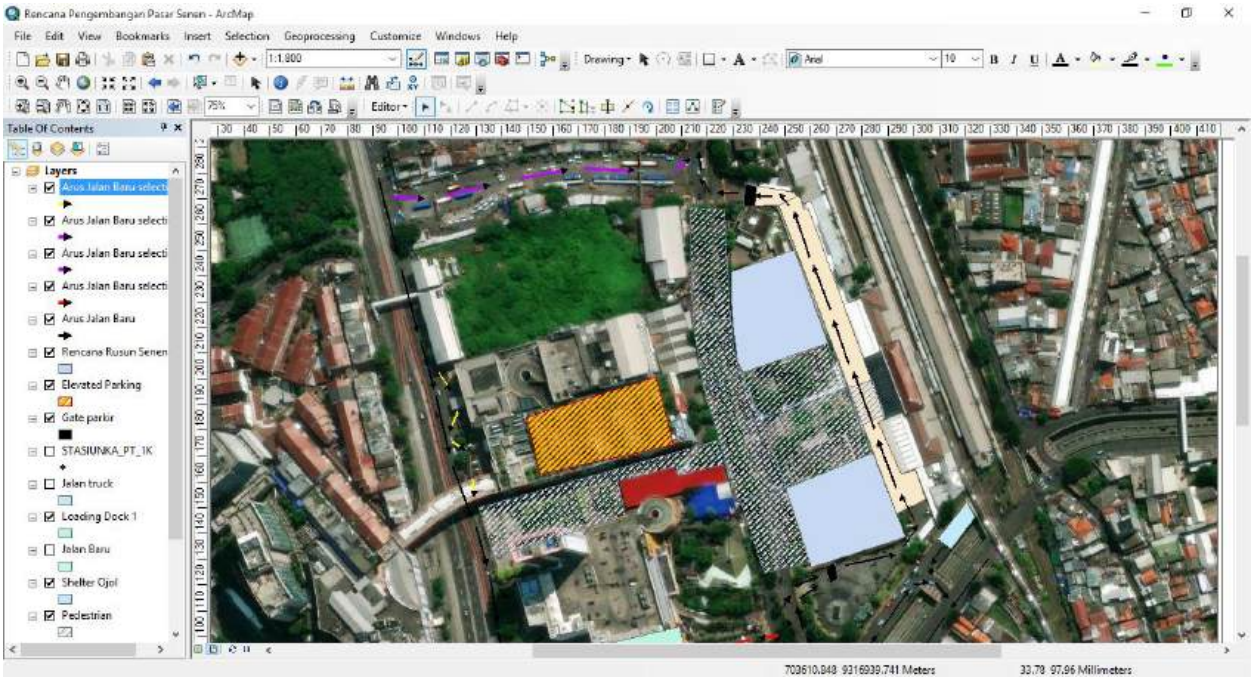

Lampiran 2.48 Membuat Peta radius 800m dari kantor kecamatan jatinegara untuk direncanakan menjadi rumah susun

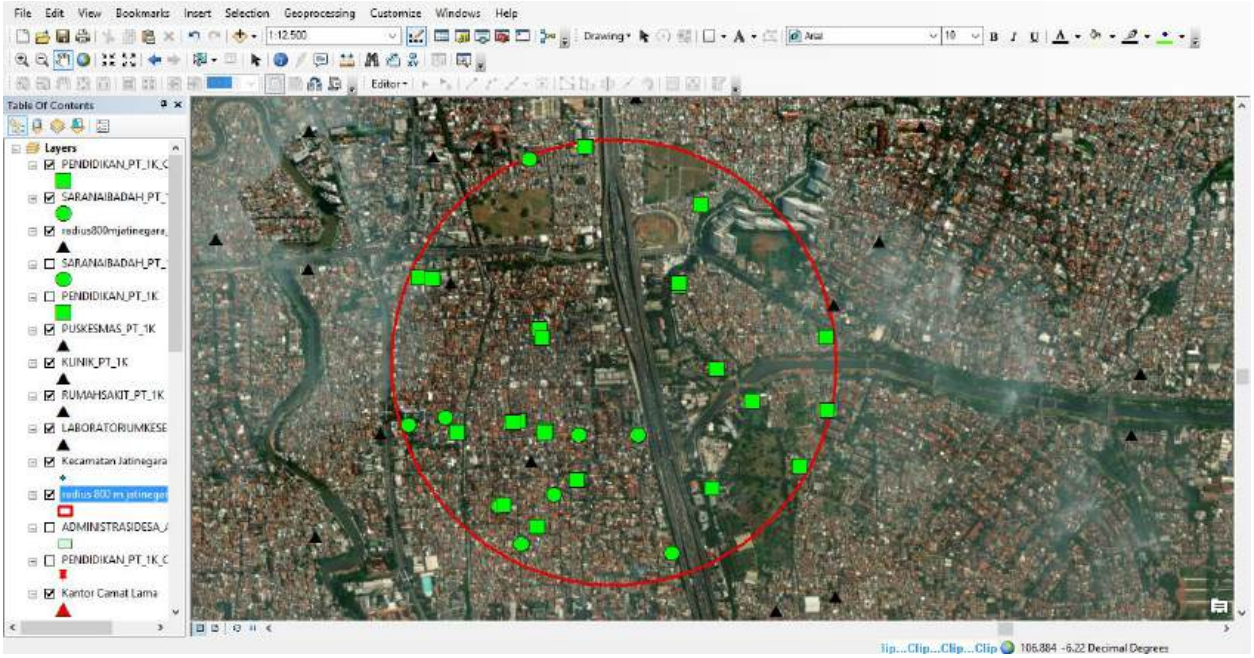

Lampiran 2.49 Menyusun laporan kerja praktik dan merapihkan logbook kegiatan

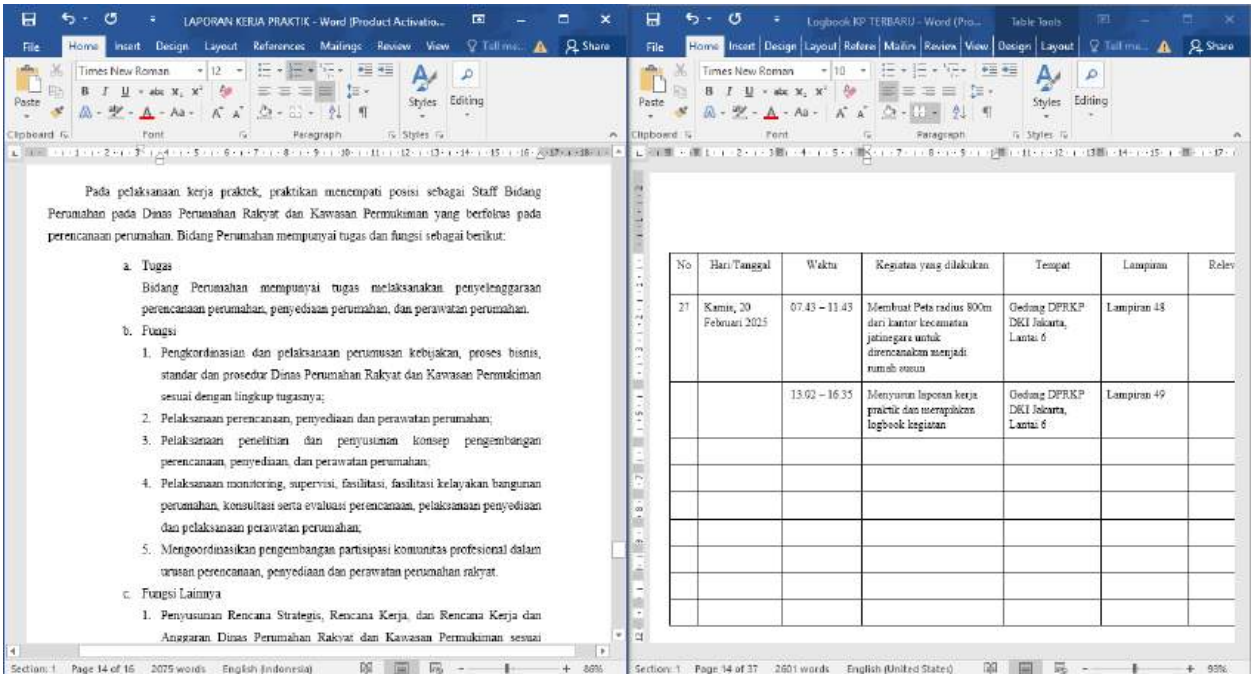

Pada pelaksanaan kerja praktek, praktikan menempati posisi sebagai Staff Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berfokus pada perencanaan perumahan. Bidang Perumahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas
Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan perumahan, penyediaan perumahan, dan perawatan perumahan.

b. Fungsi
1. Pengkordinasian dan pelaksanaan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan perawatan perumahan;
3. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan konsep pengembangan perencanaan, penyediaan, dan perawatan perumahan;
4. Pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi, fasilitasi kelayakan bangunan perumahan, konsultasi serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan penyediaan dan pelaksanaan perawatan perumahan;
5. Mengoordinasikan pengembangan partisipasi komunitas profesional dalam urusan perencanaan, penyediaan dan perawatan perumahan rakyat.

c. Fungsi Lainnya
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Tempat	Lampiran	Relev
27	Kamis, 20 Februari 2025	07.43 – 11.43	Membuat Peta radius 800m dari kantor kecamatan jatinegara untuk direncanakan menjadi rumah susun	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 48	
		13.02 – 16.35	Menyusun laporan kerja praktik dan merapihkan logbook kegiatan	Gedung DPRKP DKI Jakarta, Lantai 6	Lampiran 49	
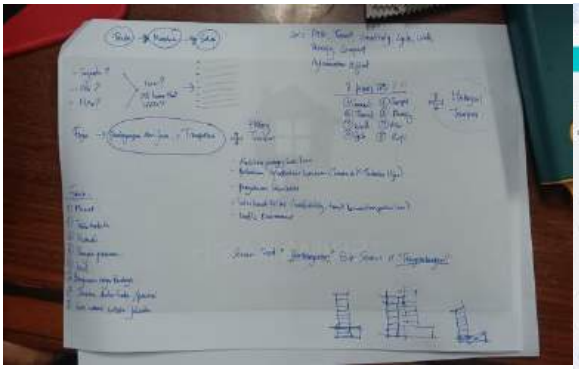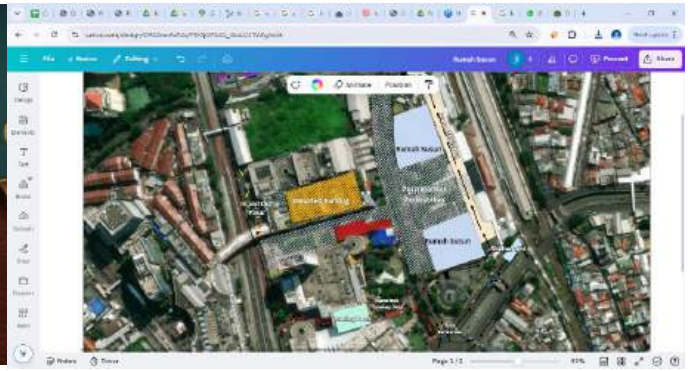
Lampiran 2.50 Asistensi dan merevisi rencana pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan sekitar stasiun Pasar Senen